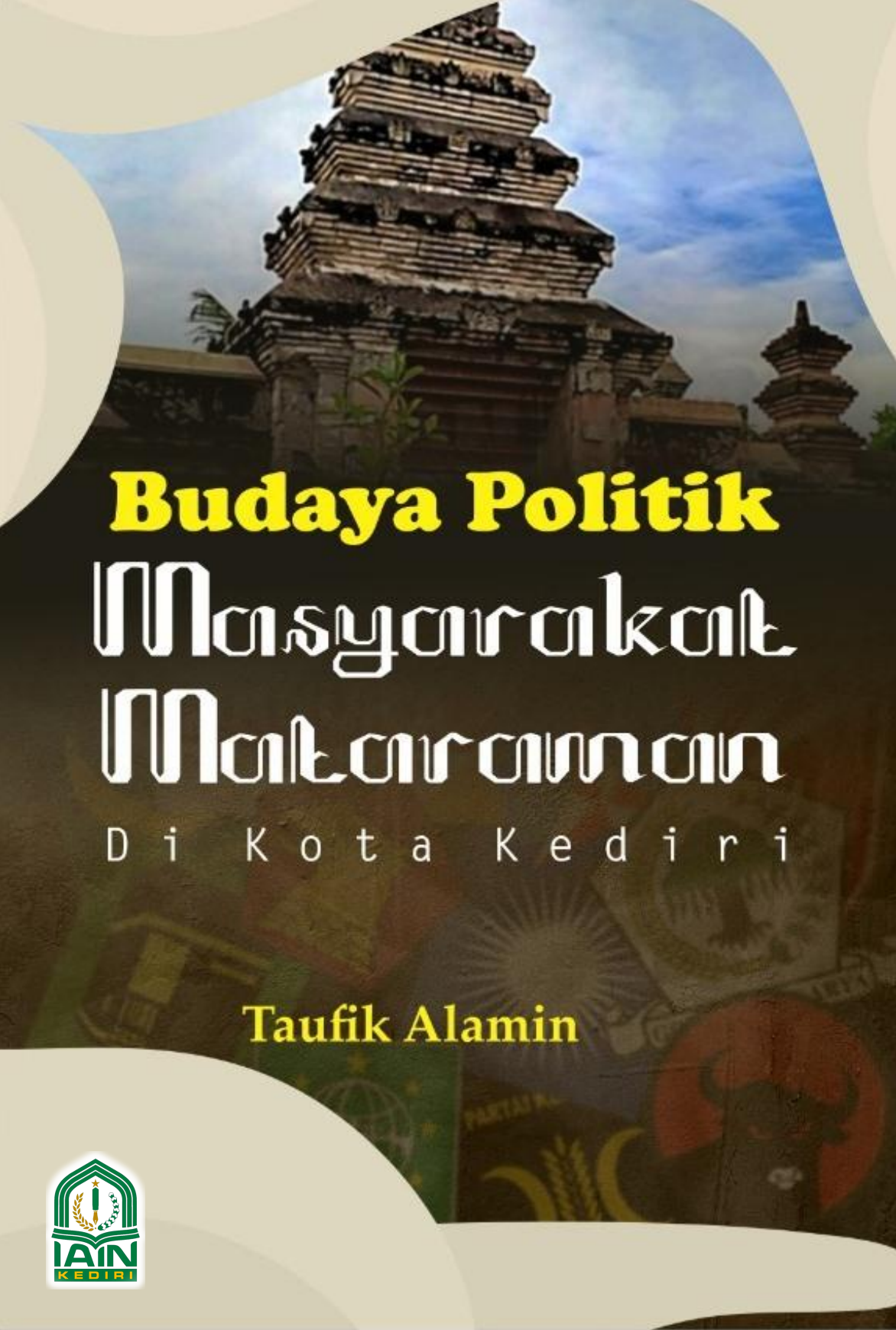

Budaya Politik Masyarakat Mataraman

Di Kota Kediri

Taufik Alamin

IAIN KEDIRI

IAIN
KEDIRI

Budaya Politik Masyarakat Mataraman di Kota Kediri

Penulis:
Taufik Alamin

Editor:
Abdul Rosyid

IAIN KEDIRI PRESS

Budaya Politik Masyarakat Mataraman di Kota Kediri

© 2022, Taufik Alamin
All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis: Taufik Alamin
Editor: Abdul Rosyid
Layout: Epullah
Desain Cover: Aura Latifa

Cetakan: I Oktober 2022

XXIV + 353 hlm. :15,5 X 23 Cm

ISBN:

Diterbitkan oleh:
IAIN Kediri Press
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur
64127 Telp. (0354) 689282, Fax (0354) 686564

Percetakan:
Nadi Pustaka offset
Jl.Nakulo No.19A Pugeran
Maguwoharjo Depok Sleman
Yogyakarta
Telp. 0274-4333626 / 081578626131

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan Hidayah serta pertolonganNya, sehingga penulis dapat menyajikan buku yang berjudul : Budaya Politik Masyarakat Mataraman di Kota Kediri, yang merupakan bagian dari disertasi penulis sewaktu menempuh jenjang doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Masyarakat Mataraman di Kota Kediri dari masa Orde Baru hingga masa reformasi telah terjadi perubahan politik sehingga berakibat adanya pergeseran orientasi masyarakat di dalamnya. Hal ini sebenarnya juga berlaku secara nasional, mengingat selama Orde Baru, pemerintahan di setiap daerah selalu dikendalikan oleh pusat. Pemerintah dalam hal ini sangat dominan menentukan corak dan langgam politik di semua daerah di Indonesia. Kehidupan politik lima tahunan melalui pemilu telah dimodifikasi menjadi tiga partai politik yang boleh berkontestasi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan, partai-partai yang sebelumnya telah lama berdiri digabung (fusi) menjadi satu partai.

Penulis menemukan bahwa pola afiliasi politik seperti yang dikemukakan Geertz, dimana pemilih Santri memilih partai Islam, pemilih Abangan memilih partai Nasionalis, dan

pemilih priyayi memilih Golkar masih berlaku. Golongan masyarakat Abangan di Kota Kediri cukup banyak walaupun Kediri ini terkenal dengan masyarakat yang Islamnya cukup besar. Dibuktikan dengan suara PDIP hasil pemilu 1999 dan 2004 yang signifikan dan hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Kediri, Kota Kediri). Di daerah Kabupaten Kediri PDI-P meraih 510.450 suara (38,47%) pada pemilu 1999 dan 357.008 suara (28,97%) pada pemilu 2004. Walaupun kultur pesantren cukup kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kediri, namun tidak serta merta menjadikan Kediri sebagai basis partai Islam. Karakteristik Masyarakat Kediri yang heterogen dengan kultur Jawa yang kental telah menjadi tembok tebal bagi sebagian warga Kediri dalam menahan pengaruh politik Islam yang datang dari kultur pesantren. Oleh karena itu, walaupun mereka dalam kehidupan kesehariannya mereka bersatu padu dalam menjalankan ritual yang bercirikan Islam Tradisional seperti tahlilan, yasinan ataupun yang lainnya, namun dalam hal aspirasi politik mereka berbeda.

Jika dilihat dari kategorisasi politik Cliford Geertz, masyarakat di Kota Kediri terdiri dari tiga kelompok politik, yakni politik santri, politik abangan dan politik priyayi. Maka partai-partai yang muncul dan mendapatkan dukungan dari basis kelompok politiknya masing-masing masih relatif konsisten disetiap pemilu lima tahunan sampai 2009.PKB mewakili kelompok santri atau Islam tradisional, PDIP mewakili kelompok abangan dan nonmuslim dan Golkar mewakili kelompok priyayi.

Namun demikian, pada pemilu 2014, menghasilkan konfigurasi perolehan suara yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.Pada pemilu keempat di era reformasi

ini pemenangnya adalah Partai Amanat Nasional. Secara otomatis kemenangan PAN tersebut berhak menjadi ketua DPRD, sedangkan PDIP dan PKB yang perolehan suaranya menempati urutan ke-2 dan ke-3 hanya mendapatkan kursi wakil ketua satu dan wakil ketua dua.

Sementara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Kediri selama sepuluh tahun terakhir baik PDIP maupun PKB sebagai representasi partai politik dari kalangan abangan/nasionalis dan santri justru selalu kalah dalam memenangkan ajang pemilihan kepala daerah. Pada pilkada tahun 2008 maupun tahun 2013 pasangan calon yang menang adalah yang didukung oleh Partai Amanat Nasional beserta partai koalisi lainnya.

Melihat fenomena di atas, penelitian ini fokus pada tiga hal. Pertama, bagaimana proses perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman tersebut terjadi. Kedua, Faktor-aktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan orientasi politik.Ketiga, adalah bagaimana rasionalitas pilihan politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada di Kota Kediri.

Pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 orientasi politik masyarakat Kediri masih didominasi oleh cara pandang kelompok keagamaan. Artinya, orientasi masyakat dalam memilih partai politik dalam pemilu disesuaikan dengan identias kelompok (*religio-politik*) dengan identitas kepartaian yang berlaku saat itu. Terdapat empat partai politik besar yang ada saat itu mewakili unsur nasional dan unsur Islam atau agama. Dari kelompok nasionalis terdapat PDIP dan Partai Golkar, sedangkan dari kelompok agama muncul PKB dan PAN.

Dalam pemilu 2004 tersebut yang menjadi partai pemenang di Kota Kediri ini adalah PKB dengan memperoleh 9 kursi di DPRD sehingga dalam pemilu tersebut perolehan suara partai agama lebih banyak jumlahnya daripada perolehan suara partai nasionalis. Dengan fakta tersebut berarti mematahkan hipotesis yang selama ini berkembang bahwa wilayah Mataraman selalu didominasi partai nasionalis perlu direvisi, setidaknya-tidaknya hal tersebut tidak terjadi di Kota Kediri.

Selanjutnya, sejak pelaksanaan pilkada 2008 dan pemilu 2009 di Kota Kediri mengalami perubahan.Sejak pemilu ke tiga di era reformasi ini ditemukan tren atau kecenderungan bahwa pemilu mengalami penurunan ideologi dan digantikan dengan hal-hal yang bersifat pragmatis. Akan tetapi, tidak berarti peran ideolog dalam partai politik tidak ada sama sekali.

Di sisi lain, orientasi dan sikap masyarakat dalam berpolitik juga semakin rasional. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap mereka dalam pemilu dan pilkada tidak lagi tergantung pada tokoh anutan yang mereka miliki. Dalam wilayah politik masyarakat ternyata dapat lepas dari bayang-bayang pengaruh para tokoh anutannya. Artinya, masyarakat dapat memisahkan mana urusan agama dan mana yang merupakan urusan politik.

Faktor sosial budaya meliputi nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Adapun warga Kota Kediri adalah mayoritas adalah masyarakat Jawa yang masih memegang teguh etika dan tradisi Jawa seperti sikap guyub rukun, dan cenderung menghindari konflik secara terbuka. Faktor selanjutnya, identitas kepartaian, yaitu suatu keadaan psikologis atau perasaan dekat dengan sikap mendukung

atau setia pada atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. Identitas partai membentuk sebuah identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikkan dirinya dengan sebuah partai politik, sedangkan yang faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat adalah faktor lingkungan.

Penulis juga menemukan data bahwa keberadaan masyarakat miskin yang ada di Kota Kediri dalam hal merespons adanya kegiatan politik lima tahunan tersebut sangat bergantung kepada berbagai dimensi yang berada di sekililingnya.

Kehidupan masyarakat Kota Kediri, pada umumnya masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang cukup menonjol. Kekerabatan yang dimaksud di sini selain berdasarkan jalur keturunan juga melalui jalur perkawinan. Bahkan, jalur kekerabatan tersebut dapat diperluas hingga tetangga dalam satu wilayah dusun ataupun desa/kelurahan. Sikap guyub rukun tampaknya masih sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Perilaku tersebut senantiasa dipertahankan secara turun-temurun dan diwujudkan dalam beragam aktivitas. Demikian juga yang berlaku dalam menyikapi persoalan politik.

Kondisi tersebut harus benar-benar bisa diciptakan secara bersama-sama mengingat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, seorang kandidat siapapun ia dan dari manapun asalnya, masyarakat tetap akan memperlakukan kepadanya secara berhati-hati dan santun agar tidak menyinggung perasaan kandidat yang dimaksud.

Bagi sebagian besar masyarakat di Kediri, dalam menentukan sikap politiknya menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional sehingga dengan rasionalitas yang dimilkinya semaksimal mungkin dipayakan utilitas dan keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa didapatkan. Seorang pemilih dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada pertimbangan yang menurut mereka rasional dan dapat ukur tingkat kemanfaatannya. Baginya berkenalan dengan calon atau kandidat dalam pemilu dan pilkada adalah momentum atau waktu yang tepat untuk memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai.

Masyarakat tipe seperti ini cara berfikirnya sangat realistis yang ajang pemilihannya hanya berlangsung sekali dalam lima tahun. Kesempatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan "kehadiran" kandidat baik secara langsung ataupun melalui perantara tim sukses dalam rangka memakaksimalkan kegunaan hak suara yang dimilkinya untuk digantikan sesuatu yang bermanfaat baginya, baik berupa uang maupun barang.

Adapun yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan tersebut adalah seorang calon atau kandidat hanya akan ditemuinya saat menjelang pemilihan. Masyarakat sudah terbiasa melihat para politisi yang sudah terpilih menjadi anggota dewan ataupun pejabat pemerintahan tentu tidak akan ingat lagi dengan dirinya bahkan janji-janjinya sekalipun. Sebagai konsekuensinya adalah mereka menuntut dipenuhinya permintaannya kepada kandidat jika yang bersangkutan menginginkan untuk dipilih. Dengan dasar petimbangan tersebut masyarakat memiliki argumentasi

dalam menjelaskan sikap dan tindakannya tersebut kepada tim sukses ataupun langsung kepada kandidat.

Di sisi lain, banyak ditemukan dihampir semua anggota masyarakat Mataraman bersifat terbuka dan mau menerima kehadiran tim sukses bersama kandidat untuk melakukan pertemuan. Sikap tersebut sengaja dipertahankan masyarakat dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan rasa guyub rukun. Kedua, masih terkait dengan budaya guyub rukun dan tidak mau menyinggung perasaan kandidat atau tim sukses yang biasanya lebih dari satu orang, maka setiap keluarga akan melakukan musyawarah antaranggota keluarga bagaimana keputusan akhirnya diambil.

Demikianlah sekilas gambaran tentang buku ini, yang tentu hanya merupakan gambaran kecil dari dinamika masyarakat Mataraman yang luas dan kaya akan nilai dan ragam kearifan lokal di dalamnya, tetapi juga telah melewati perjalanan sejarah yang sangat panjang dan berliku.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Tak ada gading yang tak retak, sudah barang tentu tulisan dalam buku ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Kritik dan saran penuls harapkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga buku ini bermanfaat.

Taufik Alamin

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Is ..... **xi**
Daftar abel ..... **xv**
Daftar Gamba ..... **xvii**
Glosarium ..... **xix**

Bab I Membaca Sejarah Peta Politik Mataraman di Kota Kediri **1**

Bab II Budaya Politik dan Strukturasi sebagai Analisis Masyarakat Mataraman **25**
Teori Budaya Politik 25
Teori Strukturasi 31
Teori Pilihan Rasional 40
Definisi Konseptual 45
Perubahan Orientasi Politik Masyarakat 45
Budaya Politik 50
Masyarakat Mataraman 54
Alur Pemikiran 56

Bab III Membaca Geografis Objek Penelitia **61**
Tinjauan Geografis dan Kependudukan 61
Kediri dan Sejarah Identitas Mataraman 70
Identitas Mataraman 71

Falsafah Tri Dharma Mangkunegaran 81

Bab IV Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Mataramandi Kota Kediri 85
Munculnya Politik Aliran 85
Pembelahan Politik oleh Penguasa Orde Baru 103
Orientasi PolitikMasyarakat di Era Reformasi 115
Pemilu 1999 dan 2004 : Di Bawah Bayang-Bayang Politik Aliran..... 118
Pilkada 2008 dan Pemilu 2009 : Berebut Kepentingan..... 128
Konflik Internal Partai 134
Pindah Caleg dan Pindah Dukungan 139
Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 : Pertarungan Petahana 143
Analisis Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Mataraman..... 155
Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Orientasi Politik..... 207
Harmoni Sosial 207
Harmoni dalam Tradisi Slametan..... 210
Harmoni dalam Seni Tradisi 218
Harmoni Antar Umat Beragama dan Peghayat Kepercayaam 225
Hubungan Segitiga Kekuasaan..... 242
Faktor SosialBudaya, Identitas Partai dan Lingkungan..... 262
Dimensi Strukturasi dalam Perubahan Orientasi Politik Masyarakat 287

Rasionalitas Pilihan Politik MasyarakatMataraman dalam Pemilu dan Pilkada 300
Rasionalitas Sosial Budaya 303
Rasionalitas Ekonomi 308
Analisis Teori Pilihan Rasional James S Coleman 310
Rekonstruksi Teori dan Proposisi 314
Rekonstruksi Teori 315
Proposisi 328

Bab V Perubahan Oreintasi Politik Ideologis ke Politik Rasional- Pragmatis 339
Faktor Sosial Budaya, Identitas Partai dan Lingkungkan Sebagai Sebab Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Mataram 340
Nilai dan Norma Budaya Jawa Sebagai Dasar Rasionalitas Masyarakat Mataraman dalam Kontestasi Politik 341

Daftar Pustaka 345
Profil Singkat Penulis 353

Daftar Tabel

Tabel 1 Konsep srukturasi Anthony Giddens 34
Tabel 2 Serapan Tenaga Kerja 68
Tabel 3 Perolehan Suara Pemilu 1971 104
Tabel 4 Perolehan Kursi Pemilu 2004..... 123
Tabel 5 Perolehan Suara Pilkada 2008 132
Tabel 6 Perolehan Suara Pemilu 2009 138
Tabel 7 Perolehan Suara Pilkada 2013 145
Tabel 8 Perolehan Suara Pemilu 2014 149
Tabel 9 Perubahan Orentasi dan Sikap Politik 171
Tabel 10 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu 2004-2014..... 175
Tabel 11 Peran dan Fungsi Segitiga Kekuasaan 261

Daftar Gambar

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian 60
Gambar 2 Peta Kota Kediri 64
Gambar 3 Peta Kebudayaan Jawa Timur 74
Gambar 4 Hubungan Segitiga Kekuasaan 244

Glosarium

Abangan	:	Artinya warna merah. Istilah ini dipopulerkan oleh Clifford Geertz, sebutan untuk golongan penduduk JawaMuslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks
Airlangga	:	Raja Jawa yang memrintah sekitar tahun 1021-1024. Merupakan tokoh yang mempersatukan kembali kerajaan leluhurnya yang telah terpecah belah. Juga merupakan tokoh yang lama berjuang untuk memenangkan peperangan dan memperjuangkan kemakmuran kerajaan. Peranannya yang besar dalam mengembalikan tatanan kerajaan membatnya dihormati sebagai titisa dewa Wisnu di dunia.
Aliran	:	Yang dimaksud adalah aliran sosio-religius yang terjadi pada era tahun 1950-an dan 1960-an yang diusung oleh partai politik dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai politik juga berdasarkan pada aliran semacam itu
Anut Grubyuk	:	Ikut-ikutan tidak mengerti permasalahannya. Biasanya tindakan ini diambil seseorang karena adanya keinginan untuk sama dengan gerombolan atau lingkungan di sekitarnya.
Astabrata	:	Ajaran tentang sikap kebajikan bagi seorang raja. Dalam ajaran ini dikemukakan bahwa seorang rajadiharapkan dapat menjaga negara dan rakyatnya sebagaimana para dewa menjaga selruh penjuru dunia. Terjemahan istilah itu adalah delapan janji atau peraturan, tetapi ada juga yang mengartikan sebagai " delapan kewajiban negarawan. Delapan kewajiban

tersebut disimbolisasikan dalam karakter yang dimiliki oleh delapan dewa mata angin (astadikpalaka), akni Indra, Yama, Surya, Candra, Anila (Bayu), Kuwera, Baruna dan Agni.

Daerah Pemilihan : Daerah pemilihan dibentuk berdasarkan wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk. Setiap dapil diwakili satu kursi (*single-member constituency*) atau lebih (*multi-member constituency*).

Gerindra : Partai Gerakan Indonesia Raya

Golkar : Singkatan dari Golongan Karya. Adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Guyub - Rukun : Sikap kebersamaan, merasa satu, harmonis secara sosial.

Hanura : Partai Hati Nurani Rakyat

Harmoni : Berasal dari bahasa Yunani Harmonia yang artinya terikat secara serasi. Harmoni juga dapat diartikan kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur.

Jayabaya : Raja Jawa yang memerintah di Kerajayaan Kediri pada tahun 1135-1161 M. Raja iilah yang berhasil menyatukan dua kerajaan yang semula terpecah menjadi dua. Pada masa pemerintahannya banyak mengahasilkan karya satra dalam bentuk kakawin mengalami perkembangan pesat. Raja Jayaawa juga dikenal dengan ramalannya yang bernama Jangka Jayabaya.

Kauman	:	Kauman (juga disebut Pekauman/Pakauman) merupakan nama beberapa daerah tertentu di Jawa yang banyak dihuni oleh warga Muslim. Kauman biasanya terletak di sebelah barat alun-alun dan dapat ditandai dengan adanya masjid di daerah tersebut. Nama ini diduga berasal dari kata "kaum imam".
Kiai	:	Alim ulama dalam agama Islam
Konstituante	:	Badan yang dibentuk untuk membuat dan menyusun UUD. Pada akhirnya badan konstituante gagal menyusun UUD, karena terjadinya perdebatan sengit antara anggota mengenai penentuan dasar Negara. Akhirnya keluarlah Dekrit Presiden yang membubarkan badan tersebut
Konstitusi	:	*Constitution* (Inggris), *constitute* (Belanda). Memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit berarti Undang-undang Dasar dan secara luas bermakna keseluruhan aturan-aturan hukum serta ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dari suatu Negara
Korporasi	:	Merupakan gabungan beberapa perusahaan atau orang. Gabungan tersebut dapat dilihat dari keterlibatan modal berupa saham dari beberapa orang. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan pembagian keuntungan kedepannya.
Langgar	:	Tempat, ruangan yang menyerupai masjid yang digunakan untuk salat dan mengaji bagi umat Islam.
Mahar Politik	:	Uang yang diberikan agar seseorang dipinang atau dicalonkan oleh partai politik dalam pemilihan. Mahar politik bukan hal baru dalam perpolitikan di Indonesia, namun secara hukum sulit untuk dibuktikan.
Mangkunegara I	:	Merupakan penguasa Praja Mangkunegaran, pecahan dari kerajaan Mataram, lebih tepatnya wilayah Kasunanan di Surakarta akibat dari perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Wilayah kekuasaan Mangkunegaran meliputi Jawa Tengah bagian selatan. Nama kecilnya adalah Raden Mas Said dan mendapatkan julukan Pangeran Samber Nyowo.

Makrokosmos-Mikro kosmos	:	Merupakan alam pikiran orang Jawa yang merumuskan kehidupan manusia berada dalam dua kosmos (alam), yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos dalam pikiran orang Jawa adalah sikap dan pandangan hidup terhadap alam semesta yang mengandung kekuatan-kekuatan supranatural atau adikodrati. Tujuan utama dalam hidup adalah mencari serta menciptakan keselarasan atau keseimbangan antarakehidupan makrokosmos dengan mikrokosmos.
Marhaenisme	:	Ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai alam dan kultur Indonesia.
Masyumi	:	Majlis Syuro Muslimin Indonesia. Yaitu sebuah partai Islam yang didominasi oleh kaum modernis pada tahun 1950-an.
Muhammadiyah	:	Organisasi sosial keagamaan kaum Islam modernis di Indonesia
Nahdlatul Ulama	:	Organisasi sosial keagamaan kaum Islam tradisionalis di Indonesia
Nasdem	:	Partai Nasional Demokrat yang didirikan dan diketuai oleh Surya Paloh.
Ndadi	:	Kesurupan atau keadaan pemain penari jaranan yang kemasukan roh halus. Keadaan ndadi tersebut menjadi salah satu fragmen tersendiri yang menjadi daya tarik tersendiri. Pemain yang ndadi dapat melakukan apa saja, misalnya, memakan kaca (beling) atau minum darah ayam.
Noma	:	Ketentuan yang mengatur nilai-nilai yang dianggab baik dan buruk. Dalam suatu masyarakat , norma berperan sebagai pemandu dalam perilaku bagi para anggotanya.
PDI Perjuangan	:	Paratai Demokrasi Indonesia Perjuangan; partai pecahan dan sekaligus reformis dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang selalu diintervensi dengan berbagai kepentingan rezim Orde Baru.

Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah pemilihan umum untuk memilih bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, serta gubernur dan wakil gubernur secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PNI	:	Partai Nasionalis Indonesia didirikan oleh Ir Soekarno pada tahun 1927.
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
Priyayi	:	Istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Priyayi juga merupakan kelompok sosial yang ada di masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri.
Pulung	:	Cahaya yang oleh masyarakat tradisional Jawa dipercaya akan turun kepada seseorang yang akan memperoleh anugerah sekaligus amanat. Dalam masyarakat Jawa, kemenangan dalam pilkades di antaranya dapat dilihat dari tanda-tanda siapa yang direstui dengan mendapatkan pulung.
Pilihan Rasional	:	Teori ini dikenal dengan teori pertukaran sosial. Teori ini mengatakan, individu cenderung memilih tindakan rasional berdasarkan perhitungan maksimal yang dapat diperoleh dari suatu relasi sosial. Berdasarkan asumsi teori ini, individu akan menekan sekecil mungkin biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan relasi sosial.
Rasionalitas	:	Daya kreasi pemikiran, yang menjadi dasar-dasar pertimbangan atau alasan logis dalam memilih, menetapkan, dan mengarahkan tindakan-tindakan dalam berbagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu
RT	:	Rukun Tetangga; sebuah unit terkecil dalam komunitas atau lingkungan tempat tinggal dalam masyarakat.

RW	:	Rukun Warga; sebuah unit yang merupakan gabungan dari, atau mengkoordinir beberapa RT.
Santri	:	Orang yang mendalami agama Islam, dan pemaknaan kedua adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang saleh.
Slametan	:	Upacara ritual, seringkali dilakukan oleh masyarakat kampung yang ditujukan untuk menciptakan keselarasan diantara para peserta slametan dan dengan demikian akan menjadikan jiwa mereka merasa tenang dan selamat dari gangguan roh-roh jahat.
Tahlilan	:	Ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ketujuh.Selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, kesatu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000.
Tim Sukses	:	Sekelompok orang yang bertugas untuk memperjuangkan calon yang diusungnya (Capres, Cagub, Cabup/ Cawakot) agar berhasil meraih kemenangan dalam suatu pemilihan. Team sukses ini ada yang dibentuk oleh partai, ada juga yang ditentukan sendiri oleh sang calon. Sebagian team sukses merupakan orang-orang profesional yang dibayar, tetapi sebagian lain hanya bersifat sukarela karena merasa simpati atau mendukung pada sang calon tersebut
Tlatah	:	Suatu tempat atau ruangan yang ada di dunia. Tlatah bisa berupa gunung, laut, samudra, danau, daratan, maupun negara.
Tokoh Masyarakat	:	Pemuka masyarakat yang memiliki pengaruh karena latar belakang tertentu (ilmu, agama, ekonomi, kultur dan sebagainya).

Bab I Membaca Sejarah Peta Politik Mataraman di Kota Kediri

Studi tentang budaya politik utamanya di masyarakat Jawa sudah cukup banyak dilakukan oleh intelektual asing maupun dalam negeri. Namun, masih sedikit upaya yang sudah dilakukan untuk menyusun suatu analisis yang terkait konsep politik tradisional dan pengaruhnya bagi sistem politik modern yang ada di Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjabarkan lebih mendalam dan sistematis terhadap berbagai nilai dan norma tradisional Jawa yang terkait dengan fenomena politik modern yang terus berkembang. Dengan demikian,penelitian ini lebih diarahkan untuk lebih menjabarkan gambaran kehidupan sosial dan politik dari kacamata sebagai orang Jawa. Cara pandang tersebut tidak hanya menstrukturkan persepsi dan interpretasi mereka yang menggunakannya, tetapi pada saat yang bersamaan, juga mempengaruhi perilaku mereka.

Untuk menjelaskan struktur sosial dan kecenderungan orientasi masyarakat Mataraman di Kediri, peneliti menggunakan cara pandang Clifford Geertz tersebut yang berlangsung saat itu sebagai polarisasi politik antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sebagai titik tolak dalam penelitian ini. Inti dari pandangan Geertz terdapat kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi

sosial yang liniar dengan pilihan politiknya. Kelompok abangan yang didefinisikan sebagai kelompok Islam yang kurang taat cenderung memilih partai nasionalis, sedangkan kelompok santri cenderung memilih partai Islam. Kelompok Islam tradisional menyalurkan aspirasinya ke partai NU, sedangkan kelompok modernis seperti Muhammadiyah menyalurkan pilihannya ke Masyumi. Walaupun teori Geertz ini banyak mendapatkan kritik hingga sekarang, namun para pakar politik sosial budaya masih menjadi alat analisis utamanya.

Sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru, situasi politik nasional berangsur-angsur membaik, menunju perubahan sistem politik dan kenegaraan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Paling tidak sistem sentralisasi telah berubah menjadi sistem desentralisasi yang memberikan kebebasan atau otonomi kepada pemerintaha daerah untuk mengurusi dan menentukan masa depannya sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Meskipun pada ataran substansi demokrasi belum berjalan secara maksimal, namun semangat perubahan di awal reformasi tersebut telah ditandai dengan kehidupan demokrasi pada tingkat prosedural. Di bidang kehdupan politik, masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan dan menyalurkan aspirasinya melalui beragam partai politik atau yang dikenal dengan sistem multi partai.

Transisi demokrasi yang berhasil dilakukan pada masa awal reformasi telah mendorong partai politik untuk semakin berperan. Apalagi masyarakat diberi akses yang luas untuk terlibat dalam aktivitas partai politik. Hal ini yang tidak ditemukan pada masa Orde Baru. Aspek lain yang ditemukan di dalam proses transisi demokrasi adalah peran pemerintah

dalam membuat undang-undang kepartaian yang membuka peluang bagi partai politik untuk berkompetisi. Dengan kompetisi ini, maka partai politik yang berkualitaslah yang akan tetap eksis. Menariknya, jika sistem kepartaian pada masa Orde Baru cenderung bersifat hegomoni, maka di era reformasi cenderung plural dengan ideologi dan manifesto partai yang beragam.

Perubahan dari *electoral law* ini, khususnya untuk menghasilkan sistem kepartaian yang kompetitif, juga dapat dilihat dari perubahan undang-undang kepartaian yang terus terjadi. Era awal reformasi telah lahir paket undang-undang politik sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemilu 1999. Selanjutnya menjelang pemilu tahun 2004 dilakukan revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 1999 menjadi Undang-Undang nomor 31 tahun 2002. Sebelum pemilu 2009 dilaksanakan juga telah diterbitkan lagi undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang intinya juga menciptakan sistem kepartaian yang efektif untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas.Terlepas dari kepentingan partai politik yang bermain di dalam proses revisi undang-undang tersebut, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 pun direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 untuk menghadapi pemilu 2014.

Pemahaman terhadap proses di atas menjelaskan interaksi kekuatan-kekuatan politik di era reformasi berlangsung sangat intensif. Terbentuknya masyarakat sipil yang diikuti dengan perkembangan masyarakat politik dan ekonomi mendorong berlangsungnya percepatan prose demokrasi. Dalam beberapa hal, kehadiran kekuatan poltik dari arena-arena demokratisasi memberikan peluang kepada masyarakat

untuk mengendalikan agenda politik dan pemerintahan. Selain itu, keberadaan arena demokratisasi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus memunculkan sikap yang inklusif terhadap proses politik yang dilaksanakan.

Tingkat partisipasi masyarakat utamanya di daerah-daerah semakin meningkat, seiring dengan dibukannya kran demokratisasi. Salah satu konsekuensinya adalah munculnya aktor-aktor baru di arena politik baik ditingkat nasional maupun daerah. Munculnya aktor-aktor politik tersebut berbeda setiap daerah sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Jawa timur yang nahdliyin sebagai mayoritasnya dan banyak berdiri pondok pesantren, pada pemilu awal reformasi tersebut dipegang oleh Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan di Jawa Tengah karena mayoritas adalah kelompok nasionalis, yang menjadi pemenang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan kondisi tersebut tentu telah mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan pada masa Orde Baru yang aktor-aktor politiknya berasal dari Golkar.

Gambaran tentang persebaran kekuatan politik di setiap daerah yang disebut *deskriptif representation* telah melahirkan konfigurasi keterwakilan politik yang dinamis. Pada pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik, Golkar yang biasanya menang pada masa Orde Baru diatas 60 persen, dalam pemilu yang pertama kali di era reformasi tersebut, hanya mampu mengumpulkan suaranya sebesar 22 persen. Selebihnya suara tersebut tersebar di sejumlah partai politik yang baru didirikan menjelang pemilu seperti PAN dan PKB, ditambah partai lama: PPP dan PDIP. Pemilu 2004 persebaran suara

semakin bertambah dengan lahirnya partai baru diantaranya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan, diluar partai tersebut masih banyak partai-partai baru yang tidak memilki kursi di DPR, tetapi mengusung perwakilannya di DPRD kapupaten /kota dan DPRD provinsi(Marijan, 2015, hal. 120) (Marijan, 2015, hal. 120).

Apabiladilihatdarisudutpandang*substantiverepresentation*, yaitu adanya para wakil rakyat yang bekerja sesuai dengan aspirasi rakyat, upaya ini belum membawa perubahan yang cukup berarti. Kritik yang sering dikemukakan adalah para wakil rakyat lebih mementingkan dirinya sendiri atau partai yang diwakilinya. Artinya, sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil pada kenyataanya masih menyisakan masalah *disconec electoral*(Marijan, 2015, hal. 121) (Marijan, 2015, hal. 121).

Perkembangan budaya masyarakat akan memengaruhi dinamika dan perkembangan politik suatu negara. Demikian pula dengan yang terjadi di suatu pemerintahan daerah, peran budaya politik masyarakat lokal akan menentukan lebih lanjut bagaimana dinamika politik yang berlangsung di dalamnya.

The civic cultur bukanlah kultur politik yang pengertiannya sering diperoleh seseorang dari buku-buku tentang kewarganegaraan, yang melukiskan cara di mana warga Negara harus bertindak di alam demokrasi. Adapun yang dimaksud budaya politik dalam penelitian iniadalah kultur partisipan yang setia. Individu-individu tidak hanya diorientasikan kepada kultur politik yang dikombinasikan dengan orientasi-orientasi politik parokial dan subjek(A. Almond & Verba, 1990) (A.Almond & Verba, 1990).

Budaya politik yang dimiliki oleh masyarakat selain memengaruhi dinamika dan sistem politik suatu negara, di sisi lain juga terdapat hubungan dealektis antara masyarakat dan negara bahwa pada tataran tertentu negara memilki simbol-simol yang dijaga dan dipertahankan sehingga seorang warga negara memilki orientasi politik yang diarahkan ke sana. Dengan demikian seseorang warga negara dimungkinkan melakukan identifikasi simbol-simbol kenegaraan tersebut ke dalam dirinya. Dengan demikian, setiap individu warga negara dapat menempatkan diri dan perannya dalam sistem politik yang ada di dalam negara tersebut.

Selain definisi di atas, budaya poltik politik juga merupakan orientasi dan pola perilaku yang dimiliki individu yang kemudian diinternalisasikan dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews mendefinisikan budaya politik sebagai cara pandang dalam menyikapi kedupan pemerintahan dan dinamika politik kenegaraan. Dengan kata lain budaya politik merupakan kemampuan yang dimiliki para warga megara dalam kehidupan bernegara. Budaya politik adalah konsep keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat.

Memelajari budaya politik setidaknya diperoleh dua manfaat. Pertama, mengetahui bagaimana masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya maupun bentuk-bentuk dukungan terhadap sistem politik yang sedang berlaku. Kedua, dengan memahami relasi antara orientasi dan sikap politik dengan sistem politik, tujuan dari individu maupun kelompok yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan politik,

termasuk perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya dengan mudah dapat dipahami.

Dalam budaya politik, terdapat dimensi kesadaran. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap pelaku dianggap telah enadari dan mengetahui tentang sistem politik baik pada aspek politik maupun aspek pemerintahannya. Setiap warga negara secara sadar cenderung berorientasi terutama pada sisi *output* pemerintahan yang meliputi: eksekutif, birokrasi dan yudikatif. Kaum parokial cenderung tidak sadar, atau sekadar menyadari tentang sistem politik dalam seluruh aspeknya(A. Almond & Verba, 1990, hal. 55) (A.Almond & Verba, 1990, hal. 55).

Membahas budaya politik tidak akan lepas dari partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu sistem politik, maka akan lebih memungkinkan setiap kepentingan dan aspirasi dapat diwujudkan dalam setiap kebijakan bagi siapaun yang memerintah atau berkuasa. Demikian pula dengan keberadaan pemerintah, seorang pemimpin harus menjadi alat agregasi kepentingan masyarakatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari makna kedaulatan rakyat yang menjadi tujuan demokrasi. Berbeda kepemimpinan yang bersifat meliteeristik yang cenderung meminimalkan dan melarang adanya partisipasi dan keterlibatan publik. Di sinilah peran partai politik diuji dan ditantang untuk mampu melakukan fasilitasi kepentingan publik di satu sisi dengan penguatan sistem negara di sisi lainnya.

Partisipasi politik menurut Samuel Huntington adalah kegiatan mandiri yang dilakukan warga negara dalam rangka mempengaruhi kebijakan yang akan atau telah ditetapkan

oleh pemerintah. Aspek-aspek yang terkandung dalam definisi tersebut, antara lain, mencakup kegiatan-kegiatan yang merupakan pengejawantahan dari sikap-sikap politik tertentu di dalamnya. Adapun kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-perorang sebagai pilihan mandiri warga negara yang berbeda dengan kelompok politisi yang biasanya sudah profesional di bidang politik(Huntington & Nelson, 1994) (Huntington & Nelson, 1994).

Menurut Herbert Feith,budaya politik bangsa Indonesia didominasi oleh dua kelompok: aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam. Sementara itu, menurut Clifford Geertz, masyarakat Indonesia terbagi dalam 3 kelompok subbudaya politik. Ketiga kelompok itu, antara lain, petani pedalaman Jawa dan Bali, masyarakat pantai, dan masyarakat pegunungan (Feith, 1963)(Feith, 1963).

Perkembangan budaya politik di tingkat daerah berbeda dengan keadaan di tingkat nasional. Perkembangan budaya politik pada tingkat daerah lebih didominasi oleh pemikiran dan tingkah laku politik berdasarkan pada budaya politik yang telah matang. Menguatnya penetrasi budaya politik lokal tersebut semakin tak terbendung setelah diberlakukannya era desentralisasi atau otonomi daerah. Pengaruh budaya politik lokal terhadap dinamika dan proses politik di daerah semakin kuat meskipun struktur politik yang secara nasional telah diberlakukan.

Terhadap fenomena menguatnya budaya politik lokal tersebut terkait dengan proses pembentukan budaya nasional menurut Nazaruddin Sjamsuddinmemberikan beberapa catatan yang mesti diperhatikan, pertama munculnya

budaya asal yang bersumber dari seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan latar belakang lingkungannya. Adapun yang dimaksud dengan latar belakang lingkungan adalah ikatan yang tumbuh karena adanya kesetiaan primordial.Kedua, munculnya aneka budaya politik lokal yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya asal itu berada. Besarnya kadar kepercayaan dan permusuhan antarsubbudaya politik tersebut yang diperlihatkan oleh subbudaya politik satu dengan yang lainnya di dalam interaksi itu, berakibat ingin meninggalkan kesan tertentu bagi masing-masing subbudaya politik. Ketiga, budaya politik nasional. Dalam hal ini peranan budaya nasional tergantung pada tahap yang telah ditempuh dalam proses pembentukannya(Alfian, 1991: 32).

Selanjutnya dalam perkembangan budaya politik lokal dipengaruhi oleh dua faktor dominan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua faktor yang dominan itu adalah sistem kultural (istiadat) dan sistem kepercayaan atau agama. Dengan demikian perkembangan subbudaya politik di daerah telah dimatangkan oleh hubungan antara adat dan agama yang bersifat saling menunjang. Proses ini telah berlangsung ratusan tahun sehingga proses tersebut semakin memperkokoh orientasi politik suku-suku di Indonesia. Peranan adat dan agama telah memegang peranan penting dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan atau simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Dibidang noninstitusional, adat dan agama telah pula mempengaruhi dan atau member bentuk pada sikap atau pandangan individual anggota masyarakat

mengenai peranan yang mungkin dimainkannya dalam sistem politik(Alfian, 1991) (Alfian, 1991).

Dalam kaitannya dengan bentuk dan struktur masyarakat, Priyatmoko berpendapat bahwa budaya politik tampaknya dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh bentuk dan struktur itu. Oleh karena itu, budaya politik dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara pola tingkah laku dan pola untuk bertingkah laku. Barangkali pada mulanya suatu budaya politik terbentuk sebagai pola tingkah laku yang hendak dibakukan untuk menata tingkah laku selanjutnya. Namun, sebagai pola untuk bertingkah laku, budaya politik tidak akan selalu berhasil mengendalikan perkembangan secara sempurna. Dalam hal ini terjadi proses kreatif atau tekanan-tekanan yang dapat melahirkan pola tingkah laku baru untuk memperkaya yang sudah ada (Alfian, 1991: 255).

Kekuatan budaya politik dalam masyarakat bersumber dari proses sosialisasi politik yang terjadi di dalamnya. Dalam proses tersebut memungkinkan adanya internalisasi terhadap nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyakat dapat dipahami dengan baik dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan sosialisasi yang intensif budaya politik tidak hanya akan menghasilkan profil budaya politik tetapi juga mampu melakukan adaptasi terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam hubungannya dengan budaya politik di daerah, peneliti tertarik untuk melakukan studi terhadap perkembangan budaya politik masyarakat Mataraman di Jawa Timur. Hal tersebut didasarkan pada sebuah fakta bahwa secara sosiologis, masyarakat Jawa Timur yang terbagi dalam 38 kabupaten dan kota telah memiliki basis wilayah

kebudayaan yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh terhadap budaya politik yang ada di dalamnya.

Dalam perpektif kebudayaan Jawa masa lalu, kekuasaan adalah sesuatu yang bersifat kongkrit. Sedangkan, menurut menurut paham teori politik modern yang datangnya dari Barat, kekuasaan itu bersifat abstrak. Artinya, kekuasaan menurut pengertian ini merupakan hasil tindakan relasional yang diperoleh dengan cara meminta atau bernegosiasi dengan massa yang akan dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang calon atau kandidat diperbolehkan dengan beragam cara melakukan kampanye untuk memilih dirinya. Hal tersebut berbeda dengan konsep kekuasaan dalam perspektif budaya Jawa bahwa kekuasaan merupakan pemberian dari kekuatan adi kodrati yang dalam pencapaiannya harus melalui prosedur yang sudah ditentukan, yaitu melalui jalan usaha yang bernama bertapa atau bersemedi. Dengan media tersebut, diharapkan seseorang dapat terhubung dengan pemilik kekuasan alam semesta atau adikodrati tersebut.

Adapun indikator jika seorang mendapatkan kekuasaan atau *wahyu keprabon*, apabila ada pertanda yang namanya *pulung*. Munculnya pulung biasanya digambarkan dalam bentuk sinar yang memancar dari langit dan jatuhnya kepada seseorang, yang disebut *satriyo pinilih*. Pandangan masyarakat Jawa terhadap kekuasaan tersebut berlaku sejak zaman awal kerajaan di Jawa, jauh sebelum masa kolonialisme. Namun, hingga kini ajaran tersebut masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa utamanya di pusat kekuasaan Kerajaan Mataram, yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Banyak para politisi sebelum memperebutkan suara dari rakyat lewat pemilu, pilkada hingga pilkades, mereka akan menemui

tokoh tertentu untuk meminta restu. Harapannya dengan cara seperti itu, dapat membantu menurunkan *pulung* tempat kekuasaan tersebut berada. Cara lainnya adalah dengan mendatangi tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat (Suseno, 1985)(Suseno, 1985).

Perkembangan masyarakat Jawa dalam bidang sosial budaya dan politik, juga pernal diteliti oleh Clifford Geertz pada tahun 1950-an. Bahwa dinamika sosial politik masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan oleh struktur sosial yang terbentuk di dalamnya. Bagi masyarakat Jawa, hanya mengenal dua lapisan sosial, yaitu *wong cilik* atau rakyat jelata dengan *wong gedhe* atau para elitee masyarakat. Pola lapisan sosial tersebut terbentuk tidak semata-mata didasarkan pada kepemilikan yang bersifat ekonomi, tetapi juga berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan spritualitas.

Lebih lanjut Geertz menjelaskan bahwa dalam masyarakat Jawa diperbolehkan melakukan mobilitas status sosial dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagi sebagian masyarakat Jawa, utamanya bagi wong cilik abangan dibuka peluang untuk menjadi bagian dari kelas menengah ke atas dengan cara *mengenger* atau mengabdi ke keluarga priyayi. Dari sinilah kemudian relasi antara kelompok kelas bawah dengan kelompok elite tercipta.

Dalam perkembangan selanjutnya utamanya di masa kolonialisme di Indonesia, kelompok kelas menengah di Jawa memiliki andil dalam proses perubahan sosial di Indonesia saat itu. Hal tersebut disebabkan kelompok priyayi memiliki kemudahan akses untuk berinteraksi langsung dengan para penguasa kolonial saat itu. Ditambah lagi bahwa akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan layak juga

dapat diperoleh dengan mudah. Dengan fakta seperti itulah maka kaum priyayi memiliki andil dan peran yang cukup besar dalam memajukan masyarakat (Kartodirdjo, 1987) (Kartodirdjo, 1987).

Dalam kebudayaan Jawa muncul istilah *kejawen* atau Jawaisme. Secara sekilas kedua istilah tersebut sering dikonotasikan kepada kualitas spiritual tertentu yang dimiliki orang Jawa. Istilah kejawen juga sering diartikan percaya pada ajaran agama Jawa dengan seperangkat praktik-praktik ritualnya. Padahal dalam penelitian Mulder, menemukan bahwa Kejawen merupakan pemehaman yang dimilki orang jawa terhadap tradisi kebudayaan Jawa sehingga dalam kasus tertentu, orang Jawa yang muslim bisa bercerita dan paham tentang dunia wayang.Atau seorang Jawa yang beragama Katholik tetapi dalam hal lain ia sangat mendalami ajaran-ajaran yang ada dalam buku primbon. Orang Jawa pada umumnya, lepas dari agama yang dianut, juga sangat mengagungkan orang yang sudah meninggal sehingga ziaroh adalah implementasi budaya dibandingkan bentuk ajaran agama (Mulder, Pribadi dan Masyarakat di Jawa, 1985) (Mulder, Pribadi dan Masyarakat di Jawa, 1985).

Temuan penelitian Mulder tersebut dilanjutkan oleh Woordward yang menghasilkan suatu deskripsi tentang masyarakat Jawa yang beragama Islam dengan adat dan tradisi Jawa yang juga sangat kuat berakar dalam masyarakat. Menurut Wooodward praktek Islam yang dilakukan masyarakat Jawa dengan menggunakan atau menggabungkan dengan tradisi Jawa bukanlah model keberagaman yang sinkretik. Banyak para antropolog terdahulu menyebutkan bahwa Islam yang ada di Jawa adalah pertemuan antara

budaya peninggalan Hindu dan atau Budha dengan Islam itu sendiri. Islam di Jawa adalah versi lain sebagaimana model Islam di wilayah lain. Jika selama ini Islam diartikan seperti yang datang dari Timur Tengah, maka sebenarnya itu Islam versi Timur Tengah. Begitu pula yang lain, terdapat Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Batak dan lain sebagainya karena pada akhirnya tidak ada yang bisa membatasi pertemuan dan persinggugan antara Islam denga budaya dimana Islam tersebut dikembangkan. Keduanya menyatu satu dengan yang lainnya, bahkan bersifat komplementer. Hal tersebut juga berlaku untuk agama lain diluar Islam (Woodward, 2005, hal. 10)(Woodward, 2005, hal. 10).

Temuan tersebut diperkuat lagi oleh Muhaimin dan Nur Syam bahwa Islam yang ada di wilayah Cirebon Jawa Barat yang memilki tradisi pesisir pantai utara Jawa sangat khas mendominasi warna keislaman masyarakatnya. Hal tersebut karena antara Islam dan budaya lokal menyatu dan saling memberi sehingga sukar untuk dipisahkan meskipun demikian Islam yang berlaku baik di Jawa maupun di Cirebon tidak kehilangan kemurniannya sebagai ajaran yang besumber dari kitab Alquran. Demikian pula tradisi yang diserap adalah tradisi yang masih sesuai dengan ajaran Islam dan disesuaikan dengan konteks sosial setempat. Dus, Islam tidak membabat habis semua produk budaya dan tradisi masyarakat, tetapi dirangkul dan menjadi media tersebarnya nilai-nilai ajaran Islam(Syam, 2010) (Syam, 2010).

Selain temuan di atas Woodward juga merumuskan hubungan antara Islam dengan budaya Jawa yang terbagai dalam dua titik penting. Pertama, antara Islam dan tradisi Jawa memperhatikan pada siklus kehidupan manusia,

mulaikelahiran, pernikahan, dan kematian. Keduanya memiliki pandangan bahwa selain dunia nyata yang sekarang terdapat alam lain setelah kematian, yaitu akhirat. Jika Islam yakin tentang surga dan neraka, orang jawa juga yakin bahwa ada keterkaitan antara mikro kosmos dan makro kosmos. Dunia kecil dan dunia besar. Kedua, baik Jawa maupun Islam sama-sama mempercayai posisi kraton sebagai pemegang kendali syariat atau agama. Orang Islam dalam keseharian dipandu oleh hukum atau syariat, sedangkan orang Jawa menjadikan keraton sebagai paugeran atau pedoman nyata atau bahkan tertulis tentang pentingnya agama untuk pedoman dalam kehidupan manusia. Orang Jawa memiliki raja sebagai sultan, selain sebagai penguasa pemerintahan dan politik juga sebagai pemimpin agama(Woodward, 2005) (Woodward, 2005).

Selanjutnya untuk membahas masyarakat Jawa yang ada di Jawa Timur para pakar antropologi dan sosiologi menyebutnya sebagai masyarakat Mataraman. Wilayah Mataraman ini berada di bagian barat dan selatan Jawa Timur. Para ahli sejarah dan budaya menyebut wilayah Mataraman sebagai wilayah manca negara dalam struktur pemerintahan kerajaan Mataram Islam sehingga karakter masyarakatnya berbeda dengan masyarakat yang ada di wilayah Yogayakarta maupun Surakarta yang termasuk ke dalam wilayah *nagari.*

Wilayah nagari adalah wilayah inti yang dekat dengan pusat kekuasaan atau *keraton* sehingga masyarakat di kedua wilayah ini menjadikan keraton sebagai pusat nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Berbeda dengan wilayah Mataraman yang jauh dari pusat kekuasan meskipun dalam bahasa dan nilai-nilai kejawaan masih sama dengan yang

dimiliki masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, namun corak politik dan ikatan sosial antarmasyarakatnya lebih longgar dan egaliter. Hal inilah yang menjadikan perbedaan yang cukup jelas dalam sikap politik maupun perilaku keberagamaannya. Masyarakat Mataraman yang ada di Jawa Timur kehidupan keagamaan (Islam) lebih kental hal tersebut disebabkan banyak berdiri pondok pesantren dengan bentukan masyarakat santri yang khas.

Meskipun demikian membatasi dan mengidentifikasi secara ketat tentang definisi dan batasan masyarakat mataram tidak bisa lagi dilakukan. Hal tersebut karena persebaran masyarakat yang etnik Jawa di Jawa Timur tidak hanya berada di Jawa Timur saja tetapi sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu,, membatasi pengaruh kerajaan mataram sebelum atau sesudah kemerdekaan juga menjadi problem akademis tersendiri. Hal tersebut disebabkan mataram sebagai kerajaan telah berdiri dan eksis jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Selanjutnya, sebagai sebuah subkebudayaan, Mataraman tentu bukan sesuatu yang bersifat statis, tetapi telah mengalami modifikasi bahkan perubahan karena berdealektika dengan subkebudayaan lain yang ada di Indonesia. Artinya, kebudayaan masyarakat mataram itu sendiri telah dan terus mengalami perubahan-perubahan.

Masyarakat Mataraman memiliki ciri sosial dan budaya yang juga berpengaruh terhadap tradisi politiknya. Dalam konteks pemilu, masyarakat Mataraman memiliki ciri khusus dalam pilihan politiknya yang tercermin dari pilihan dan dukungan kepada partai politik tertentu. Hal tersebut di dasarkan pada hasil pemilu mulai tahun 1955 sampai 2004

bahwa masyarakat cenderung memilih partai yang berbasis nasionalis dibandingkan partai yang berbasis agama.

Dalam bidang politik, masyarakat di wilayah Mataraman tidak menyukai model keberagamaan yang formalistik karena hal tersebut dianggap tidak nasionalis. Dengan demikian, partai-partai yang berlabelnasionalis lebih banyak mendapatkan dukungan di masyarakat Jawa Mataraman. Hal tersebut berbeda dengan mayoritas masyarakat diwilayah Madura dan Pandalungan lebih menunjukkan loyalitas dukungannya kepada partai yang berbasis massa Islam Nahdlatul Ulama seperti Partai KebangkitanBangsa. Di mana ulama dan kiai masih menjadi tokoh panutan di Madura dan Pandalungan. Pengaruhnya pun ikutmerambah ke ranah pilihan politik warganya.

Gambaran tersebut mencerminkan suatu kondisi politik yang telah lama terjadi sejak masa reformasi hingga beberapa tahun berikutnya. Namun, sejak pemilu tahun 2014 kondisi tersebut telah mengalami pergeseran. Sejak dilaksanakannya pemilu legislatif tahun 2014 menunjukkan bahwa politik aliran menghadapi tantangan serius. Penelitian yang dilakukan oleh Rubaidi (2014) bahwa telah terjadi pola pergeseran tersebut terkait dengan budaya politik patronase sebagai akar penyebabnya. Dalam penelitiannya Rubaidi menyampaikan argumentasinya.

Pertama, pergeseran dari pola pemberian suara berbasis politik aliran kepada pemilihan yang lebih di dasarkan atas pilihan rasional (*rational choices*) sebagai dasar argument. Sebelumnya, afiliasi pada politik aliran lebih di dasarkan pada klientilisme, bahwa hubungan politik dan social lebih didasarkan pada ketaatan total dari klien terhadap patron.

Dalam perkembangannya politik patronase seperti tampak di Jawa, ditandai dengan partai yang bukan lagi sebagai patron utama. Masyarakat lebih melihat perhitungan untung rugi secara material dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Hal tersebut terlihat pada Pemilu 2014 yang lalu, di saat pemilih lebih dipengaruhi oleh manfaat yang mereka peroleh melalui pembelian suaradan bentuk lain dari patronase daripada dipengaruhi identitas politik aliran atau bentuk lyalitas lainnya.

Kedua, persaingan calon yang bersifat personal dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia semakin melintasi batas-batas politik aliran. Pada pemilu sebelumnya yakni tahun 2009 hingga tahun 2009, para caleg umumnya berkontestasi di dalam partai dengan memperebutkan suara pemilih berdasarkan garis ideologi politik aliran. Namun, pada pemilu 2014, perebutan suara pemilih telah melewati blok-blok politik aliran. Suara pemilih lebih disimbolisasikan melalui jaringan klientelisme menjadi objek perebutan para caleg lintas partai.

Sejak pemilu 1999, salah satu ciri khas dari kompetisi pemilu di Jawa Timur adalah pengaruh secara berkelanjutan dari politik aliran. Dengan sistem pemilu multipartai terdapat dua kontestan partai politik berbasis ideologi aliran yang dominan sejak era reformasi, yakni PKB yang berafiliasi ke NU dengan dukungan komunitas santri tradisionalis dan PDIP dengan basis utamanya kelompok abangan dan nonmuslim. PKB mendapat suara terbanyak di Jawa Timur pada pemilu tahun 1999 dan Pemilu 2004 dan diikuti oleh PDIP. Pada Pemilu 2009 PKB mengalami konflik internal sehingga dengan mudah dimenangkan oleh Partai Demokrat.

Pada pemilu 2014, PKB kembali menjadi pemenang pemilu di Jawa Timur dengan memperoleh 20 kursi anggota legislatif sedangkan PDIP mendapatkan 19 kursi di DPRD. Pada pemilu yang sama sejumlah partai lainnya baik yang berorientasikan Islam dan nasionalis bersaing untuk memperebutkan pemilih abangan maupun santri.

Masyarakat Mataraman yang ada di Kota Kediri dari masa Orde Baru hinga masa reformasi terjadi perubahan politik sehingga berakibat pada perubahan orientasi masyarakat di dalamnya. Tentu hal tersebut berlaku secara nasional, mengingat selama pemerintahan Orde Baru, pemerintahan di setiap daerah selalu dikendalikan dari pusat. Pemerintah dalam hal ini sangat dominan menentukan corak dan langgam politik di semua daerah di Indonesia. Kehidupan politik lima tahunan melalui pemilu telah dimodifikasi hanya menjadi tiga partai politik yang boleh berkontentasi, yaitu PPP, Golkar dan PDI. Sedangkan, partai-partai yang sebelumnya telah lama berdiri digabung (fusi) menjadi satu partai.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pola afiliasi politik seperti apa yang di kemukakan Geertz, dimana pemilih Santri memilih partai Islam, pemilih Abangan memilih partai Nasionalis, dan pemilih priyayi memilih Golkar masih berlaku. Golongan masyarakat Abangan di Kediri cukup banyak walaupun Kediri ini terkenal dengan masyarakat yang Islamnya cukup besar.

PDI-P memiliki pendukung yang cukup banyak yang dibuktikan dengan suara PDIP hasil pemilu 1999 dan 2004 yang signifikan dan hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Kediri, Kota Kediri). Di daerah Kabupaten Kediri PDI-P meraih 510.450 suara (38,47%) pada pemilu

1999 dan 357.008 suara (28,97%) pada pemilu 2004. Dengan demikian, walau kultur pesantren cukup kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kediri, namun tidak serta merta menjadikan Kediri sebagai basis partai Islam. Karakteristik Masyarakat Kediri yang heterogen dengan kultur Jawa yang kental telah menjadi tembok tebal bagi sebagian warga Kediri dalam menahan pengaruh politik Islam yang datang dari kultur pesantren. Oleh karena itu, walaupun mereka dalam kehidupan kesehariannya mereka bersatu padu dalam menjalankan ritual yang bercirikan Islam Tradisional seperti tahlilan, yasinan, ataupun yang lainnya, namun dalam hal aspirasi politik mereka berbeda.

Masyarakat Mataraman utamanya di Kota Kediri, memilki ciri sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pola afiliasi politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak pemilu pertama hingga awal reformasi, masyarakat lebih condong memilih partai nasionalis dibandingkan partai yang berbasis agama ataupun ideologi lain sosialis dan komunis. Alasanya, mereka tidak suka dengan hal-hal yang mencolok, misalnya Islam yang terlalu Islam karena mereka hal tersebut dianggap tidak berjiwa nasionalis. (Kompas, 21 Juli 2008).

Bahwa selama 4 kali pemilu dalam masa reformasi, pemenang pemilu di Kota Kediri selalu berganti-ganti. Pada pemilu 1999 pemenangnya adalah PDIP, kemudian disusul pada pemilu 2004 pemenangnya adalah PKB. Lima tahun berikutnya pada pemilu 2009 pemenangnya PDIP kembali. Kemudian dalam pemilu 2014 partai pemenang adalah PAN.

Jika dilihat dari kategorisasi politik aliran menggunakan kategorisasi Cliford Geertz, masyarakat di Kota Kediri terdiri dari tiga kelompok budaya politik yang berbeda, yakni

kelompok budaya politik santri, kelompok budaya politik abangan dan kelompok budaya politik priyayi. Oleh karena itu, partai-partai yang muncul dan mendapatkan dukungan dari basis kelompok kebudayaan politiknya masing-masing masih relatif konsisten pada setiap di selenggarakannya pemilu-pemilu di Kota Kediri hingga tahun 2009. Yaitu, PKB yang mendapatkan dukungan dari kelompok santri atau Islam tradisional, PDIP yang mewakili kelompok abangan dan nonmuslim dan Partai Golkar yang mewakili kelompok priyayi.

Kekuatan dari tiga partai politik yang mewakili kelompok budaya politik tersebut juga cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan ketiga partai tersebut mampu menempatkan wakil-wakilnya di kursi DPRD. Bahkan, tiga kursi pimpinan yang meliputi satu ketua, dan dua wakil ketua DPRD selalu dipegang dari tiga partai tersebut (PDIP, PKB dan Partai Golkar).

Namun, pada pemilu 2014, menghasilkan konfigurasi perolehan suara yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.Pada pemilu keempat di era reformasi ini pemenangnya adalah Partai Amanat Nasional. Dengan kemenangan PAN tersebut tentu ia berhak menjadi ketua DPRD, sedangkan PDIP dan PKB perolehan suaranya menempati urutan ke-2 dan ke-3 sehingga hanya mendapatkan kursi wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 di lembaga legislatif yang kantornya berada di Jalan Mayor Bismo ini.

Sementara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Kediri selama sepuluh tahun terakhir baik PDIP maupun PKB sebagai representasi partai politik dari kalangan abangan/nasionalis dan santri justru selalu kalah dalam

memenangkan ajang pemilihan kepala daerah. Pada pilkada tahun 2008 maupun tahun 2013 pasangan calon yang menang adalah yang didukung oleh Partai Amanat Nasional beserta partai koalisi lainnya.

Melihat fenomena di atas, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisisproses perubahan budaya politik yang ada di Kota Kediri sebagai representasi budaya Mataraman, bagaimana proses perubahan orientasi politik masyarakat Mataramandi Kota Kediri dan faktor apa saja yang menyebabkan perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman serta bagaimana rasionalitas pilihan politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada?

Penulisan ini dilakukan karena adanya dorongan yang kuat untuk menindaklanjuti dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun telah banyak penelitian tentang budaya politik, masih jarang yang meneliti tentang perilaku politik masyarakat Jawa Mataraman di Jawa Timur. Kalaupun penelitian tersebut dilakukan, ruang lingkupnya pembahasannya masih sebatas kesatuan administrasi pemerintahan, misalnya, provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Dengan demikian budaya sebagai bagian dari cara berpikir dan bertindak dan bertindak belum banyak diungkap. Artinya, cenderung mengasumsikan bahwa masyarakat adalah sebagai kesatuan politik kewarganegaraan yang didasarkan pada norma dan aturan-aturan formal sebagai negara modern.

Adapun dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena budaya politik masyarakat Mataraman yang dipengaruhi oleh budaya Jawa di wilayah perkotaan dengan kompleksitas masalah yang ada di

dalamnya. Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas dinamika budaya politik masyarakat Jawa di wilayah perdesaan.Selain itu,, penelitian ini juga diarahkan untuk mengamati dan menganalisis perkembangan budaya politik masyarakat Mataraman di wilayah perkotaan yang tidak hanya terkait secara langsung dengan momentum pemilihan umum semata, tetapi juga dirahkan untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan orientasi dan sikap masyarakat Mataraman yang telah dipraktikan dan berlangsung cukup lama oleh masyarakat.

Bab II Budaya Politik dan Strukturasi sebagai Analisis Masyarakat Mataraman

Fungsi teori dalam penelitian, tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan tentang fenomena sosial yang diteliti tetapi juga dapat memperjelas hubungan antarkonsep. Dengan demikian peneliti dapat melakukan analisis terhadap objekpenelitian dengan mudah dan konsisten(Effendy, 1989) (Effendy, 1989).

Selanjutnya, untuk menjelaskan secara sistematisyang menjadi permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan teori-teori sebagai berikut:

Teori Budaya Politik

Studi tentang budaya politik sudah banyak dilakukan oleh para pakar baik dari kacamata politik maupun sosiologi. Studi budaya politik yang bersifat khusus dilakukan oleh Gabriel Almond, yang meneliti orientasi politik di 5 negara. Sementara itu, studi budaya politik di Indonesia juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa ilmuwan Indonesia maupun dari luar negeri.

Dalam penelitiannya, ia menggunakan pendekatan individual. Karena menurutnya, dengan menitikberatkan pada individu, dapat merefleksikan lebih nyata tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kelompoknya. Dari individu inilah dapat digali pendapat dan arah politik yang dimilikinya.

Selanjutnya, Almond membagi sikap dan orientasi politik menjadi tiga aspek: kognitif, afektif, dan evaluatif.

Orientasi politik yang bersifat kognitif berarti peneliti harus dapat mengungkap gagasan dan pengetahuan individu tentang berbagai objek politik seperti pemerintah, partai politik, lembaga legislatif dan lain sebagainya. Sedangkan, orientasi afektif adalah menyangkut sikap yang dimiliki oleh individu terhadap berbagai kebijakan publik, performa calon dan partai politik, maupun sikapnya terhadap kepemimpinan. Apakah mendukung, mengkritisi atau bahkan melawan atau oposisi. Orientasi politik selanjutnya adalah orientasi evaluatif. Artinya, setiap warga negara dapat menentukan tindakan dan perilaku yang dipilih serta melakukan respon terhadap objek politik yang dinilai menyimpang atau mendukung dan membela karena sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya(A. Almond & Verba, 1990) (A.Almond & Verba, 1990).

Gabriel Almod ingin memperlihatkan bahwa dimensi penelitiannya yang menekankan peran individu tetapi juga aspek yang menonjol lainnya untuk dilihat adalah aspek-aspek yang bersifat psikologis. Dengan aspek psikologis tersebut seorang individu menggunakan basis nilai dan moral yang digunkan untuk melihat, mensikapi dan melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap sebuah sistem politik. Dengan pendekatan seperti ini diharapkan mampu memotret gambaran orientasi politik secara kolektif dalam suatu wilayah masyarakat, mulai tingkat desa, komunitas, hingga tingkat negara.

Masih terkait dengan ruang lingkup kajian tentang budaya politik bahwa sistem politik merupakan aspek-aspek politik dari gagasan, pengetahuan, adat istiadat, mitos dan tahayul

yang dimilki masyarakat. Dengan seperangkan aspek-aspek tersebut, masyarakat dapat menolak atau menerima nilai-nilai yang datangnya dari luar. Dengan demikian budaya politik menekankan sebuah gambaran tentang ideologi yang belaku umum di masyarakat (Widjaja, 1982)(Widjaja, 1982).

Mochtar Mas'oed sependapat dengan Almond bahwa yang dimaksud dengan budaya politik mempelajari sebuah sistem politik secara menyeluruh. Di dalamnya secara khusus mempelajari peran parpol, individu dan kelompok dalam bangunan struktur sosial tertentu sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana semua itu terjadi (Mas'oed & Andrews, 2000) (Mas'oed & Andrews, 2000).

Menurut Almond budaya politik terbagi dalam tiga jenis yaitu budaya politik parokial yaitu orientasi politik yang ditentukan oleh para elite dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh para elite atau pemimpinnya. Fenomena ini masih berlaku di setiap lapisan sosial masyarakat. Yang kedua, orientasi politik kaula yang cirinya masyarakat sudah memilki pengetahuan tentang sistem politik yang berlaku, tetapi mereka masih pasif dan tidak berbuah pada bentuk partisipasi. Dan yang ketiga, orientasi politik partisipan, pada tipe ini masyarakat telah memilki kesadaran tentang peran, fungsi beserta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tipe masyarakat dalam kategori ketiga ini, telah melek politik dan aktif dalam kegiatan pengambilan kebijakan publik.

Lebih lanjut Rosenbaum (1975), merinci kajian budaya politik meliputi: Orientasi terhadap struktur pemerintahan. Yang termasuk di dalamnya, meliputi orientasi rezim, yaitu bagaimana individu mengevaluasi dan menanggapi lembaga

pemerintahan, simbol, pejabat dan norma. Selanjutnya, orientasi terhadap masukan dan keluaran ke dan dari pemerintah. Hal ini menyangkut perasaan dan sikap warga negara kepada pemerintah.

Selain orientasi terhadap struktur pemerintahan, menurut Rosenbaum dalam budaya politik terdapat juga orientasi terhadap pihak dalam sistem politik. Yang termasuk dalam klasifikasi ini menyangkut identifikasi politik (unit politik, wilayah geografis, dan kelompok sosial), kepercayaan politik; sejauh mana seseorang merasakan sikap kooperatif yang terbuka, atau sikap toleran dalam bekerja dengan orang lain, termasuk tentang konsepsi individu tentang aturan apa yang harus diikuti dalam kehidupan bersama.

Elemen lain yang menjadi bagian dari ruang lingkup budaya politik adalah menyangkut aktivitas politik warga negara, termasuk kompetensi yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam memperjuangkan kepentingan politk tertentu. Dan yang selanjutnya, perasaan yang dimilki warga negara bahwa apa yang dilakukan mampu mempengaruhi kebijakan dan proses politik yang sedang berlangsung.

Selanjutnya, bagaimana sikap politik dapat dimunculkan oleh individu atau kelompok karena sikap individu dimunculkan karena faktor dan orientasi tertentu. Oleh Almond and Powell, tiga orientasi, yang menjadi teori dominan dalam teori budaya politik, tersebut ialah:

(1) Orientasi kognitif

Orientasi kognitif dihubungkan dengan pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peran, dan sistem politik baik *input* maupun *output*. Individu dan kelompok yang mempunyai orientasi kognitif, sudah terbentuk oleh

konsepnya tentang sistem politik di lingkungannya. Dengan kata lain, mereka mampu memahami dengan baik tentang pola sistem politik tersebut. Budaya politik yang dibentuk oleh orientasi kognitif berusaha mencari bentuk ideal (termasuk rasional) atau mempertahankannya dalam aktivitas politik.

(2) Orientasi afektif

Orientasi afektif dihubungkan dengan perasaan terhadap sistem politik, peranan para pelaku politik, dan penampilannya. Tidak seperti orientasi kognitif, orientasi afektif lebih mempertimbangkan perasaan individu kelompok dalam menyikapi politik dan pelakunya. Tentu saja faktor *like or dislike* bisa menjadi kekuatan dominan dalam membentuk budaya politik masyarakat. Tidak bisa diabaikan pula bahwa pertimbangan politik masyarakat dalam pemilihan umum dan daerah pun tidak bisa dilepaskan dari orientasi afektif.

(3) Orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif berhubungan dengan kemampuan setiap warga negara dalam menilai dan mengevaluasi berdasarkan informasi dan pengamatan yang diperolehnya. Setelah dilakukan evaluasi terhadap objek politik, akan melahirkan sikap dan tindakan dalam diri individu atau kelompok. Maka, orientasi evaluatif sebenarnya merupakan bentuk sinergi antara orientasi kognitif dan afektif sehingga individu maupun kelompok dapat menjatuhkan vonis dalam bentuk sikap dan tindakan terhadap keadaan sistem politik yang sedang berlangsung dalam bentuk menolak atau mendukung.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, ketiga orientasi politik sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi acuan dalam melakukan penelitian dan kajian budaya politik masyarakat Mataraman utamanya yang berada di Kediri dan sekitarnya. Dengan demikian peneliti dapat menggunakan teori tersebut sebagai cara untuk mendefinisikan dan menjelaskan orientasi masyarakat Kota Kediri dalam berpolitik, khususnya dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Selain beberapa kajian tentang budaya politik Indonesia yang dilakukan oleh para intelektual dalam negeri tersebut Dalam penelitian ini juga menggunakan kajian budaya politik masyarakat Jawa yang pernah dilakukan oleh Clifford Geertz yang dilakukanya di wilayah Mojokuto atau Pare Kediri. Semenjak Geertz melakukan kajian tentang *The Religion of Java*, maka kajian tentang hal tersebut terus berlanjut, baik yang setuju dengannya maupun yang menolaknya. Penelitian ini sengaja menggunakan titik tolak kajian Geertz yang disebabkan oleh konsep trikotominya, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, konsepsi Geertz tentang Agama Jawa banyak menjadi sumber inspirasi untuk kajian kebudayaan Jawa bahkan Indonesia.

Trikotomi agama Jawa itulah yang sampai sekarang disebut-sebut sebagai wacana sosial, politik dan budaya di Indonesia dalam dan menjadikannya sebagai referensi induk dalam membedah fenomena politik dan keagamaan di Jawa. Kekuatan dari konsepsi trikotomi Geertz terletak pada kemampuan mendeskripsikan secara detail tentang ketiga varian tersebut dan menyusun ulang dalam konklusi

hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh atas varian tersebut.

Teori Strukturasi

Konsep strukturasi dalam teori sosiologi Anthony Giddens cukup populer dalam kajian sosiologi kontemporer, namun sebagai suatu teori atau metodologi konsep Giddens tersebut terkesan agak sulit dipahami dan seolah abstrak.Akan tetapi, ketika dipahami dan dielaborasi secara lebih luas konsep strukturasi sebenarnya cukup menarik dan dapat dijadikan alat analisis yang tajam terutama mengenai relasi antara agen (aktor) dan struktur (sistem) dalam kehidupan masyarakat sebagai fakta sosial yang objektif.

Strukturasi (*Structuration*) merupakan konsep sosiologi utama Anthony Giddens sebagai kritik terhadap teori fungsionalisme dan evolusionisme dalam teori strukturalisme. Inti teori strukturasi terletak pada tiga konsep utama, yaitu tentang "struktur", "sistem", dan "dualitas struktur" (Giddens, 2010, hal. 25)(Giddens, 2010, hal. 25).

Menurut Giddens, hubungan antara agen dan struktur tidak bersifat dualisme melainkan dualitas. Keduanya, baik struktur dan agen saling terkait dan dinamis menurut hukum dialektika. Hal yang dinamis tersebut disebabkan setiap agen atau aktor mampu berkreasi dan keluar dari dominasi struktur baik yang mengekang maupun yang membebaskan. Kemampuan agen atau aktor dalam melakukan tindakan tersebut dinamakan praktik sosial.

Giddens dengan teori strukturasinya menekankan kajian pada "praktik sosial yang tengah berlangsung" sebagaimana dinyatakannya, bahwa "ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial,

menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu"(Giddens, 2010, hal. 563) (Giddens, 2010, hal. 563).

Pengertian strukturasi dikaitkan dengan konsep dualitas struktur, dimana struktur-struktur diproduksi dan direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial. Teori strukturasi Giddens mencakup tentang kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekeliruan pemisahan antara agen dan struktur (*agency and structure*) dalam sosiologi. Melalui teori strukturasi Ginddens berusaha untuk melampaui batas-batas fungsionalisme dan kegigihannya dalam mentransformasikan dikotomi antara agen dan struktur telah diterima dalam lingkungan sosiologi mutakhir. Akan tetapi, teori strukturasi masih juga menjadi bahan perdebatan kritis menyangkut kegagalannya untuk menghasilkan program tersendiri dalam risetempirik dari sudut pandang hipotesis yang teruji.

Menurut teori strukturasi, domain dasar ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi sepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia, seperti halnya benda-benda alam yang berkembang biak sendiri, saling terkait satu sama lain. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus-menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan

melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu(Giddens, 2010, hal. 3) (Giddens, 2010, hal. 3).

Inti dari teori Giddens adalah cara padangannya mengenai struktur.Menurutnya, struktur bukan sesuatu yang bersifat tetap dan berada di luar individu atau kelompok, tetapi antarstruktur sebagai perangkat aturan yang terus bergerak seiring dengan praktik sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam masyarakat.

Menganalis strukturasi dalam sistem-sistem sosial berarti mempelajari cara-cara bagaimana sistem-sistem seperti itu tertanam dalam aktivitas aktor tertentu dengan tetap berpedoman pada aturan dan sumber daya yang ada. Langkah selanjutnya, melakukan tindakan-tindakan yang melahirkan produksi dan reproduksi tindakan melalui proses interaksi. Struktur tidak ditempatkan diluar individu, tetapi masuk di dalam ingatan dan ketika terwujud dalam praktik sosial sehingga struktur tersebu berada di dalam individu. Oleh karena itu, struktur tidak dalam bentuk mengekang yang membatasi gerak dan tindakan, tetapi dalam konteks strukturasi struktur dapat bersifat mengekang maupun membebaskan. Selanjutnya, dualitas struktur tersebut merupakan suatu landasan utama yang pada akhirnya melahirkan keterulangan dalam reproduksi sosial yang dilakukan aktor dalam rentang ruang dan waktu (Nashir, 2012)(Nashir, 2012).

Tabel 1 Konsep srukturasi Anthony Giddens

Struktur	Sistem	Strukturasi
Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasisebagaikelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial.	Relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-prtaktik sosial reguler.	Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri.

Sumber : Ritzer (2007)

Struktur menurut Giddens, ialah "hal-hal yang menstrukturkan (aturan dan sumberdaya)...hal-hal yang memungkinkan adanya praktik sosial yang dapat dipahami kemiripannya di ruang dan waktu serta yang memberi mereka bentuk sistemis" (Giddens, 2010)(Giddens, 2010).

Menurut Giddens bahwa "struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia". Dalam pandangan Giddens, berdasarkan konsep 'dualitas struktur' dalam hubungan antara agen dan struktur (*agency and structure*), bahwa 'struktur' merupakan medium sekaligus hasil dari tindakan yang ditata secara berulang oleh struktur. Ditekankan pula tentang 'keterinformasian' aktor yang tergantung pada pengetahuan dan strategi yang ada untuk meraih tujuan. Agen atau pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu antara tindakan dan peristiwa. Sedangkan, struktur adalah "aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial". Sedangkan sistem sosial, "memproduksi praktik sosial, atau mereproduksi hubungan antara aktor dengan kolektivitas yang diatur sebagai praktik sosial yang terorganisasi".

Inti dari teori strukturasi adalah gagasan tentang agen manusia, kemampuan orang untuk terlibat dalam tindakan yang bertujuan dengan konsekuensi yang disengaja dan tidak diinginkan. Giddens mendefinisikan aktor manusia sebagai agen yang memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya dan dapat mengontrol orang lain dalam konteks interaksi yang bertujuan. Aktor manusia mendasarkan interaksi mereka pada pengetahuan yang ada tentang dunia, kemampuan mereka dan aturan perilaku sosial. Interaksi mereka membawa maksud, makna, kekuatan, dan konsekuensi yang mengarah pada perubahan dalam struktur yang mengatur tindakan mereka. Agen secara serentak bersifat otonom, melibatkan aliran aktivitas yang terus-menerus yang dipantau secara refleks dan dibatasi oleh ketergantungan pada kolektif sosial. Konsep pengetahuan aktor sangat penting karena aktor memanfaatkan struktur, aturan dan sumber daya untuk membentuk sistem sosial.

Dalam pandangan Giddens, lingkungan dimana manusia berada di dalamnya merupakan kumpulan dari beragam tindakan yang keberadaannya tidak secara kebetulan melainkan sesuatu yang terstruktur. Dengan demikian sebuah praktik sosial pada akhirnya akan menghasilkan sebuah struktur sosial yang memiliki bentuk dan pola.Sebagaimana yang dicontohkan Giddens bahwa bentuk dan pola tersebut menyerupai sebuah bangunan yang ada lantai, dinding dan atapnya.

Tapi metafora tersebut bisa sangat menyesatkan jika diterapkan terlalu ketat. Sistem sosial terdiri dari tindakan manusia dan berbagai hubungan tentang apa yang memberi pola dan bagaimana pengulangannya di seluruh periode

waktu dan jarak ruang. Dengan demikian ide-ide reproduksi dan struktur sosial itu sangat erat terkait satu sama lain dalam analisis sosiologis. Kita harus memahami masyarakat manusia menjadi seperti bangunan yang setiap saat sedang direkonstruksi oleh susunan batu bata yang membentuk bangunan itu.

Agen adalah aktor, sedangkan agensi menurut Giddens terdiri atas peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi. Agen, menurut Giddens "memiliki kemampuan menciptakan perbedaan sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan; Jadi, aktor tidak lagi menjadi agen jika ia kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Giddens jelas mengakui adanya sejumlah hambatan terhdap aktor, namun tidak berarti bahwa aktor tidak memiliki pilihan dan tidak menciptakan perbedaan. Bagi Giddens, secara logis kekuasaan mendahului subjektivitas karena tindakan melibatkan kekuasaan, atau kemampuan mengubah situasi. Jadi, teori strukturasi Giddens menempatkan kekuasaan pada aktor dan tindakan yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung mengabaikan orientasi tersebut dan justru mementingkan niat aktor (fenomenologi) atau struktur eksternal (fungsionalisme struktural)"(Giddens, 2010) (Giddens, 2010).

Menurut teori strukturasi Giddens, hubungan antara agen dan struktur bersifat dualitas, bukan hubungan dualisme. Dalam pandangan Giddens, merupakan sesuatu yang sudah jelas jika dikatakan ada perbedaan antara pelaku (agen, aktor) dan struktur, sebagaimana dikatakan ada keterkaitan antara

struktur dan pelaku atau sebaliknya. Persoalannya adalah, apakah perbedaan dan hubungan antara pelaku dan struktur itu bersifat dualisme (tegangan atau pertentangan) atau dualitas (timbal-balik)? Giddens melihatnya sebagai dualitas (*duality*) dan bukan dualisme sebagaimana yang telah menjadi pandangan umum ilmu-ilmu sosial yang mempertentangkan pelaku (agen) versus struktur.

Giddens mengakui adanya konsep kekuasaan sebagai kemampuan transformatif, yang mendahului subjektivitas atau terbentuknya kemampuan introspeksi dan mawas diri, yang dalam ilmu sosial pada umumnya bersifat dualisme antara subjek dan objek. Dalam konsepsi tersebut kekuasaan-kekuasaan kerap kali didefinisikan dalam kaitan dengan maksud atau kehendak, yakni sebabagai "kemampuan untuk menggapai hasil-hasil yang diinginkan dan dimaksudkan". Para ahli lain seperti Parsons dan Foucault memahami kekuasaan sebagai suatu "kepemilikan masyarakat atau komunitas sosial". Dalam kaitan ini, sebagaimana pendapat Bachrach dan Baratz, Giddens juga memahami makna kekuasaan dalam dua sisi, yakni di satu pihak sebagai "kemampuan para aktor dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang disukai", di pihak lain kekuasaan sebagai "mobilisasi bias yang dilekatkan ke dalam institusi-institusi". Namun, Giddens melihat kekuasaan dalam kaitan dualitas struktur. Dalam memaknai kekuasaan yang dipahaminya(Giddens, 2010, hal. 24-25) (Giddens, 2010, hal. 24-25).

Konsep Anthony Gidden tentang strukturasi dalam batas tertentu kadang terbaca rumit, lebih-lebih ketika masuk pada pembahasan tentang konsep agen, agensi, struktur, sistem,

sumber daya, dan kekuasaan. Namun, yang dapat dipahami secara konkret konsep strukturasi dari sosiolog kontemporer dari Inggris ini ialah relasi antara agensi dan struktur yang perwujudannya berupa praktik sosial (*social practices*) yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Praktis sosial itulah sebagai wujud nyata kehidupan sosial manusia dalam masyarakat atau masyarakat sebagai manifestasi kehidupan kolektif manusia, yang menggambarkan hubungan saling timbal-balik (dualitas) antara struktur dan agensi. Konsep praktis sosial Giddens sebagai esensi dari perwujudan strukturasi mirip dengan konsep tindakan sosial *(social action)* Max Weber, namun perbedaannya Giddens lebih melihatnya sebagai relasi dualitas sedangkan Weber lebih menekankan pada perilaku aktor yang lebih menunjukkan dualisme dengan tekanan terletak berada pada pengaruh subjek (pelaku, subjek, agen) yang bertindak penuh makna(Nashir, 2012) (Nashir, 2012).

Konsep atau teori strukturasi dari Giddens ingin membalik dua paradigma besar yang selama ini dominan dalam sosiologi. Pertama, paradigma stukturalisme Durkheimian dan struktural-fungsional Parsonian yang lebih menekankan pada pengaruh dominan struktur terhadap pelaku dalam relasi yang bersifat dualisme. Kedua, paradigma tindakan sosial Weberian yang menggambarkan dualisme atau pengaruh dominan pelaku (aktor, agen) sebagai subjek yang bertindak yang sarat makna *(the subjective meaning)* sebagai kritik terhadap dualisme struktural. Strukturasi Giddens mencoba menawarkan eklektik atau bergerak di antara dualisme strukturalisme dan tindakan sosial para teoritisasi besar sosiolog tersebut, dengan menampilkan alternatif relasi

dualitas (timbal-balik) antara agen dan struktur dalam bentuk agensi dan praktik sosial.

Konsep dan teori Giddens tentang strukturasi memberikan pilihan paradigmatik baru bahwa tidak mesti strukturlah atau sebaliknya subjeklah yang dominan dalam praktik kehidupan sosial manusia atau masyarakat itu. Kehidupan masyarakat yang perwujudannya dapat dilihat dalam berbagai praktik sosial merupakan relasi saling timbal-balik atau dualitas antara struktur dan pelaku (agensi) dalam fakta sosial yang objektif. Namun, sebagaicacatan kritis, tentu kehidupan sosial manusia dalam masyarakat tentu tidak selamanya harmonis sebagaimana pandangan strukturasi Giddens sebab tidak jarang terjadi dominasi strukur terhadap aktor atau sebaliknya sehingga dualisme relasi struktur dan agensi tentu juga bersifat dinamis. Kehidupan masyarakat dalam berbagai lingkungan kebudayaan dan keadaan yang dikerangka oleh ruang dan waktu yang beragam tentu bersifat beragam atau majemuk pula perwujudannya baik dalam bentuk praktik sosial atau tindakan sosial maupun dalam sistem sosial secara keseluruhan.

Teori strukturasi Antony Giddens peneliti gunakan dalam melihat dan menganalisis praktek sosial yang dilakukan oleh para agen, dalam hal ini adalah individu dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Mataram di Kota Kediri dalam membentuk orientasi politik dalam kehidupannya, utamanya terkait dengan pemilu dan pilkada. Demikian pula bagaimana peran struktur sebagai bagian tak terpisahkan dalam membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat. Kedua-duanya, baik agen maupun struktur merupakan dua hal yang saling mempengaruhi atau bersifat dealektis.

Teori Pilihan Rasional

Asumsi yang mendasari dari teori iniadalah bahwa manusia adalah memilki otonomi dan kehendak bebas. Kehendak yang otonom ini lebih lanjut karena didorong oleh adanya pertimbangan-pertimbangan dan preferensi yang bersifat rasional. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Friedman dan Hecter yang merupakan penemu dari teori ini dipengaruhi oleh pandangan Weber yang menkankan manusia sebagai agen yang memiliki kehendak untuk mengubah struktur yang disebutnya sebagai tindakan sosial. Dalam perkembangannya paradigma Weberian ini terus dikembangkan oleh para generasi setelahnya sehingga melahirkan paradigma definisi sosial(Ritzer, 2007) (Ritzer, 2007).

Seanjutnya inti dari teori pilihan rasional ini adalah bahwa setiap orang yang dalam menentukan tindakan sosialnya tidak hanya bersifat rasional tetapi diharapkan bisa mendapatkan manfaat lebih dari apa yang sudah dilakukannya. Selanjutnya, tindakan dapat disebut rasional apabila didukung berdasarkan preferensi yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan preferensi yang dimilkinya tentu tindakan yang diambil merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi dan mengopimalkan kebutuhan berdasarkan nilai manfaat yang didapatkannya.

Teori ini juga disebut teori tindakan rasional, yang didasarkan pada asumsi bahwa individu memilih tindakan yang paling sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Teori pilihan rasional digunakan sebagai model dalam pengambilan keputusan indovidu, terutama awalnya dalam konteks ekonomi mikro, yang membantu para ekonom lebih

memahami perilaku masyarakat dalam hal tindakan individu seperti yang dijelaskan melalui rasionalitas, di mana pilihan-pilihan itu konsisten karena dibuat sesuai dengan pilihan pribadinya.

Meskipun dalam perkembangannya teori ini tidak hanya digunakan di bidang ekonomi, digunakan juga oleh para pakar ilmu sosial untuk melihat lebih jauh tentang tindakan masyarakat melalui pendekatan individual dalam bidang sosial dan politik. Beberapa survey dan penelitian terakhir mengenai perilaku pemilih, motivasi dan alasan pemilih seorang kandidat dan partai politik banyak menggunakan teori karya Coleman ini.

Terdapat dua unsur utama yang terdapat dalam teori Coleman ini, yaitu aktor dan sumber daya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. Menurut Coleman, sosiologi seharusnya memusatkan perhatiannya kepada sistem sosial. Akan tetapi, fenomena yang makro tersebut harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri yaitu faktor individual. Dengan alasan tersebut Coleman menjelaskan secara rinci interaksi antar aktor dan sumberdaya menunju ke tingkat sistem sosial(Wirawan, 2013) (Wirawan, 2013).

Lebih lanjut kaitannya dengan aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki maksud dan tujuan. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakan yang dituju pada upaya mencapai tujuan itu. Aktor juga dipandang memiliki pilihan yang didasarkan pada nilai atau keperluan tertentu. Teori pilihan rasional ini tidak memperdulikan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang terpenting, tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

telah sesuai dengan tingkatan pilihan yang telah ditentukan oleh aktor.

Dalam perkembangannya teori pilihan rasional telah muncul sebagai salah satu subbidang yang paling aktif, berpengaruh, dan sering digunakan dalam kajian disiplin ilmu politik. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa perilaku politik individu dapat dijelaskan melalui penerapan asumsi yang dianggap "netral nilai" yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri dengan cara memaksimalkan dari tujuan yang dimilikinya. Argumen utamanya bahwa manusia yang cenderung mendahulukan kepentingan pribadinya yang diwujudkan dalam seluruh dimensi kehidupannya. Teori ini mendukung dan melanggengkan kehidupan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penting teori demokrasi normatif. Dalam penerapannya tidak jarang menawarkan penjelasan yang tidak ada kaitannya tentang konsep kewarganegaraan yang diharapkan.

Sebagaimana dalam hasil penelitian ini bahwa sikap dan perilaku masyarakat dalam menilai seorang calon atau kandidat didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. Dikatakan berdasarkan pengetahuan masyarakat, bahwa masyarakat kecil yang berpendidikan rendah memahami pemilu atau pilkada adalah sebatas mencoblos nama dan tanda gambar partai. Ketika pengetahuannya demikian maka melakukan tindakan memilih dengan datang ke tempat pemungutan suara dan nyoblosnya dengan benar sesuai aturan ditambah dengan pengetahuannya terhadap calon adalah suatu aktivitas dianggap sudah cukup dan selesai. Baginya memilih adalah konsekuensi dari proses interaksinya

dengan calon yang didasari pertimbangan dan manfaat tertentu. Dengan mendasarkan diri pada manfat yang akan diterimanya pemilih akan melakukan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan calon atau tim sukses. Kompensasi tersebut bisa berupa uang ataupun barang sesuai dengan tujuan dari pemilih tersebut.

Sedangkan, pertimbangan mengenai untung ruginya dalam memilih suatu kandidat selalu terkait dengan kondisi sosial di mana individu tersebut tinggal. Dalam masyarakat kecil dasar perimbangan yang paling dominan dalam menyampaikan hak politiknya adalah interaksi dengan sesama teman atau saudara yang tidak jauh berbeda dengan kehidupannya. Misalnya jika yang bersangkutan adalah pedagang kaki lima, aspirasi dan sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan pedagang yang lain, yang dalam kesehariannya mereka melakukan aktivitas bersama dalam pekerjaannya.

Lebih lanjut tentang pengembangan teori pilihan rasional, James Scoot menyusun beberapa klausul sebagai pedoman dalam penelitian dan kajian-kajian sosial.

1) Individu memiliki kemampuan dalam menghadirkan keputusan, sikap dan tindakannya yang berdampak pada fenomena sosial yang sedang berkembang.
2) Alasan-alasan dalam melakukan penyikapan dan tindakannya merupakan hal mendasar yang dimiliki oleh individu tersebut.
3) Individu menyadari bahwa alasan-alasan yang dibuat sebagai konsekuensi dari tindakan yang telah dipahami sebelumnya.

4) Sehingga aktorpun sebenarnya juga menadari akibat dari tindakan-tindakan tersebut yang terkait dengan konsekuensi dirinya.
5) Dalam menentkan berbagai pilihan, individu akan memilih pilihan yang paling menguntungkan dirinya dengan cara memaksimalkan manfaat yang akan diterimanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori pilihan rasional digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara masyarakat Mataramandalam memutuskan pilihan berdasarkan kecenderungan pribadinya. Dalam melakukan tindakannya, aktor terlebih dahulu melakukan seleksi dari pilihan-pilihan yang tersedia atau yang memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek seperti apa yang menjadi tujuan dan prioritasnya, sumberdaya yang dimiliki dan juga kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukannya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori pilihan rasional digunakan untuk mengetahui cara yang digunakan oleh masyarakat Mataraman di Kota Kediri dalam menentukan pilihannya, serta bagaimana mereka menyeleksi dari berbagai alternatif pilihan politik yang tersedia. Selanjutnya, dengan teori ini dapat diungkap tujuan serta prioritas yang telah mereka tetapkan dalam berpolitik, utamanya dalam pemilu maupun pilkada. Dalam melakukan pilihan atas tindakannya tersebut, sudah tentu masyarakat memilki pengetahuan dan mampu memberikan penjelasan secara logis tentang karakteristik dan asal dari kecenderungan-kecenderungan tersebut.

Definisi Konseptua

Definisi konseptual adalah sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Definisi konseptual juga dapat diartikan suatu penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut, bersifat konstitutif (merupakan definisi yang disepakati oleh banyak pihak dan telah dibakukan di kamus bahasa), formal dan mempunyai pengertian yang abstrak. Secara sederhana, definisi konstitutif/ konseptual ini adalah mendefinisikan suatu konsep dengan konstruk yang lainnya.Berdasarkan pengertian di atas, definisi konseptual dalam penelitian ini meliputi

Perubahan Orientasi Politik Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, pergerakan,berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. memberikan batasan bahwa: "Perubahan secara besar maupun secara kecil atau perubahan secara cepat atau lambat itu sesungguhnya adalah suatudinamika, artinya suatu kenyataan yang berhubungan dengan perubahan keadaan".

Sedangkan, yang dimaksud perubahan adalah posisi yang berubah dari posisi sebelumnya. Perubahan orientasi cara pandang masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan terhadap berbagai hal yang terkait dengan kehidupan politik. Orientasi politik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam lagi tentang orientasi politik masyarakat dalam kaitannya dengan momentum pesta demokrasi rakyat, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah langsung yang ada di Kota Kediri.

Dalam penelitian ini sengaja peneliti menggunakan konsep perubahan sebab dalam kata "perubahan" mengandung pengertian yang berbeda dengan kondisi atau situasi sebelumnya. Konsep perubahan sosial menunjuk pada suatu proses dalam sistem sosial yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan atau diamati dalam kurun waktu tertentu. Perubahan-perubahan yang dapat diukur terkait dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, sedangkan perubahan yang dapat diamati cenderung kepada hal-hal yang bersifat kualitatif(Kanto, 2011, hal. 4) (Kanto, 2011, hal. 4).

Sedangkan, kata orientasi itu sendiri berarti suatu peninjauan untuk menentukan sikap (arah,tempat,dsb) yang tepat dan benar, atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan untuk bersikap. Sedangkan, pengertian politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tata negara dan ilmu tentang kekuasaan. Akan tetapi, dalam lingkup yang lebih khusus politik ialah interaksi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang

mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Adapun pengertian dari orientasi politik adalah suatu cara pandang dari golongan masyarakat dalam pranata sosial dan suatu struktur masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas politik. Munculnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang datang dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola untuk dapat dijadikan referensi dalam memandang suatu objek politik sehingga orientasi politik itulah yang kemudian memengaruhi terbentuknya tatanan masyarakat dimana interaksi-interaksi yang mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Juga dapat di simpulkan bahwa orientasi politik itulah yang pada akhirnya memengaruhi perilaku pemilih untuk menentukan keputusan memilih atau tidak memilih seorang kandidat anggota dewan legislatif di negeri ini (Alfian, 1991)(Alfian, 1991).

Orientasi politik merupakan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara –meliputi penyelenggaraan administrasi publik, sistem politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan— yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Orientasi politik dapat juga diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Orientasi politik merupakan perilaku dalam individu, sedangkan perilaku luarnya adalah berupa kegiatan, hal ini perlu ditegaskan karena Orientasi individu tidak selalu *termanifestasikan* dalam perilakunya, orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk

sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik (Surbakti, 2010).

Berdasarkan pendekatan perilaku yang dikemukakan Budiharjo bahwa proses politik yang terjadi pada suatu negara akan dapat diketahui apabila fokus pada rakyat sebagai pelaku politik dibandingkan dengan membahas lembaga-lembaga politik formalnya. Perilaku politik hanyalah sebagian dari perilaku sosial yang berhubungan erat dengan pola perilaku pemberian suara terhadap Rancangan Undang-Undang, giat tidaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat *(DPR)* memelopori kegiatan untuk Rancangan Undang-Undang *(RUU)*, bagaimana interaksinya dengan teman-teman sejawat, kegiatan *lobbying*, juga terkait dengan orientasinya terhadap kegiatan-kegiatan seperti sikap, persepsi, motivasi, evaluasi, tuntutan, harapan-harapan, dan sebagainya.

Suatu sikap dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan psikologis untuk melihat objek atau perilaku tertentu dengan disertai perasaan suka dan tidak suka terhadapnya. Dengan demikian sikap juga dapat diartikan sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang khusus terhadap objek atau perilaku, sementara keyakinan lebih bersifat umum, berkaitan dengan pandangan dunia yang lebih luas, dan cenderung lebih stabil. Oleh karena itu, sikap seseorang terhadap sesuatu sebenarnya merupakan cerminan dari cara orang tersebut berpikir dan merasakannya. Dalam konteks lebih lanjut sebuah sikap juga dapat terkait dengan cara berperilaku. Dengan perilaku tersebut orang lain dapat mengamati bagaimana sikap seseorang tersebut terhadap peristiwa atau perilaku tertentu.

Selain itu, sikap dapat membantu seseorang dalam mengklasifikasikan tindakan terhadap objek dan lingkungan

yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, dengan klasifikasi tersebut seseorang memiliki kemampun untuk merespons terhadap objek tersebut sesesuai dengan kecenderungan yang sudah ada sebelumnya.

Secara garis besar, sikap senantiasa tidak konstan, banyak faktor yang melatarbelakangi seorang tokoh politik maupun masyarakat umum menentukan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting bagi dirinya, media massa, partai politik dan faktor emosional. Pemikiran yang membentuk sikap politik dan perilaku kolektif masyarakat atau bangsa terhadap suatu sistem politik yang telah bertahan lama akhirnya membentuk semacam pola-pola politik masyarakat hingga menghasilkan keputusan politik atas atas dasar sikap-sikap tersebut. Hal inilah yang kemudian membentuk yang namanya budaya politik (Setiadi & Kolip, 2013: 95).

Diera keterbukaan sistem politik, telah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi warga negara yang aktif seluas-luasnya bagi kepentingan mereka sendiri yaitu sebagai rakyat atau warga negara. Namun, dalam menghadapi kenyataan politik, banyak janji dari partai politik maupun kandidat sebagai tantangan bagi masyarakat sendiri untuk mensikapinya. Paling tidak setiap orang atau kelompok ditantang untuk melakukan evaluasi yang cukup besar cakupannya terhadap objek politik (seperti kandidat, partai, dan platform) dan kemudian menggabungkan preferensi ini dengan cara yang memungkinkan mereka untuk dipetakan ke dalam keputusan pemungutan suara sederhana.

Budaya Politik

Budaya politik mengacu pada nilai dan perilaku politik individu maupun kelompok. Sebagai konsep analisis terhadap nilai dan perilaku, sudah lama analisis politik ini diberlakukan. Dimulai dari Aristoteles yang menulis tentang pemikiran yang dapat menginspirasi perubahan politik atau stabilitas politik. Sedangkan, Machiavelli menekankan peran dari nilai-nilai dan perasaan identitas dan komitmen.

Dalam perkembangan selanjutnya, studi tentang budaya politik telah secara unik dipengaruhi oleh pendekatan perilaku yang dicetuskan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Batasan kajian budaya politik semakin dipersempit dan identik dengan sikap terhadap pemerintah sebagai agen politik, untuk diukur secara kuatitatif dan kemudian dibandingkan dengan sistem politik yang berlaku di negara lain. Namun setelah itu, kajian ini berkembang dalam perspektif yang lebih luas bahwa budaya politik sebagai proses di mana makna politik dibangun dalam interaksi sosial di mana antara sikap individu warga negara, dengan bahasa dan simbol-simbol sistem yang ada di dalamnya.

Teknik analisis budaya politik dimulai mulai dari pengumpulan data tentang pendapat, sikap, dan nilai politik warga negara yang dilakukan melalui wawancara terstruktur, dengan mengambil sampel perwakilan warga negara. Selanjutnya juga muncul kajian dengan menggunakan pendekatan interpretatif dan metode kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut bagaimana sebuah identitas politik dihasilkan, atau bagaimana simbol dan retorika dapat menghasilkan sebuah konsensus atau sebaliknya menimbulkan konflik.

Kajian tentang budaya politik saat ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada pada saat kelahirannya di tahun 1950-an. yang mencakup sikap individu terhadap pemerintah, nilai dan kepercayaan sosiokultural, serta ekspresi material dan non-materi seperti bendera, himne, teks lisan dan tertulis, film, hanya untuk menyebutkan beberapa contoh.

Meskipun perbedaan dalam epistemologis tetap berlangsung, antara kajian yang berpusat pada pendekatan individualistik dan pendekatan sistemik, fenomena tersebut justru telah melahirkan kajian-kajian interdisipliner dari berbagai disiplin keilmuan. Demikian pula telah banyak dilakukan kerjasama penelitian dan studi ilmiah antar negara dengan membangun jaringan penelitian telah membawa prospek dan perkembangan studi budaya politik ke depan semakin menjanjikan.

Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis dan sistematis dengan membangun integrasi keilmuan dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Integrasi antara ilmu pengetahuan dan humaniora disatu sisi dilakukan koneksi dan tukar pengalaman antara yang terjadi di Barat dengan di negara-negara lain di dunia. Dengan begitu diharapkan hasilnya mampu merefleksikan kondisi dan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang lebih luas.

Pada umumnya, pengertian atau definisi budaya politik yang dijabarkan oleh para ahli politik hampir serupa. Gabriel Almond dan Sidney Verba misalnya menganggap budaya politik sebagai sikap dan orientasi warga negara terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, termasuk sikap kepada peran warga negara di dalam sistem itu. Sementara menurut

Mochtar Mas'oed dan Colin MacAndrew menitikberatkan pada sikap masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan kata lain, budaya politik pada dasarnya adalah sikap politik masyarakat terhadap kehidupan politiknya sendiri(A.Almond & Verba, 1990) (A.Almond & Verba, 1990).

Membahas budaya politik, tidak akan lepas mengenai partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu sistem politik, akan lebih memungkinkan setiap kepentingan dan aspirasi dapat diwujudkan dalam setiap kebijakan bagi siapaun yang memerintah atau berkuasa. Demikian pula dengan keberadaan pemerintah, maka seorang pemimpin harus menjadi alat agregasi kepentingan masyarakatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari makna kedaulatan rakyat yang menjadi tujuan demokrasi. Berbeda kepemimpinan yang bersifat meliteeristik yang cenderung meminimalkan dan melarang adanya partisipasi dan keterlibatan publik. Di sinilah peran partai politik diuji dan ditantang untuk mampu melakukan fasilitasi kepentingan publik di satu sisi dengan penguatan sistem negara di sisi lainnya.

Budaya politik selain mempelajari perilaku politik individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau negara, juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana suatu partispasi atau keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik dapat diwujudkan. Dengan partisipasi suatu sistem politik dan pemerintahan dapat diukur seberapa jauh tingkat pegakuan warga negara terhadap para pemimpin baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Partisipasi politik menurut Samuel Huntington adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan oleh pemerintah. Beberapa aspek dari definisi tersebut antara lain mencakup kegiatan-kegiatan yang melibatkan sikap-sikap di dalamnya. Selain itu, kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-perorang sebagai warga negara yang berada dengan orang-orang profesional di bidang politik. Sedangkan, kegiatan-keguatan tersebut ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah(Huntington & Nelson, 1994) (Huntington & Nelson, 1994).

Dari definisi yang dirumuskan Hungtinton partisipasi masyarakat dalam poliik dapat terjadi dalam dua level. Level pertama adalah partisipasi yang didasari adanya kesadaran tentang posisi dan haknya sebagai warga negara untuk terlibat dalam proses pegambilan keputusan publik. Oleh karena itu, tindakan partisipasi ini termasuk tindakan yang sukarela tanpa tekanan, tetapi murni inisiatif masyarakat sendiri. Level kedua, bahwa partisipasi dapat diciptakan melalui cara-cara tertentu yang menyebabkan setiap warga nengara untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Cara-cara yang dignakan bisa melalui pernyataan dan tindakan yang bersifat persuasif hingga cara-cara yang bersifat propaganda dan kekuatan fisik.

Lepas dari rumusan sebagaimana di atas, partisipasi sangat menentukan bagi proses pengabilan keputusan pemerintahan demokrasi. Dengan partisipasi itulah selain aspirasi publik dapat disalurkan, legitimasi terhadap adanya pemerintahan juga menjadi lebih penting. Tidak hanya karena merupakan cermin dari makna kedaulata rakyat, tetapi dapat menciptakan kerja eksekutif lebih efektif dalam melayani kebutuhan masyarakatnya.

Masyarakat Mataraman

Masyarakat Mataraman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebutan untuk kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat yang menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengah yang dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Meskipun menggunakan istilah Mataraman, masyarakat Jawa yang ada di sebelah barat selatan provinsi Jawa Timur ini dalam hal etika, budaya dan bahasa masih banyak persamaan dengan masyarakat Jawa yang tinggal di Jawa Tengah utamanya di Yogyakarta dan Surakarta. Namun, dalam perilaku keagamaan dan orientasi politiknya ada perbedaan. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh stuktur kekuasaan Kerajaan Mataram pada masa lampau juga dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang berbeda antara yang di Jawa Tengah dengan yang ada di Jawa Timur.

Untuk memudahkan definisi tentang masyarakat Mataraman, peneliti menggunakan definisi dan klasifikasi yang dilakukan oleh Ayu Sutarto (2010) bahwa di Jawa Timur terdapat lima wilayah kebudayaan yang terdiri atas:

1) Wilayah budaya Arek, terdapat diwilayah Jawa Timur bagian tengah mulai utara hingga selatan. Wilyah ini meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Malang
2) Wilayah budaya Mataraman, terdapat di Jawa Timur bagian barat. Wilayah Mataraman ini meliputi Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban.

3) Wilayah budaya Madura yang terdapat di Pulau Madura. Adapun yang termasuk dalam budaya Madura meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
4) Wilayah budaya Pandalungan, perpaduan antara budaya Jawa dan Madura. Terdapat di Jawa Timur bagian timur. Wilayah tersebut meliputiPasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, dan Jember
5) Wilayah budaya Osing, yaitu peraduan dari budaya Jawa, Madura dan Bali. Area kebudayaan ini berada di ujung timur pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Banyuwangi.

Wilayah Mataraman dapat dibedakan lagi ke dalam subwilayah kebudayaan yang lebih kecil. Menurut budayawan Dwi Cahyono (2011) Mataraman dibagi lagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu Mataraman Kulon (Barat),Mataraman Wetan (Timur), dan Mataraman Pesisir. Pembagian ini didasarkan pada jejak sejarah dan budaya lokal yang berkembang di dalamnya. Salah satu hal yang menjadi ciri khas yang paling mudah untuk membedakan di antara ketiganya adalah dengan bahasa yang digunakan.

Dari segi kedekatan budayanya dengan Jawa Tengah, Mataram Kulon lebih kuat. Bahasa sehari-hari yang digunakan lebih halus dibandingkan Mataram Wetan. Wilayahnya merupakan bekas Keresidenan Madiun. Sedangkan, Mataram Timur meliputi daerah karesidenan Kediri. Wilayah ini karena berbatasan dengan subbudaya arek, bahasa yang digunakan cenderung lebih cair, tidak sebagaimana di Mataraman barat yang masih terjaga sesuai dengan asalnya di Jawa Tengah. Sedangkan, wilayah mataram pesisir adalah wilayah masyarakat Jawa yang tinggal di Karesidenan Bojonegoro.

Karena kondisi dan letak alamnya yang dekat dengan pantai, banyak memberikan warna budaya Jawa di daerah ini lebih kasar dan struktur sosial masyarakatnya juga tidak lagi bersifat hierarkis. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal tertentu sebagai sifat orang Jawa, ketiga wilayah Mataraman ini masih memegang teguh budaya Jawa, unggah ungguh, senang bekerjasama dan mengedepankan sikap hormat kepada orang yang lebih tua atau secara sosial ekonomi berkedudukan lebih tinggi.

Alur Pemikiran

Berdasarkan fenomena yang tergambar dalam latar belakang serta rumusan masalah dalam penelitian ini, disusunlah suatu alur pemikiran. Adapun maksud disusunnya alur pemikirantersebut adalah sebagaipengantar untuk memahami fenomena yang diteliti dan tentu saja yang dimaksud di dalamnya merupakan suatu acuan yang tidak mutlak dipedomani dalam memasuki dunia empiris yang sesungguhnya yang jauh lebih kaya dan dinamis dari sekadar suatu penjelasan teoritis. Namun demikian, sebagai suatu alur pemikiran, kerangka konseptual atau kerangka pemikira, ia tetap diperlukan sebagai unsur penting dalam kegiatan ilmiah.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini. Setidaknya dengan alur pemikiran tersebut akan diperoleh gambaran kasar dan awal tentang karakteristik umum dari fenomena yang hendak dikaji.

Setelah rezim Orde Baru tumbang digantikan oleh Orde Reformasi, sistem politik berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Partisipasi masyarakat tumbuh dan pergantian

sistem ketatanegaraan berubah menjadi lebih demokratis. Salah satu perubahan yang tampak setelah orde reformasi adalah sistem politik dan sistem pemilihan umum. Partai politik banyak berdiri menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Hingga penelitian ini dilaksanakan sudah empat kali diselenggarakan pemilu. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1999, kemudian pemilu tahun 2004, pemilu ketiga dilaksanakan tahun 2009 dan pemilu keempat pada tahun 2014. Demikian pula untuk pengisian jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak lagi dilakukan melalui pemilihan anggota DPRD, melainkan melalui pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat. Pilkada (pilihan kepala daerah) pertama kali dilaksanakan padatahun 2005. Sejak tahun tersebut, tiap tahunnya dilaksanakan pilkada di Indonesia. Baru pada tahun 2015 dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Orientasi politik masyarakat dalam pemilu juga mengalami perubahan, dari politik aliran, yakni memilih karena latar belakang ideologi dan budaya masyarakat sebagaimana terjadi pada pemilu 1999 dan pemilu 2004. Namun, berbeda dengan pemilu 2009 dan pemilu 2014 bahwa sejak pemilu tersebut telah terjadi perubahan orientasi dan polarisasi pemilih berdasarkan faktor-faktor non ideologis. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang langsung dipilih oleh rakyat, yang dalam waktu pelaksanaannya mendahului penyelengaraan pemilu legislatif.

Berdasarkan pemikiran dan fakta empiris tersebut, penelitian ini berupaya untuk melihat perubahan orientasi politik masyarakat dari dua sisi, yakni dari aspek sistem dan

struktur, tetapi juga dari sisi tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini juga hendak melihat bagaimana keduanya (stuktur dan agen) berkontribusi terhadap perubahan orientasi politik masyarakat itu sendiri.

Adapun yang menjadi fokus studi ini adalah budaya politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri dengan menitikberatkan pada aspek orientasi dan sikap pilitik beserta dinamika perubahan yang terjadi di dalamnya. Sementara itu, di sisi lain, budaya politik masyarakat terus berubah seiring dengan perkembangan sistem politik itu sendiri melaui berbagai aturan perundang-undangan yangdari setiap pemilu mengalami perubahan pula.

Sedangkan, untuk mengetahui bagaimana perkembangan budaya politik masyarakat Mataraman, peneliti perlu mendeskripsikan budaya politik tersebut mulai era baru hingga era reformasi. Dengan mengetahui perkembangan budaya politik masyarakat dari masa ke masa akan diketahui hubungan penguasa dengan rakyat di wilayah Mataraman ini. Dari perkembangan tersebut selanjutnya dapat diamati dari orientasi dan pola hubungan penguasa dengan rakyat. Cara-cara apa saja yang telah digunakan penguasa dalam mengelola kekuasaan kepada rakyatnya, elemen-elemen sosial apa yang digerakkan dan bagaimana prosesnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana tindakan individu dan masyarakat dalam menyikapi sistem politik yang berlangsung, penting untuk mengetahui lebih jauh tentang rasionalitas tindakan mereka dalam bentuk pilihan-pilihan politiknya. Dalam melakukan tindakan sosial tersebut tentu ada rasionalisasi yang bisa dijelaskan di balik tindakan tersebut. Dalam hal ini pilihan-pilihan politik masyarakat

Mataraman terhadap sistem politik yang berlangsung akan didapatkan argumentasi yang mampu menjelaskan secara komprehensip mengapa hal tersebut dilakukan.

Pandangan, sikap dan tindakan individu atau kelompok terhadap kehidupan politik tersebut akan berimplikasi pada pilihan-pilihan yang dianggap rasional dalam menghadapi meomentum pemilu maupun pilkada. Pada momentum politik lima tahunan itulah masyarakat memberikan evaluasi dan penilaian, atau sebaliknya memiliki alasan tersendiri dalam menentukan pilihan politiknya.

Berdasarkan asumsi dasar penelitian dan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka alur pemikiran yang digunakan untuk menejelaskan fenomena sosial yang terjadi di lapangan dapat dilihat pada skema berikut ini.

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian

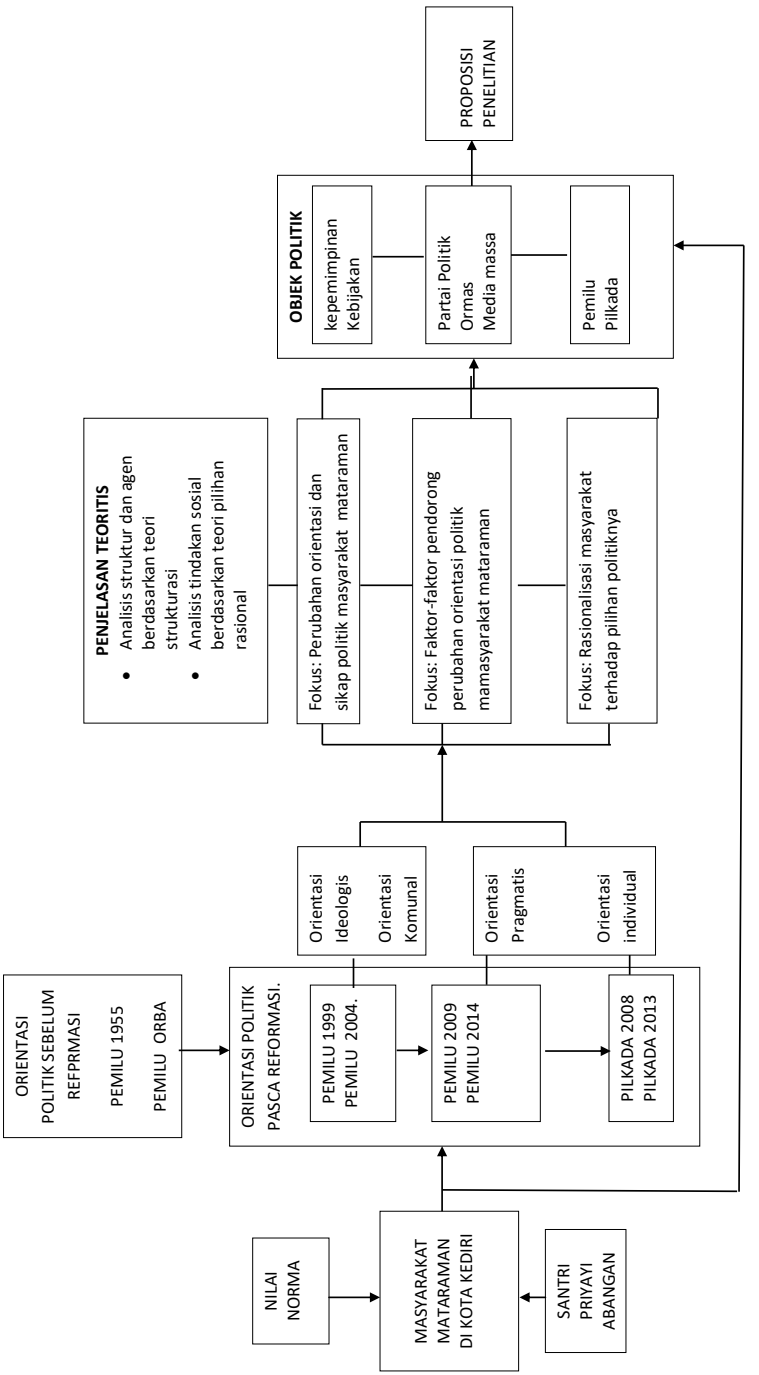

BAB III MEMBACA GEOGRAFIS OBJEK PENELITIAN

Tinjauan Geografis dan Kependuduka

Wilayah Kota Kediri dengan luas 63,40 km2 terbelah menjadi dua bagian, oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Dengan adanya sungai yang berada di tengah kota tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi desain tata kota serta karakter masyarakat yang ada di dua wilayah tersebut(BPS Kota Kediri, 2018).

Kediri pada awalnya merupakan sebuah kerajaan yang sudah cukup tua, sebelum lahirnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram. Adapun ibukota kerajaan Kediri adalah Daha, yang sekarang diabadikan sebagai nama jalan utama di Kota Kediri. Jalan Doho yang sekarang adalah merupakan jantung dan pusat ekonomi dan perbelanjaan di Kediri dan sekitarnya. Di sepanjang jalan ini banyak berdiri pertokoan, pasar dan hotel berbintang.

Pada zaman sebelum kemerdekaan, Kediri juga merupakan ibu kota karesidenan yang wilayahnya meliputi Nganjuk, Tulungagung, Blitar,Trenggalek dan Kediri itu sendiri. Salah satu bukti peninggalan sejarah yang hingga saat ini masih digunakan adalah stasiun kereta api sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan kota-kota disekitarnya hingga

ke Surabaya dan Jakarta. Adapun letak stasiun kereta api Kediri ini juga disepanjang jalan Doho.

Sebagaimana model kota-kota lama di Jawa pada umumnya, struktur dan tata letak kota Kediri memiliki unsur-unsur seperti alun-alun, pendopo pemerintah, masjid agung, pasar dan penjara. Letak bangunan-bangunan tersebut saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Wilayah di mana bangunan tersebut berada di daerah yang disebut kauman. Di Kediri daerah yang disebut *kauman* adalah di sekitar masjid agung dan alun-alun, yang sekarang masuk wilayah administrasi Kelurahan Kampungdalem.

Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto. Wilayah barat ini sebagian besarnya adalah merupakan lahan pertanian. Namun, wilayah yang luasnya 24,6 km2 ini, yang sebagian besar dipakai untuk pemukiman penduduk. Jumlah penduduk di kecamatan Mojoroto adalah paling banyak jumlahnya dibandingkan dua kecamatan lainnya. Selain itu, wilayah barat ini juga banyak berdiri gedung sekolah dan perguruan tinggi serta pondok pesantren. Di wilayah ini banyak berdiri pondok pesantren yang sudah cukup tua umurnya. Salah satunya adalah pondok pesantren Lirboyo dan pondok pesantren Salafiah Bandarkidul. Singkatnya, wilayah barat sungai, selain merupakan lahan pertanian yang cukup luas, jumlah penduduknya terbanyak juga merupakan pusat pendidikan yang ada di Kota Kediri.

Sementara di wilayah timur sungai masuk dalam wilayah Kecamatan Kota yang luasnya 14,9 km2. Di wilayah Kecamatan Kota ini banyak berdiri pusat-pusat ekonomi dan perbelanjaan seperti pasar tradisional, pertokoan sepanjang

jalan doho, supermarket dan gedung perhotelan. Kantor pemerintahan atau balai kota dan kantor DPRD juga berada di wilayah ini. Pemukiman pendududuk di Kecamatan Kota terlihat paling padat dibandingkan dua kecamatan lainnya, sedangkan wiayahnya paling sempit. Maka tak heran jumlah kelurahannyapun paling banyak dibandingkan dengan dua kecamatan yang lain.

Selanjutnya sebelah timur Kecamatan Kota merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Pesantren yang luas wilayahnya 23,9 km2. Kecamatan yang letaknya paling timur Kota Kediri ini bisa dikatakan merupakan wilayah yang sebagian besarnya masih bernuansa pedesaan. Di kecamatan ini berdiri pabrik gula Pesantren Baru, yang sejak zaman kolonial merupakan pusat pengumpulan hasil pertanian berupa tebu dari wilayah timur Kediri raya sehingga bisa digambarkan bahwa sebagian wilayah ini merupakan lahan pertanian produktif. Banyak komoditas tanaman perkebunan dan persawahan dibudidayakan oleh penduduk sebagai sumber mata pencaharian utama.

Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,40 km² atau (6.340 ha) dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. Terletak di daerah yang dilalui Sungai Brantas dan di antara sebuah lembah di kaki gunung berapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter. Kota berpenduduk 312.000 (2012) jiwa ini berjarak ±130 km dari Surabaya ibu kota provinsi Jawa Timur terletak antara 07°45›-07°55›LS dan 111°05›-112°3› BT.Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40% (Pemkot Kediri: 2018) (BPS Kota Kediri, 2018).

Gambar 2 Peta Kota Kediri

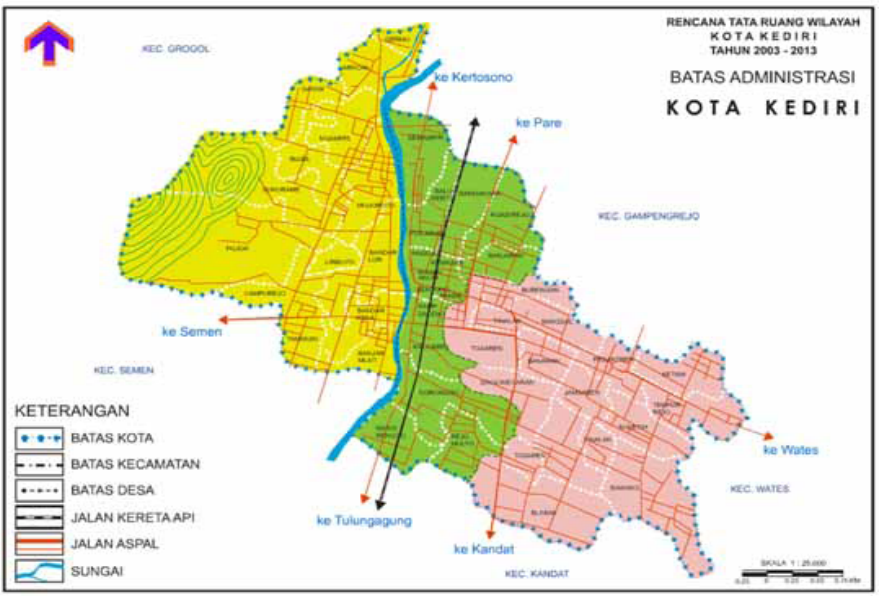

Sumber: Pemkot Kediri (2016)

Sedangkan, dalam hal administrasi pemerintahan, Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan yang masing-masing terdiri dari banyak kelurahan. Jika dilihat dari jumlah kelurahannya, di Kota Kediri terdapat 46 kelurahan yang dulunya merupakan desa, namun sejak dikeluarkannya Perda no 11 tahun 2002 statusnya menjadi kelurahan. Maka sejak tahun 2002 di Kota Kediri tidak ada lagi pemilihan kepala desa (Pilkades) karena jabatan lurah diangkat langsung oleh walikota. Adapun sebaran kelurahan di setiap kecamatan antara lain, Kecamatan Mojoroto letaknya di sebelah barat terdiri atas 14 kelurahan, sedangkan bagian timur sungai merupakan wilayah Kecamatan Kota yang membawahi 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren yang letaknya paling timur terdapat 15 kelurahan.

Selanjutnya, Posisi Kota Kediri sebagai pintu masuk arus informasi, perdagangan dan industri bagi daerah-daerah lain di sekitarnya, seperti di Tulungagung, Blitar dan Trenggalek. Tercatat di dalamnya banyak berdiri pusat-pusat ekonomi, dan perbelanjaan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh dua hal yang pertama adalah faktor sejarah, sejak masa pemerintahan Belanda, Kediri merupakan pusat ibukota karesidenan. Adapun yang menjadi wilayah Karesidenan Kediri meliputi, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dan Trenggalek.

Sedangkan faktor kedua adalah geografis, Kediri merupakan jalur yang mudah dicapai dari arah luar baik melalui jalur darat seperti sekarang maupun jalur transportasi air, yang telah terjadi sejak dahulu. Hal ini disebabkan Kediri dilewati Sungai Brantas yang membelah Kota Kediri menjadi dua bagian. Bagian barat yang merupakan daerah pegunungan dan relatif gersang untuk pertanian. Oleh pemerintah daerah kulon kali ini menjadi sentral pendidikan dan pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren telah berdiri lama di wilayah barat ini antara lain, Pondok Lirboyo, Pondok Al Ishlah Bandarkidul, Pondok Maunah Sari Bandarkidul, Pondok Dunglo Bandarlor, Pondok Almahrusyiah Ngampel, dan Pondok Al Hodiriyah Banjarmlati. Sedangkan sekolah-sekolah menengah negeri juga banyak terdapat di kulon kali baik yang sekolah menengah umum maupun kejuruan.

Sedangkan wilayah timur kali atau wetan kali merupakan daerah subur dan persawahan. Pusat perekonomian pasar dan mall ada di wilayah ini.Wilayah yang membentah hingga lereng gunung kelud ini banyak terdapat pabrik gula yang berdiri sejak zaman penjajahan Balanda. Tercatat PG Pesantren Baru, PG Mrijtan yang keduanya berda di wilayah Kota Kediri

dan PG Ngadirejo yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Selain sebagai pusat perekonomian, wilayah timur sungai juga merupakan pusat pemerintahan. Baik kantor walikota dan kantor DPRD juga berada di wilayah ini.

Sebagai wilayah yang merupakan pusat perekonomian, di timur sungai Brantas ini juga terdapat 2 pasartradisional. Bahkan pada tahun 2005 pemerintah Kota membangun lagi pusat pasar grosir yang berada di wilayah kelurahan Ngronggo. Dengan begitu, wilayah Kecamatan Kota selain sebagai pusat perekonomian juga merupakan pusat pemerintahan. Sedangkan kecamatan yang letaknya paling timur dan berbatasan dengan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah Kecamatan Pesantren. Wilayah kecamatan pesantren ini dulunya merupakan daerah perkebunan. Salah satu peninggalan masa kolonial yang hingga saat ini masih berdiri megah yakni pabrik gula Pesantren Baru. Daerah sekitar pabrik gula ini, sebagaian besar adalah tanah pertanian subur, yang banyak ditanami tanaman tebu. Masyarakat banyak memanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman yang menjadi bahan dasar gula ini. Oleh karena itu, sebagian besar pencaharian masyarakatnya dari sektor pertanian. Selain di kecamatan Pesantren pabrik gua juga terdapat di Kecamatan Mojoroto yaitu Pabrik Gula Mritjan, yang berada di wilayah kelurahan Mrican.

Dilihat dari jumlah pabrik tebu di wilayah Kota Kediri, yang hingga kini masih beroperasi, mengindikasikan bahwa Kediri merupakan daerah perkebunan yang subur dan menguntungkan secara ekonomi. Hal tersebut disebabkan letak Kediri secara geografis juga sangat menguntungkan. Yang pertama, daerah ini dilewati aliran Sungai Brantas

yang mata airnya berasal dari wilayah Kabupaten Malang kemudian mengalir melewati Blitar, Tulungagung hingga akhirnya masuk ke wilayah Kediri dan membelah kota Kediri menjadi 2 bagian yaitu sisi timur yang meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren dan sisi barat yang merupakan wilayah Kecamatan Mojoroto. Yang kedua, kesuburan tanah Kediri juga ditopang oleh keberadaan gunung berapi yang cukup aktif yakni Gunung Kelud. Lewat letusanya itulah beragam material vulkanik dapat menjadikan lahan pertanian baik sawah dan perkebunan menjadi subur. Belum lagi material berupa pasir hingga saat ini menjadi tambang emas yang menjajikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil. Itulah sebabnya sejak masa kolonial bahkan sejak zaman kerajaan, Kediri telah mampu menjadi daya magnet tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan hingga sekarang utamanya di wilayah eks karesidenan Kediri yang meliputi Trenggalek, Blitar dan Tulungagung.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar terserap dalam bidang perdagangan dan industri yakni mencapai 50,6%. [1]Yakni sebagai pegawai/karyawan atau buruh di perusahaan dan istansi pemerintahan. Sebagian besar dari keberadaan karyawan tersebut adalah buruh di perusahaan swasta. Seperti diketahi, bahwa kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pabrik rokok yang berskala nasional yakni PT. Gudang Garam Tbk. Perusahaan yang berdiri pada tanggal 26 Juni 1958 memang sudah termasuk kategori perusahaan yang sangat kuat secara modal dan sangat lama memiliki berpengalaman dalam bisnis industri

[1] Kediri Dalam Angka Tahun 2017 Badan Statistisik Kota Kediri, 2017

kretek di Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, lima tahun terakhir ini perusahaan yang memiliki karyawan 35.000 lebih ini, telah mengembangkan usahanya dibidang bisnis jasa property dan perhotelan.

Tabel 2 Serapan Tenaga Kerja

No	Industri Pengolahan	Jumlah Serapan Tenaga Kerja		Nilai Produksi (Triliyun Rupiah)
		Jumlah	Persen	
1	Tembakau	36.900	94,83 %	53,83 Triliun
2	Makanan	1.408	3,6 %	131,12 Triliun
3	Jumlah	38,912	100 %	184, 95 Triliun

Sumber : BPS Kota Kediri Dalam Angka

Banyaknya serapan tenaga kerja di sektor perburuhan ini, menjadikan perubahan dalam masyarakat di bidang sosial ekonomi serta budaya. Masyarakat Kediri yang dulunya menggantungkan mata pencahariannya berbasis agraris (rural) yakni sektor pertanian, kini sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya di sektor industri perusahaan sebagai buruh atau karyawan. Akibatnya, dari kondisi tersebut tidak dapat dipungkiri telah menyebabkan arus tenaga kerja dari wilayah pelosok perdesaan berpindah ke pusat kota, karena alasan mata pencahariannya sebagai buruh perusahaan (masyarakat urban)

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah sebanyak 30 orang, terdiri atas 20 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Lembaga legislatif Kota Kediri saat ini adalah hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang dimenangkan oleh Partai Amanat Nasional. Secara organisasi, wakil rakyat saat ini terdiri dari sepuluh partai politik, yaitu Partai Nasdem (1 orang anggota), PKB (4 orang anggota), PKS (3 orang anggota),

PDI-P (4 orang anggota), Partai Golkar (3 orang anggota), Partai Gerindra (3 orang anggota), Partai Demokrat (2 orang anggota), PAN (6 orang anggota), PPP (2 orang anggota) dan Partai Hanura (2 orang anggota).

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan 46,64 persen PNS berijasah D-IV/S1. Tingkat pendidikan PNS terbanyak kedua adalah SLTA dengan persentase 26,45 persen. Jumlah PNS dengan pendidikan D-I/II/III hanya 17,51 persen. Sementara itu PNS dengan pendidikan S2 dan S3 hanya 5,52 persen, dan masih ada PNS berpendidikan SLTP ke bawah dengan persentase 3,87 persen.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) persentase penduduk Kota Kediri yang berada pada kelompok usia 7 hingga 15 tahun yang masih sekolah mencapai 100 persen. Pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun persentase penduduk yang masih sekolah 89,52 persen. Sedangkan pada kelompok usia 19 hingga 24 tahun hanya 42,53 persen yang masih sekolah.

Industri pengolahan di Kota Kediri mampu menyerap 38.912 tenaga kerja. Pengolahan tembakau adalah klasifikasi industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu 36.900 tenaga kerja (94,83%). Industri makanan mampu menyerap 1.408 tenaga kerja (3,62%). Dilihat dari nilai produksi, klasifikasi industri tembakau menduduki peringkat pertama dengan nilai 53,84 triliun rupiah. Sementara itu nilai produksi industri makanan adalah 131,12 miliar rupiah.

Komposisi angkatan kerja secara ekonomi terbagi atas 91,54 persen bekerja dan 8,46 persen pengangguran terbuka. Persentase penduduk bekerja baik laki-laki maupun perempuan samasama mencapai angka hampir 92 persen. Sementara itu

komposisi bukan angkatan kerja secara ekonomi terdiri atas 50,07 persen penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga, 35,46 persen sedang bersekolah, dan 14,47 melakukan kegiatan lainnya. Ada perbedaan komposisi pada penduduk laki-laki dan perempuan. Pada penduduk laki-laki komposisi terbesar bukan angkatan kerja adalah sedang bersekolah 54,76 persen, sementara pada penduduk perempuan yang terbesar adalah mengurus rumah tangga 64,48 persen. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, 60,07 persen penduduk bekerja berpendidikan SLTA ke atas. Sementara itu persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan SLTA justru sedikit lebih tinggi, yaitu 93,19 persen.

Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut mencapai 40,23 persen. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa, menyerap 25,85 persen tenaga kerja yang ada.

Dilihat dari status pekerjaan utama 56,07 persen penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hanya 17,70 persen yang melakukan usaha sendiri, dan 11,38 persen menjalankan usaha dengan dibantu buruh maupun tenaga kerja keluarga. Sementara itu jumlah pekerja bebas dan pekerja keluarga masing-masing 8,79 persen dan 6,06 persen.

Kediri dan Sejarah Identitas Mataraman

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Staasblad (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. Gemeente ini menjadi tempat

kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai Gemeente Raad (Dewan Kota/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (Europeanen), empat orang Pribumi (Inlanders) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan Staasblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "Zelfstanding Gemeenteschap" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Kota Kediri berdiri sebagai pemerintahan daerah (kota) berdasarkan UU No. 12/1950. Jika mengacu pada UU tentang pembentukan Pemerintah Kota Kediri tersebut, saat ini Kota Kediri berumur 66 tahun. Sedangkan lahirnya Kota Kediri lahir pada tanggal 27 Juli 879. Maka setiap tanggal 27 Juli pemerintah kota ditetapkan sebagai peringatan hari Jadi Kota Kediri. Dalam setiap peringatan hari Jadi, selalu diisi dengan rangkaian acara. Salah satu acara yang dianggap penting adalah acara prosesi upacara menusuk sima. Acara tersebut diyakini sebagai awal mula daerah Kediri sebagai sebuah pemukiman yang telah memilki tatanan sosial, ekonomi dan politik. (Pemkot Kediri, 2016)

Identitas Mataraman

Untuk menguraikan sisi sosial budaya masyarakat Kota Kediri dalam penelitian ini, peneliti sengaja mengaitkannya dengan salah satu subkultur kebudayaan yang ada dan berkembang di Jawa Timur, yakni kultur Mataraman. Dalam hal ini dikandung maksud bahwa dinamika masyarakat yang

berlangsung --baik dari segi sosial budaya maupun politik-- tidak terlepas dari pengaruh subkulur ini. Dalam beberapa aspek terdapat persamaan mengenai pandangan, pehaman, dan perilaku masyarakat di Kota Kediri. Ini merupakan pengaruh dan bentukan dari dialektika nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Mataraman, yakni nilai-nilai budaya Jawa yang ada di Jawa Timur.

Terkait hal di atas, nama Mataram menjadi unik. Hingga saat ini tidak ada sumber valid yang menjelaskan asal usul nama Mataraman. Belum ditemukan adanya penjelasan tentang siapa yang memberi nama dan sejak kapan dipakai. Namun demikian, secara sosiologis dan antropologis dapat dilihat bahwa provinsi Jawa Timur tidak homogen. Meskipun mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa, juga terdapat etnis lain yang cukup besar sebarannya, yakni etnis Madura. Bahkan, etnis madura ini telah menyebar di semua wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selain itu,,heterogenitas ini menjadikan perbedaan pola kebudayaan antaretnis.

Menurut budayawan Ayu Soetarto (2004), wilayah Jawa Timur dibagi menjadi sepuluh subkebudayaan: Arek, Mataraman, Padalungan, Madura, Osing, Tengger, Jawa Panoragan, Madura Bawean, dan Madura Kangean. Pembagian subkebudayaan yang ada di Jawa timur ini berbeda antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun demikian, dari pendapat semua pakar terdapat kesamaan atau kesepakatan bahwa penduduk wilayah Jawa Timur bagian barat tersebut berkultur Mataram. Oleh karena itu, wilayah ini dinamakan daerah Mataraman(Sutarto, 2004) (Sutarto, 2004).

Berbeda dengan Arie Wibowo (2007) yang menyebutkan bahwa wilayah Jombang Mojokerto, Sidoarjo, Tuban,

lamongan dan Gresik bukan kategori wilayah budaya Mataraman, teapi merupakan sub budaya wilayah arek yang ada di Surabaya. Hal tersebut disebabkan kelima wilayah itu merupakan daerah penyangga Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur.

Sedangkan menurut Hotman Siahaan (1996), bahwa keanekaragaman budaya di Jawa Timur (Mataraman, padalungan, Arek, Madura, Pesisir pantai utara, dan Osing) jika tidak dibuat pola interaksi yang baik dapat menciptakan budaya tanding. Budaya tanding dapat timbul karena adanya kesenjangan dan merasa dinomorduakan. Maka menurut Siahaan, Jawa Timur yang multikultur tersebut pemerintah khusunya harus mampu menjaga keharmonisan yang selama ini telah terjaga dengan baik.

Jika diperbandingkan adanya sebaran tiap-tiap subkultur yang ada di Jawa Timur, subkultur Mataramlah yang paling banyak dan mendiami sebagian besar provinsi yang beribukota Surabaya ini. Hal ini sepadan dengan survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas, dengan data terakhir tahun 2017 bahwa jumlah penduduk yang ada di wilayah Mataraman sebanyak 40 persen dari total penduduk Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para politisi saat pilkada dan pemilu digelar untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan dari masyarakat yang sebagian besar adalah orang Jawa.

Gambar 3 Peta Kebudayaan Jawa Timur

Sumber :www.goodnewsfromindonesia.id

Adapun isltilah dan nama Mataraman telah lama digunakan oleh masyarakat dan para pengamat sosial budaya. Hal ini disebabkan pola-pola budaya yang digunakan masyakat dalam kehidupan sehari-harinya merupakan pengaruh dari kekuasaan kerajaan Mataram Kuno dan Mataram Islam. Dua kerajaan besar inilah yang hingga saat ini sangat terasa pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Mataraman mulai sistem religi, bahasa, organisasi sosial, maupun seni budaya. Karena besarnya pengaruh budaya dari kerajaan yang berpusat di Jogya dan Solo tersebut, wilayah ini dinamakan Mataraman.

Sebagimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa letak wilayah Mataraman terdapat dibagian paling barat provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Adapun batasan-batasan tersebut: (1) bagian barat terdiri atas Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Ngawi; (2) bagian tengah meliputi Kediri, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto; (3) wilayah utara meliputi Bojonegoro, Lamongan,

dan Tuban. Sedangkan, (4) wilayah pesisir selatan terdiri atas Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan.

Sebelum membahas tradisi masyarakat Mataraman, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai sejarah perkembangan dan karakteristik masyarakatnya, baik dari aspek sosial budaya maupun dari aspek dinamika politik yang ada di dalamnya. Pembahasan tentang masyarakat Mataraman yang dimaksud dalam penelitian ini lebih difokuskan pada dinamika masyarakat Mataraman yang terjadi di Kota Kediri.

Masyarakat Mataraman sebagian besar dihuni orang Jawa. Dominasi orang Jawa ini sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-harinya. Menurut data terakhir dari monografi Pemerintahan Kota Kediri menunjukan bahwa jumlah penduduk yang bersuku Jawa hampir 90 % dan sisanya berasal dari suku-suku lain yang ada di setiap kabupaten dan kota di wilayah Mataraman. Salah satu iIndikator yang paling nyata adalah masih kuatnya pengaruh tradisi dan budaya Jawa tersebut. Ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Selain bahasa yang menjadi ukuran, indikator lainnya adalah banyaknya tradisi yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat utamanya yang menyangkut siklus kehidupan: kelahiran, perkawinan, dan kematian.

Penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat Mataraman sama seperti yang digunakan masyarakat di Jawa Tengah dan DIY meskipun dari sisi kehalusannya sangat berbeda dengan yang ada di Solo dan Jogja. Terkait dengan penggunan bahasa Jawa, fungsinya tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga merupakan media dalam

membentuk etika dan budi pekerti. Oleh karena itulah, penggunaan bahasa Jawa dalam praktik berkomunikasi terdapat penjenjangan yang disesuaikan dengan posisi orang yang diajak bicara. Untuk fungsi yang kedua inilah yang agak sulit dilakukan jika tidak dilatih sejak kecil melalui pendidikan di keluarga.

Adapun pelaksanaan pendidikan budi pekerti bagi orang Jawa terutama dilakukan melalui latihan penggunaan bahasa yang diajarkan sejak kecil dalam keluarga. Peran paling besar dalam hal ini adalah kedua orang tua. Posisi orang tua dan anak terlebih dahulu dijelaskan sebagai pihak-pihak yang berbeda posisi meskipun dalam keluarga yang sama. Oleh karena itu, setiap anak dituntut harus menghormati orang tuanya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan tingkatan-tingkatan tertentu yang sudah ditentukan dan diatur sebelumnya. Misalnya, bahasa yang digunakan untuk ayah dan ibu atau kepada yang lebih tua akan sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan untuk level umur yang sama atau dibawahnya (Mulder, Mistisisme Jawa, 2001)(Mulder, Mistisisme Jawa, 2001).

Dengan demikian, penggunaan bahasa Jawa selain berfungsi sebagai alat penyampai pesan, juga menjadi cermin bagi penggunanya. Artinya, kepribadian seseorang akan diukur dengan cara penggunaan bahasa, seberapa jauh yang bersangkutan mengerti tentang etika dan norma yang terkandung di dalamnya. Orang Jawa menyebutnya sebagai cara untuk mengetahui *unggah-ungguh* dalam diri pemakainya. Bagi orang Jawa, kesopanansangat diutamakan dan harus ditunjukkan kepada orang lain sebagai ukuran bahwa ia menghormati orang lain.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat Kota Kediri sangat dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai budaya Jawa. Seperti dapat dicontohkan, banyak perkumpulan dan ikatan sosial maupun agama menggunakan istilah *paguyuban*. Kata paguyuban berasal dari kata *guyub*. Kata *guyub* ini mwngacu pada salah satu ciri khas masyarakat yang mementingkan semangat kebersamaan.

Adapun beberapa perkumpulan yang sempat peneliti ketahui yang menggunakan kata paguyuban: Paguyuban Antar-Umat Beragama (PAUB), Paguyuban Lintas Masyarakat (PaLM), Paguyuban Orang tua Murid yang ada di setiap sekolah, Paguyuban Seni Jaranan Wahyu Krida Budaya, Paguyuban Pedagang Kakilima, Paguyuban Ojek Motor, Paguyuban Perempuan Kota Kediri, Paguyuban RT/RW dan masih banyak lagi. Dengan digunakannya kata paguyuban diharapkan oleh para anggota yang ada di dalamnya memiliki semangat kekeluargaan dan meningkatkan kebersamaan tanpa melihat kedudukan atau status seseorang, tetapi menjadi satu kesatuan.

Banyaknya perkumpulan masyarakat yang menggunakan kata "paguyuban" menandakan bahwa anggota dari perkumpulan tersebut masih mementingkan hubungan yang bersifat informal karena dilandasi adanya rasa emosional yag tinggi. Perkumpulan semacam ini juga memilki semangat komunal yang sangat tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran yang digagas oleh Ferdinand Tonnies.

Adapun masyarakat paguyuban menurut Ferdinand Tonnies memiliki ciri, pertama, Intimed, yakni suatu kondisi di dalam kelompok masyarakat yang terjadi hubungan mendalam karena dilandasi oleh rasa cinta sehingga

menimbulkan rasa simpati dan empati di dalamnya. Kedua, pola hubungan antaranggota di dalmnya bersifat pribadi. Ketiga, hubungan antara mereka bersifat eksklusif, artinya seringkali yang digunakan sebagai dasar berhubungan adalah semangat dan kepentingan diantara mereka saja, sangat kurang memperhatikan kepentingan dari pihak lain. Ciri lain dari masyarakat paguyuban adalah lebih memprioritaskan kepentingan kelompok atau bersama dibandingkan kepentingan pribadi masing-masing anggotanya.

Seperti pada masyarakat lain, setiap anggota masyarakat Jawa mengharapkan agar irama kehidupan yang sesuai dengan kodrat alam dan cita-cita masyakat terpenuhi sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai sejahtera, adil dan makmur baik lahir maupun batin. Hal itu diyakini akan berhasil bila setiap individu dalam masyarakat dalam semua tingkah laku, pebuatan, tata tertib dan kebiasaan hidup sehari-hari didasarkan pada kaidah pokok pikiran masyarakat Jawa itu sendiri.

Adapun kaidah pertama yang harus dimilki oleh orang Jawa adalah bahwa setiap orang dalam menghadapi setiap situasi bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Sikap seperti itu selanjutnya disebut prinsip kerukunan. Kedua, bahwa dalam setiap situasi hendaknya setiap anggota masyarakat Jawa dalam cara berbicara dan membawakan diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukan orang tersebut. Sikap kedua ini disebut prinsip hormat (Sudarsono, 1985, hal. 23)(Sudarsono, 1985, hal. 23).

Kedua prinsip tersebut disadari oleh hampir semua orang Jawa sehingga seluruh tingkah laku, perbuatan dan

perkataannya selalu mengacu kepada kedua prinsip tersebut. Mereka akan selalu menjaga kerukunan dan berusaha menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Prinsip kerukunan bertujuan menciptakan masyarakat dalam keadaan selaras, serasi, dan seimbang sehingga di masyarakat akan tercipta situasi tenang, tentram, dan terhindar dari perselisihan dan pertentangan. Demikian pula seluruh anggota masyarakat bersedia saling membantu baik dalam kepentingan perorangan apalagi yang menyangkut kepentingan umum atau bersama. Prinsip kerukunan itu terlihat dalam suasana, bekerjasama, dalam aktivitas tukar pikiran, baik itu di lingkungan keluarga, dalam hubungannya dengan tetangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip tersebut oleh masyarakat dijaga dengan baik. Akan tetapi, apa saja yang akan mengganggu kerukunan diatasi segera oleh seluruh warga masyarakat sehingga terhindar dari adanya konflik.

Prinsip kerukunan tersebut tidak berarti bahwa pribadi-pribadi dalam masyarakat Jawa harus meninggalkan prinsip dan pendirian pribadinya. Dalam bertukar pikiran, mereka tetap bebas mempertahankan pendiriannya masing-masing. Hanya saja, cara mereka mengungkapkan pendapat dan pendiriannya jelas tampak kesadaran adanya prinsip kerukunan. Mereka menjaga agar tidak terjadi konflik yang terbuka, selalu diusahakannya jalan tengah yang tanpa merugikan kedua belah pihak. Akan tetapi, prinsip orang lain tidak akan terbantai. Prinsip kerukunan pada masyarakat Jawa itu menimbulkan kesadaran. Bila perlu, kepentingan pribadi dikalahkan demi kesepakatan bersama.

Hal lain yang tampak menonjol dari pelaksanaan prinsip kerukunan itu ialah kemampuan menguasai emosi supaya tetap terkendali dan tidak mengganggu kerukunan masyarakat. Dari prinsip kerukunan itu sering timbul sikap berpura-pura yang mungkin merugikan diri sendiri meskipun kerugian tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam masyarakat Jawa, orang akan segera mengetahui dan menyadari kedudukannya pada setiap waktu, tempat, dan situasi yang sedang dialaminya. Pada saat itu juga ia akan menentukan bagaimana ia harus berbicara, bagaimana membawakan diri, dan sikap hormat yang bagaimana yang harus dilakukan terhadap rang lain sesuai dengan derajat dan kedudukan orang tersebut.

Prinsip hormat mengatur hubungan anggota-anggota masyarakat Jawa secara hirarkis. Setiap orang Jawa akan segera tahu di mana ia harus berada pada waktu dan situasi tersebut, penggunaan bahasa Jawa yang bagaimana yang digunakan, bagaimana sikap yang harus diambil dalam menghadapi lawan bicaranya, dan lain sebagainya yang terkait dengan prinsip ini.

Sikap hormat kepada yang lebih tua, baik karena umur maupun karena silsilah kekerabatan atau karena kedudukan yang lebih tinggi itu akhirnya membentuk struktur sosial masyarakat Jawa yang paternalistik. Artinya, kelakukan atasan dengan sendirinya dianggap benar dan dengan demikian menjadi standar moral yang akan ditiru oleh bawahannya.

Demikian kedua prinsip pokok yang menjadi sumber moral masyarakat Mataraman yang terlihat pada semua tatanan, kebiasaan, perbuatan, dan tingkah lakunya dalam hidup sehari-hari. Hal tersebut masih dipegang teguh dan

dijaga kelangsungan hidupnya hingga sekarang. Proses sosialisasi terhadap nilai dan norma tersebut dilakukan melalui keluarga (Suseno,2001).Hal tersebut diajarkan kepada anak-anaknya baik dengan contoh perbuatan, nasihat, dan pelajaran maupun dengan cara-cara sindiran. Bagi mereka yang lalai atau melanggarnya, orang tua atau masyarakat akan menghukum dalam berbagai bentuk: dimarahi, sampai dikucilkan dari masyarakat, dengan sebutan "*ora Jawa*", *lali Jawane*" dan perkataan lainnya. Hukuman semacam itu sudah cukup membuat mereka yang melanggar merasa tersiksa Akhirnya, yang bersangkutan berusaha mematuhi aturan dan adat kebiasaan serta tingkah laku yang direstui masyarakat.

Falsafah Tri Dharma Mangkunegaran

Selain etika dan prinsip-prinsip dasar masyarakat Jawa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Jawa juga memiliki sebuah falsafah yang menjadi pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Falsafah tersebut menyangkut tentang kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Baik pemimpin maupun rakyat tidak hanya memiliki hubungan tetapi juga ketergantungan satu dengan yang lainnya. Falsafah tersebut dikenal dengan sebutan Tri Dharma Mangkunegaran.

Falsafah Tri Dharma Mangkunegaran merupakan ciptaan Mangkunegara I, raja yang merupakan pecahan dari kerajaan Mataram Surakarta (Pakubuwono II). Ajaran tersebut dirumuskan oleh Pangeran Sambernyowo, sebutan lain dari Mangkuegara I dalam memandang hubungan antara raja dengan bawahannya.

Falsafah tersebut lahir sebagai refleksi dari perjuangan Raden Mas Said, sebelum bergelar Mangkunegara beserta pengikutnya dalam melawan intervensi dan dominasi kekuasaan Belanda terhadap Mataram. Proses perjuangan yang panjang tersebut, menyebabkan pola hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau bawahan mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya berlaku bahwa segala titah raja, atau perintah raja harus diikuti oleh bawahan atau rakyatnya. Oleh Raden Mas Said pandangan tersebut diubah menjadi raja tidak memiliki kekuasaan apapun tanpa adanya kesetiaan dari pengikutnya. Artinya seorang raja harus memahami kehendak dan aspirasi rakyatnya.

Falsafah Tri Dharma mulai diberlakukan setelah ditandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 17 Maret 1757 oleh Raden Mas Said, Pakubuwono II dan Belanda. Sejak itulah Raden Mas Said memilki daerah kekuasaan sendiri yang terpisah dengan kekuasaan kasunanan Surakarta, dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara I.

Dari falsafah Tri Dharma tersebut maka lahirlah budaya politik baru di masyarakat mataram, utamanya diwilayah Mangkunegaran. Budaya politik baru inilah yang memberikan banyak inspirasi dan pemahaman masyarakat Jawa dalam memandang negara, pemimpin dan rakyatnya. Adapun falsafah Tri Dharma Mangkunegaran yang akhirnya menjadi budaya politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Rumangsa melu Handarbeni*

   Artinya merasa ikut memiliki.Siapapun dan di manapun setiap warga negara dengan penuh kesadaran harus merasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini

dengan sepenuh jiwa dan raga. Sehingga setiap orang tidak hanya menganggap bahwa negara adalah tempat melakukan aktivitas dan kehidupan semata. Akan tetapi merasa ikut memiliki sehingga setiap perbuatannya mampu menjadi manfaat bagi bangsanya.

Sikap inilah yang selaras dengan jiwa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, bangsa dan negaranya. Sebagai wujud rasa cintanya tersebut semua anggota masyarakat harus bersatu dan berdaulat demi mencapai cita-cita bersama. Selanjutnya dengan sikap *rumangsa melu handarbeni* ini juga dikandung maksud, setiap warga negara harus selalu berupaya untuk memajukan bangsa dan negaranya dengan segala potensi yang ada di dalamnya, sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku mandiri atau berdiri di atas kaki sendiri.

2. *Wajib melu Hangrungkebi*

Wajib melu Hangrungkebi artinya adalah wajib ikut dalam mempertahankan atau merasa bertanggung jawab di mana setiap warga negara bangsa berkewajiban, mengisi, membina, dan mempertahankan terhadap serangan-serangan musuh baik dari luar maupun dalam. Hal yang sangat khas dengan menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.

Bagi orang Jawa, terkait dengan mempertahankan dan membela negara dari intervensi negara lain adalah wajib. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam usaha mengisi dan memajukan bangsanya, harus dapat bersinergi dengan kelompok lain tanpa membedakan suku, agama dan golongan untuk bekerjasama membangun dan mengisi kemerdekaan dengan karya dan bakti nyata. Konsep

bersinergi dan menciptakan kerjasama dengan pihak lain adalah manifestasi dari prinsip hidup masyarakat Jawa yang paling menonjol yaitu guyub rukun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. *Mulat sarira hangrasa wani*

   Arti dari *mulat sarira hangrsa wani* adalah berani melakukan introspeksi diri. Dengan demikian harus ada keberanian hati untuk melihat kekurangan diri sendiri. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan kesungguhan, karena tanpa adanya kesungguhan maka akan sulit dilakukan. Langkah untuk menjalani hal ini tidak hanya sulit tapi juga berat. Oleh arena itu setiap orang harus melakukan intropeksi dan evaluasi diri, untuk kemudian dicarikan solusi agar tidak terjebak lagi kepada hal-hal yang sebelumnya bersumber dari kekurangan diri tersebut.

Dengan demikian melakukan mawas diri atau intropeksi merupakan tindakan yang lahir dari niat yang tulus untuk melakukan yang lebih baik lagi serta menjauhi hal-hal yang menjadi kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukannya.

Bab IV Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Mataramandi Kota Kediri

Munculnya Politik Aliran

Istilah aliran merupakan metafora dari kenyataan kehidupan sosial-politik di Indonesia, di mana partai politik pada masa pascakemerdekaan melakukan mobilisasi massa dengan membentuk sejumlah organisasi bayangan dalam rangka memenangi pemilihan umum 1955. Partai politik ibaratnya merupakan sebuah sungai besar dimana air mengalir dari sejumlah anak sungai yang besar maupun yang kecil. Dalam kehidupan kepartaian, aliran merupakan perwujudan dari pembentukan dukungan melalui mobilisasi massa. Proses mobilisasi massa seperti itu merupakan hal yang sangatwajar karena demokrasi politik pada waktu itu memungkinkannya.

Tidak hanya itu, partai politik juga melibatkan diri dalam kehidupan sosial yang sangat luas. Ada partai politik yang membentuk lembaga pendidikan seperti yang dilakukan oleh PNI dan PKI, bahkan ada juga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Partai-partai juga memiliki media sendiri seperti surat kabar dan majalah, dalam rangka membentuk opini publik untuk memperoleh dukungan massa yang sebesar-besarnya dalam menghadapi pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Politik pada masa pascakemerdekaan merupakan proses pembentukan kekuatan yang semaksimal

mungkin dan itu dimungkinkan karena demokrasi yang dipraktikkan memang sangat memungkinkan.

Basis pembentukan organisasi sosial dan politik pada masa pascakemerdekaan adalah orientasi dan perilaku keagamaan (Gaffar, 2000)(Gaffar, 2000). Hal tersebut seperti yang digambarkan oleh Clifford Geertz dari hasil penelitiannya di Mojokuto Jawa Timur awal tahun 1950-an yang kemudian dikenal sebagai model santri, abangan dan priyayi. Peta masyarakat seperti yang digambarkan sebenarnya memperlihatkan pemilihan sosial terutama di Jawa. Pemilihan sosial tersebut bersifat kumulatif dan konsolidatif karena telah terjadi proses penguatan dalam hal pengelompokan sosialnya. Orang abangan memiliki orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan santri. Abangan cenderung memilih untuk berpihak kepada partai politik yang tradisional, sekular, dan nasionalistik.Sementara itu, orang santri memilih untuk berpihak pada partai-partai Islam.

Untuk menjelaskan struktur sosial dan kecenderungan orientasi masyarakat Mataraman di Kediri, peneliti menggunakan cara pandang Clifford Geertz tersebut yang berlangsung saat itu sebagai polarisasi politik antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sebagai titik tolak dalam penelitian ini. Inti dari pandangan Geertz terdapat kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang liniar dengan pilihan politiknya. Kelompok abangan yang didefiniikan sebagai kelompok Islam yang kurang taat cenderung memilih partai nasionalis, sedangkan kelompok santri cenderung memilih partai Islam. Kelompok Islam tradisional menyalurkan aspirasinya ke partai NU, sedangkan kelompok modernis seperti Muhammadiyahmenyalurkan

pilihannya ke Masyumi. Walaupun teori Geertz ini banyak mendapatkan kritik hingga sekarang, namun para pakar politik sosial budaya masih menjadi alat analisis utamanya.

Salah satu ilmuwan yang membantah teori Geertz ini adalah Seymour Lipset dan Stein Rokkan bahwa bukan perbedaan struktur sosial yang semata-mata yang menjadi pembeda orientasi dan pilihan politik masyarakat. Lipset dan dan Rokan menemukan faktor lain, yaitu mobilisasi yang intensif dan masif yang dilakukan oleh partai politik kepada struktur sosial masyarakat yang menjadikan polarisasi politik tersebut terjadi. Artinya, tiap partai politik saat itu sangat jeli memetakan isu politik sesuai dengan kebutuhan basis politik yang bersangkutan. Misalnya, PKI sangat intensif mengampanyekan isu penguasaan tanah dikembalikan kepada rakyat dan bukan hanya milik segelintir orang, yang ia disebut sebagai setan desa. Selanjutnya, PNI sebagai partai pemerintah melakukan kampanye kepada para pegawai dan priyayi yang memegang kekuasaan di pemerintahan. Begitu pula dengan partai-partai Islam, yakni NU dan Masyumi menyasar pendukunganya kepada kelompok Islam tradisional yang ada di pedesaan dan kelompok Islam modernis di perkotaan.

Pembagian kelas sosial di Indonesia berdasarkan pandangan marxisme tidaklah tepat, sebagaimana yang ada di negara-negara Barat. Hal tersebut karena di Indonesia yang memengaruhi orientasi politik masyarakat karena adanya faktor agama, etnik, bahasa, budaya maupun geografis. Adapun di Indonesia tidak dikenal pelapisan sosial masyarakat berdasarkan sosial-ekonomi. Untuk wilayah pedesaan, para penduduknya tidak mengenal kelas sosial dan

persepsi kelas secara subjektif sebagaimana yang dikehendaki kaum marxis. Kalaupun yang terjadi pada masyarakat desa di Jawa adalah dinamika sosial politik yang terkait dengan birokrasi dan bukan sebagaimana yang ada dalam konteks marxis. Dalam masyarakat Jawa hanya dikenal dua pembeda individu dalam masyarakat yaitu *wong cilik* (orang kecil) dan *wong gedhe* (orang besar). Orang kecil adalah masyarakat biasa, sedangkan orang besar adalah mereka yang bekerja di sektor birokrasi atau yang biasa di sebut priyayi.Oleh karena itu, di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, tidak dikenal istilah kiri atau liberal.

Sejak pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan tahun 1955, para ilmuan menganggap bahwa politik aliran tetap menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Hal tersebut hingga pelaksanaan pemilu berikutnya, 1971, 1977,1982, 1987, 1992, 1997 di bawah rezim Orde Baru yang represif. Tidak hanya itu, pelaksanaan pemilu 1999 dan 2004 di era reformasipun masyarakat dalam memilih partai masih didominasi karena latar belakang ideologi atau aliran. Meskipun dalam konteks dua pemilu ini tidak sedikit pula pakar ilmu politik yang membantah.

Dwight King(King, 2003) (King, 2003), dalam bukunya yang berjudul "*Half-Hearted Reform, Elekctoral Institutions and Struggle for Democracy in Indonesia"* yang juga didukung dalam tulisan Anis Baswedan (2004), *Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004*. Yang menarik dari paparan King adalah bahwa ada keberlanjutan politik aliran yang terjadi pada pemilu 1955 di bawah Odre Lama ke pemilu 1999 di era Reformasi. Begitu pula dengan Baswedan, ia menemukan fakta bahwa telah terjadi korelasi yang signifikan di kota dan kabupaten di

Indonesia bahwa partai-partai Islam mendapatkan dukungan yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Begitu pula dengan dukungan partai nasionalis dalam hal ini PDIP mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat yang mayoritas nonmuslim.

Sementara pihak yang tidak setuju dengan temuan King dan Baswedan adalah William Liddle dan Saiful Mujani dalam karyanya yang berjudul *"Leadership, Party and Religion:Explaining Voting Behavior in Indonesia"*. Liddle dan Mujani menilai pengaruh orientasi keagamaan dan politik aliran pada hasil perolehan suara di pemilu 1999 dan 2004 sangat terbatas. Adapun pengaruh dominan dalam mempengaruhi perilaku pemilih adalah *leadership* atau kepemimpinan yang didukung oleh perkembangan media massa utamanya televisi yang pengaruhnya hingga ke pelosok tanah air. Terlepas mana yang benar dan menjadi pegangan akademis, apakah pendapat Clifford Geertz yang dteruskan King dan Bawesdan atau sebagimana pendapat Wiliam Liddle dan Saiful Mujani bahwa telah terjadi perubahan, maka akan ditentukan oleh seberapa besar dukungan masyarakat, utamanya masyarakat akademis sebagaimana yang dikemukakan Khun.

Melalui pendekatan budaya Clifford Geertz pada tahun 1953-1954 telah melakukan penelitian di masyarakat Mojokuto (Pare Kediri) dan berhasil menyusun kategorisasi masyarakat kedalam tiga kelompok, yaitu Santri, Priyayi, dan Abangan. Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada tahun 1960 ini menghasilkan konstruksi nalar Jawa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Wacana agama trikotomi tersebut yang masih menjadi wacana sosial, politik dan budaya yang cukup menarik hingga

sekarang, bagi para ilmuwan ketika hendak mengkaji tentang Jawa. Kelebihan dari Clifford Geertz dalam mengungkap tentang fenomena agama Jawa adalah kemampuannya dalam hal mendeskripsikan dan mendalami fenoma tersebut secara detail atas ketiga varian tersebut dan menyusun ulang dalam konklusi hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh atas ketiga varian tersebut.

Hasil perenungan Geertz sampai pada sebuah kesimpulan bahwa varian santri adalah kelompok muslim yang taat dalam beragama. Bagi santri, tahun 1950-an taat beragama berarti mengupayakan Islam sebagai pedoman dalam mewujudkan perikehidupan dibidang ekonomi, sosial dan politik. Islam harus dibawa dalam ranah kehidupan kenegaraan dan termasuk memilih partai politik dalam rangka mewujudkan tujuan Islam. Oleh karena itu, merekapun mendirikan partai politik yang berasaskan Islam dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Begitu pula sebaliknya, varian abangan adalah mereka yang tidak menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Baginya,beragama adalah urusan individu dan tidak perlu dibawa dalam urusan sosial dan politik. Dengan demikian, kelompok abangan sangat terbuka terhadap masuknya ideologi dunia yang dominan saat itu, yaitu nasionalisme dan komunisme. Sedangkan priyayi adalah orang abangan yang dicirikan dengan perilakunya yang halus dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya priyayi adalah orang-orang yang bekerja di birokrasi pemerintahan.

Sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno berkuasa, Kediri sebagai bagian dari daerah Mataraman merupakan basis kelompok abangan. Secara struktur sosial, masyarakat

abangan adalah mereka yang secara ideologis memiliki keterikatan dengan dengan *wong cilik*. Secara harfiah *wong cilik* artinya orang kecil atau masyarakat bawah yang jumlahnya paling besar dibandingkan kelas sosial di atasnya. Mereka secara geografis hidup di wilayah pedesaan hingga pelosok-pelosok. Kehidupan mereka sehari-harinya mengandalkan dari sektor pertanian dan perkebunan sebagai petani dan buruh perkebunan sedangkan sebagian lainnya di wilayah pesisir sebagai nelayan.

Di sisi lain, secara historis pendirian partai politik di Indonesia selalu dikaitkan dengan latar belakang ideologi atau aliran tertentu yang sekaligus pula mencerminkan lapisan sosial di masyarakat. Masyarakat petani yang identik dengan kelas bawah adalah basis dari partai-partai yang berhaluan politik kerakyatan. Salah satu cara melakukan klaim atas hubungan tersebut adalah dengan simbolisasi yang diwujudkan dalam lambang partai, pidato-pidato elitee politik hingga yang termuat dalam anggaran dasar organisasi.

Petani misalnya, yang merupakan mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah lumbung suara yang sangat menggiurkan bagi partai politik, utamanya untuk kepentingan elektoralnya. Kaitanya dengan hal tersebut, partai politik ada yang menggunakan gambar hewan banteng yang merupakan binatang ternak yang akrab dengan para petani dan simbol dunia pertanian. Selanjutnya, ada gambar palu dan arit yang merupakan simbol dari alat produksi bagi para petani dan buruh atau pekerja bangunan. Selain dari aspek mata pencaharian, ada pula partai politik dalam melakukan klaim kedekatannya dengan masyarakat atau pemilih dengan menggunakan segmentasi pemilih berdasarkan perilaku

keagamaan masyarakat. Beberapa contoh diantarannya terdapat partai-partai Islam yang menggunakan lambang ka'bah, bintang dan bulan atau lambang salib bagi partai dari kalangan agama Katolik dan Kristen.

Karesidenan Kediri sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Wilayah ini merupakan lahan subur yang ditopang adanya faktor alam yang saling menunjang, yaitu aliran Sungai Brantas sebagai sumber pengairan yang sangat cukup dan keberadaan Gunung Kelud sebagai gunung berapi yang aktif. Itulah sebabnya sejak zaman dulu Kediri merupakan tempatnya lahirnya kerajaan besar yang melahirkan kerjaaan-kerajaan besar seperti Kadhiri, Singosari, dan Majapahit. Memasuki zaman penjajahan Belanda, Kediri dan sekitarnya merupakan pusat ekonomi yang ikut menyuplai keuntungan ekonomi bangsa penjajah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan bersejarah seperti saluran irigasi, jalan kereta api, gedung, dan bangunan pabrik gula.

Selain secara sosiokultural, agama Islam di Kota Kediri memiliki peran penting juga dalam sistem sosial dan pemerintahan. Dalam struktur sosial, posisi kiai sebagai pemimpin agama Islam di Kota Kediri memilki peran yang cukup signifikan. Kiai selain sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, juga memiliki pondok pesantren dan lembaga pendidikan, yang di dalamnya para kiai bertugas memberikan pengajaran ilmu agama kepada para santri sebagai aktivitas pokoknya. Banyaknya santri yang dititipkan ke pondok pesantren oleh para orang tua merupakan suatu indikator bahwa kiai merupakan sosok yang dipercaya

memilki kemampuan ilmu agama yang tinggi di atas rata-rata masyarakat umum.

Mayoritas penduduk Kota Kediri secara riil beragama Islam. Keislaman mereka terbagi ke dalam dua kelompok: (1) kelompok Islam nominal dan (2) Islam yang taat, atau meminjam istilah Geertz (1960) sebagai Islam abangan dan Islam santri. Walaupun kedua kelompok ini sama-sama pemganut Islam, namun dalam afiliasi politiknya pun tidak sama, hal tersebut disebabkan kultur keberagamaannya juga tidak sama. Kelompok Islam santri cenderung memilih partai Islam, sementara kelompok Islam abangan cenderung memilih partai nasionalis. Dengan kata lain, realitas aktualisasi aspirasi politik umat Islam di Kediri pada tataran empirik memperlihatkan sosok fenomena keberagaman kultur yang berimplikasi kepada pilihan partai politik yang linier.

Sebagaimana telah disampaikan dalam penelitian Clifford Geertz bahwa kehidupan politik di masyarakat utamanya di Jawa sangat dipengaruhi oleh tipe keagamaan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks nasional, perdebatan tentang dasar negara pancasila memberikan gambaran tentang peta pemikiran politik yang terbelah menjadi dua kutub ekstrim. Kutup pertama adalah nasionalis yang memiliki pemahaman bahwa Indonesia yang telah didirikan ini harus bebas dari intervensi agama. Bagi kelompok ini, agama merupakan urusan pribadi setiap warga negara yang tidak ada hubungannya dengan sistem dan pemahaman kenegaraan. Sedangkan kutub kedua adalah Islam. Kelompok ini mempunyai pemahaman bahwa urusan politik dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari agama. Islam sebagai agama telah diyakini bagi kelompok

ini menyangkut segala asek kehidupan, tidak terkecuali persoalan dasar negara dan politik kenegaraan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa di Kediri raya secara sosiologis masyarakatnya terbagi dalam 2 kelompok: santri dan abangan. Dua kelompok ini sebenarnya secara ideologis masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tiap-tiap kelompok memiliki klaim sejarah yang sama-sama kuat. Bahkan, karena kuatnya tiap kelompok tersebut, ditahun 65-an saat tragedi kemanusiaan banyak menimbulkan ledakan konflik hingga menimbulkan kekerasan berdarah. Gambaran tersebut semakin jelas setelah Cliford Geertz melakukan penelitian di wilayah Pare, Kediri yang menghasilkan trilogi keberagamaan masyarakat yang antagonistik, dan sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan sosial.

Hal tersebut dapat diamati pascaperistiwa tragedi tahun 1965, keberadaan kelompok abangan semakin terjepit. Ruang-ruang aktualisasi dan ekspresi budaya mereka dibatasi bahkan ditutup. Keberadaan mereka di tengah masyarakat menjadi termarginal. Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung menganggap mereka sebagai komunis. Gerak-geriknya dipersoalkan dan selalu dikaitkan dengan relasi masa lalunya dengan PKI, partai yang telah dibubabarkan dan dilarang oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan kelompok abangan melakukan siasat agar bisa bertahan hidup. Tidak terkecuali dalam bidang keagamaan, mereka akhirnya terpaksa harus masuk ke salah satu agama resmi, yaitu Islam. Selanjutnya, ketika Clifford Geertz melakukan penelitian di Mojokuto Pare, polarisasi dan fragmentasi masyarakat yang dipicu oleh ideologi politik

sedang dalam kondisi puncak-puncaknya. Bahkan, polarisasi tersebut telah berakibat pada konflik baik laten maupun manifes yang sulit diurai penyelesainya.

Munculnya varian Islam abangan di Kota Kediri selain disebabkan oleh pemahaman teologis terhadap ajaran Islam, juga dipicu oleh konflik politik tahun 1965 yang selama Orde Baru berkuasa mereka ditempatkan sebagai "orang-orang yang berbahaya". Oleh karena itu, mereka perlu diawasi dan dibatasi ruang geraknya.

Sebenarnya kelompok abangan di Kota Kediri ini jika dicermati lebih mendalam terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang secara teologis sebagai orang Islam minimalis. Mereka tidak melakukan ritual agama dengan baik sebagaimana kelompok santri. Akann tetapi, mereka jika berurusan dengan publik dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang Islam. Kelompok kedua, mereka masuk menjadi penganut alian kebatinan atau penghayat kepercayaan. Ciri khas yang menonjol dari komunitas abangan kedua tersebut adalah kesetiaan dalam mengamalkan ajaran-ajaran tradisi nenek moyang seperti slametan dan berbagai tradisi adat yang berlaku di masyarakat secara turun temurun.`

Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok santri maupun kelompok abangan di Kota Kediri telah mengalami perubahan. Jika pada tahun 1960-an kelompok santri selalu identik dengan para pedagang pasar dan kelompok abangan selalu didominasi para piyayi atau pegawai pemerintahan, di era sekarang kedua kelompok tersebut telah mengalami perubahan secara mendasar. Masing-masing telah membaur baik dari jenis pekerjaan maupun kelas sosial. Artinya, baik

kelompok abangan maupun santri sama-sama plural yang di dalamnya terdiri dari beragam profesi seperti petani, pedagang, pegawai, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dengan demikian klasifikasi santri dan abangan berdasarkan kelas sosial dan jenis pekerjaan sudah tidak relevan lagi.

Pemilu pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia adalah pemilu 1955. Adapun hasil hasil perolehan suara yang ada di Kediri dari empat besar parpol: (1) PKI memperoleh suara 23.252 yang merupakan partai pemenang di wilayah Karesidenan Kediri; (2) Disusul kemudian perolehan suara dari PNI, yaitu 14.998;(3) Pemenang ketiga, partai NU sebesar 11.803 suara, dan yang ke-4 Masyumi 4.521 suara.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa partai yang banyak didukung oleh masyarakat Mataraman utamanya di Kediri adalah partai-partai nasionalis, yakni PNI dan PKI, sedangkan sebagian yang lain adalah partai-partai Islam, yaitu NU dan Masyumi. Selain mencerminkan kekuatan dukungan di balik perolehan partai politik tersebut, sebenarnya di sisi lain juga dicerminkan kecenderungan dari wajah keberagaman masyarakat di wilayah Mataraman beserta kelompok sosial yang menjadi penyokong di dalamnya. Berikut pernyataan Markaban :

> "Kediri ini hanya ada abang dan hijau. Saat pemilu pertama dua kekuatan tersebut saling berebut mendapatkan dukungan. Masyarakat NU biasanya memilih partai Nu sedangkan Masyumi didukung oleh orang Muhammadiyah. Kalau orang abangan ada dua, yang penggede atau pegawai masuk PNI, tapi kalau masyarakat biasa di desa-desa didekati sama PKI" (Wawancara, 9 Nopember 2019)

Sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa masyarakat Kediri pada umumnya merupakan petani dan sebagian yang lain buruh perkebunan. Pada saat itu partai yang yang paling intens berhubungan dengan kedua kelompok ini adalah PKI. Partai ini sangat lihai melakukan pendekatan menggunakan seni tradisional: jaranan, ledhek, dan kethoprak. Melalui kesenian inilah partai yang berlambang palu arit ini memfasilitasi petunjukkan diberbagai tempat. Sedangkan, untuk melakukan pendekatan kepada para petani, PKI menggunakan isu *land reform*,yaitu melakukan propaganda untuk mengambil aset tanah yang banyak dikuasai oleh para tuan tanah. Para tuan tanah inilah yang harus dilawan dan direbut tanahnya yang kemudian akan dibagikan kepada para petani miskin.

Di sisi lain, selain melakukan pendekatan dengan petani dan buruh perkebunan, dan buruh tani, masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan atau yang sering disebut Kejawen ini juga diklaim sebagai basis pendukung PKI. Kepadanya dikatakan bahwa dengan merangkul kaum Kebatinan atau orang kejawen ini adalah wujud pembelaan terhadap agama asli orang Jawa. Isu tentang nguri-uri tinggalan leluhur adalah daya tarik yang besar bagi sebagian masyarakat yang merupakan representasi kelas proletar. Singkatnya, PKI berhasil menarik simpati dari kalangan masyarakat abangan yang ada di Kediri, utamanya di wilayah pedesaan dan perkebunan. Itulah sebabnya karena persentase dari kelompok ini sangat besar maka PKI menjadi pemenang di Karesiden Kediri pada pemilu pertama ini.

Sedangkan, pemenang pemilu kedua adalah PNI. Partai yang mengandalkan kharisma Soekarno ini sangat massif

mendapatkan dukungan dari masyarakat di Kediri dan sekitarnya. Adapun yang menjadi pendukung utama dari partai penguasa saat itu adalah para pegawai dan sebagian petani. PNI saat itu merupakan representasi kelompok priyayi abangan. Mereka menggunakan jargon nasionalisme dengan istilah kaum marhen yang merupakan gambaran dari kehidupan petani di Indonesia.

Dalam gambaran Soekarno kaum marhen berbeda dengan kaum proletar sebagaimana yang digunakan oleh kaum marxis atau komunis. Jika kaum proletar adalah lapisan kelompok masyarakat yang tidak memiliki alat produksi karena seluruh alat produksi dimiliki para majikan (borjuis), kaum marhen bagi Soekarno adalah sosok petani di Indonesia yang sebagian besar yang masih memiliki lahan pertanian meskipun tidak kurang dari setengah hektar. Sisanya bekerja sebagai buruh tani. Itulah sebabnya sebutan kaum marhen lebih tepat disebut sebagai *wong cilik*, yaitu lapisan masyarakat bawah yang sering menghadapi ketertindasan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sebutan *wong cilik* tersebut hingga pada masa reformasi ini masih sering digunakan oleh PDIP sebagai partai penerus ajaran-ajaran Soekarno.

Berbeda dengan dinamika masyarakat abangan dalam politik, masyarakat santri yang ada di Kota Kediripun sejak masa pemerintahan Soekarno hingga masa pemerintahan Soeharto atau zaman Orde Baru juga mengalami dinamikanya tersendiri. Di Kediri basis kaum santri berpusat di pondok pesantren, tempat seorang kiai dan para santrinya menjalankan aktivitas pendidikan agama dan aktivitas lainnya yang menyangkut ajaran agama seperti mengaji kitab kuning, salat berjamaah, berzikir, dan berdoa. Hubungan antara kiai dan

santrinya adalah hubungan antara murid dan guru. Seorang kiai selain harus mengajarkan agama, juga mengajarkan akhlak kepada para santrinya. Bahkan, nantinya hubungan kiai santri tidak hanya sebatas saat masih mondok saja, tetapi berlanjut hingga menjadi alumni dan berkeluarga. Pola hubungan ini selalu dijaga sepanjang waktu hingga melahirkan relasi timbal balik antar keduanya semakin kuat. Kuatnya hubungan tersebut salah satu bentuknya bahwa seorang kiai tidak jarang diminta oleh alumni untuk meminta barokah doa saat santri atau alumni mempunyai hajat khusus seperti perkawinan, tasyakuran, hingga kematian. Itulah sebabnya kekuatan kiai tidak sebatas menyampaikan ajaran agama saja tetapi juga banyak menjadi tempat untuk berkonsultasi dan memberi nasihat dalam urusan-urusan dunia.

Berbeda dengan keberadaan partai Islam, pada pemilu 1955 terdapat dua partai Islam yang menjadi 5 besar: Masyumi dan NU. Keduanya merupakan partai yang merepresentasikan suara dan aspirasi umat Islam Indonesia. Sebelumnya, dua partai ini sebenarnya satu. Akan tetapi, karena ada friksi diantara para pengurusnya, sebelum pemilu digelar, tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri.

Sebagai partai yang ingin memperjuangkan kepentingan ummat Islam, sudah barang tentu simbol-simbol yang digunakanpun juga menggunakan simbol Islam. Masyumi menggunakan simbol bulan dan bintang sebagai lambang dari umat Islam yang sudah lama digunakan oleh negaa-negara Islam di Timur Tengah, sedangkan NU sendiri tetap menggunakan lambang organisasinya sendiri yang sejak tahun berdirinya 1926. Tidak itu saja, keberadaan partai-partai Islam mulai era ini selalu mengintroduksi kelembagaan

agama melalui keterlibatan para ulama ke dalam struktur kepengurusan partai.

Begitu pula yang terjadi di Kediri, keberadaan partai Islam baik Masyumi maupun NU selalu melibatkan para tokoh agama di Kediri. Bedanya, jika Masyumi diisi para tokoh agama dari kalangan ustad-ustad Muhammadiyah, NU melibatkan para tokoh agama dari pesantren dan para alumninya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Halim Moestofa sebagai berikut:

> "Kalau dari partai NU yang mempelopori dan menganjurkan jamaah untuk milih NU adalah para kiai sendiri. Dari fatwa dan perintah kiai itulah para santri dan masyarakat masuk menjadi bagian dari pendukung NU. Bagi kami perintah tersebut adalah wajib kami ikuti sebagaimana kami mengikuti beliau saat memperintahkan dalam hal agama". Karena sebelum itu kami masuk ke Masyumi juga karena nderek perintah kiai. Begitu para kiai memperintahkan untuk keluar dan masuk partai NU, ya kami *sami'na wa atho'na* (mengikuti perintah tersebut tanpa syarat)" (Wawancara, 20 Januari 2020)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaian umat Islam di Kediri adalah sebagai jamaah dari Nahdlatul Ulama. Organisasi keagamaan ini telah lama berkiprah dalam bidang dakwah dan pendidikan khususnya melalui jalur pondok pesantren. Kelompok Islam tradisional ini jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kelompok ormas lainnya yang ada di Kediri. Hal tersebut karena Kediri banyak berdiri pondok pesantren tua semisal pesantren Lirboyo dan pesantren Salafiah Bandarkidul yang memilki jumlah santrinya banyak dan berasal dari daerah-daerah di Idonesia. Oleh karena itu, keberadaan kiai yang merupakan pemimpin pesantren sangat disegani dan berpengaruh baik ke santri

sendiri maupun ke masyarakat sekitar pondok. Keberadaan pondok pesantren tersebut akhirnya dengan sendirinya menjadi sebuah komunitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengaruhnya melebar hingga ke level luar Kediri secara geografis maupun secara struktur sosial melintasi berbagai kelompok dan kalangan di masyarakat hingga di tingkat pemerintahan. Pengaruh kiai pesantren yang paling dominan terutama bagi masyarakat pedesaan. Sedangkan, Masyumi lebih banyak mendapatkan dukungan dari jamaah Muhammadiyah, para ustad yang biasanya lulusan pendidikan umum dan bersal dari perkotaan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh informan Halim Moestofa sebagai berikut

> "Semua pengasuh pondok pesantren dan pengurus NU yang ada di Kediri masuk menjadi pendukung Partai NU, baik KH Mahrus Ali, pengasuh pondok Lirboyo, KH Abu Bakar Pondok Salafiah, KH Ma'ruf pondok Kedunglo dan KH Jazuli Ploso adalah ulama-ulama terkemuka secara nasional. Dan itu diikuti pula oleh kiai-kiai yang lainnya. Namun ada juga kiai di Kediri yang tetap bertahan di Masyumi, yaitu KH Toha Mu'id, pengasuh pondok pesantren Al Ishlah Bandar Kidul." (Wawancara, 20 Januari 2020)

Pernyataan dari informan di atas menggambarkan bahwa NU sebagai kekuatan politik di Kediri cukup diperhitungkan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kiai pesantren yang didukungan secara sosial dari para petani dan pedagang pasar yang merupakan representasi masyarakat agraris. Atas dasar kondisi tersebut, NU menjadi menempati urutan ke-3 setelah PKI dan PNI. Adapun Masyumi sebagai representasi kekuatan santri modernis menempati urutan ke-4 setelah NU.

Meskipun sebagian besar pendukung Masyumi adalah kelompok Islam perkotaan dan berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah, tidak berarti tidak mendapatkan dukungan dari kelompok Islam pedesaan dan kiai. Di Kota Kediri salah satu pengasuh pondok pesantren yang tetap bertahan mendukung Masyumi adalah KH Toha Mu'id yang memimpin Pondok Pesantren Al Islah Bandarkidul. Hal ini tentu mengkibatkan para santri dan alumni Pondok Al Islah juga mengikuti sepak terjang kiainya. Menurutnya warga NU dan warga pesantren, perjuangan tetap bertahan sebagai perwujudan atas keinginan untuk menjaga persatuan sesama umat Islam meskipun berbeda ormas keagamaanya. Sampai penelitian ini dilakukan, sifat dan karakter para pengasuh pondok Al Ishlah kepada para santrinya adalah memberikan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai apapun.

Dari prespektif sejarah di atas, Pondok Pesantren Al Ishah memiliki corak dan afiliasi politik tersendiri dan tidak terikat sebagaimana para kiai NU lainnya. Ini terjadi dalam perkembangannya hingga era setelah reformasi.Bukti atas realitas ini, saat Pilkada tahun 2013, Abdullah Abu Bakar orang Muhammadiyah yang didukung PAN, menang sebagai pasangan Walikota yang menggandeng Lilik Muhibah yang merupakan menantu dari KH Toha Mu'id sendiri sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al Islah Bandarkidul sebagai wakilnya.

Kembali pada hasil perolehan suara pada pemilu tahun 1955, kelompok abangan dalam berpolitik diwakili PNI dan PKI. Sedangkan, kelompok santri diwakili NU dan Masyumi. Perbandingan perolehan suara antara partai nasionalis

dengan partai Islam di Kediri sangat jauh. Jika digabungkan, perolehan suara antara PKI dan PNI yang merupakan partai nasionalis berjumlah 38.250. Adapun perolehan partai Islam yang merupakan gabungan suara NU dan Masyumi berjumlah 16.324.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kediri dalam menyalurkan sikap politiknya lebih dominan ke partai-partai nasionalis dibandingkan ke partai Islam. Ini berarti mayoritas masyarakat Kediri berkultur abangan, sedangkan sisanya kelompok santri, baik dari kalangan santri tradisional maupun santri modern. Namun demikian, secara kultural baik abangan maupun santri tetap merupakan entitas yang cair. Keduanya dapat bertemu dalam ritus dan pola keberagamaan yang cukup harmonis dan saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pembelahan Politik oleh Penguasa Orde Baru

Orde Baru dalam awal pendiriannya mengklaim dirinya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Hal yang pertama kali dilakukan adalah meluruskan kembali berbagai penyelewengan UUD 1945 yng dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin dan bertekad untuk memegang teguh pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di samping itu, pengotak-ngotakan ideologis ada seperti yang terjadi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Pada pemilu 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan menghapus sistem multipartai. Menurutnya, sumber dari kekacauan politik yang mengganggu stabilitas politik adalah partai politik. Oleh karena itu, langkah

pertama yang dilakukan adalah melakukan pelarangan PKI dan membubarkannya termasuk organisasi yang ada di bawahnya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soekarno dilakukan pelarangan terhadap Masyumi, menggantiya dengan pembentukan partai baru, Parmusi. Semua aktivis Masyumi dilarang terlibat dalam kepengurusan Parmusi.

Konggres Pertama Parmusi tanggal 4-7 November 1968 memilih Mohammad Roem sebagai ketua Parmusi, tetapi pemerintah tidak menyetujinya.Sebagai gantinya, pemerintah mengangkat Djamawai Kusuma dan Lukman Harun sebagai ketua umum dan sekretaris Jendral Parmusi. Dalam perkembangannya, kedua orang tersebut dikudeta Naro dan Imran Kadir yang didukung militer. Akhirnya pemerintah melakukan campur tangan dengan mengeluarkan surat keputusan dengan menunjuk HMS Mintardja tokoh akomodatif Muhammadiyah sebagai ketua(Romly, 2006, hal. 60-61) (Romly, 2006, hal. 60-61).

Pemilu 1971 diikuti sepuluh partai politik: PNI, Parmusi, NU, Golkar, Parkindo, Partai Katholik, Perti, IPKI,dan Partai Murba. Dalam pemilu pertama di era Orde Baru tersebut Golkar telah menjadi mayoritas tunggal yang meninggalkan jauh perolehan suara partai-partai politik lainnya. Untuk lebih jelasnya perolehan partai politik pada awal Orde Baru ini digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 Perolehan Suara Pemilu 1971

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEH SUARA
1	Partai Nasionalis Indonesi (PNI)	3.793.266
2	Partai NU	10.213.650
3	Parmusi	2.930.746
4	Golkar	34.348.673
5	Parkindo	733.359

6	Partai Katholik	603.740
7	IPKI	338.403
8	PSII	1.308.237
9	PERTI	381.309
10	Partai Murba	48.126

Sumber KPU RI (2019)

Dengan dasar untuk mempersempit konflik yang berkepanjangan akibat perbedaan ideologi antarparatai politik, pemerintah Orde Baru membuat kekuatan politik tengah, yaitu Golkar. Cara ini ternyata cukup efektif untuk menekan konflik antarpartai politik disamping sikap politik pemerintah sendiri saat itu yang sangat besar dalam membesarkan Golkar.Tekait hal ini, salah satu informan yang juga mantan anggota DPRD Kota Kedir, Tamam Moestofa, menyampaikan pernyataan sebagai berikut

> "Pada pemilu tahun 1971, Golkar sebagai pendatang baru, telah memenangi pemilihan umum dengan sangat mencolok. Meskipun sangat mengejutkan, masyarakat sebenarnya sudah banyak yang menduga atas kemenangan itu karena keterlibatan pemerintah dalam kemenangan sangat besar. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena meskipun Golkar ikut sebagai kontestan pemilu, tetapi dalam undang-undang kepartai, tidak dimasukkan sebagai partai politik. Namun sejarah akhirnya membuktikan, bahwa Golkar bukan hanya sebatas wadah golongan karya saja. Tetapi telah berubah menjadi partai pemerintah yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah." (Wawancara, 15 Desember 2019)

Pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa timbulnya goncangan-goncangan politik nasional di masa lalu disebabkan belum membudayanya pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Masyarakat dianggap belum dapat mengahayatinya

dengan penuh. Oleh karena itu, dikeluarkanlah TAP MPR no 4 tahun 1978, yang menjadi dasar dimulainya sosialisasi pancasila secara masif ke seluruh lapisan masyarakat melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Langkah selanjutnya adalah menata bidang politik dengan cara melakukan perubahan-perubahan pada infra struktur politik yang akan mendukung terciptanya kestabilan politik.

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan dari awal bahwa masyarakat Mataraman yang ada di Kota Kediri dari masa Orde Baru hinga masa reformasi terjadi perubahan politik sehingga berakibat pada perubahan orientasi masyarakat di dalamnya. Tentu hal tersebut berlaku secara nasional, mengingat selama pemeintahan Orde Baru, pemerintahan di setiap daerah selalu dikendalikan dari pusat. Pemerintah dalam hal ini sangat dominan menentukan corak dan langgam politik di semua daerah di Indonesia. Kehidupan politik lima tahunan melalui pemilu telah dimodifikasi hanya menjadi tiga partai politik yang boleh berkontentasi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan partai-partai yang sebelumnya telah lama berdiri digabung (fusi) menjadi satu partai.

Adapun pengelompokan partai pada masa Orde Baru ini didasarkan pada jenis kelompok pendukung dan ideologi. Kelompok partai pertama adalah partai-partai yang berideologi Islam, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam (PERTI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Keempat partai ini melebur menjadi satu bernama Partai Persatuan Pembagunan (PPP)

pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan kelompok partai kedua adalah berdasarkan ideologi nasionalis yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), ditambah dua partai agama non muslim yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Hasil dari lima organisasi partai ini diberi nama Partai Demorasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Januari 1973.

Sedangkan Golkar didirikan sejak tahun 1964 bernama Sekber Gokar. Organisasi ini semula didirikan sebagai wadah untuk menghadapi kekuatan PKI dan dalam posisinya tersebut ia tidak berafiliasi pada partai politik. Organisasi kemasyarakatan ini beranggotakan organisasi pemuda, profesi, buruh, nelayan dan sarjana. Tateapi dalam perkembangannya pada tahun 1970 menjadi peserta pemilu tahun 1971 dengan nama Golongan Karya (Golkar). Maka dalam hal ini cara pemerintah waktu itu dengan melakukan fusi kepartaian tidak lain adalah upaya bagi rezim Orde Baru untuk membatasi ruang politik masyarakat.

Salah satu kesaksian dari informan, Dwidjo (50) mengatakan bahwa keberadaan Golkar di Kediri pada awalnya sangat lihai dalam menarik simpati ke masyarakat. Tetapi dalam hal lain ia juga cerdik yaitu mengambil aset-aset PNI pada saat itu. Salah satunya adalah mengambil alih panti-panti marhen yang ada di setiap daerah sebagai tempat aktivitas politiknya. Lebih lanjut Dwidjo mengatakan:

> "Golkar yang merupakan hasil fusi pada tahun 1971 sebenarnya berasal dari orang-orang PNI yang merupakan partai penguasa sebelum orde baru. Banyak panti marhaen yang ada pada masa soekarno setelah kekuasaan berganti

> ke zaman orde baru dipakai sebagai kantor dan sekretariat golkar. Dan gerakan itu biasa di lihat di daerah-daerah. Dan memang golkar sangat lihai mempermak dirinya dengan mengambil hal-hal positif dari partai lain seperti murba." (Wawancara, 20 September 2019)

Di Zaman Orde Baru, tampak ada perasaan bahwa keterlibatan Islam dalam politik praktis cenderung mengganggu kestabilan politik dan pemerintahan, dan oleh karena itu mengganggu pula gerak pembangunan yang menjadi program dan ciri utama pemerintah. Karena itu saat Orde baru Islam dilihat sebagai agama. Dalam pengertian ibadah dan soal-soal kemasyarakatan yang tidak bersifat politik praktis. Apalagi setelah pancasila dijadikan sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan organisasi sosial politik di Indonesia.

Seanjutnya pada pemilu-pemilu berikutnya 1977, 1982, 1987, 1992,1997 Golkar menjadi partai hegemonik. Dalam sejarah pemilu Orde Baru perolehan suara Golkar tidak pernah dibawah 60%. Pada pemilu 1987 Golkar memperoleh kenaikan paling signifikan. Selama Orde Baru. Sebaiknya, bagi PPP pemilu 1987 adalah pemilu yang paling mendaptkan suara paling kecil. Terkait dengan naiknya suara Golkar, Halim memberi penjelasan sebagai berikut :

> "Saat itu, yaitu tahun 1984 NU sedang melaksanakan muktamar di Situbondo. Hasil muktamar memutuskan NU kembali ke khittah 1926. Artinya NU menarik diri dari politik praktis dan dukung-mendukung terhadap partai politik tertentu. Jadi saat itu orang-orang NU yang sebelumnya ada di PPP keluar dari PPP dan pindah ke partai lain, tapi sebagian yang lain memang memilih netral. Jadi orang NU di Kediri saat itu memilih dalam dua bentuk, sebagian keluar dari PPP dan pindah ke Golkar dan sebagian lagi tetap netral dan berkhidmah di NU sebagai ormas keagamaan" (Wawancara, 20 Januari 2020)

Pada pemilu 1997 Golkar kembali mendapatkan limpahan suara dari PDI. Hal tersebut disebabkan pendukung PDI merasa kecewa terhadap penggusuran Megawati sebagai ketua umum PDI digantikan Suryadi yang didukung pemerintah dan militer.. Masa di daerah termasuk di Kediri melampiaskan kekecewaan tersebut sebagian memilih Golkar dan sebagian lagi ke PPP. Bagi PDI sendiri pemilu 1997 merupakan pemilu dengan perolehan suara terendah dalam sejarah Orde Baru yaitu 3,06 % dari total suara sah secara nasional.(Pamungkas, 2009, hal. 8) (Pamungkas, 2009, hal. 8)

Di lihat dari prepektif dan cara kepemimpinan dikelola oleh penguasa, barangkali era rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun adalah cerminan dari cara dan sistem kekuasaan Jawa dioperasikan kembali di era modern. Selama masa Orde Baru berkuasa, tidak terjadi pengawasan dam kontrol dari masyarakat kepada pemerintah. Di era tersebut banyak terjadi campur tangan negara ke dalam persoalan lokal. Tidak berhenti di situ saja, jaringan administrasi pemerintahan mulai pusat tersebar dan masuk keseluruh daerah hingga daerah terpencil di pelosok desa.(H Antlöv, 2001, hal. 10) (H Antlöv, 2001, hal. 10)

Jabatan kepala desa atau lurah saat itu diperoleh melalui pilihan kepala desa. Seluruh masyarakat "diwajibkan" hadir untuk memilih calon-calon yang sebelumnya telah disetuji oleh camat dan bupati. Maka yang terjadi kemudian bagi lurah atau kepala desa terpilih adalah terjadinya tekanan ganda. Satu sisi ada keharusan moral untuk mewakili penduduk desa namun satu sisi lain berhadapan dengan permintaan atasan. Salah seorang mantan kepala desa, Supadi (63) mengatakan:

> "Kepala desa itu oleh pemerintah dianggap sebagai pejabat publik dan oleh karena itu diminta untuk bergabung dengan Golkar, dan harus menjadi pelaksana yang seta bagi kebijakan negara. Begitu pula untuk tokoh masyarakat dengan atau tanpa persetujuan mereka, mereka dipaksa atau dihimbau menjadi bagian dari birokrasi, menduduki jabatan yang digaji atau tidak dalam birokrasi desa." (Wawancara, 23 Januari 2020)

Pada era Orde Baru, selalu dikobarkan semangat ideologi Pancasila oleh pemerintah kepada semua lapisan masyarakat dengan cara harus saling membantu satu dengan yang lain atas nama menjaga konsesnsus nasional yaitu Pancasila. Untuk menjaga persatuan diantara warga masyarakat, penguasa Orde Baru menciptakan politik massa mengambang. Keijakan Orde Baru adalah menghapuskan seluruh kegiatan partai politik kecualai untuk kampanye pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut Supadi (63) mengatakan:

> "Kalau bicara pemilu selama Orde Baru yang paling diingat ya saat kampanyenya.Karena yang dimaksud kampanye itu ya konvoi secara bersama-sama dengan yang lain disepanjang jalan Doho dan jalan-jalan utama di Kota. Bagi mereka yang punya sepeda motor maka dia akan naik sepeda motor keliling kota. Tetapi bagi yang nggak punya, disuruh berkumpul untuk naik truk dan pick up bersama yang lain. Kampanye tersebut waktunya diatur waktunya oleh panitia biar nggak bentrok dengan massa partai lain. Dan setiap orang diminta untuk bergabung dan datang saat ngumpul di lapangan dan stadion Barawijaya oleh para kader partai. Dan di tempat tersebut sudah disiapkan hiburan musik dan nyayi sambil berkali-kali ngucapkan yel-yel hidup partai secara bareng-bareng. Saya kira kalau bicara pemilu yang paling berkesan ya saat kampanye itu, bukan coblosannya.." (Wawancara, 23 Januari 2020)

Menurut pengakuan Supadi (63) pada zaman Orde Baru, rakyat dilarang berpolitik, kecuali menjelang pemilu, itupun sangat terbatas yakni sebatas melakukan pemungutan suara dengan diarahkan sebelumnya oleh para aparat pemerintahan agar setiap orang menjatuhkan pilihan politiknya kepada organisasi peserta pemilu yang bukan partai politik (Golkar). Selain itu, masyarakat diberikan gambaran ketika negara dipimpin oleh partai politik maka akan cenderung melahirkan situasi konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu kegiatan partai politik di daerah sangat dibatasi dengan ketat. Kegiatan politik hanya saat diperbolehkan berlangsungnya kampanye pemillihan umum dalam waktu singkat menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam politik lima tahunan menjelang pemilu, biasanya masyarakat telah diingatkan melaui siaran radio RRI dan TVRI secara terus menerus sepanjang hari. Ditambah lagi, dalam berbagai pertemuan yang sudah dirancang sebelumnya, masyarakat selalu dihimbau oleh aparat desa, kelurahan maupun kecamatan untuk mensukseskan pemilihan umum. Dengan cara tersebut maka maka masyarakat telah dianggap ikut mewujudkan demokrasi pancasila sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemerintah.

Terkait dengan pilihan politik masyarakat saat akan melakukan pencoblosan di bilik suara, para elite masyarakat mulai tingkat kabupaten atau kotamdya hingga desa selalu meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mengumpulkan warga dalam suatu pertemuan, agar nantinya mereka memilih tanda gambar Golongan Karya. Alasnya dengan memilih tanda gambar tersebut maka masyarakat akan terhindar dari persoalan besar yang berlarut-larut,

hingga tidak akan dibangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik dan lain sebagainya di lingkungannya.

Selain itu,, selalu disampaikan oleh para pejabat di tingkat kecamatan dan kabupaten, bahwa masing terdapat suatu kelompok yang ingin memaksakan kepada ideologi tertentu melalui partai politik sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat hingga memicu konflik hingga berkali-kali ada usaha untuk memberontak terhadap negara Pancasila yang sah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Poniman (65) salah seorang mantan pegawai kecamatan Mojororot mengatakan:

> "Saya sebagai aparat kecamatan waktu itu sering menyampaikan kepada masyarakat saya agar negara kita yang berdasarkan Pancasila ini harus dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, dan tidak boleh diubah-ubah lagi sesuai dengan kemauan ideologi partai politik. Pancasila itu tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Tetapi di tengah-tengah. Ke kanan berarti condong ke agama (Islam) dan ke kiri berarti sekuler bahkan komunis. Maka saran saya kepada masyarakat, agar bangsa ini tetap lestari maka pilih yang tengah saja. Gambar tengah itu kan jelas Golkar, dan dia bukan partai politik." (Wawancara, 13 Nopember 2019)

Dari ilusrasi sebagaimana yang telah disampaikan informan di atas, dapat diketahui seluruh kekuatan politik Orde baru telah disalurkan lewat jaringan birokrasi mulai pusat hingga ke desa-desa. Intinya bahwa pemilu harus disukseskan pelakasanaanya yaitu dengan cara memilih sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Sebab ada logika yang sering di sampaikan oleh negara lewat para birokrat kabupaten hingga perangkat kecamatan dan desa, bahwa jika negara diserahkan kepada partai politik, maka akan terjadi

konflik yang berkepanjangan sebagaimana yang terjadi pada masa Orde lama. Sehingga Pancasila yang menjadi dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia akan terancam hilang dari negara kita.

Jika dilihat dominasi Golkar dalam keseluruhan Pemilu Pemilu Orde Baru maka format kepartaian yang terbentuk dapat dikatakan sebagai sistem kepartaian hegemonik. Ciri kepartaian hegemonik ini adalah adanya sebuah partai atau sebuah koalisi partai yang mendominasi proses politik dalam suatu negara dalam kurun waktu yang lama. Partai hegemonik tidak akan membiarkan terjadinya kompetisi baik yang bersifat formal maupun aktual. Partai-partai diadakan hanyalah sebagai partai kelas 2 karena mereka tidak akan diperkenankan untuk berkompetisi dengan fair dan dari basis yang sama. Akibatnya partai hegemonik akan tetap berkuasa.Demikian pula juga tidak ada sanksi yang akan membuat Partai hegemonik tersebut responsif. Tidak hanya perubahan kekuasaan, segala bentuk tentang kompetisi pun dikesampingkan.

Ciri dari sistem kepartaian hegemonik di atas masih tampak nyata dalam sejarah pemilu Orde Baru. Kontestasi pemilu dan proses politik hanya di dominasi Golkar kalaupun kontestasi itu menyertakan PPP dan PDI partai-partai tersebut hanyalah sebagai penyerta yang tidak diperhitungkan keberadaannya. PPP dan PDIP eksistensinya dipelihara tetapi tidak lebih sebagai partai kelas 2. Sebab yang namanya kompetisi sesungguhnya tidak pernah terjadi antara Golkar dengan PPP atau PDI. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya dalam pemilu - pemilu Orde Baru tidak ada kompetisi Selain

itu, tidak ada satupun instrumen yang dapat memaksa Golkar untuk responsif terkait aspirasi masyarakat.

Akibat dari sistem yang demikian lahirlah legislatif yang lebih tanggap kepada pemerintah daripada kepada konstituen atau masyarakat. DPR tidak lebih sebagai lembaga yang sekadar memberi persetujuan atas segala usul dan kebijakan yang diambil pemerintah. DPR lebih tanggap terhadap pemerintah disebabkan oleh banyak faktor. Pertama rekrutmen calon anggota DPR tidak memungkinkan lahirnya orang-orang yang yang merupakan perwakilan dari konstituen terhadap pemerintah, karena mereka sebelum dicalonkan terlebih dahulu mereka harus lolos penelitian khusus. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk mencegah orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah. Kedua, sistem kepartaian hegemonik dengan Golkar sebagai mayoritas tungga,l tidak memungkinkan munculnya kekuatan penyeimbang. Ketika komposisi anggota DPR yang menyertakan unsur yang diangkat oleh Presiden yaitu militer maka akan menjadikan kekuatan hegemoni pemerintah semakin tak terbendung(H Antlöv, 2001) (H Antlöv, 2001).

Selanjutnya jika terdapat anggota DPR yang yang membangkang maka ada sanksi yang berupa recall karena dianggap mengganggu stabilitas politik dan yang terakhir sistem yang demikian tidak akan pernah melahirkan sirkulasi elite sebagaimana seharusnya. Elite yang berkuasa hanya berputar pada figur-figur itu saja yang lebih dekat dengan kekuasaan Orde Baru.

Orientasi PolitikMasyarakat di Era Reformasi

Sistem poltik yang belaku di era reformasi berbeda dengan sistem politik pada pemerintahan Orde Baru. Sistem politik di era ini ditandai dengan lahirnya banyak partai politik (multi partai). Pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem politik multi partai ini dipekirakan tidak akan ada lagi *single mayority* yang menguasai pemerintahan.

Di sisi lain, munculnya gerakan reformasi ditandai dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan sistem politik yang semula otoriter menjadi sistem yang demokratis. Pengelolaan tata pemerintahan yang semula pada zaman Orde Baru bersifat sentralistik dan represif menjadi pemerintahan yang bebas dari tekanan politik penguasa dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Substansi otonomi daerah adalah terciptanya kekuasaan yang sepenuhnya dari masyarakat untuk menentukan nasibnya secara mandiri dan independen, tentunya dengan menggunakan pemerintahan di daerah sebagai pelaksananya. Dengan demikian , masyarakat memilki kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dari sektor ekonomi, budaya dan peri kehidupan sosial lainnya.

Sementara itu di sisi lain, partai politik merupakan embrio demokrasi perwakilan modern. Melalui sistem demokrasi, partai politik menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat untuk dapat diartikulasikan menjadi sebuah kebijakan. Selain itu,, partai politik juga berfungsi sebagai agen untuk mereproduksi kader-kader pimpinan bangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan partai politik pada hakikatnya merupakan cermin aspirasi masyarakat, yang membutuhkan wadah untuk mengelola berbagai kepentingan dan konflik. Pengelolaan konflik dan kepentingan dapat

dipecahkan secara damai, dan menjadi salah satu tugas partai politik untuk menjembataninya. Partai politik juga dikenal sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat, sekaligus wadah untuk menempatkan kader yang potensial untuk meraih kekuasaan politik. Mekanisme meraih kekuasaan politik melalui mekanisme pemilu yang diadakan secara berkala.

Dalam konteks demokrasi modern, peralihan kepemimpinan diatur melalui pemilu secara berkala dan diikuti oleh konstentan dari partai politik. Pemilu sendiri berfungsi menciptakan pemerintahan yang kredibel, parlemen yang representatif, sirkulasi elite yang sehat, serta mewujudkan berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara institusi-institusi politik. (Bakti, 2012)(Bakti, 2012)

Pengkaderan organisasi melalui partai politik, yang menjadi salah satu tugas partai politik pada gilirannya akan menciptakan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki visi dan misi ke depan dan siap bertarung dalam Pemilu. Pemilu sendiri merupakan mekanisme demokrasi, dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. (Gaffar, 2000)(Gaffar, 2000) Secara teoritis, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan, dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.

Sikap masyarakat Mataraman di Kota kediri cenderung dalam menerima fenomena kekuasaan sebagai sesuatu yang

harus dihormati, bukan saja hal tersebut diyakini sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan orang banyak, tetapi juga karena mereka yakin bahwa perlawanan terhadapnya tidak akan pernah membawa keuntungan bagi masyarakat luas.

Sikap dasar seperti itu memang menguntungkan posisi birokrat dalam berhadaan dengan masyarakat. Mobilisasi pendapat, sikap, dan dukungan masyarakat atas setiap kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah pada umumnya dapat dilakukan tanpa kesulitan yang berarti. Meskipun sikap hormat dan patuh ini juga membawa berbagai ekses yang kurang menguntungkan bagi keberhasilan pembangunan karena cenderung memperlemah fungsi kontrol sosial terhadap perilaku birokrat yang menyimpang dari aturan permainan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dwidjo (50) :

> "Orang Kediri itu bersikap cuek, meskipun dalam urusan yang menyangkut kepentingan bersama, misalnya oleh seorang pejabat pemerintahan yang kadang dilihat secara aturan telah menyimpang. Kecuali memang dia melakukan dosa besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu segala hal yang terkait dengan kontrol terhadap pemerintah memnag tidak terjadi secara fulhgar dan keras. *Wis kono kono*, nanti kalau sudah mentok pasti akan berhenti sendiri." (Wawancara, 20 September 2019)

Kemenangan Golkar dalam pemilu sepanjang Orde Baru ikut membawa pengaruh bagi sabilitas politik di Kediri saat itu. Sebaliknya, kuatnya posisi birokrat di daerah ini telah secara langsung menjamin kemenangan Golkar selama Orde Baru berkuasa. Dengan dua pernyataan itu, sesungguhnya

sudah cukup bagi kita untuk memahami lingkungan sosial politik para birokrat di Kediri.

Selanjutnya dalam kaitanya dengan proses perubahan orientasi politik masyarakat di Kota Kediri, akan dijelaskan berbagai kondisi sosial kultural yang berimplikasi terhadap perubahan orientasi politik . seiring dengan perubahan sistem politik nasional yaitu dengan lahirnya era reformasi. Kondisi sosial kultural tersebut sebenarnya telah terjalin lama dan dipraktikkan dalam dalam tradisi dan keyakinan masyarakat, terutama dalam hal upacara *slametan* bersih desa dan pelestarian kesenian tradisional jaranan. Sedangkan hubungan harmonisasi dalam hubungan antar umat beragama juga telah terbentuk setelah era reformasi.

Pemilu 1999 dan 2004 : Di Bawah Bayang-Bayang Politik Aliran

Pemilu tahun 1999 merupakan penyelenggaraan pemilu pertama kali di era reformasi. Pemilu ini menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Saat itu, penentuan calon terpilih di dasarkan pada nomor urut yang telah ditentukan oleh parpol sebagaiman yang telah dicetak dalam surat suara. Sedangkan pada pemilu 2004, sistem pemilu mengalami perubahan karena mengadopsi sistem proporsional semi terbuka yang memungkinkan pemilih untuk dapat memilih calon maupun partai. Dengan sistem yang ada saat itu, seorang calon bisa secara otomatis mendapatkan suara yang jumlahnya setara atau melebihi jumlah kuota partai untuk memenangkan satu kursi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pola afiliasi politik seperti apa yang di kemukakan Geertz, dimana

pemilih Santri memilih partai Islam, pemilih Abangan memilih partai Nasionalis, dan pemilih priyayi memilih Golkar masih berlaku. Golongan masyarakat Abangan di Kediri cukup banyak, walaupun Kediri ini terkenal dengan masyarakat yang Islamnya cukup besar.

PDI-P memiliki pendukung yang cukup banyak yang dibuktikan dengan suara PDIP hasil pemilu 1999 dan 2004 yang signifikan dan hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Kediri, Kota Kediri). Di daerah Kabupaten Kediri PDI-P meraih 510.450 suara (38,47%) pada pemilu 1999 dan 357.008 suara (28,97%) pada pemilu 2004. Dengan demikian, walau kultur pesantren cukup kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kediri, namun tidak serta merta menjadikan Kediri sebagai basis partai Islam. Karakteristik Masyarakat Kediri yang heterogen dengan kultur Jawa yang kental telah menjadi tembok tebal bagi sebagian warga Kediri dalam menahan pengaruh politik Islam yang datang dari kultur pesantren. Oleh karena itu, walaupun mereka dalam kehidupan kesehariannya mereka bersatu padu dalam menjalankan ritual yang bercirikan Islam Tradisional seperti tahlilan, yasinan ataupun yang lainnya, namun dalam hal aspirasi politik mereka berbeda.

Pada pemilu 1999 ada sekita 48 partai politik yang ikut berkompetisidalam pemilu, namun hanya ada enam partai yang lolos electoralthreshold 2,5% yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Pada Pemilu 2004, jumlah partai yang ikut pemilu menurun drastris menjadisetengahnya (24 partai), dari keenam partai incumbent hanyaPBB yang tidak bisa lolos threshold 3% namun ada 2 partai yangbaru masuk yaitu PKS dan Demokrat. Pada pemilu 2009, partai politikmengalami

peningkatan kembali menjadi 38 partai politik yang ikutkompetisi. Dari ke 38 partai ini, ada 9 partai politik yang lolosparliamentary threshold 2,5%, 7 partai incumbent dan 2 partai baru yaitu Gerindra dan Hanura.

Pada era ini pimpinan negara dipegang oleh KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri di tengah tensi politik yang sangat tinggi. Pada masa ini juga sering terjadi bongkar pasang kabinet dan konflik antara eksekutif dengan legislatif, yang kemudian berujung pada dijatuhkannya presiden Abdurrahman Wahid karena tuduhan korupsi dana Bulog. Selama pemerintahan Gus Dur,tidak kurang 14 kali terjadi pergantian menteri dan 5 kasus yang menyebabkan ketegangan antara DPR dan presiden terus terjadi setelah Abdurrahman Wahid dipaksa turun dari kursi presiden, Megawati naik menjadi presiden yang didampingi hamzah Haz.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil pemilu 1999 telah menjadikan partai sebagai kekuatan politik yang sangat kuat dan dominan. Dominasi partai tersebut tidak hanya terjadi di dalam tubuh parlemen tetapi juga masuk di tubuh kabinet. Era ini dapat disebut sebagai masa kekuasaan partai politik meskipun di bawah sistem pemerintahan presidensil.

Tidak seperti yang diperkirakan oleh banyak orang, pemilu yang diperkirakan akan terjadi gesekan dan konflik keras antara massa pendukung kontestan pemilu ternyata tidak terjadi. Pemilu 1999 justru berlangsung secara aman, bahkan antusias masyarakat untuk hadir dalam pemilu sangat tinggi yaitu 91% sebanding dengan angka partisipasi pada pemilu 1955. Padahal tidak ada mobilisasi untuk pemilih seperti yang pernah terjadi pada era orde baru. Diduga tingginya angka

partisipasi disebut adalah satu bentuk luapan kegembiraan rakyat atas lahirnya era demokrasi, dan sekaligus adanya harapan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia.

PDIP sebagai simbol kekuatan partai nasionalis mendapatkan perolehan suara terbesar dan sangat prestisius yaitu 33,%. Hasil tersebut melampaui hasil yang dicapai oleh PNI Pada tahun pemilu 1955. Perolehan suara PDIP tersebut merupakan sebuah prestasi yang tidak akan mungkin dengan mudah terulang lagi pada pemilu-pemilu berikutnya.

Sementara itu Partai Golkar yang dijadikan musuh bersama oleh partai-partai orde baru dilanda perpecahan internal. Perolehan suaranya terjun bebas jika dibandingkan dengan perolehan suara dalam pemilu Pemilu Orde Baru. Meskipun demikian Golkar masih perkasa, karena dia berhasil menempatkan dirinya pada rangking kedua dalam perolehan suara setelah PDIP. Kejutan lain adalah perolehan suara PAN. Partai ini disebut-sebut akan memperoleh suara yang sangat besar, karena identifikasi yang melekat pada dirinya sebagai gerbong kaum reformis. Namun trnyata hasilnya tidak sesuai tidak seperti yang diduga, PAN hanya mampu meraup 7%, sementara PKB partai baru yang didirikan oleh Kyai NU menempatkan dirinya pada rangking ketiga dan ternyata partai tersebut tidak mampu mengulang kesuksesan NU seperti pada pemilu 1955.

Pada pemilu legislatif 5 April 2004, sejumlah partai memperebutkan suara dari kelompok masyarakat pemilih yang sama,seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PartaiGolkar yang memperebutkan kaum Nasionalis, Partai AmanatNasional (PAN) dan Partai Keadilan

Sejahtera (PK Sejahtera) mencari suara kaum Islam modern, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperebutkan suarakelompok Islam Tradisional. Hal ini dikuatkan oleh pandangan Ichlasul Amal (2004), bahwa hasil pemilu legislatif menunjukkandengan jelas asal-muasal suara yang diperoleh empat besar partai pemenang pemilu, Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP. Keempat partai itu mendulang suara dari kelompok Islam dan Nasionalis. Masyarakat masih mencoblos partai berdasarkan aliran, budaya, dan agama.

Di Kota Kediri ciri sosial dan budaya berpengaruh terhadap pola afiliasi politik. Masyarakat tlatah Mataraman dari sejak 1955 hingga 2004 selalu loyal kepada partai yang Nasionalis. Banyak kalangan menyebut bahwa orang Mataraman utamanya di Kediri, tidak suka dengan hal-hal yang mencolok, misalnya Islam yang terlalu Islam, karena mereka anggap tidak Nasionalis. (Kompas, 21 Juli 2008).

Kenyataan seperti ini tidak salah apabila Kediri dikatakan sebagai daerah "semangka", yaitu daerah yang dipermukaannya hijau (Islam), namun di dalamnya merah (nasionalis). Dalam kehidupan sosial, mayoritas masyarakat masih menjadikan tokoh agama atau kiyai sebagai panutan, dan akhirnya setiap kali dalam bidang pemerintahan ataupun saat pemilu masih memiliki meskipun tidak sebesar saat diranah sosial keagamaan. Dalam pemilu 1999 dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang "merah", dan lima tahun kemudian, dalam pemilu 2004 PKB yang "hijau" unggul.

Tabel 4 Perolehan Kursi Pemilu 2004

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	PDI Perjuangan	24.835	8
2	Partai Kebangkitan Bangsa	34.863	9
3	Partai Golkar	12.280	4
4	Partai Demokrat	7. 024	3
5	Partai Amanat Nasional	6.734	3
6	Partai Keadilan Sejahtera	2.412	1
7	Partai Persatuan Pembangunan	2.002	1
8	Partai Damai Sejahtera	2.674	1
	Jumlah		30

Sumber : KPU Kota Kediri

PDIP dalam pemilu 2004 mendapatkan suara 24.835. Perolehan suara tersebut berasal dari 3 daerah pemilihan yang jumlahnya hampir merata di 3 kecamatan. Tetapi jika dibandingkan dari perolehan ketiga kecamatan, maka basis pendukung paling banyak partai berlambang kepala banteng ini ada di Kecamatan Kota. Di kecamatan tersebut memang secara sosiologis banyak bermukim pemilih dari kalangan masyarakat miskin. Selain itu, dilihat dari corak keberagaman, masyarakat di kecamatan ini adalah abangan. Wilayah ini juga berdiri sejumlah tempat beribadah gereja dan komunitas penghayat kepercayaan. Tampaknya PDIP masih menjadi partai andalan bagi masyarakat abangan dan non mulim di wilayah kecamatan tersebut.

Sedangkan PKB yang merupakan partai yang didirikan oleh PBNU berhasil menang dalam pemilu kali ini dengan perolehan suaranya melebihi partai yang lain. Jumlah perolehan suara dari partai ini adalah 34.863. Jika dibandingkan dengan dengan perolehan PDIP hampir selisih 10.000 suara. Namun dalam perolehan kursi di DPRD sama-sama

memperoleh 9 kursi. Hal tersebut karena yang digunakan untuk menghitung perolehan kursi dengan menggunakan model elektoral treshold, dan bilangan pembagi pemilih (BPP). Basis dukungan PKB ada di Kecamatan Mojoroto yang secara sosiologis banyak terdapat masyarakat santri dan pondok pesantren. Saat itu PKB berhasil mendapatkan kursi di kecamatan kulon kali ini hingga 4 kursi.

Sedangkan dukungan dari dapil lain ada di Kecamatan Kota dan Pesantren. Di Kecamatan Pesanren PKB juga mendaptkan perolehan 3 kursi. Masyarakat di Kecamatan pesantren karakternya hampir sama dengan Mojoroto, selain banyak penduduknya bekerja di sektor pertanian, secara keagamaan masyarakatnya adalah bercorak santri tardisional yang dalam kehidupan sosialnya berafiliasi dengan ormas NU. Adapun di Kecamatan kota, PKB tidak banyak mendapatkan suara, tetapi masih mendaptkan 2 kursi. Dua kursi tersebut didapatkan dari jamah masjid dan sebagian merupakan dukungan kalangan etnis Cina di Kota Kediri yang dikabarkan saat itu masih loyal terhadap perjuangan Gus Dur.

Urutan ketiga dari pemenang pemilu berikutnya adalah Partai Golkar. Partai bentukan Orde Baru ini masih solid meskipun saat awal reformasi banyak mendapatkan hujatan dan protes dari banyak kalangan. Hal tersebut karena menurut pandangan masyarakat partai berlambang pohon beringin ini sebagai representasi pemerintah yang korup dan sering melakukan represi terhadap masyarakat kecil. Meskipun demikian dalam pemilu 2004 ini Partai Golkar masih mendapatkan 4 kursi dan menurut aturan masih berhak menjadi wakil DPRD. Basis dukungan partai yang berlambang pohon beringin ini ada di kecamatan kota.

Secara sosiologis, Parta Golkar mendapatkan dukungan dari para pegawai dan masyarakat yang tinggal di perumahan. Menurut Clifford Geertz, Golkar masih merupakan partai pilihan kelompok priyayi yang ada di Kota Kediri. Sedangkan 2 kursi didapatkan dari Mojoroto dan Pesantren masing-masing menyumbangkan 1 kursi.

Pemilu 2004 dikejutkan dengan hadirnya partai baru yaitu Partai Demokrat. Di Kota Kediri dalam pemilu kali ini berhasil mendapatkan 3 kursi. Partai tersebut mengandalakan popularitas Susilo Bambang Yudoyono atau SBY sebagai magnet yang menjadikan partai ini banyak mendapatkan simpati. Modal popularitas inilah yang nantinya pada pemilihan presiden di tahun yang sama menghantarkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden pertama diera pemilihan presiden langsung. Partai Demokrat tersebut mendapatkan satu kursi di tiap kecamatan satu kursi. Selain mengandalkan popularitas lewat media massa saat itu, partai ini juga menggunakan jaringan keluarga veteran dan pensiunan TNI.

Urutan perolehan suara kelima adalah PAN. Partai yang didirikan Amien Rais ini di Kota Kediri mendapatkan 2 kursi di DPRD. Selain mengandalkan warga Muhammadiyah secara personal, partai berlambang matahari ini juga mendaptkan simpati dari pemilih karena popularitas Amien Rais yang saat itu identik dengan reformasi 1998. Klaim sebagai partai reformasi juga sering digunakan para pengurus dan calegnya saat kempanye sebelumnya. Saat itu dua kursi tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota.

Sedangkan tiga kursi yang lain masing-masing diperoleh PKS, PPP dan PDS. Ketiga partai yang sama-

sama mengandalkan basis agama ini mendapatkan satu kursi di DRD. PKS mendaptkan kursi di daerah pemilihan Mojoroto, PPP mendapat kursi di Pesantren, sedangkan PDS mendapatkan kursi di Kecamatan Kota. Total keseluruhan partai politik yang mendaptkan kursi di DPRD Kota Kediri dalam pemilu 2004 berjumlah delapan partai politik. Dalam sidang paripurna DPRD Kota Kediri, posisi Ketua DPRD adalah Bambang Haryanto dari PDIP, sedangkan dua posisi wakil DPRD dipegang oleh Sujud Kendar dari PKB dan Tamam Moestofa dari Partai Golkar.

> "Orang-orang abangan itu pasti pilihannya kepada partai nasionalis. Karena ada simbol Bung Karno dan Megawati. Kami punya pandangan bahwa dengan memilih partai PDI, tidak hanya persoalan siapa yang jadi caleg, tapi partai tersebut lebih mewakili corak dan ciri sebagai partainya wong cilik. Disitu juga banyak teman-teman yang secara ekonomi dan sosial hampir sama dengan saya. Bahkan secara keagamaan dan adat kebiasaanpun di internal PDIP tidak dipersoalkan." (Wawancara, 15 Desember 2019)

Dalam konteks masyarakat sanri tradisional, kefanatikan pada figur kiai atau sentimen kelompok juga sangat mendominasi. Memilih parai Islam baginya adalah konsekuensi dari eksistensi mereka sebagai seorang muslim. Karena mereka takut dikatakan bukan sebagai seorang muslim sehingga bisa dikucilkan dari kelompoknya. Mereka juga tidak dapat embedakan wakil-wakilnya yang duduk di DPR maupun DPRD.

Salah satu Warga Kota Kediri, Yusuf (40), menyampaikan bahwa dalam pemilu 2004 masyarakat tidak melihat siapa nanti yang akan menjadi wakil-wakilnya di DPRD. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena ia ingin menjaga

hubungannya dengan komunitas sosial yang selama ini ada di dalamnya, yakni Nahdlatul Ulama. Masyarakat memilih partai Islam bukan karena tahu betul tentang siapa dan bagaimana program kerjanya, tetapi lebih karena takut disisihkan atau dianggap bukan orang NU. Hal tersebut menandakan bahwa seseorang dalam memilih partai Islam tidak selalu dilandasi oleh kesadaran tentang perjuagan Islam atau pemahaman keberagamaan mereka.

Faktor lain yang mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu 1999 dan 2004 adalah keluarga. Salah satu informan, bernama Dony (35) yang tinggal di Pakelan mengatakan bahwa ia memilih PDIP sebagai partai yang didukung oleh keluarga selama bertahun-tahun. Bahkan tidak hanya keluarganya saja, hampir semua keluarga di kampungny telah menjadi "pelanggan" PDIP dalam setiap pemilu. Bagi orang luar menurut Dony, kampung yang ia tempati sering disebut sebagai kandang banteng. Atau dengan istilah budayanya sering disebut kampung abangan.

Begitu pula untuk pendukung Partai Golkar, masyarakat memilih partai berlambang pohon beringin tersebut karena adanya pengaruh keluarga yang rata-rata adalah pegawai negeri sipil. Meskipun kepaa keluarga tersebut telah pensiun dari pegawai negeri sipil namun kebiasaan untuk memilih Partai Golkar tetap dipertahankan. Pengalaman selama orde baru yang menjadikan para pegawai negeri sipil menjadi kader dan juru kampanye, yang saat itu banyak berinteraksi dengan para pejabat sipil maupun militer, sehingga oleh lingkungannya diangap terpandang, menjadikan hal tersebut tidak begitu saja hilang dan mudah untuk beralih pilihan

politiknya, meskipun sistem politik telah berubah setelah adanya reformasi.

Pilkada 2008 dan Pemilu 2009 : Berebut Kepentingan

Pada waktu pelaksanaan pilkada pertama di Kota Kediri partai politik yang berhak mengusung kandidat mengajukan nama-nama yang sebagian besar melibatkan orang di luar partai politik. Hanya empat orang yang merupakan fungsionaris partai politik. Selebihnya mereka berasal dari beragam latar belakang, yaitu pengusaha sebanyak enam orang. Dari kalangan birokrat sebanyak 3 orang. Sisanya berasal dari profesional, tokoh ormas/LSM.

Rinto Harno adalah seorang manager PT Gudang Garam, perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Kediri. Rinto awalnya berpasangan dengan Bambang Edianto yang juga menjabat wakil walikota Kediri. Karena Bambang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU karena alsan kesehatan, akhirnya PDIP yang menjadi partai pengusungnya menggantinya dengan M.Zaini, mantan sekretaris daerah Kota Kediri. Zaini sendiri sebelumnya dicalonkan sebagai walikota oleh PKB versi Gus Dur. Berhubung PKB yang diakui oleh KPU adalah versi Muhaimin Iskandar, akhirnya Zaini digandengkan dengan Rinto Harno pada detik-detik terakhir menjelang penutupan pendaftaran.

Pasangan selanjutnya adalah, Iwan Budianto dan Arifin Asror. Iwan adalah manager Persik Kediri. Lewat tangan Iwanlah nama Persik berkibar dan beberapa kali menjadi juara utama liga nasional. Selain sebagai manager Persik, Iwan adalah menantu dari walikota yang masih berkuasa, Ahmad Maschut. Berbekal popularitas persik dan nama

besar mertua yang menjadi walikota selama dua periode, diharapkan menjadi modal politik maju dalam ajang pilkada. Sedangkan pasangan wakil walikotanya adalah Arifin Asror, anggota DPRD yang juga sebagai ketua PKB versi Muhaimin Iskandar. Perlu diketahui saat tahapan pilkada berlangsung sedang terjadi konflik kepengurusan PKB pusat antara kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Kubu Muhaimin Iskandar. Akibat dari konflik tersebut kepengurusan di daerah menjadi terbelah. KPU akhirnya dalam keputusannya hanya menerima PKB dengan ketua umum Muhaimin Iskandar berdasarkan pada pada SK Menkumham RI nomor M-02. UM.06.08 Tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 8 Juni 2005. Konflik PKB ini nantinya juga masih terus berlangsung hingga tahapan pemilu 2009.

Pasangan berikutnya adalah Martanti Sunardewi dan Ahmad Salis. Pasangan yang diusung koalisi PKS menjaring calon walikotanya dari luar partai, yaitu seorang pengusaha dari Surabaya berpasangan denga Ahmad Salis anggota DPRD dari PKS. Meski PKS hanya memperoleh satu kursi pada pemilu 2004, namun berdasarkan hitungan perolehan suara, mereka dapat mengusung pasangan calon. Pasangan ini didukung oleh PKS dan partai politik non parlemen.

Selanjutnya adalah pasangan Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar. Dalam pilkada pertama di Kota Kediri ini pasangan ini diusung oleh PAN, PPP dan PDS. PAN yang memperoleh empat kursi pada pemilu 2004 berkoalisi dengan PPP dan PDS yang masing-masing memilki satu kursi. Kedua pasangan ini adalah bukan kader parpol. Samsul adalah seorang dokter penyakit dalam yang sudah lama dikenal masyarakat. Sedangkan Abu Bakar adalah seorang pengusaha muda yang

memiliki usaha bisnis di Yogyakarta. Dibandingkan dengan pasangan lain, pasangan yang mendapatkan nomor urut satu ini melakukan start kampanyenya atau lebih tepatnya sosialisasi ke masyarakat lebih awal, sejak tahapan pilkada belum dimulai. Dari pasangan inilah nantinya yang akan muncul sebagai pemenang dan menjadi walikota dan wakil walikota Kediri pertama hasil pemilihan langsung.

Pasangan kelima yang diusung partai politik adalah Tamam Moestofa dan Heru Marwanto. Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar ini merupakan kombinasi figur politisi dan aktivis orgnasasi sosial kemasyarakatan. Tamam Moestofa adalah ketua Partai Golkar dan wakil ketua DPRD, sedangkan Heru Marwanto adalah seorang aktfis FKPPI dan pernah menjadi ketua KNPI Kota Kediri. Pada Pemilu 1997 ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Kediri dari unsur pemuda.

Selain kelima pasangan calon yang dusung partai politik, dalam pilkada tahun 2008 ini juga terdapat tiga pasangan calon dari unsur perseorangan. Melihat banyaknya pasangan calon dalam pilkada ini, tampak bahwa animo bebera kelompok masyarakat untuk maju sebagai calon walikota dan wakil walikota cukup tinggi. Ketiga pasangan ini terdiri dari dua birokrat, anggota DPRD, aktivis LSM, dan wiraswasta. Jumlah keseluruhan dari pasangan calon walikota dan wakilnya pada pilkada tahun 2008 sebanyak delapan pasangan calon.

Satu hal yang menarik dalam pelaksanaan Pilkada pertama di Kota Kediri yang dilaksanakan pada tahun 2008. Saat itu muncul delapan pasangan calon untuk memperebutkan kursi walikota dan wakilnya. Dari kedelapan pasangan tersebut terdapat pasangan yang merupakan representasi dari

kekuatan petaha yaitu HA. Maschut. Karena walikota lama sudah dua periode menjabat sehingga yang dicalonkan adalah anak menantunya sendiri yang bernama Iwan Budiyanto. Sebagaimana di daerah lain, kekuatan petahana telah berhasil membangun kekuatan oligarki baru dalam mengendalikan proses politik dalam beragam tingkatan karena didukung oleh kekuatan finansial dan pengaruh yang cukup kuat selama menjabat. Hal inilah yang menyebabkan semakin kuatnya politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Kota Kediri.

Terkait dengan dukungan finasial dalam pilkada diakui banyak pihak baik pengurus partai politik, kandidat maupun tim sukses. Tanpa adanya dukungan finansial yang cukup, sangat sulit mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Ditambah lagi kenyataan di masyarakat sangat nampak bahwa tanpa adanya uang transport, masyarakat akan sulit diharapkan dalam memilih kandidat yang diharapkan. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Edy Suwarno (43) yang merupakan pengurus partai politik;

> "Terkait *money politic,* selama saya berproses di bidang politik, masyarakat sampai tingkat yang paling bawah, memang belum bisa lepas dari jeratan money politic, Siapapun calonnya, apakah itu di pilkada ataupun di pileg sama saja. Dan kecenderungan masyarakat Kota Kediri ketika sudah punya pilihan bukan berarti tidak bisa menerima yang lain. Kalaupun ada itu, ya karena militansinya, sehingga banyak yang tahu dan tidak ada yang mendatangi. Dan yang saya lihat, prakteknya sudah terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi." (Wawancara, 26 Januari 2020)

Tabel 5 Perolehan Suara Pilkada 2008

NO	PAPOL PENGUSUNG	JUMLAH SUARA
(1)	(2)	(3)
1	Syamsul Ashar dan Abdulah Abu Bakar	56.079
2	Iwan Budianto dan Arifin Asror	35.361
3	Rinto Harno dan M Zaini	24.353
4	Martanti Sunardewi dan Ahmad Salis	5.410
5	Kasmuji dan Choirul Anam	5.189
6	Syaiful Muslimin dan Farid Ma'ruf	5.122
7	Heru Marwanto dan Tamam Musthofa	2.595
8	Machrus dan R Nugroho	2.170

Sumber : KPU Kota Kediri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemenang pilkada tahun 2008 diperoleh pasangan Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar yang didukung PAN, PDS dan PPP. Jumlah perolehan suaranya 56.079 atau 41,15 persen dari total suara sah. Perolehan suara kedua diperoleh pasangan Iwan Budianto dan Arifin Asror sebesar 35.361 atau sebesar 25,95 persen. Sedangkan angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 55.725 atau 28 persen.

Jika mencermati perolehan suara dari kedelapan pasangan calon diatas, terdapat pola pendekatan dari masing-masing yang berbeda. Namun secara garis besar terdapat dua pola pendekatan yang digunakan, pertama adalah pendekatan popularitas dan patronase dan kedua pola pendekatan dengan menggunakan pendekatan popularitas dan langsung ke masyarakat.

Pola pendekatan dengan menggunakan popularitas dan patronase digunakan oleh pasangan Iwan Budiyanto, Rinto Harno, M. Zaini, Kasmuji dan Heru Marwanto. Dari nama-nama tersebut, mereka relatif sudah dikenal oleh masyarakat berdasarkan posisi jabatan dan peran sosial

mereka sebelumnya dalam masyarakat. Kepopulerannya tersebut digunakan sebagai modal sosial untuk maju dalam ajang pilkada pertama ini. Selain kepopuleran yang diperoleh melalui jabatan dan perannya dalam masyarakat, para calon yang berangkat dari birokrasi memiliki hubungan baik dengan walikota Ahmad Maschut yang selama dua periode menjabat memang dikenal sangat populer di mata masyarakat Kota Kediri. Hal tersebut tidak terlepas dari kiprah Maschut dalam memajukan sepak bola Persik hingga menjadi juara liga nasional dua kali yaitu tahun 2003 dan 2005. Selain itu, juga didukung keberhasilan Maschut dalam melakukan pendekatan kepada para pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Di mata masyarakat walikota Maschut dikenal supel dan peduli terhadap warganya.

> "Pak Maschut yang saya kenal sebagai sosok pemimpin yang sangat dekat dengan semua kalangan. Baik itu tokoh masyarakat, kiai, maupun dengan kalangan pemuda. Tidak peduli dengan siapapun ia perhatikan. Bahkan saat warga punya hajatan saja, beliaunya sering mendatanginya. Saya kira sampai sekarang kita belum menemukan lagi sosok pemimpin yang seperti itu." (Wawancara, 15 Pebruari 2020)

Salah satu yang diandalkan majunya Iwan Budianto maju menjadi calon walikota adalah keberhasilannya dalam dunia sepak bola. Iwan diketahui pernah sukses menghantarkan grup sepak bola Malang, Arema Malang dan Persik Kediri juga dua kali menjuarai liga nasional.

Untuk menggambarkan situasi menjelang dan saat pelaksanaan pemilu 2009 di Kota Kediri, peneliti menemukan tiga peristiwa penting yang menandai corak dan dinamika politik saat itu, yang membedakan dengan era pemilu

sebelumnya. Peristiwa penting tersebut adalah terjadinya konflik internal partai politik, pindah partai politik dan berubahnya orientasi pilihan dari partai politik ke figur kandidat atau calon. Ketiga peristiwa tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan pada bagian-bagian di bawah ini.

Konflik Internal Partai

Dengan berdirinya PKNU diakhir tahun 2005, polarisasi santri tradisional dalam politik akhirnya sulit dihindari. Hal tersebut berakibat pada perolehan PKB di pemilu berikutnya yaitu tahun 2009 mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Jika pada pemilu 2004 di Kota Kediri PKB mendaptkan perolehan sembilan kursi, karena konflik internal maka perolehan PKB pada pemilu tahun 2009 menjadi empat kursi saja. Sedangkan pecahan PKB yakni PKNU mendaptkan tiga kursi.

Sebagaiman telah menjadi berita nasional, penyebab munculnya konflik internal PKB bahwa sebagian kalangan kiai NU merasa keberatan terhadap PKB yang dinakodai oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Salah satu pemicunya adalah seringnya Gus Dur melakukan pemecatan pengurus partai tanpa ada klarifikasi sebelumnya. Yang terakhir dilakukan Gus Dur adalah memecat Muhaimin Iskandar dari jabatan ketua umum. Dengan kondisi yang terus diwarnai konflik akhirnya sejumlah kiai angkat bicara dan menyatakan sikap protesnya tersebut lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam keputusan terakhir pengadilan menyatakan PKB pihak Gus Dur menang, sedangkan PKB pihak ulama dinyatakan ditolak. pihak usaha para pendukung

tersebut faksionalisasi antara kubu Gus Dur dengan kubu ulama.

Dengan adanya keputusan PTUN yang memenangkan PKB Gus Dur berakibat pada kubu PKB ulama sepakat untuk mendirikan partai baru. Masing-masing kubu bahkan tetap mengadakan konggres partai masing-masing sehingga menghasilkan kepengurusan yang berbeda. Pemilu 2004 disenyalir menjadi titik balik bagi PKB dalam mengelola konstituen menjadi polarisasi konflik yang sulit didamaikan. Konflik internal tersebut akhirnya berakibat pada pendirian partai baru dari kubu ulama yang bernama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Pada pemilu 2009, dengan munculnya PKNU akhirnya ikut menggerus basis dukungan PKB yang hampir keseluruhannya merupakan orang NU. Karena jamaah NU sangat menghormati kiainya, maka ketika kiainya masuk ke PKNU maka dengan sendirinya sebagian besar massa NU masuk menjadi pendukung PKNU. Berikut pernyatan salah satu warga NU, Miftahul Arifin sebagai berikut:

> "PKNU sendiri didirikan oleh ulama dan kiai. Dari namanya saja partai itu mencerminkan bahwa ulama dihormati dan difungsikan sebagaimana mestinya. Nah berbeda dengan yang menjadi kritik para kiai selama ini yaitu terhadap PKB. Partai ini dinilai tidak banyak memberi manfaat, dan peran kiai sangat minim di dalamnya. Maka atas dasar fakta tersebut, kami harus ikut ulama. Kemana diperintahkan maka kami harus *samina wa atho'na*, siap melaksanakan dengan sepenuh hati." (Wawancara, 23 Pebruari 2020)

Pada pemilu 2009 PKNU berhasil mendapatkan tiga kursi, sedangkan PPP mendapatkan satu suara. Maka dengan fakta

tersebut menurunnya perolehan suara PKB pada pemilu kali ini sudah terjawab, yaitu disebabkan konstituennya berpindah ke PKNU dan PPP dan sisanya ke partai lain. Karena konflik internal partai tersebut juga berakibat pada terjadinya pergeseran orientasi politik di kalangan kelompok santri tradisional, meskipun pergeseran tersebut tetap ke partai yang memiliki landasan dan corak kelembagaan dengan partai yang ditinggalkannya.

Dalam pemilu 2009, partai nasionalis maupun Islam mengalami penuruan suara yang cukup signifikan. Jika PKB turun suaranya dari sembilan kursi menjadi empat kursi karena konflik internal dan hingga berakibat pada pendirian partai baru yaitu PKNU. Sedangkan PDIP yang pada pemilu 2004 mendaptkan sembilan kursi maka pada pemilu tahun 2009 hanya mendaptkan lima kursi di DPRD. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pengurus DPC PDIP Kota Kediri, menurunnya suara PDIP disebabkan adanya faksionalisasi di tubuh pengurus.

Pasca kepengurusan Bambang Haryanto kepengurusan DPC PDIP Kota Kediri dipegang oleh Joko Supriyanto. Proses pergantian pengurus tersebut dilakukan dalam konferensi cabang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun ketua DPC PDIP, Joko Supriyanto dalam proses menjalankan roda organisasi, dinilai oleh beberapa kalangan di internal partai melanggar aturan partai, meskipun yang bersangkutan menolak hal tersebut. Akibat konfik yang berlarut- larut dan semakin mendekati waktu persiapan untuk pemilu 2009, maka DPP PDI P menunjuk Djarot Syaiful Hidayat sebagai PLT Ketua DPC PDIP Kota Kediri. Kedudukan Djarot sebagai pelksana tugas berlangsung hingga saat pelaksanaan pilkada

tahun 2008. Akibat konflik tersebut menjadikan energi dan konsentrasi untuk melakukan konsolidasi politik partai tidak berjalan secara maksimal. Dari kondisi tersebut akhirnya berakibat pada menurunnya perolehan suara PDIP pada pemilu tahun 2009.

Setelah pelaksanan pilkada selesai dan dalam rangka mempersipkan pemilu 2009, diadakan konferensi cabang untuk memilih kepungurusan DPC PDIP yang baru. Akhirnya terpilih Wara S.Reny Pramana sebagai ketua PDIP Kota kediri yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pada kepengurusan sebelumnya. Meskipun pergantian pengurus telah dilakukan, konflik antar faksi di tubuh PDIP tetap belum mereda. Hal tersebut berlangsung hingga pelaksanaan pemilu berikutnya tahun 2014, serta mempengaruhi dukungan suara partai moncong putih tersebut gagal memperoleh kemenangan suaranya seperti pada pemilu 2004.

Di saat dua partai yang merupakan representasi dari kelompok abangan (PDIP) dan santri (PKB) didera konflik internal, dalam konteks lain justru masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada partai yang lain yang minim konflik. Dalam konteks Pemilu 2009 partai yang minim konflik tersebut adalah PAN. Dalam pemilu 2009 ini PAN berhasil menaikkan perolehan suaranya dari pemilu sebelumnya yang hanya menapat dua kursi menjadi empat kursi. Sedangkan perolehan suara lain seperti Partai Demokrat tetap tiga kursi, Golkar yang semula mendapatkan empat pada pemilu 2004, berkurang satu kursi menjadi tiga kursi. Runtuhnya perolehan suara dari dua partai pemenang dalam pemilu 2004 ini akhirnya menyebar ke partai lain seperti PKPB, PBB,

Gerindra, Hanura, dan PPNU masing-masing mendaptkan satu suara.

Disaat polarisasi kepengurusan parpol sedang menimpa PKB dan PDIP, munculnya partai politik baru pada pemilu 2009 ini juga menjadi penyebab berkurangnya perolehan suara dari tiga partai politik yang pada pemilu sebelumnya menduduki peringkat tiga besar. Partai-partai tersebut diantara adalah Gerindra, Hanura, PKPB, PPNUI dan PKNU. Kemunculan partai-partai tersebut seolah menjadi alasan bagi masyarakat yang menyebabkan pilihan politiknya semakin beragam. Dari partai politik peserta pemilu tahun 2004, hanya PAN yang mendaptkan tambahan suara. PAN berhasil menambah suaranya, sehingga mendapatkan dua tambahan kursi menjadi empat kursi. Sedangkan PKB, PDIP dan Golkar perolehan suaranya mengalami penurunan yang cukup signifikan. PKB turun suaranya dari sembilan kursi menjadi empat kursi, PDIP yang semula mendaptkan delapan kursi berkurang menjadi lima kursi, kecuali Golkar yang hanya berkurang satu kursi sehingga menjadi tiga kursi. Adapun hasil perolehan suara partai politik pada pemilu 2009 di Kota Kediri dapat dilhat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Perolehan Suara Pemilu 2009

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	5	20.432
2	PKB	4	14.564
3	PAN	4	19.376
4	Partai Demokrat	3	16.287
5	Partai Golkar	3	11.412
6	PKNU	3	13.869
7	Hanura	2	4.442
8	PKPB	1	2.865

9	PBB	1	2.504
10	PKS	1	4.283
11	PDS	1	3.389
12	Gerindra	1	4.663
13	PPNUI	1	2.705
	Jumlah	30	

Sumber: KPU Kota Kediri

Pindah Caleg dan Pindah Dukungan

Selain faktor-faktor di atas, pada pemilu 2009 juga muncul sebuah fenomena baru dalam ranah pencalon anggota legislatif di Kota Kediri. Fenomena baru tersebut adalah terjadinya pindah partai politik dari anggota legislatif . Latar belakang terjadinya perpindahan keanggotaan partai politik tersebut selain karena dipicu konflik internal partai politik juga disebabkan partai politik yang lama tidak lagi memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu.

Akhirnya dukungan partai politik di Kota kediri akhirnya merupakan hal yang lumrah atau biasa, baik dikalangan masyarakat dan elite politik sekalipun. Salah satu elite politik yang pindah ke partai politik lain adalah Nuruddin Hasan yang semula sebagai anggota legislatif dari PAN, pada periode pemilu berikutnya pindah ke PKB. Pindahnya Nuruddin Hasan ke PKB tetap dapat menjadi calon terpilih. Hal tersebut karena basis pendukung Nurudin juga mengikuti meski sudah pindah partai. Dengan demikian loyalitas pemilih sesungguhnya bukan kepada partai politik, tetapi kepada seseorang calon.

Sedangkan alasan dari mereka yang melakukan pindah partai politik berbeda-beda motifnya, tetapi yang paling banyak adalah adanya ketidakcocokkan dengan para partai lama. Namun secara umum, mereka menganggap bahwa

partai politik baginya hanyalah sekadar kendaraan, atau sarana untuk menjadi wakil rakyat. Seseorang akan tetap bertahan di partai politik tertentu jika mampu bekerja sama dengan para pegurus partai lain sehingga dapat bersiergi membesarkan nama partai. Namun jika sudah terdapat bibit ketidakcocokkan dalam memenej organisasi partai, maka sesorang punya hak untuk menentukan pilihannya, pindah ke partai lain yang lebih meneima kehadirannya, begitulah garis besar dari pendapat mereka yang melakukan pindah partai politik. Selain Nuruddin Hasan sejumlah politisi di Kota Kediri yang pindah partai politik antara lain ; Nurhadi, Hartingah, Hamim Sudjono, Erita Dewi, Sriana.dan Farid Rizal.

Sepanjang perjalanan sejarah perkembangan partai-partai politik dan pengalaman pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), realitas ekspresi penyaluran aspirasi politik umat Islam tidak terkosentrasi ke dalam satu wadah tunggal partai Islam, akan tetapi menyebar secara bervariasi ke berbagai saluran partai politik yang ada di panggung arena politik nasional.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pemilu tahun 2009 mengalami perubahan sistem lagi dengan terbitnya amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir sistem pemilu sebelumnya dan menggantinya dengan sistem proporsional daftar terbuka penuh. Dengan perubahan sistem pemilu ini, menyebabkan para calon mengubah arah dan strategi kampanye mareka, dan harus bertarung dengan rekan mereka sendiri sesama calon di partai yang sama.

Hal yang sama sistem proporsional daftar terbuka tersebut juga berlaku hingga pelaksanaan pemilu tahun 2014.

Bedanya untuk pemilu 2014 para calon sudah sejak awal memilki waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan model dan strategi kampanyenya. Pada prakteknya, banyak calon yang mampu memperkirakan tentang berapa kursi yang dapat dimenangkan oleh partainya di daerah pemilihan mereka. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa kompetisi yang sesugguhnya adalah memenangkan suara per individu untuk mengalahkan lawan politik dari partai mereka sendiri dapat memperoleh kursi. Sebagian besar informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa kompetitor mereka yang sesungguhnya adalah para calon atau kandidat lain dari partai yang sama. Dari gambaran dan dinamika tersebut sesungguhnya adalah sebagai akibat dari adanya perubahan sistem pemilu itu sendiri. Sehigga dengan adanya perubahan-perubahan sistem pemilu tersebut, secara eksternal ikut mempengaruhi pula perubahan orientasi politik masyarakat atau pemilih sendiri dalam setiap menghadapi pemilihan umum.

Ketika seorang calon menghadapi kandidat lain dari partai yang sama, serta memiliki kesamaan wilayah pemilihan dan ideologi, mereka akhirnya akan membuat pembedaan. Salah satunya adalah dengan cara menawarkan "sesuatu yang konkrit " kepada para pemilih. Cara lain yang juga dapat dilakukan yaitu dengan membuat tim sukses personal. Upaya lain yang biasanya juga dipilih oleh para calon adalah dengan memperkenalkan nama mereka dan membangun relasi personal dengan sebanyak-banyaknya pemilih. Di sisi lain para calon juga biasanya mengandalkan pada nama dan ketenaran mereka dalam melakukan mobilisasi dukungan suara.

Sesuai dengan perkembangan reformasi politik yang berlangsung di Indonesia, kekuatan politik yang banyak menawarkan ideologi adalah partai politik. Hampir semua partai politik menawarkan demokrasi sebagai prinsip perjuangan mereka. Dengan menawarkan demokrasi kepada masyarakat, partai diharapkan mampu menarik simpati dan dukungan dari masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, ideologi yang ada di dalam masyarakat tidak menggambarkan kedekatan masyarakat dengan partai politik. Dukungan masyarakat kepada suatu parpol pada masa reformasi justru tidak berkaitan dengan ideologi partai politik. Hal ini dapat diamati di wilayah Kota Kediri, bahwa preferensi politik masyarakat dapat berpindah dari satu parpol ke parpol lainnya pada setiap pemilu. Fenomena ini menurut penulis bahwa demokratisasi yang dilaksanakan menghasilkan kekuatan politik yang beragam sebagai cerminan bahwa pluralisme di akui dalam masyarakat. Walaupun dalam konteks tertentu, ideologi demokrasi justru tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang bekembang di masyarakat.

Selain faktor personal calon, kegagalan partai politik sebagai media kaderisasi calon pemimpin telah terjadi begitu lama. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika Mahkamah Konstitusi pada Pemilu tahun 2009 mengeluarkan putusan bahwa penetapan calon terpilih dalam Pemilu Legislatif bukan lagi berdasarkan daftar nomor urut calon yang disusun pengurus partai, tetapi berdasarkan perolehan calon yang mendapat suara terbanyak.

Perubahan cara pengitungan calon terpilih tersebut, berakibat pada banyaknya caleg-caleg jadi yang tidak

berdasarkan proses kaderisasi internal partai tetapi lebih mengandalkan popularitas dan modal financial. Popularitas dapat *ditreatment* sedemikian rupa asalkan memiliki biaya. Dengan modal popularitas yang telah dibangun, suarapun dapat dikondisikan dan dibeli. Akhirnya lahirlah politik uang yang dalam klasifikasi ini disebut *buying voters* yaitu membeli suara ke pemilih.

Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 : Pertarungan Petahana

Dari dua kali pelaksanaan pilkada di Kota Kediri, maka pilkada tahun 2013 adalah pilkada yang paling dinamis, karena di dalamnya terdapat gugatan terhadap pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang. Terdapat dua hal yang menjadikan pilkada tahun 2013 tersebut sangat dinamis dan diwarnai gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, pasangan calon yang bersaing adalah sama-sama dari pihak petaha. Yaitu pasangan walikota petaha Samsul Ashar dan Soenardi bersaing dengan pasangan Abdullah Abu Bakar, wakil walikota petaha yang bergandengan dengan ketua Muslimat NU Lilik Muhibah. Keduanya sama-sama memiliki popularitas dan akses birokrasi yang kuat. Kedua, dalam penghitungan suara terdapat selisih suara yang sangat tipis yakni kurang dari satu persen.

Selain dua hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya pecah kongsi adalah adanya ketidakcocokan antar keduanya selama memerintah. Samsul sebagai walikota dinilai Abu Bakar sebagai wakilnya tidak banyak melibatkan dirinya dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan lain yang terkesan meninggalkan dirinya. Ketidak singkronan tersebut hingga menjadi rahasia umum dilevel pejabat dan pegawai

di bawah. Situasi tersebut akhirnya berakibat terjadinya polarisasi antar pegawai dan pejabat di ligkungan Pemkot Kediri. Dalam perkembangan selanjutnya Samsul juga dinilai banyak melakukan pergantian pejabat tanpa alasan dan kualifikasi yang jelas. Kondisi tersebut terus terjadi hingga memasuki tahapan pilkada.

Pilkada yang kedua di Kota Kediri ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2013 yang diikuti oleh 7 pasangan calon. Pasangan calon selain dari pihak petahana (Samsul Ashar dan Abdullah Abu Bakar) yang bertarung karena sudah pecah kongsi, juga diikuti oleh lima pasang calon yang lain. PAN yang semula pada pilkada 2008 mengusung Samsul Ashar, pada pilkada 2013 hanya mengusung Abdullah Abu Bakar yang dipasangkan dengan ketua Muslimat Kota Kediri Lilik Muhibah. Sedangkan Samsul Ashar diusung oleh PKB dan Partai Demokrat. PDIP mengusung mantan ketua DPC, Bambang Haryanto yang berpasangan dengan Hartono seorang pengusaha asal etnis Tionghoa. Golkar dan partai kecil lainnya juga mengusung pasangan calon sendiri. Sedangkan dua pasangan calon yang lain berasal dari unsur perorangan.

Yang menarik dalam pilkada 2013 ini, terdapat selisih suara yang sangat tipis yakni hanya 0,4 persen. Hal tersebut yang menyebabkan Lingkar Survey Indonesia (LSI) dalam realese ke masyarakat tidak berani memastikan siapa yang jadi pemenanngnya. Baru saat KPU daerah menggelar rapat pleno menetapkan pasangan terpilih baru dikatahui bahwa Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah adalah sebagai pasangan walikota dan wakil walikota Kediri terpilih untuk periode 2014-2019. Setelah penetapan KPU, pasangan Samsul Ashar-Sunardi menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Hasilnya tetap sama, Mahkamah Konstitusi menolak dan tetap memenangkan pasangan yang yang diusung PAN tersebut. Berikut ini hasil perolehan suara pasangan calon dalam pilkada 2013 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7 Perolehan Suara Pilkada 2013

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsul Azhar dan Soenardi	63.784
2	Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah	67.915
3	HJE Harry Muller dan Ali Imron	1.478
4	Bambang Harianto dan Hartono	13.719
5	Arifuddinsyah dan Jatmiko	867
6	Imam Subawi dan Suparlan	1.362
7	Kasiyadi dan Budi Raharjo	1.508

Sumber: KPU Kota Kediri

Dalam pilkada 203 ini terdapat dua temuan data yang menarik. Pertama isu yang digunakan dalam mengalahkan walikota petahana adalah isu korupsi. Bahkan pasangan Abu Abdullah Bakar dan Lilik Muhibah ini terang-terangan menggunakan jargon yang disampaikan ke publik yaitu "Membangun Kota Kota Kediri tanpa Korupsi". Secara tidak langsung jargon tersebut dimaksudkan sebagai pencitraan bahwa pasangan ini bersih dan tidak tekait dengan berbagai proyek yang selama lima tahun terakhir menjadi program walikota petahana, meskipun Abu Bakar sendiri ada di dalam pemerintahan tersebut. Selain itu,, isu tersebut justru sebenarnya lebih diarahkan kepada walikota petaha yang dianggap melakukan tindakan melawan hukum dalam proyek-proyek pembangunan, seperti jembatan brawijaya, pembangunan rumah sakit Gambiran 2, dan sejumlah bangunan yang lain.

Sedangkan temua kedua, dalam proses persaingan yang cukup panas tersebut ditemukan dalam penelitian ini, bahwa dua pasangan calon yang sedang bersaing ketat tersebut tidak lepas dari permaianan uang, atau yang biasa dikenal politik uang, Artinya dari masing-masing kedua tim sukses tersebut berupaya mempengaruhi suara pemilih dengan memberikan uang dan barang. Namun sayangnya ketika diminta sebagai saksi, tidak ada satupun yang berani. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Mansur, ketua Panwaslu Kota kediri sebagai berikut:

> " Aroma adanya politik uang jelas dan sangat terasa saat itu, Namun sebagai petugas yang harus mengusut masalah ini perlu ada pihak yang mengadukan itu ke panwaslu. Syarat untuk mengadukan tersebut harus jelas identitasnya, dan kepada siapa pengaduan tersebut ditujukan. Namun sangat kami sayangkan, hingga tahapan tersebut lewat, tidak satupun yang berani. Meskipun saat itu banyak yang sms ke saya bahwa di tempat tertentu ada pemberian barang dan uang dari pasangan calon, namun mereka begitu kita minta untuk mengadkan mereka menyatakan mundur dan tidak jadi mengadukan." (Wawancara, 16 Januari 2020)

Bersadarkan pernyataan dari informan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat utamanya kelompok kelas bawah menghadapi pilkada tidak lepas dari adanya uang. Tentang fenomena tersebut ketika ditanyakan kepada pasangan calon tentu menolak bahwa hal tersebut tidak benar. Dan ternyata distribusi uang untuk ganti transport pada hai H diberikan tim sukses baik langsung diberikan ke pemilih ataupun lewat jalur keluarga. Dengan jalur seperti itu memang pasangan calon bisa saja menolak. Karena kenyataanya ada pihak lain

sebagai perantara yang menyampaikan uang tersebut ke pemilih.

Pemilu ke empat diera reformasi ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 . Dalam tahun yang sama setelah pelaksanaan pemilu legislatif juga diadakan pemilihan persiden dan wakil presiden. Untuk tingkat Jawa Timur yang menjadi pemenang pemilu adalah PKB kemudian disusul PDIP. Posisi ketiga ditempati Partai Gerindra, kemudian Partai Demokrat dan Partai Golkar diposisi keempat dan kelima. PKb sebagai partai pemenang pemilu Jawa Timur menguasai di 16 kabupaten dan kota yaitu: Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupatan Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Trenggalek, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara PDIP masing-masing Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, Kota Malang, Kabupaten Malang. Kota Batu, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Magetan, Ngawi, Kota Madiun, Kota serta Kabupaten Mojokerto. Dari data perolehan perolehan tersebut kelompok santri di Jawa Timur masih mempercayakan aspirasinya ke PKB. Sedangkan kelompok abangan yang menyalurkan aspirasinya ke PDIP menempati posisi terbesar kedua.(Kominfo, 2014) (Kominfo, 2014)

Kondisi tersebut berbeda dengan dinamika politik yang terjadi di Kota Kediri. Pada pemilu 2014 menghasilkan konfigurasi perolehan suara yang berbeda dengan yang terjadi pada tingkat Jawa Timur. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis berdasarkan data dan informasi yang peneliti temukan terhadap berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan Pemilu 2014 di Kota Kediri.

Pemenang Pemilu di Kota kediri pada pemilu 2014 adalah PAN. Sejak pemilu 1999 perolehan suara PAN di Kota Kediri terus meningkat. Peningkatan di pemilu kali ini sekaligus menjadikan PAN dapat memperoleh kursi ketua DPRD. Karena dalam Pilkada sebelumnya yaitu tahun 2013, PAN juga berhasil meraih kursi Walikota Kediri lewat pasangan Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah. Dengan kondisi tersebut telah terjadi perubahan politik di dalam masyarakat. Kota Kediri yang biasanya dipimpin oleh partai dari kelompok abangan, yaitu PDIP, sejak tahun 2014 partai yang berlambang matahari ini tersebut yang akan memimpin.

Sedangkan PKB yang pada pemilu sebelumnya kehilangan suaranya, karena konflik internal partai, maka ketika PKNU tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014, tidak serta merta suaranya bisa ditarik kembali. Justru suara PKNU besar kemungkinan dialihkan ke partai selain PKB, yaitu ke PPP dan Gerindra dan sebagaian ke partai lain.

Kondisi yang sama juga dialami oleh PDIP Kota Kediri. Bedanya kalau konflik di PKB merupakan konflik ditingkat pengurus pusat yang akhirnya berimbas ke pengurus partai di daerah. Namuni konflik kepengurusan yang terjadi PDIP ini hanya terjadi tingkat lokal Kota Kediri. Masing - masing faksi belum ada titik temu yang akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan untuk bersama-sama membesarkan partai. Menurut penyataan informan, setidaknya ada 3 faksi yang sedang berkonflik yaitu faksi kepengurusan yang diketuai oleh Reny, yang kedua faksi JKO yang merupakan kepungurusan sebelum Reny dan faksi Bambang yang juga merupakan kepengurusan sebelum Joko Supriyanto.

Selain PAN yang memperoleh kenaikan suara, PPP yang semula hanya mendapatkan satu kursi dalam pemilu 2014 mendapatkan dua kursi, demikian pula PKS dan Partai Gerindra yang semula hanya mendapatkan satu kursi, di pemilu kali ini masing-masing mendaptkan tiga kursi. Hanya Partai Golkar, Partai Demokrat dan Hanura yang memiliki jumlah kursinya sama dengan pemilu sebelumnya. Sementara itu ada partai pendatang baru yang langsung mendapatkan satu kursi yani Partai Nasdem. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 Perolehan Suara Pemilu 2014

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH KURSI	Suara
1	PAN	6	28.797
2	PDI Perjuangan	4	25.350
3	PKB	4	20.573
4	Gerindra	3	16.811
5	Partai Golkar	3	14.264
6	Partai Demokrat	3	12.584
7	PPP	2	10.313
8	Hanura	1	9.601
9	PKS	3	9.101
10	Partai Nasdem	1	7.312
	Jumlah	30	154.706

Sumber : KPU Kota Kediri

Dalam pemilu 2014 diikuti oleh empat partai Islam dan enam partai nasionalis. Jika dikumpulkan seluruh perolehan suara partai Islam maka berjumlah 68.784. Sedangkan total perolehan suara dari keenam partai nasionalis adalah 85.922. jika dikurangi nasdem maka 78.610. Maka perolehan suara partai-partai nasionalis sebesar 55,6% dari total suara sah. Sedangkan dari total suara partai nasionalis, mayoritas masyarakat Kediri memilih partai tersebut 29,5% memilih

partai nasionalis wong cilik. Dan sisanya menyebar di partai-partai priyayi.

Dalam setiap pemilu maupun pilkada diselenggarakan, parpol ternyata memainkan peran yang sangat minim dalam mengorganisir kampanye di akar rumput untuk mendukung calon. Namun ini tidak berarti bahwa parpol sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mobilisasi suara. Kadangkala, calon calon yang menjabat sebagai pengurus utama parpol mampu mendominasi partai dan secara efektif mampu dapat membuat kepengurusan ditingkat cabang dari partai tersebut menjadi tim sukses pribadinya. Selanjutnya calon tersebut memanfaatkan agenda kampanye pribadinya, meskipun hal tersebut sangat merugikan calon lain yang ada di dalam daftar partai di daerah pemilihan yang sama.Dengan demikian , struktur parpol kemudian cenderung diasosiasikan dengan pengurus partai yang menjadi kandidat.

Dalam sistem pemilu yang sangat kompetitif seperti ini, pengurus parpol ditingkat akar rumput menjadi terbelah menjadi beberapa faksi. Seorang calon biasanya akan bergabung pada bebapa pengurus di tingkat lokal, para pemimpin dan kader partai. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi bagian dari tim sukses dari calon. Karena itulah, tim sukses dari seorang calon yang berasal dari pengurus parpol terkadang banyak diisi oleh kader parpol. Demikian juga dengan calon yang lain. Namun demikian peran dari parpol dapat berbeda-beda antara parpol satu dengan yang lainnya. Misalnya PKS dan PAN yang ada di Kota Kediri, sejauh yang penulis ketahui merupakan parpol yang terorganisir secara sistematis. Penulis juga menemukan fakta adanya kerjasama yang lebih baik antar kandidat dari

kedua parpol ini dibandingkan dengan para calon dari partai lainnya.

Pemberlakukan aturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (hasil revisi UU 22/1999) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 termasuk langkah progresif bagi penataan kelembagaan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Aspirasi rakyat selama ini dengan sistem yang lalu (sistem politik sentralistik) belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Padahal maju atau tidaknya suatu daerah banyak ditentukan oleh kiprah dan keteladanan pemimpin daerah tersebut. Pada tingkat tertentu bahkan pemimpin daerah sangat dominan dalam menentukan gerak arah pembangunan di daerah tersebut. Tugas partai politik adalah menciptakan regenerasi kadernya yang siap apabila terjadi peralihan kekuasaan.

Di satu pihak partai politik ikut memainkan peranannya dalam mewujudkan kehidupan demokrasi terutama karena partai politik menjadi wahana komunikasi antar elemen-elemen kemasyarakatan dan kenegaraan. Di pihak lain dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, partai politik juga dituntut untuk semakin eksis serta lebih berkualitas. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi.

Partai politik merupakan embrio demokrasi perwakilan modern. Melalui sistem demokrasi, partai politik menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang di

masyarakat untuk dapat diartikulasikan menjadi sebuah kebijakan. Selain itu,, partai politik juga berfungsi sebagai agen untuk mereproduksi kader-kader pimpinan bangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan partai politik pada hakikatnya merupakan cermin aspirasi masyarakat, yang membutuhkan wadah untuk mengelola berbagai kepentingan dan konflik. Pengelolaan konflik dan kepentingan dapat dipecahkan secara damai, dan menjadi salah satu tugas partai politik untuk menjembataninya. Partai politik juga dikenal sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat, sekaligus wadah untuk menempatkan kader yang potensial untuk meraih kekuasaan politik. Mekanisme meraih kekuasaan politik melalui mekanisme pemilu yang diadakan secara berkala.

Dalam konteks demokrasi modern, peralihan kepemimpinan diatur melalui pemilu secara berkala dan diikuti oleh konstentan dari partai politik. Pemilu sendiri berfungsi menciptakan pemerintahan yang kredibel, parlemen yang representatif, sirkulasi elite yang sehat, serta mewujudkan berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara institusi-institusi politik.

Pengkaderan organisasi melalui partai politik, yang menjadi salah satu tugas partai politik pada gilirannya akan menciptakan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki visi dan misi ke depan dan siap bertarung dalam Pemilu. Pemilu sendiri merupakan mekanisme demokrasi, dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Secara teoritis, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan

kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan, dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.

Di sisi lain, pindah partai politik juga menjadi fenomena tersendiri di Kota Kediri. Alasan dari mereka yang melakukan pindah parpo tentu juga ada alasan ketidak cocokkan dengan para partai lama. Namun secara umum, dikatakan bahwa partai politik baginya adalah kendaraan, atau sarana untuk menjadi seorang wakil rakyat. Baginya seseorang akan tetap bertahan di partai politik tertentu jika mampu bekerja sama dengan ara pegurus partai lain sehingga dapat bersiergi membesarkan nama partai. Namun jika sudah terdapat bibit ketidakcocokkan dalam memenej organisasi maka, sesorang punya hak untuk menentukan pilihannya, pndah ke partai lain yang lebih meneima kehadirannya

Sepanjang perjalanan sejarah perkembangan partai-partai politik dan pengalaman pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), realitas ekspresi penyaluran aspirasi politik umat Islam tidak terkosentrasi ke dalam satu wadah tunggal partai Islam, akan tetapi menyebar secara bervariasi ke berbagai saluran partai politik yang ada.

Keberadaan partai politik di berbagai tingkatan di Kota Kediri hampir semuanya tidak terasa dan bahkan dapat dikatakan tidak berjalan pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal tersebut disebabkan ada perasaan disebagian besar para pengurusnya bahwa ketika momentum pilkada dan pemilu sudah lewat, mereka mengalami kendala psikologis dengan masyarakat. Karena di kalangan masyarakat ada anggapan bahwa dengan menggunakan nama parpol akan lebih

membatasi ruang geraknya di tengah masyarakat. Demikian pula masyarakatpun juga memiliki sebuah anggapan bahwa parpol hanya boleh eksis jika ada momentum pemilu atau pilkada saja. Cara berpikir seperti inilah yang menyebabkan masyarakat kurang begitu menerima aktivitas pengurus parpol terjun ke masyarakat. Kalupun ia mau menyelenggarakan aksi sosial, maka sebaiknya menggunakan kelembagaan yang ada di setiap RT dan RW selain lebih memberikan kesan netral juga tidak ada perasaan curiga dengan misi parpol itu sendiri.

Jika dicermati dari fenomena semacam ini, sebenarnya bertentangan dengan fungsi parpol dalam kehidupan politik masyarakat, yang seharusnya dapat menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan politik juga sebagai wadah aspirasi masyarakat sebagaimana dalam konsep negara demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain hal ini juga akibat perlakuan selama puluhan tahun selama era Orde Baru, dengan politik massa mengambang. Dimana dalam kenyataannya saat itu masyaraat dilarang aktif dalam organisasi politik.

Hal ini terutama karena kurangnya sosialisasi politik, komunikasi politik dan perilaku partai yang belum seutuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam situasi ketika partai belum cukup atraktif di mata masyarakat inilah, kecenderungan untuk mengabaikan atau menomorduakan partai saat memilih muncul ke permukaan. Selain itu,, masyarakat pun saat ini telah semakin kritis untuk melihat kebermanfaatan pemilu dengan tidak lagi terpaku pada simbol-simbol kepartaian semata.

Kehidupan partai menghadapi para caleg hanya terjadi lima tahun sekali. Banpol misalnya, pencairannya yang

menggunakan hanya elite tertentu. Partai sendiri sudah dikapling oleh elite partainya, ketuanya. Hanya ketua yang berkuasa.bendahara malah nggak tahu apa-apa.

Analisis Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Mataraman

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan orientasi politik masyarakat Mataram di Kota Kediri terhadap sistem politik yang didalamnya mencakup peristiwa politik, perilaku aktor maupun kelembagaan politik yang berlangsung di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan orientasi politik adalah suatu cara pandang individu atau kelompok terhadap struktur yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Orientasi politik individu maupun kelompok tersebut biasanya dilatarbelakangi adanya nilai-nilai yang dimilikinya sehingga membentuk sikap dan perilaku khas dalam memandang objek politik.

Selanjutnya setelah mengetahui tentang orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri, penelitian ini juga hendak menjelaskan bahwa telah dan sedang terjadi perubahan terhadap cara pandang masyarakat Mataraman sendiri dalam berpolitik yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Hal tersebut tentu banyak faktor yang meyebabkan mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Mengutip pendapat sosiolog Indonesia Soerjono Soekamto, bahwa perubahan sosial merupakan salah satu fenomena yang tidak pernah habis. Terlebih lagi dalam era globalisasi dewasa ini, tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Namun dapat dipastikantingkat perubahannya beragam, tergantung dari kondisi masyarakat

dan faktor-faktor yang memicu terjadinya perubahan sosial tersebut. Suatu perubahan dapat terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari masyaraat itu sendiri, maupun dari luar masyarakat. (Soekanto, 2001)

Adapun mengenai konsep perubahan sosial tersebut berhubungan dengan tiga aspek, yaitu proses, perbedaan, dan dimensi waktu. Degan kata lain, perubahan sosial merujuk pada suatu proses dalam sistem sosial dimana terdapat perbedaaan-perbedaan yang dapat diukur dan atau diamati dalam kurun waktu tertentu (Kanto, 2011: 11).

Sedangkan yang dimaksud pemahaman adalah gambaran tentang sesuatu dari seseorang atau kelompok masyarakat. Sedangkan sikap adalah kesiapan individu atau kelompok untuk berpikir dan bertindak dalam menghadapi situasi dan fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sebuah sikap menandung nilai-nilai kognitif, afektif dan konatif. Sikap tidak hanya tindakan tetapi juga mengandung pemikiran untuk merespons sesuatu yang akan dilakukan. Pemahaman dan sikap bersifat subjektif. Karena bersifat subjektif maka pemahaman dan sikap setiap individu akan berbeda-beda, tergantung pengaaman, keyakinan serta kondisi sosial budaya masing-masing. Terkait dengan sikap politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk berpikir dan bertindak terhadap peristiwa politik dalam berbagai bentuk.

Dalam pendekatan perilaku, interaksi sosial yang dilakukan individu atau kelompok selalu berdasarkan pada nilai, pengetahuan dan pegalaman yang akan menghasilkan orientasi tertentu sehingga menimbulkan budaya politik.

Orientasi politik tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pola-pola tertentu dalam diri seseorang atau kelompok dalam berpolitik. Karena hakekat orientasi politik masyarakat Mataram selalu dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang selanjutnya akan membentuk pola perilaku atau tindakan poitik tertentu melalui simbol-simbol tertentu yang khas dalam beragam kelompok tertentu di dalamnya. Sehingga dalam budaya politik di dalamnya terdapat tidak hanya orientasi dan arah tetapi sikap dan tindakan yang akan diambil bagi setiap orang dalam berpolitik.

Adapun orientasi politik masyarakat Mataram yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang dan sikap politik masyarakat yang secara sosio-historis proses sosialisasinya dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa dan bagaimana mereka memahami dan bersikap dalam sistem politik modern terutama pada saat pemilu dan pilkada yang ada di Kota Kediri beserta harapan-harapan di dalamnya.

Kembali kepada pembahasan perubahan orientasi politik masyarakat mataram dalam penelitian ini yang prosesnya telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dibagi dalam tiga dimensi atau masa yaitu masa pemilu tahun 1955, masa orde Baru dan masa reformasi. Sedangkan analisis tentang perubahan orientasi politik masyarakat akan dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Sanggar Kanto bahwa ruang lingkup perubahan sosial sangat luas sehingga dalam setiap kajian perubahan sosial perlu membatasi dan memfokuskan pada aspek-aspek perubahan tertentu yang terjadi dalam lingkup kajian.(Kanto, 2011) (Kanto, 2011). Selanjutnya uraian tentang

perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri akan dijelaskan berdasarkan tiga aspek yaitu arah perubahan, bentuk perubahan dan dampak perubahan.

1. Arah Perubahan

Pemilhan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Banyak kalangan menyebut pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling demokratis bahkan mencapai tingkat yang ideal. Idealitas tersebut dibangun di atas kebebasan dan pluralitas kontestan pemilu, neralitas birokrasi dan militer setidaknya dalam konsep, tidak terjadi kerusuhan atau bentrok massa, diwakilinya semua partai peserta pemilu dan badan penyelenggara pemilu an antusiasme masyarakat atau pemilih dalam menyampaikan hak politiknya di TPS. Dengan kenyataan tersebut maka tidak mengeherankan sekaligus sebagai afirmasi kebangsaan dan jawaban nyata kepada pihak-pihak yang skeptis di dalam dan luar negeri yang mengklaim Bangsa Indonesia tidak sanggup berdemokrasi.(Pamungkas, 2009) (Pamungkas, 2009)

Angka partisipasi pemilih dalam pemilu pertama ini sangat tinggi yaitu 37.875.299 atau 87, 65 persen dari total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemlih. Pemilu ini jua menghasilkan empat besar perolehan suara secara nasional yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Disamping keempat partai tersebut terdapat kekuatan partai sedang yaitu PSI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti dan IPKI. Sedangkan kategori partai politik yang mendapatkan perolehan suara kecil adalah PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI,Partai Murba,Baperki, PIR, Permai, PIR, Hazirin, dan PPTI.(Feith, 1963) (Feith, 1963)

Menurut Hebert Feith, pemilu 1955 ini terdapat temuan yang menarik, pertama, meskipun peserta pemilu tahun ini diikuti oleh calon-calon dari partai politik dan unsur pesrseorangan, namun dari hasil perhitungan suara terakhir tidak satupun yang lolos dari calon-calon yang mewakili unsur perseorangan. Artinya semua calon anggota legislatif saat itu merupakan wakil dari partai politik. Kedua, dalam surat suara dicantumkan nama calon sesuai urutan yang ditentukan oelh partai politik dan gambar partai politik. Pemilih dalam aturannya dapat memilih tanda gambar partai politik ataupun langsung ke nama-nama calon. Namun yang terjadi kemudian, setelah dihitung suaranya, tidak ada satupun nama calon yang mendapatkan perolehan suara signifikan dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Padahal yang terjadi bisa . Yang terjadi adalah nama-nama calon dinyatakan terpilih karena mendapatkan nomer urut sesuai dengan yang disusun partai pendukung. (Feith, 1963, hal. 423-437)(Feith, 1963, hal. 423-437)

Meskipun pemilu 1955 berjalan secara demokratis namun pasca penetapan perolehan suara dan kursi partai politik kondisi sosial politik justru semakin memanas. Tidak sebagaimana sebelumnya dibanyangkan, ketika pemilu dilaksanakan yang diharapkan akan mampu menyelesaikan defisit stabilitas sebagai langkah awal ke arah pelembagaan kedaulatan rakyat. Situasi yang diharapkan tersebut tercipta karena sistem kepartaian yang terbentuk adalah *polarized*. Pada sistem politik seperti ini tidak ada kekuatan politik dominan, jarak ideologi antat kekuatan politik jauh atau tidak ada titik temu, di samping jumlah partai politik yang ada di parlemen

sangat banyak.(Pamungkas, 2009, hal. 71) (Pamungkas, 2009, hal. 71)

Sementara itu, dalam tataran ideologi terpilah ke dalam aliran komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokrat, kristen, tradisionalisme Jawa, Islam dan Katolik. Diantara empat partai besar tersebut, ideologi partai juga terfragmentasi dan saling berhadapan. PNI, Masyumi, NU dan PKI masing-masing berideologi nasionalisme radikal, Islam modernis, Islam tradisional, dan komunis. Secara sederhana keempat partai tersebut terbagi dalam dua ideologi yaitu ideologi agama (Islam) NU dan Masyumi, dan non agama atau sekuler PNI dan PKI. Akibatnya, keempat partai besar tersebut lebih banyak bersilang pendapat dibandingkan mereka harus kompromi dan kerja sama. Perbedaan pebdapat tersebut dapat dilihat nantinya saat pembahasan dasar negara. Sedangkan dalam pemerintahan juga sering terjadi kegaduhan sehingga sering terjadinya bongkar pasang kabinet. Kondisi sosial politik di era sistem parlementer tersebut baru berhenti ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan DPR dan Badan Konstituante yang merupakan hasil pemilu 1955.

Untuk menjelaskan struktur sosial dan kecenderungan orientasi masyarakat Mataraman di Kediri, peneliti menggunakan cara pandang Clifford Geertz, bahwa yang berlangsung saat pemilu 1955 dilaksanakan sebagai polarisasi politik antara kelompok Islam dan Kelompok nasionalis. (Geertz, 2013)(Geertz, 2013) Inti dari pandangan Geertz adalah terdapat kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang linier dengan pilihan politiknya.

Kelompok abangan yang didefinisikan sebagai kelompok Islam yang kurang taat cenderung memilih partai nasionalis, sedangkan kelompok santri cenderung memilih partai Islam. Kelompok Islam tradisional menyalurkan aspirasinya ke partai NU, sedangkan kelompok modernis seperti Muhammadiyah, menyalurkan pilihannya ke Masyumi. Walaupun teori Geertz ini banyak mendapatkan kritik hingga sekarang, namun para pakar politik sosial budaya masih menjadi alat analisis utamanya.

Terkait dengan hasil perolehan suara pada Pemilu 1955 di Kediri, bahwa yang menjadi partai pemenang adalah PKI yang memperoleh suara 23.252. PKI saat itu tidak hanya menjadi pemenang di karesiden Kediri tetapi juga di Karesidenan Madiun. Dua wilayah Mataraman ini memang menjadi basis utamanya di Jawa timur. Pemenang kedua adalah PNI yaitu 14.998. Meskipun wilayah Kediri secara geografis sangat dekat dengan Blitar, tempat kelahiran Soekarno yang menjadi pendiri partai ini, namun konsolidasi dan agitasi yang dilakukan para kader komunis jauh lebih intensif dan masif. Beragam sarana kesenian dan tradisi masyarakat digunakan sebagai pendekatan dalam mendapatkan dukungan. Berikut pernyataan Ki Soetarto salah seorang tokoh penghayat kepercayan sebagai berikut:

> " Saat itu kita selalu dikumpulkan dan difasilitasi untuk melakukan pertemuan. Seluruh paguyuban kesenian jaranan diminta untuk tampil dalam acara tersebut. Hal tersebut dilakukan hampir setiap minggu dan berpindah-pindah tempat. Di sela-sela pertemuan tersebut para juru kampanye menyampaikan pidatonya bahwa kalau para hadirin mencoblos partai itu (PKI), maka semua kesenian dan tradsisi masyarakat akan dikpertahankan dan kembangkan. Karena partai tersebut menyatakan dirinya

sangat peduli dengan peninggalan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya." (Wawancara, 17 Pebruari 2020)

Adapun yang menjadi pemenang ketiga dalam pemilu 1955 adalah partai NU sebesar 11.803 suara. NU mendapatkan sumbangan suaranya berasal dari wilayah yang kelompok santrinya dominan. Di Kediri basis-basis kelompok santri menyebar di beberapa kecamatan yang juga di dalamnya terdapat pondok pesantren. Wilayah-wilayah kecamatan yang dimaksud antara lain; Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojo, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Semen. Sedangkan urutan ke 4 yang menjadi pemenang adalah Masyumi dengan mendapatkan 4.521 suara. Suara tersebut paling banyak diperoleh dari wilayah perkotaan, wilayah lain yang menjadi anggota Muhammadiyah seperti di Kelurahan Kauman, Ngadiluwih dan Kecamatan Kota.

Kembali pada hasil perolehan suara pada pemilu tahun 1955, bahwa kelompok abangan dalam berpolitik diwakili PNI dan PKI. Sedangkan kelompok santri diwakili NU dan Masyumi. Perbandingan perolehan suara antara partai nasionalis dengan partai Islam di Kediri sangat jauh. Jika digabungkan perolehan suara antara PKI dan PNI yang merupakan partai nasionalis maka berjumlah 38.250. Sedangkan perolehan partai Islam yang merupakan gabungan suara NU dan Masyumi berjumlah 16.324.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kediri dalam menyalurkan sikap politiknya lebih dominan ke partai-partai nasionalis dibandingkan ke partai Islam. Hal tersebut berarti mayoritas masyarakat Kediri adalah berkultur abangan sedangkan sisanya adalah kelompok santri, baik dari

kalangan santri tradisional maupun santri modern. Namun demikian, secara kultural baik abangan maupun santri tetap merupakan entitas yang cair. Keduanya dapat bertemu dalam ritus dan pola keberagamaan yang cukup harmonis dan saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kondisi tersebut berbeda dengan pada pemilu legislatif 5 April 2004, sejumlah partai memperebutkan suara dari kelompok masyarakat pemilih yang sama,seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan PartaiGolkar yang memperebutkan kaum Nasionalis, Partai AmanatNasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) mencari suara kaum Islam modern, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperebutkan suarakelompok Islam Tradisional. Hal ini dikuatkan oleh pandangan Ichlasul Amal (2004), bahwa hasil pemilu legislatif menunjukkan dengan jelas asal-muasal suara yang diperoleh empat besar partai pemenang pemilu, Golkar, PDI-P, PKB, dan PAN. Keempat partai itu mendulang suara dari kelompok Islam dan Nasionalis. Masyarakat masih mencoblos partai berdasarkan aliran, budaya, dan agama.

Di Kota Kediri ciri sosial dan budaya berpengaruh terhadap pola afiliasi politik.Masyarakat Tlatah Mataraman dari sejak 1955 hingga 2004 selalu loyal kepada partai yang Nasionalis. Dari temuan data di lapangan, banyak kalangan menyebut bahwa orang Mataraman utamanya di Kediri, tidak suka dengan hal-hal yang mencolok, misalnya Islam yang terlalu Islam, karena mereka anggap tidak Nasionalis. (Kompas, 21 Juli 2008).

Kenyataan seperti ini tidak salah apabila Kediri dikatakan sebagai daerah "semangka", yaitu daerah yang

dipermukaannya hijau (Islam), namun di dalamnya merah (nasionalis). Dalam kehidupan sosial, mayoritas masyarakat masih menjadikan tokoh agama atau kiyai sebagai panutan, dan akhirnya setiap kali dalam bidang pemerintahan ataupun saat pemilu masih memiliki meskipun tidak sebesar saat diranah sosial keagamaan. Dalam pemilu 1999 dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang "merah", dan lima tahun kemudian, dalam pemilu 2004 PKB yang "hijau" unggul.

Pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 orientasi politik masyarakat Kediri masih didominasi oleh cara pandang kelompok keagamaan. Artinya orientasi masyakat dalam memilih partai politik dalam pemilu disesuaikan dengan identias kelompok (religio-politik) dengan identitas kepartaian yang berlaku saat itu. Empat partai politik besar yang ada saat itu antara lain; PDIP adalah partai nasionalis yang menggunakan simbol dan nama besar Soekarno atau Megawati yang juga merupakan anak Soekarno, merupakan partai politik yang mendapatkan dukungan suara dari kelompok masyarakat abangan. Partai yang menggunakan jargon sebagai partainya *wong cilik* ini hampir tidak ada kesulitan dalam mendapakan dukungan dari lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah di Kota Kediri. Kedua adalah PKB yang merupakan partai politik baru setelah reformasi ini juga dengan mudah mendapatkan dukungan suara dari para nahdliyin. Partai yang didirikan PBNU ini direpresentasikan sebagai wadah aspirasi warga NU dalam berpolitik. Yang cukup mengejutkan, partai yang mendapatkan dukungan mayoritas dari kalangan santri tradisional ini menjadi pemenang pemilu tahun 2004 di Kota Kediri.

Menurut Halim Moestofa yang saat itu menjabat ketua PCNU Kota Kediri, bahwa kemenangan PKB tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan sosok Abdurrahman Wahid atau biasa dengan panggilan Gus Dur. Sosok Gus Dur sebagai tokoh pluralisme mampu menjadikan PKB sebagai partai politik yang melindungi kelompok marginal dan kelompok lintas agama. Besarnya dukungan suara PKB yang di setiap kecamatan yang ada di Kota Kediri merupakan kombinasi antara kelompok nahdliyin dan kelompok marginal atau minoritas lintas agama. Analisis tersebut ada benarnya, mengingat dalam daftar calon PKB dari Kecamatan Kota terdapat calon bernama Haryanto adalah salah seorang dokter di Kelurahan Pakelan yang beragama Katolik dan berasal dari warga keturunan etnis Tionghoa. Oleh karena itu dalam pemilu tahun 2004 tersebut PKB mendapatkan perolehan suara sebesar 34.863 dan mendapatkan 9 kursi di DPRD Kota Kediri.

Pemenang ketiga pada pemilu 2004 adalah Partai Golkar. Partai yang didirikan rezim Orde Baru tersebut dalam pemilu kedua di era reformasi ini masih mendapatkan dukungan cukup besar yaitu dengan perolehan suara 12.280. Dengan perolehan suara tersebut Partai Golkar mendapatkan 4 kursi dewan. Dalam rapat pemilihan pimpinan DPRD, Partai Golkar berhasil mendudukkan ketuanya, Tamam Moestofa sebagai wakil ketua DPRD. Posisi tersebut sama dengan PKB yang hanya mendapatkan wakil ketua DPRD, saat itu dijabat oleh Sudjud Kendar, meskipun perolehan kursinya paling banyak. Sedangkan ketua DPRD terpilih adalah Antonius Rachman dari PDIP. Dalam pemilihan pimpinan DPRD waktu itu

aturannya dipilih dari seluruh anggota dewan berdasarkan suara terbanyak.

Adapun dukungan suara Partai Golkar paling banyak berasal dari para pegawai swasta, guru-guru sukuan, pegawai negeri, karang taruna, dharma wanita, kelompok PKK dan kelompok profesi lainnya. Kelompok-kelompok tersebut selanjutnya memanfaatkan jaringan keluarga dan pertemanan yang memang telah lama terjalin sejak Orde Baru berkuasa untuk mendapatkan dukungan suara.

Berdasarkan klasifikasi Clifford Geertz, dukungan terbesar Partai Golkar di Kota Kediri mayoritas diperoleh dari jaringan kelompok masyarakat priyayi yang sudah relatif terbangun dengan baik sejak masa Orde Baru. Adapun kelompok-kelompok yang menjadi pendukung partai Golkar tersebut sebenarnya adalah sisa-sa dari kelompok priyayi yang sebenarnya cukup besar jumlahnya di Kota Kediri. Namun akibat isu reformasi yang banyak menyudutkan partai tersebut sebagai bagian dari Orde Baru, suara partai ini mengalami penyusutan dukungan suara yang cukup signifikan.

Bukti lain bahwa orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri masih didominasi cara berpikir politik aliran adalah perolehan suara PAN yang cukup signifikan. PAN sebagai partai yang lahir di era reformasi mendapatkan dukungan suaranya berasal dari masyarakat perkotaan dan jamaah Muhammadiyah. Dukungan pemilih terhadap PAN tidak dapat dilepaskan dengan sosok Amien Rais yang juga menjadi Ketua Umumnya saat itu. Klaim gerakan reformasi sebagai buah dari kiprah Amien Rais sedikit banyak telah menjadikan kelompok masyarakat kelas menengah di

perkotaan menjatuhkan pilihan politiknya ke partai politik yang berlambang matahari terbit tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Azis (52) salah satu pengurus Muhammadiyah sebagai berkut:

> "Secara organisatoris Muhammadiyah itu independen, tidak ada hubungan dengan partai politik manapun. Hanya saja dengan PAN karena yang menjadi inisiator utamanya adalah Pak Amien, yang sebelumnya beliau juga menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, maka secara perorangan banyak teman-teman dalam pemilu mencoblos PAN. Secara prinsip perjuangan keduanya tidak ada perbedaan. Hanya saja, cara dan posisinya yang berbeda. Muhammadiyah akan tetap berkhidmah pada kepentingan ummat dan bangsa sehingga berbeda dengan parpol yang melalui jalur politik praktis". (Wawancara, 10 Desember 20190

Berdasaran temuan data di lapangan sebagaimana kutipan pendapat di atas, bahwa orientasi politik masyarakat yang mendukung PAN adalah mereka yang secara langsung terafiliasi dengan keanggotaan di Muhammadiyah. Dengan nilai-nilai ke-Muhammadiyah-an pemilih merasa cocok dan sesuai dengan performa yang ditunjukkan PAN kepada mereka. Demikian pula dengan kelompok masyarakat kelas menengah perkotaan yang secara budaya keagamaannya lebih modenis atau kelompok sosial yang secara intelktual lebih rasional dalam menterjemahkan ide-ide reformasi, maka pilihan merek lebih diarahkan ke PAN. Dengan demikian PAN sebagai partai politik dalam pandangan kelompok santri modernis lebih cocok dan sesuai dengan citra dan identifikasi struktur sosial yang melekat dalam dirinya.

Perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri terjadi sejak dilaksanakan pilkada tahun 2008

dan terus berlanjut hingga pelaksanaan pemilu tahun 2009. Dua momentum politik lima tahunan tersebut, baik secara yuridis maupun politis menjadi salah satu pemicu adanya perubahan orientasi politik masyarakat dalam memandang dan mensikapi tawaran-tawaran partai politik, tim sukses mapun calon-calon yang datang ke masyarakat. Orientasi dan sikap yang dimaksud di sini tentu bisa dijelaskan melalui pendekatan perilaku individu maupun kelompok yang kemudian disimpulkan berdasarkan pilihan politiknya terhadap calon dan partai politik tersebut dalam pilkada maupun pemilu.

Satu tahun berikutnya setelah pelaksanaan pilkada, pada pemilu 2009 sitem pemilu mengalami perubahan yang cukup fundamental. Jika pada pemilu sebelumnya yang menentukan calon terpilih di lembaga DPR dan DPRD adalah partai politik dengan menggunakan mekanisme nomor urut. Namun dalam pemilu 2009 ini, penetapan calon terpilih tidak berdasarkan nomor urut tetapi didasarkan pada perolehan suara caleg terbanyak. Legitimasi ini didasarkan pada permohonan pengujian terhadap undang-undang pemilu legislatif yang oleh caleg PDIP dan Partai Demokrat. Dasar dari pengujian ini didasari oleh adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pengurus partai politik dalam penentuan nomor urut . Menurutnya penentuan nomor urut terkesan politis dan hanya berdasarkan subjektivitas pengurus partai.

Studi yang dilakukan Muljani dan Liddle (2010) bahwa faktor yang menentukan perilaku pemilih pada pemilu 1999 dan 2004 yaitu faktor figur dan kedekatan dengan partai politik tertentu. Sedangkan pada pemilu 2009 perilaku pemilih dipengaruhi oleh figur yang ditopang peran media

massa. Sbenanya dari kajian Muljani ditemukan tren atau kecenderungan bahwa pemilu yang terjadi sejak era reformasi mengalami penurunan ideologi dan digantikan dengan hal-hal yang bersifat pragmatis. Tetapi tidak berarti peran ideolog dalam partai politik tidak ada sekali. Namun seiring dengan perubahan sistem pemilu yang memberikan kebebasan bagi pemilih untuk memenangkan calon tertentu dalam surat suara, di sisi lain pula semakin memberikan dampak kebebasan bagi calon sebagai aktor untuk bisa memainkan situasi tersebut sehingga mendapatkan simpati dan dukungan dari pemilih dengan beragam cara.

. Car-cara yang digunakan calon dalam merebut simpati dan dukungan diantaranya adalah menggunakan media massa, penyebaran pamflet, spanduk dan selebaran sebagai sara pencitraan pada dirinya. Cara tersebut selalu dilakukan dalam setiap pemilu ataupun pilkada. Karena hal tersebut dilakukan secara terus menerus akhirnya menjadi praktik sosial.

Sebagai respon dari tindakan aktor tersebut, masyarakat justru melihat calon atau pasangan calon dalam pemilu dan pilkada sebagai pihak yang sangat berkepentingan untuk mendapatkan jabatan politik. Akibatnya masyarakat dapat memainkan situasi atau struktur tersebut menjadi kesempatan bagi pemilih untuk memenuhi kebutuhannya. Yakni dengan cara menjadikan hubungan aktor dengan pemilih sebagai hubungan transaksional. Ibaratnya aktor menawarkan barang dan masyarakatpun membelinya. Posisi tersebut kadang dapat secara dealektis bergantian. Ada kalanya aktor tergantung dengan pemilih, atau sebaliknya masyarakat menggantungkan kepentingannya (jangka pendek) kepada

aktor. Artinya hubungan antara calon dengan pemilih bersifat saling tergantung dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Giddens tidak percaya bahwa sebuah realitas sosial dapat dipahami secara utuh jika analisis sosial tidak menghubungkan antara tindakan aktor dengan struktur yang telah ditafsirkannya. Artinya lahirnya tindakan aktor dalam hal ini adaah calon legislatif dan pasangan calon dalam pilkada adalah kombinasi antara motif tindakan dirinya dan tuntutan struktur yang telah ditafsirkannya. Keduanya memiliki hubungan kausalitas yang saling menunjang dan melengkapi. Sehingga keduanya bukan sesuatu yang terpisah atau dualisme, melainkan dualitas.

Dengan demikian yang membedakan pemilu 2004 dengan pemilu 2009 adalah munculnya personalitas dalam pencalonan. Jika dalam pemilu sebelumnya pemilih disodori nama-nama calon yang telah diseleksi oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Dan dari urutan nomor tersebut jika partai mendapatkan alokasi kursi, maka kursi tersebut akan diberikan calonnya berdasarkan nomor urut yang sudah ditentukan oleh partai politik sebelumnya. Namun sebaliknya meskipun terdapat calon yang mendapatkan pilihan langsung paling banyak, namun urutan pencalonannya berada di nomor urut bawah, sangat kecil kemungkinannya untuk jadi sebagai wakil rakyat.

Dengan berubahnya sistem penghitungan dan penetapan calon terpilih dalam peraturan pemilu, maka bagi seorang calon baik di pemilu mapun di pilkada harus dengan sekuat tenaga dapat menjaring suara dari pemilih. Adapun fungsi partai hanya sebatas saat melakukan rekruiten dan

penetapan calon di internal partai. Selebihnya calon yang bersangkutanlah yang akan menentukan nasibnya sendiri di depan pemilih. Dari sinilah sejumlah pengurus partai yang ada di Kota Kediri banyak mengeluhkan adanya sistem baru tersebut yang tidak sejalan dengan fungsi partai.

Terkait kondisi pemilih yang pragmatis tersebut, banyak dikeluhkan oleh pengurus partai politik. Dengan berubahnya sistem pemilu yang menempatkan calon dapat mendapatkan suara secara mandiri, sehingga membuka kemungkinan adanya beragam cara bagi calon untuk mendapatkan dukungan suara. Popularitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ajang pemilu dan pilkada. Masyarakat tentu akan merasa kesulitan jika calon yang bersangkutan tidak dikenal publik. Selain popularitas, dukungan finansial juga tidak kalah penting dalam menggalang suara dari pemilih. Peruntukan dukungan finansial tersebut selain untuk mempengaruhi pemilih juga sebagai ongkos operasional selama masa kampanye untuk menggerakkan tim suksesnya ke masyarakat. Selanjutnya dapat dilihat perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat sebelum dan sesudah reformasi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9 Perubahan Orentasi dan Sikap Politik

NO	DIMENSI	SEBELUM REFORMASI		SETELAH REFORMASI	
1	Pemilu/Pilkada	1955	1971-1997	1999-2004	2009-2014 Pilkada 2008-2013
2	Orientasi Politik	Ideo logis	Antago nistik	Idealistik Substantif	Rasional-Toleran

3	Sikap politik	Militan	Hegemonik-Formalistik	Fanatisme Kelompok	Rasional-Pragmatis

Teori Strukturasi merupakan konsep yang memiliki relevansi dengan dunia politik. Dinamika politik di masyarakat melibatkan hubungan dinamis antara aktor politik dengan struktur politik. Dinamika ini tercermin dari relevannya esensi ajaran Giddens dalam mengurai secara mendalam baik aktor, struktur dan proses srtrukturasi yang terjadi dalam dunia politik. Oleh karena itu, teori strukturasi Giddens memiliki relevansi dengan fenomena penelitian yang peneliti kaji. Teori strukturisasi Giddens menyoroti relasi agensi dengan struktur yang oleh Giddens sebut dengan dualitas struktur.

Dalam koteks penelitian ini, yang berposisi sebagai aktor adalah para calon, sedangkan struktur adalah partai politik dan aturan-aturan yang terkait dengan pemilu atau pilkada. Anthony Giddens memadang bahwa aktorlah yang selama ini memicu adanya perubahan orentasi politik. Para calon atau kandidat menyadari bahwa tanpa melalui dukungan partai politik , maka keinginan menjadi seorang wakil rakyat hanyalah sia-sia, Mak segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh aturan dan mekanisme partai politik menjadi sesuatu yang harus dilaluinya. Namun di sisi lain, persaingan politik antar kandidat dalam pemilu tidak hanya dengan calon lain yang berbeda partai politik, namun persaingan yang lebih berat dan menentukan sebenarnya justru persaingan antarcalon di internal partai tersebut. Oleh karena itu calon sebagai aktor harus dapat menyadari bahwa tanpa usaha yang sungguh-sunggh untuk mendapatkan dukungan langsung dari pemilih

maka keinginan tersebut bisa jadi kandas ditengah jalan atau justru menguntungkan calon lain yang masih dalam lingkup partai politik yang sama.

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini, maka perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri sebelum reformasi hingga pasca reformasi terjadi secara bertahap. Selain berubahnya sistem politik dan sistem pemilu secara nasional, peruahan orientasi masyarakat juga dipicu oleh adanya tindakan aktor yakni para kandidat atau calon dalam upaya memenangkan dirinya menjadi wakil rakyat dalam pemilu maupun pilkada. Satu hal lagi yang tidak dapat diabaikan adalah faktor sosial budaya masyarakat Kota Kediri yang sejak pasca reformasi telah mengalami dinamika hubungan antar kelompok dan keagamaan dan elite-elitenya di tingkat lokal. Adapun tentang faktor sosial budaya tersebut secara detail akan peneliti jelaskan tersendiri dalam bagian lain.

Dengan demikian perubahan orientasi politik masyarakat mataram di Kota Kediri sebelum reformasi yang bersifat ideologis sehingga menimbulkan politik aliran, setelah reformasi bayang-bayang oreintasi ideologis tersebut masih terjadi khususnya pada pemilu 1999 dan pemilu 2004. Kesimpulan ini peneliti ambil dari sebuah fakta bahwa di dalam pelaksanaan pemilu 1999 dan pemilu 2004 partai politik dan pemilih sama-sama masih menggunakan sentimen kelompok dalam menjaring hubungan antarkeduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada periode ini orientasi pemilih bergeser dari cara berpikir ideologis ke cara berpikir fanatis. Artinya partai-partai politik dalam mengidentifikasikan dirinya

disesuaikan dengan ciri-ciri dan identitas kelompok sosial yang ingin dirangkul sebagai basis politik mereka.

Persamaan antara orientasi ideologis dengan orientasi fanatis adalah sama-sama mengedepankan identitas kelompok sosial sebagai basis dalam mengelola ciri dan identitas kepartaian. Adapun yang menjadi pembeda dari dua orientasi politik ini, jika pada periode pemilu 1955 perbedaan antar partai politik sangat sulit disatukan, disebabkan jarak ideologis antar partai saat itu (nasionalis, agama, komunisme) atau antara isu agama dan sekuler sangat jauh sehingga sulit didamaikan. Hal tersebut juga terjadi hingga di tingkat pemilih atau basis politiknya. Sedangkan orientasi fanatis terjadi saat pemilu 1999 dan 2004, di mana para pendukung antar parati politik saling mengedepankan simbol-simbol kelompok seperti PKB dengan nahdliyinnya, PAN dengan dukungan massa Muhammmadiyah, PDIP dengan dukungan kelompok petani/wong cilik. Demikian juga Golkar sebagai partai milik Orde Baru masih merepresentasikan dirinya sebagai partainya para pegawai dan kelas pekerja. Namun dalam proses bernegosiasi dalam wilayah parlemen maupun di tingkat akar rumput mereka cepat melakukan kompromi dan konsesnsus. Meskipun di beberapa daerah hubungan tersebut tidak sama, namun secara umum kerjasama para wakil rakyat dan elite partai politik dapat dengan mudah dilakukan.

Namun kondisi tersebut berubah lagi setelah diberlangsungkannya pilkada pertama kali di Kota Kediri tahun 2008 dan dilanjutkan lagi dalam pemilu 2009. Pada periode ini orientasi politik masyarakat yang semula bersifat fanatis berubah ke arah orientasi politik yang bersifat rasional

dan pragmatis. Hal tersebut juga terjadi hingga pelaksanaan pemilu 2014. Hubungan antara partai politik dengan pemilih bukan lagi bersifat kelembagaan, tetapi bersifat personal, menjadi hubungan antara calon atau kandidat dengan pemilih. Dengan kondisi seperti itu, yang menyebabkan timbulnya perubahan orientasi politik dari masing-masing pihak, yang semula bersifat ideologis-fanatis berubah menjadi orientasi yang bersifat rasional dan pragmatis.

Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri juga didukung adanya temuan data tentang perolehan suara partai politik mulai pemilu 2004 hingga pemilu 2014. Meskipun secara sosiologis umat Islam yang ada di Kota Kediri mencapai 90 persen. Namun dalam perkembangan selama sepuluh tahun berikutnya mengalami dinamika orientasi yang tidak sama dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya. Oleh karena itu, dalam analisis kepartaian dan dukungan masyarakat, peneliti menggunakan klasifikasi partai politik menurut ideologi aliran, yaitu antara partai agama (Islam) dan partai nasionalis. Adapun untuk mengetahui perbandingan perolehan suara dan kursi dari dua kelompok partai politik tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam Pemilu 2004-2014

Pemilu 2004			Pemilu 2009			Pemilu 2014		
Nama Partai	Jumlah		Nama Partai	Jumlah		Nama Partai	Jumlah	
	Suara	Kursi		Suara	Kursi		Suara	Kursi
PDIP, Golkar, Demokrat	44.139	15	PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKPB	60.101	15	PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, Nasdem	85.922	15

PKB, PAN, PPP, PKS, PDS	48.685	15	PKB, PAN,PPP, PKS, PDS, PBB, PPNUI	60.693	15	PAN, PKB, PKS, PPP	68.784	15

Sumber : KPU Kota Kediri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pemilu 2004 di Kota Kediri diikuti oleh 3 partai politik lama yaitu PDIP, Golkar, PPP dan 5 partai politik baru yang dibentuk sejak masa reformasi yaitu PAN, PKB, P.Demokrat, PDS dan PKS. Jika dilihat dari perolehan suaranya, partai kelompok agama utamanya Islam sangat dominan suaranya dalam pemilu kedua di era reformasi ini. Artinya masyarakat Kota Kediri pasca reformasi lebih banyak memberikan dukungan dan kepercayaan kepada partai agama dibandingkan kepada kelompok partai nasionalis. Sementara untuk suara PDIP juga mengalami penurunansignifikan yang semula memperoleh kursi 8 turun menjadi 4 kursi

Apabila dipetakan dari keberadaan partai tersebut lebih mencerminkan identitas kelompok sosial keagamaan yang ada di masyarakat. PKB mewakili kelompok santri tradisional, PAN mewakili kelompok santri modernis, PPP mewakili masa umat Islam yang telah bergabung sejak masa Orde Baru, PKS mewakili kelompok Islam perkotaan dan PDS mewakili kelompok umat Kristen. Adapun kelompok partai politik nansionalis, masing-masing adalah Partai Golkar mewakili kelompok pegawai dan organisasi kekaryaan, namun sebagian pendukungnya banyak yang lari ke Partai Demokrat. Sedangkan PDIP mewakili masyarakat abangan, yang mayoritas adalah masyarakat kecil, atau yang biasa dengan sebutan wong cilik.

Berbeda dengan pemilu 2004, saat memasuki pemilu 2009, di Kota Kediri sedang melaksanakan pilkada pertamanya tahun 2008 yang diikuti oleh 8 pasangan calon. Menariknya, saat proses pencalonan pilkada sedang dilakukan oleh partai-partai, dua partai yang memperoleh kursi terbanyak yakni PKB dan PDIP justru dirundung konflik internal. PKB sedang terjadi dualisme kepengurusan mulai di tingkat pusat antara PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin Iskandar yang akhirnya merembet ke daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan PDIP juga dilanda konflik kepengurusan di tingkat lokal sebagai buntut dari pelaksanaan konferensi cabang tingkat Kota Kediri. Sementara di sisi lain juga hadirnya partai pendatang baru dalam pemilu yaitu Gerindra dan Hanura, Selain itu, juga ditambah partai-partai lama yang lolos verifikasi KPU, semakin menambah jumlah peserta pemilu. Partai-partai tersebut antara lain PKPB, PKNU, PPNUI dan PBB.

Pada pemilu 2009 di Kota Kediri diikuti oleh 38 partai politik peserta pemilu.Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga belas partai politik yang akhirnya berhasil mendapatkan kursi DPRD. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya maka jumlah partai politik baik dari kelompok nasionalis maupun partai agama berimbang perolehan suaranya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orientasi politik masyarakat Mataraman Kota Kediri tidak lagi kepada partai politik yang berbasis agama. Tetapi juga bukan berarti masyarakat lebih berorientasi kepada partai nasionalis. Karena jumlah perolehan suara dan kursi antarkedua kekuatan tersebut hampir sama.

PKB yang pada pemilu sebelumnya menjadi pemenang pemilu dan memiliki 9 kursi pada pemilu 2009 turun drastis menjadi 4 suara. Diduga 3 kursi lari ke PKNU yang merupakan pecahan PKB, sedangkan dua kursi lainnya mengarah ke partai lain. Demikan pula suara PDIP yang semula memperoleh 8 kursi turun menjadi 5 kursi. Partai politik dari kelompok agama yang mengalami kenaikan hanyalah PAN. Kenaikan perolehan suara PAN pada periode pemilu kali ini bukan mengindikasikan sebagai kenaikan pemilih dari kelompok santri modernis, tetapi menurut Nuruddin Hasan ketua DPD PAN Kota Kediri adalah hasil dari managemen dan konsolidasi organisasi yang telah lama dipersiapkan dengan matang. Berikut pernyataannya:

> "Pada pemilu 2009 PAN di Kota Kediri semakin solid setelah sebelumnya berhasil memenangkan pilkada pertama. Dari hasil pilkada tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya orang PAN saja yang memilih tetapi dari bemacam-macam unsur di masyarakat. Artinya PAN tidak lagi menjadi milik kelompok tertentu. Dan masyarakat telah mengetahui sendiri bahwa PAN bisa semua kelompok masuk di dalamnya. Bukan hanya milik warga Muhammadiyah saja. Untuk pemilu 2009 memang sudah disiapkan sejak 2006 termasuk menyiapkan pemenangan di pilkada itu sendiri." (Wawancara, 23 Agustus 2020)

Pada pemilu 2014 perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri semakin jelas dari data perolehan partai politik peserta pemilu. Dalam pemilu kali ini diikuti oleh 12 partai politik. Dari keduabelas partai politik tersebut ditetapkan model parlementary threshold, yaitu ambang batas bagi partai politik yang berhak mengikuti penghitungan suara dan mendapatkan kursi secara nasional baik di pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Maka jumlah partai

politik yang berhak mendapatkan kursi di setiap daerah adalah sama yaitu 10 partai politik.

Dari data yang bersumber dari KPU Kota Kediri, dapat diketahui bahwa dalam pemilu 2014 partai politik nasionalis perolehan suaranya lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan perolehan suara partai politik agama. Selain itu, dalam pemilu kali ini, jumlah partai nasionalis lebih banyak dibandingkan dengan partai politik agama. Namun ada yang mengejutkan, bahwa yang menjadi partai politik pemenang pada pemilu 2014 di Kota Kediri adalah PAN yang nota bene merupakan partai politik dari kelompok agama. Meskipun demikian dari tiga kali pemilu mulai tahun 2004, 2009 dan 2014 perolehan kursi dari partai politik nasionalis maupun partai politik agama tetap sama, yaitu masing-masing 15 kursi di DPRD.

Dari gambaran perolehan suara dan kursi partai politik sebagaimana di atas besar kemungkinan yang menjadikan proses politik di DPRD maupun dalam konteks hubungan dan interaksi sosial di masyarakat berjalan secara kondusif. Tidak ada konflik dan perdebatan yang mengarah pada situasi yang gaduh apalagi menimbulkan bentrok fisik. Artinya kekuatan nasionalis dan agama di Kota Kediri dapat berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Karena tidak ada yang merasa lebih dominan dari yang lain. Dengan demikian perubahan orientasi politik yang terjadi pada masyarakat Kota Kediri lebih mengarah kepada sebuah upaya untuk mencari jalan tengah dan titik temu setiap kali muncul gagasan atau persoalan.

2. Bentuk Perubahan

Menurut temuan data dalam penelitian ini, bahwa bentuk perubahan orientasi politik masyarakat mataram di Kota Kediri semakin bersifat terbuka dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan orientasi yang semula bersifat Ideologis dan cenderung berpikir absolut dan cenderung bersikap militan, maka setelah ada perubahan orientasi tersebut sikap yang ditunjukkan lebih terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian masyarakat dalam melihat suatu gagasan atau pendapat lebih diarahkan pada upaya-upaya untuk terjadinya kerja sama.

Namun seiring dengan perubahan orientasi politik tersebut masyarakat dalam merespons ajakan dari para kandidat atau calon semakin dewasa, artinya lebih mempertimbangkan segi nalar dan lebih dapat menyikapinya dengan yang ada di dalam masyarakat tidak menggambarkan kedekatan masyarakat dengan partai politik. Dukungan masyarakat kepada suatu parpol pada masa reformasi justru tidak berkaitan dengan ideologi partai politik. Hal ini dapat diamati di wilayah Kota Kediri, bahwa preferensi politik masyarakat dapat berpindah dari satu parpol ke parpol lainnya pada setiap pemilu. Fenomena ini menurut peneliti bahwa demokratisasi yang dilaksanakan menghasilkan kekuatan politik yang beragam sebagai cerminan bahwa pluralisme di akui dalam masyarakat. Walaupun dalam konteks tertentu, ideologi demokrasi justru tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang bekembang di masyarakat. Salah seorang pengamat budaya Kediri Tauhid Wijaya mengatakan:

> "Dalam bidang politik masyarakat memang rasional meskipun juga pragmatis, artinya mereka dapat memisahkanmana yang terkait dengan urusan agama dan mana yang terkait dengan urusan sosial atau politik. Di pesantrenpun juga begitu, ajakan kyai hanya efektif di internal pesantren, tetapi setelah diluar tembok, mereka sudah nggak tergantung dengan pilihan kiyai lagi. Begitu pula dengan banyaknya pengajian yang sering mendatangkan kyai, tetapi dalam kenyataannya jamaah tetap meliki pilihan sendiri. Bagi masyarakat dalam urusan agama ngikut kyai tetapi untuk urusan di luar agaa mereka sudah memiliki kriteria atau pedoman sendiri." (Wawancara, 14 September 2019)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa orientasi dan sikap masyarakat dalam berpolitik bersifat rasional. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap merka dalam pemilu dan pilkada tidak lagi tergantung pada tokoh panutan yang mereka miliki. Dalam wilayah politik masyarakat ternyata dapat lepas dari bayang-bayang pengaruh para tokoh panutannya. Artinya masyarakat dapat memisahkan mana urusan agama dan mana yang merupakan urusan politik.

Menurut temuan data di lapangan bahwa sejak pasca reformasi kondisi masyarakat di Kota Kediri telah mengalami perubahan orientasi. Perubahan orientasi politik masyarakat tersebut karena disebabkan kondisi masyarakat semakin rasional. Meskipun ada faktor politik uang dalam pemilu maupun pilkada, namun program masih menjadi sandaran dan dasar dalam menentukan pilihan politiknya. Artinya partai politik yang menawarkan program kesejahteraan akan semakin diminati rakyat. Fenomena tersebut terjadi sejak pemilu 2009, bahwa partai politik yang menang pada pemilu 2004 karena dirasa tidak memperjuangkan kepentingan

rakyat akhirnya pindah ke partai politik lain. Di sisi lain sejak pelaksanaan pemilu 2009 masyarakat telah mengenal politik uang. Hal tersebut disebabkan pengaruh pelaksanaan pilkada sebelumnya yang menjadikan uang sebagai bagian dari transasksi politik.

Fakta lain yang memperkuat argumen tersebut, bahwa sejak pilkada pertama tahun 2008 hingga pilkada 2013 PAN tetap menjadi pemenangnya. Hal tersebut disebabkan masyarakat tidak lagi melihat partai pengusung sebagai pertimbangan utama, tetapi lebih memetingkan faktor figur kandidat yang pertimbangan utamanya. Dalam pengertan lain, masyarakat lebih mempertimbangkan program yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat dibandingkan dengan sentiment ideologis seperti nasionalis atau agama. Dalam pemilu kondisi politik sedikit banyak dipengaruhi oleh isu-isu yang bersifat nasional.

Tidak itu saja, pada pemilu 2014 PAN berhasil menjadi pemenang pemilu sehingga sehingga berhak atas kursi Ketua DPRD. Sehingga secara total PAN dapat menguasai kursi legislatif dan eksektutif. Jika diamati dari kaca mata ideologis maupun politik aliran, maka kemenangan PAN bukan merupakan simbol kemenangan kelompok Islam modernis. Hal tersebut disebabkan orientasi politik masyarakat yang telah berubah. Mereka memilih partai politik tidak lagi didasarkan pada ideologi atau sentimen keagamaan, namun karena dilatarbelakangi oleh pandangan yang lebih kekinian dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara praktis. Dwidjo Utomo Maksum (50) salah seorang pengamat sosial politik Kediri mengatakan;

> "Bagi saya orientasi masyarakat tentang trilogi Geertz tetap mendominasi ruang yang paling dalam dalam diri masyarakat Kediri. Akan tetapi dalam proses perkembangannya ada perubahan ketika ada brandding, peran media massa, dan bagaimana mereka mempengaruhi mereka ke konsituen, adanya alat peraga yang semakin kreatif dan sebagainya adalah fakta-fakta yang ikut mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pikada dan pemilu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka masih kuat mempertahankannya. Misalnya mereka banyak masuk PAN tetapi kalau ditanya jiwanya adalah nasionalis. Jadi terdapat perbedaan antara urusan keseharian di masyarakat dengan urusan kepentingan yang bersifat elektoral." (Wawancara,20 September 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa orientasi politik masyarakat di Kota Kediri telah mengalami perubahan ke arah yang lebih realistis dan terbuka. Mereka akan memilih partai politik atau calon yang dapat memenuhi harapan dan juga soal kepemimpinan. Adapun mengenai tipologi keberagamaan sebagaimana digambarkan Clifford Geertz tetap disimpan dalam ruang kebatinan masyarakat. Bedanya jika pada masa lalu ideologi tersebut sekaligus dapat mengarahkan pada orientasi politik kepada partai politik tertentu untuk dipilih, namun yang terjadi sekarang orientasi politik tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan elektoral saja dan tidak ada perubahan dalam pola keberagamaan mereka.

Temuan ini menarik sebagai bahan kajian mengingat secara sosiokultural masyarakat Kediri sejak dahulu mayoritas warganya adalah berkultur abangan. Meskipun secara keagamaan , batasan tersebut semakin kabur. Sebagian dari mereka yang abangan sudah menjalankan syariat Islam

sebagaimana kelompok santri, terutama mereka yang kultur abangannya masuk kelompok priyayi. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga dan menghormati keyakinan-keyakinan lama yang sudah menjadi kebiasaan karena diyakini merupakan peninggalan nenek moyang. Contohnya dalam kehidupan keluarga, setiap berurusan dengan siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan dan kematian, tetap dilangsungkan *slametan* dengan cara mengundang tetangga sekitar untuk mendoakan agar hajat yang dimaksudkan tercapai. Dalam konteks budaya keagamaan seperti ini tampaknya di masyarakat Kediri pada umumnya masih tertanam dengan kuat.

Kolaborasi antara Islam abangan dan Islam santri dapat dilihat dalam bentuk kegiatan do'a bersama atau acara *ngirim do'a* kepada arwah. Dalam hal acara pengiriman doa arwah tersebut banyak ditemukan dalam keluarga Islam abangan dengan mengundang kelompok yasin dan tahlil (kelompok santri) ke rumahnya, minta dido'akan agar hajatnya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pihak tuan rumah menyediakan hidangan untuk dimakan besama dan nasi berkat untuk dibawa pulang kelompok Islam santri dengan maksud diberikan kepada keluarganya di rumah.

Dari gambaran di atas, apabila dikaitkan dengan temuan Clifford Geertz dalam bukunya *Agama Orang Jawa*, maka karakter kelompok abangan maupun santri, atau lebih tepatnya antara orang Islam abangan dan Islam santri sudah jauh berbeda kondisinya dibandingkan dengan saat penelitian tersebut dilakukan yakni tahun 1960-an. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek ritual dan perilaku keagamaanya saja, tetapi juga terjadi pada wilayah relasi antar keduanya yang

tidak lagi bersifat antagonis, tetapi sudah berubah menjadi sinergis bahkan terkesan integral antara satu dengan yang lainnya.

Contoh lainnya untuk menjelaskan kondisi tersebut adalah semakin banyak kelompok abangan karena dirasa mampu secara finansial telah melakukan ibadah haji. Bahkan sebagian dari mereka yang sudah berhaji tersebut dengan tidak malu-malu menyebutkan titel hajinya di depan namanya. Atau dalam pergaulan sehari-hari mereka seolah-olah bangga jika dipanggil dengan sebutan pak haji. Demikian pula bagi kelompok santri, hubungannya dengan kelompok abangan juga semakin dekat dan akrab . Hal ini disebabkan kaum abangan lebih dekat dengan tata cara keagamaan yang dimilki kelompok santri dibandingkan dengan model keagamaan kelompok Islam perkotaan. Berikut pernyataan Tauhid Wijaya (47) :

> "Masyarakat kediri kota adalah masyarakat yang memiliki kelembaman tinggi, memilki daya serap tinggi. Misalnya mau cari isu agama, akan sulit dibangkitkan. Termasuk hal ini kurang responsive dan kurang cepat dalam menjawab fenomena akhir. Jargon harmoni itu memang yang menyebabkan kita sulit untuk berinovasi secara lebih cepat, namun harus diakui bahwa kebiasaan hidup bersama dengan perbedaan tersebut telah berjalan ratusan tahun yang lalu.. Karakter semacam ini sudah ada sejak. Karena saya kan lahir juga di sini.Istilahnya *nggih-nggih tapi nggak kepanggih*". (Wawancara, 14 Sepetember 2019)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sikap masyarakat Kediri dalam menghadapi berbagai peristiwa dan perbedaan yang datangnya dari luar sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Oleh karenanya mereka tidak termasuk tipe masyarakat yang reaktif ketika berhadapan dengan

perbedaan. Mereka justru akan lebih terbuka dan dapat menerima perbedaan-perbedaan tersebut menjadi bagian dalam kehidupan bersama.

Kenyatan-kenyataan di atas ,jika ditarik dengan menggunakan prespektif historis, memang menemukan titik temunya. Kediri yang keberadaannya sejak zaman abad ke-12, telah menjadi sebuah kerajaan yang diperhitungkan hingga mengalami masa kejayaan. Secara ekonomi dan politik, Kediri telah mampu menjadi pusat kendali pemerintahan serta pusat perdagangan saat itu. Hal tersebut terus berlangsung pada masa kolonial, hingga zaman kemerdekaan. Sebagai buktinya adalah adanya berbagai bangunan peninggalan di sepanjang pinggir Sunggai Brantas, seperti Masjid Agung, Klenteng, Gereja, Pesantren dan gedung pemerintahan, yang letaknya masing-masing tidak berjauhan satu dengan yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa sinergi antara kehidupan agama, dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan damai dan serasi telah berjalan cukup lama di Kota Kediri.

Dengan demikian bentuk perubahan orientasi politik masyarakat mataram di Kota Kediri sesuangguhnya telah memiliki akar sosial dan sejarah yang panjang. Masyarakat Kediri yang terbentuk melalui proses pertemuan dari beragam unsur yang berbeda. Dari pertemuan unsur-unsur tersebut baik agama dan kepercayaan, etnis dan kelompok sosial akhirnya menghasilkan proses akulturasi budaya yang kuat. Dengan ungkapan lain, masyarakat Kediri itu sudah kosmopolit sejak dahulu. Maka ketika terdapat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat sendiri tidak

lagi mempunyai rasa fanatisme yang berlebihan. Hal tersebut tidak dapat pungkiri karena adanya pengaruh nilai-nilai Jawa dalam masyarakat Kediri, Selain itu, sejak dahulu zaman kerajaan masyarakat Kediri dibentuk oleh sistem interaksi sosial sungai sebagai sarana tranportasi dan perdagangan saat itu.Sehingga tampak halus dan terstruktur, berbeda dengan interaksi pelabuhan laut yang cenderung bebas dan kasar.

Dengan demikian, bentuk perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat mataram di Kota Kediri adalah budaya politik toleransi. Yaitu bentuk orientasi atau cara pandang masyarakat yang berpusat pada gagasan atau persoalan. Cara pandang budaya politik toleransi semacam ini lebih berorientasi pada masalah dan berusaha memecahkan masalah tersebut. Dalam memecahkan masalah masyarakat selalu berupaya untuk mencari titik temu sehingga terjadi konsesnsus dan kerja sama. Dalam budaya politik toleransi juga senantiasa bersikap netral tetapi kritis terhadap perkembangan gagasan tetapi dalam konteks lain mereka sangat terbuka dengan siapapun dan menjauhi sikap curiga terhadap orang lain.

3. Dampak Perubahan

Dampak perubahan orientasi politik masyarakat mataram yang semula bersifat idologis menjadi rasional pragmatis dalam pemilu maupun pilkada sangat dirasakan partai politik, calon, maupun masyarakat itu sendiri. Pemilu dan Pilkada yang merupakan ajang kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat ke arah lebih baik, karena adanya perubahan orientasi tersebut maka berdampak pada cara-cara yang

yang dianggap lebih efektif dalam meraih suatu kekuasaan atau jabatan politik dengan menarik dukungan suara dari masyarakat.

Menurut Firmanzah, pragmatisme politik adalah merupakan orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaiangan politik. Seringkali orientasi jangka pendek ini membawa aktor politikke arah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk berkuasa, dan bukannya untuk melakukan pembaharuan kebijakan publik sebagai hasil dari berkuasa tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada ditabraknya etika, moralitas, aturan main, janji politik dan ideologi partai yang hanya sekadar untuk mengamankan posisi politik mereka saja.(Firmanzah, 2010, hal. 46) (Firmanzah, 2010, hal. 46)

Sebenarnya dampak pragmatisme dalam pemilu dan pilkada tersebut sebagai akibat dari tindakan para calon dan partai politik serta tim sukses yang dengan beragam cara dalam memenangkan kompetisi politik baik di internal maupun antar partai politik. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari undang-undang pemilu yang mengatur tentang penetapan calon terpilih bukan lagi karena nomor urut tetapi berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dampak lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah munculnya perilaku transaksional antara calon atau kanddat dengan pemilih.

Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, bahwa sebagian masyarakat memandang partai politik itu sama, tujuannya sama begitu pula tentang visi dan misinya. Oleh karena itu masyarakat yang menjadi tim sukses atau simpatisan partai tertentu di mata masyarakat dianggap biasa. Meskipun jika dilihat dari latar belakang kelompok dan kultur keagamaan

orang tersebut berbeda dengan calon atau partai politik yang didukungnya. Di sisi lain masyarakat sebenarnya juga sudah menyadari bahwa dalam setiap pemilu dan pilkada, yang banyak aktif menemui masyarakat adalah calon atau tim suksesnya. Oleh karena itu masyarakat tahunya adalah siapa yang mengajak untuk mendukungcaleg tersebut juga menjadi pertimbangan. Jika orang yang mengajak tersebut, baik sebagai tim sukses atau simpatisan memilki catatn negatip di masyarakat maka, masyarakat juga akan cenderung menghindar untuk mengikuti kemauan orang tersebut dan begitu pula sebaliknya. Dengan melihat relasi antara pemilih dengan tim sukses dan calon, maka dapat disimpilkan bahwa posisi tim sukses sangat menentukan berhasil dan tidaknya mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. Kondisi tersebut berlaku terutama bagi masyarakat yang awam politik, sehingga mereka sangat tergantung dari siapa yang mengajaknya. Dengan demikian hubungan antara kandidat dengan pemilih bersifat tidak langsung, karena menggunakan jasa pihak ketiga untuk menghubungkannya ke masyarakat.

Gambaran tentang cairnya hubungan antara pemilih dan calon atau tim sukses dapat diketahui dari pernyatan salah seorang anggota tim sukses, Edy Suwarno (43) sebagai berikut:

> "Hubungan antar masyarakat meskipun berbeda pilihan, tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, kecuali hanya sebagian kecil yang merupakan tim utama caleg. Namun pada umumnya warga tidak ada masalah dan tetap kondusif. Bahkan antar pendukung/tim bisa berkomunikasi dengan baik di wilayah masing-masing untuk saling menetapkan batasan wilayah dan diberi kebebaaan untuk melakukan aktivitas kampanye. Diantara tim sukses sering ketemu di warung kopi dan berbaur satu dengan yang lain. Bahkan saling menyesuaikan satu

dengan yang lain. Sebab kalau berkompetisi, malah hancur semua. Makanya mereka saling berbagi, dan yang penting sama-sama jalan." (Wawancara, 26 Januari 2020)

Sumberdaya yang umum dan yang paling nampak digunakan dalam pemilu mapun pilkada adalah menggunakan uang, barang dan jaringan. Pemberian uang dan barang digunakan sebagai alat transaksi bagi pemilih saat pertemuan yang diadakan oleh tim sukses atau calon. Pemberian uang tersebut digunakan sebagai ongkos transportasi. Sedangkan pemberian uang juga dilakukan pula kepada pemilih saat menjelang pemilihan di TPS. Dengan pemberian uang dan barang tersebut diharapkan pemilih semakin terikat dengan calon sehingga akan berdampak pada adanya kepastian bahwa dukungan suara pemilih akan diberikan kepadanya.

Adapun pola pendistribusian uang sebagaimana temuan dalam penelitian ini dilakukan melalui keluarga. Alasannya, dengan melalui keluarga sangat kecil kemungkinannya untuk seorang pemilih berkianat. Namun ada juga, sebagian calon dalam pemberian uang kepada pemilih melalui tim suksesnya. Pada pemilu 2009 kebanyakan calon memberikan uang melalui tim suksesnya. Namun berdasarkan evaluasi mereka sendiri, ternyata pemberian langsung melalui tim sukses kepada pemilih banyak yang tidak sampai kepada sasaran. Sehingga dalam pemilu 2014, para calon legislatif mengubah cara tersebut dengan memberikannya kepada pemilih melalui kepala rumah tangga atau jaringan keluarga.

Menurut Abdul Mukhlis (2009), politik uang merupakan fenomena umum yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu di banyak negara, bahkan di negara-negara demokrasi yang menggunakan pemilihan Umum (Pemilu) sebagai

media memilih pemimpin-pemimpin politik. secara umum, pengertian politik uang terkait pada upaya mendapatkan keuntungan bagi kemenangan bagi para kontestan melalui pembelian suara atau dikenal juga dengan istilah politik transaksional.

Adapun yang dimaksud dengan politik uang adalah, uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu.(Halim, 2014) (Halim, 2014)

Komisi pemilihan umum Daerah (KPUD), kota kediri menetapkan anggota DPRD untuk masa bakti tahun 2014-2019. dari sebanyak 30 orang anggota dewan terpilih , 60 persen diantaranya adalah muka baru , dan sisanya 40 persen muka lama. sementara itu, dari jumlah keseluruhan anggota dewan , kuota perempuan menembus prosentase 30 persen.

Keberadaan partai politik di berbagai tingkatan di Kota Kediri hampir semuanya tidak terasa dan bahkan dapat dikatakan tidak berjalan pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal tersebut disebabkan ada perasaan disebagian besar para pengurusnya bahwa ketika momentum pilkada dan pemilu sudah lewat, mereka mengalami kendala psikologis dengan masyarakat. Karena di kalangan masyarakat ada anggapan

bahwa dengan menggunakan nama parpol akan lebih membatasi ruang geraknya di tengah masyarakat. Demikian pula masyarakatpun juga memiliki sebuah anggapan bahwa parpol hanya boleh eksis jika ada momentum pemilu atau pilkada saja. Cara berpikir seperti inilah yang menyebabkan masyarakat kurang begitu menerima aktivitas pengurus parpol terjun ke masyarakat. Kalupun ia mau menyelenggarakan aksi sosial, maka sebaiknya menggunakan kelembagaan yang ada di setiap RT dan RW selain lebih memberikan kesan netral juga tidak ada perasaan curiga dengan misi parpol itu sendiri.

Jika dicermati dari fenomena semacam ini, sebenarnya bertentangan dengan fungsi parpol dalam kehidupan politik masyarakat, yang seharusnya dapat menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan politik juga sebagai wadah aspirasi masyarakat sebagaimana dalam konsep negara demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain hal ini juga akibat perlakuan selama puluhan tahun selama era Orde Baru, dengan politik massa mengambang. Dimana dalam kenyataannya saat itu masyaraat dilarang aktif dalam organisasi politik.

Hal ini terutama karena kurangnya sosialisasi politik, komunikasi politik dan perilaku partai yang belum seutuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam situasi ketika partai belum cukup atraktif di mata masyarakat inilah, kecenderungan untuk mengabaikan atau menomorduakan partai saat memilih muncul ke permukaan. Selain itu,, masyarakat pun saat ini telah semakin kritis untuk melihat kebermanfaatan pemilu dengan tidak lagi terpaku pada simbol-simbol kepartaian semata.

Perubahan parpol penguasa yang lama dipegang lama oleh partai nasionalis (PDIP) dan Golkar saat orde Baru, di era reformasi berubah menjadi PKB dan PAN. Pendudkung partai tidak lagi ideologis. Kekuatan aliran yang dulu masih terkotak merah kuning hijau, sekarang telah menyebar ke berbagai partai. Termasuk PAN sebagai partai pemerintah pada tahun 2014 ternyata didukung beragam elemen. Hal tersebut dibenarkan Setyo Hadi (51) dalam pernyataanya sebagai berikut:

> "Ternyata kalau dikumpulkan mereka yang jadi itu sebagai warga NU. PDIP itu ideologis, sehingga siapapun calegnya akan dicoblos partai. Belum ada ceritanya orang caleg nasionalis membantu kelompok pengajian atau tempat ibadah. Regina yang orang cina saja begitu masuk PDIP langsung dipilih. Ya karena dia menyediakan uang untuk pemilih. Karena masyarakat itu memilki pandangan pada hari H harus dapat uang. Alasanya karena kalau caleg tersebut jadi, nggak bakalan diperhatikan, maka dia harus dapat sesuatu jika diminta mencoblos." (Wawancara, 10 Nopember 2019)

Merebaknya citra bahwa siapapun yang berkiprah dalam politik pemilu atau pilkada maka akan berdampak pada keuntungan tertentu yang bersifat finansial. Salah satu yang menjadi berita saat itu adalah seorang kiai besar menyatakan dukungan terhadap pasangan tertentu dalam pilkada. Berbagai komentar terhadap berita tersebut marak di media sosial sehingga sempat disesalkan oleh beberapa pihak. Karena asumsi semacam itu terkesan menyudutkan seseorang atau pihak tertentu. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Berikut komentar salah satu tokoh agama dan pengasuh pesantren Bandarkidul Kota Kediri, Gus Qowimuddin (50) meyampaikan pernyataannya sebagai berikut;

> "Saya melihat, dalam kontek politik, apa yang menjadi keputusan pesantren yang diambil oleh kiainya itu tidak kemudian diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi dalam kontek yang lain masyarakat mengikutinya, contoh penetapan awal ramadhan, akhir ramadhan. tapi pada persoalan politik tidak demikian. Hal ini terjadi karena pengaruhi *money politic*. *Money politik* untuk pondok pesantren dan *money politic* untuk masyarakat berbeda. saat ini masyarakat punya persepsi bahwa ketika pesantren membuat keputusan itu karena mendapatkan sesuatu. dalam konteks pilkada, dalam kontek pileg itupun demikian. Padahal yang terjadi tidak demikian, ketika kyai dan pesantren menyampaikan pilihannya itu karena berdasarkan kalkulasi politik tertentu. Tetapi di masyarakat kyai atau pesantren telah dianggap mendapatkan sesuatu dari calon. (Wawancara, 16 Nopember 2019)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa persoalan uang dalam pilkada maupun pemilu sudah menjadi hal lazim di mata masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari cara-cara yang digunakan para aktor politik dalam mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Salah satu tokoh yang diyakini memilki pegaruh ke masyarakat adalah kiai. Maka dalam kontes pilkada atau pemilu penterjemahan minta restu ke kiai adalah dalam rangka meminta dukungan ke kiai tersebut agar dirinya juga mendapatkan simpati dan dukungan dari santri dan para alumninya. Hubungan antara calon dengan kiai pun akhirnya tidak bisa lepas dari dugaan masyarakat, bahwa sang kiaipun tidak lepas dari permainan transaksional yang dilakukan oleh calon tersebut.

Selanjutnya mensikapi adanya fenomena politik uang di setiap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu di Kota Kediri, sebagian masyarakat menyatakan menerima uangnya tetapi belum tentu memilih orangnya. Pandangan tersebut

merupakan pandangan mayoritas dari seluruh jumlah responden. Jika dicermati lebih jauh pandangan ini, menurut peneliti memiliki dua asumsi. Asumsi pertama, masyarakat sebenarnya telah memiliki pilihan terhadap calon tertentu, namun karena proses pemberian uang itu dilakukan oleh calon atau tim sukses yang merupakan orang-orang yang mereka kenal, maka besar kemungkinan ada perasaan enak dan tidak enak jika menolaknya. Maka uangpun diterima meskipun pilihannya sudah ke calon lain. Sedangkan asumsi yang kedua, masyarakat menganggap politik uang sebagai sesuatu yang biasa, sehingga tidak perlu untuk ditutup-tutupi. Dengan memberikan uang, hubungan antara calon atau pasangan calon dengan pemilih bersifat transaksional. Uang yang telah dikeluarkan oleh calon dianggap sebagai ongkos atau biaya politik. Dengan demikian ada semacam ikatan atau penanda bahwa antara keduanya telah terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Calon atau pasangan calon akan mendapatkan suara atau dukungan politik, sedangkan bagi pemilih mendapatkan imbalan untuk pengganti biaya transport atau upah kerja sehari.

Dalam pilkada terdapat dua aktor yang sangat berkepentingan, yaitu partai politik dan kandidat yang bersaing. Kepentingan dua aktor tersebut sebenarnya memiliki resiko yang berakibat mengesampingkan masyarakat. Pertama, kepentingan partai politik. Kepentingan partai politik yang utama adalah terkait dengan keharusannya untuk memunculkan kandidat yang diharapkan mampu bersaing dalam pilkada. Sementara pada titik ini partai tidak banyak memiliki kader yang cukup populer dan kredibel untuk dicalonkan. Namun secara bersamaan partai politik juga

membutuhkan perluasan dukungan dari kelompok-kelompok sosial yang mengakar di dalam masyarakat.

Untuk memenuhi kepentingan tersebut pemimpin partai politik melirik pemimpin atau tokoh-tokoh ormas yang sudah mapan di masyarakat. Singkatnya partai politik menggandeng tokoh ormas ke dalam kekuasaan untuk berkompetisi dalam pilkada. Kaena persoalan keterbatasan kader dan nalar untuk memperluas basis dukungan ada di semua partai yang berhak mencalonkan kandidat dalam pilkada, menjadikan tokoh atau pemimpin dari ormas yang telah mapan menjadi rebutan partai politik.

Setelah pemilu tahun 2009 hingga pemilu 2014 orientasi masyarakat Kota Kediri mengalami perubahan. Yang semula masyarakat dalam mempertimbangkan pilihan politiknya berdasarkan ideologi maka sejak 2009 masyarakat berubah dalam menentukan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang berupa isu kesejahteraan sosial. Jadi siapapun partai politik yang mampu menawarkan dan mewujudkan isu kesejahteraan, maka partai itulah yang dipilih. Dan bukan lagi menggunakan platfon idelogi semisal nasionalis, agamis dan sejenisnya seperti yang berlaku sebelumnya. Berikut pendapat Tauhid Wijaya sebagai berikut:

> "Dalam bidang politik masyarakat memang rasional meskipun juga pragmatis, artinya mereka dapat memisahkan mana yang terkait dengan urusan agama dan mana yang terkait dengan urusan sosial atau politik. Di pesantrenpun juga begitu, ajakan kyai hanya efektif di internal pesantren, tetapi setelah diluar tembok, mereka sudah nggak tergantung dengan pilihan kiyai lagi. Begitu pula dengan banyaknya pengajian yang sering mendatangkan kyai, tetapi dalam kenyataannya jamaah tetap memiliki pilihan sendiri. Bagi masyarakat dalam

> urusan agama ngikut kyai tetapi untuk urusan di luar agama mereka sudah memiliki kriteria atau pedoman sendiri." (Wawancara, 14 Sepetember 2019)

Fenomena semacam itu terjadi di masyarakat Kota Kediri, ketika pasangan Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah menang dalam pilkada tahun 2013, maka setahun kemudian PAN yang menjadi pendukung pasangan ini paling banyak menyumbangkan suara dan kursinya di DPRD Kota Kediri meninggalkan perolehan suara partai-partai yang lain. Meskipun PAN bukanlah partai yang dominan, tetapi masyarakat menilai bahwa dengan terpilihnya pasangan Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibah ikut mendongkrak harapan masyarakat tentang perbahan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa menangnya Mas Abu, sebutan untuk walikota terpilih juga dipengaruhi oleh isu yang di-usungnya dengan memberikan dana program pembangunan sebesar 50 juta per RT dengan nama prodamas. Semula janji politik dengan memberikan dana 50 juta per RT dianggap sebagai permainan politk uang. Pasca penetapan Abu Bakar sebagai calon walikota terpilih, pasangan Samsul Ashar sebagai walikota petaha melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan tersebut ditolak, dengan alasan hal tersebut bukan sebagai money politic, tetapi merupakan bagian dari tawaran atau janji politik dalam kampanye, yang itu sah secara hukum.

Menangnya PAN di Kota Kediri cukup fenomenal karena jika dilihat dari basis PAN sendiri yang biasanya dari kalangan Muhammadiyah – yang sebaran anggotanya di wilayah ini sangat kecil. Justru yang paling banyak dan dominan secara

keagamaan di masyarakat adalah kaun nahdliyin. Selain penataan strategi pemenangan yang lebih solid juga didukung oleh tawaran program lewat Prodamas inilah yang menjadi kunci kemenangannya. Sehngga PAN berhak mendapatkan kursi ketua DPRD.

Orientasi politik masyarakat terhadap keberadaan partai politik pasca reformasi, terutama sejak pemilu 2009 tidak lagi berdasarkan ideologi atau program yang ditawarkan, tetapi sangat tergatung pada seberapa besar peran dan tanggung jawab para pengurus dan kadernya yang duduk di parleman. Hal tersebut peneliti temukan di hampir seluruh tim sukses dan kader parpol yang bergerak mencari suara untuk memenangkan kandidatnya ke kursi parlemen. Bagi mereka mengenal dan memilih kandidat atau calon lebih penting dibandingkan mempersoalkan latar belakang partai poltik yang mengusungnya. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan disampaikan Hartono (40) salah seorang aktivis NU di Kota Kediri mengatakan:

> "Bagi saya, semua partai politik itu sama. Karena secara formal memilki visi, misi dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kepetingan rakyat. Masalahnya partai tersebut , apakah didukung oleh kader-kader jujur dan punya komitmen tidak. Di situlah pentingnya melihat siapa yang akan kita pilih. Kalau yang kita pilih tidak kenal ya tentu kita ragu akan kemampuannya. Maka jika hal tersebut yang terjadi, biasanya para kader partai atau tim sukses tersebut dalam menggalang suara berdasarkan kedekatan. Ada juga melalui ikatan keluarga atau pertemanan. Dengan cara tersebut maka biasanya seorang kandidat akan mendapatkan dukungan suara yang diperlukan" (Wawancara, 9 Nopember 2019)

> Di sisi lain, keberadaan partai politik di Kota Kediri dapat dikatakan dinamis dan semarak. Hal tersebut dapat dilihat saat menjelang diadakannya pemilu. Individu atau kelompok mencoba melakukan pendirian partai politik yang merupakan cabang di Kota Kediri. Dari data mulai pemilu 2004 hingga 2014, peserta pemilu yang terdaftar di Kota Kediri jumlahnya hampir menyamai jumlah partai politik yang ada di kepengurusan pusat. Pada tahun 2004 jumlah peserta pemilu adalah 48 partai politik. Dari jumlah tersebut sebagian besar memilki kepengurusan di Kota Kediri.(Data KPU Kota Kediri).

Berbeda dengan kesaksian informan terdahulu, bahwa masyarakat Mataraman menurutnya tidak mengalami perubahan, utamanya dalam hal corak keberagamaan maupun dalam sitem sosial kemasyarakatan. Hanya saja karena situasi kekinian mengharuskan mereka bersikap, maka pilihan politikpun diambil guna memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Demikian penjelasan Utomo (51) sebagai berikut:

> "Salah satu faktornya adalah adanya keterbukaan yang mendorong didirikannya partai politik tidak seperti saat orba yang hanya 3 partai saja. Dari beragam grup atau komunitas ini lalu membangun ikatan dan sentimen baru sehingga menjadi keyakinan tertentu yang kemudian diwujudkan dengan cara mendirikan partai. Tapi secara global Kediri itu tidak lepas dari pengaruh *ideologi abang ijo kuning*. Yaitu abangan atau nasionalis, priyayi dan agama. Dan secanggih apapun tentang teori politik yang hendak diterapkan bahwa dunia politik di Jawa khususnya Kediri tidak akan lepas dari konsep tersebut. Entah itu sengaja dibangun atau kebetulan, namun faktanya memang seperti itu." (21 September 2019)

Lebih jauh dari fenomena yang berkembang adalah bahwa masyarakat masih melihat simbol dan ketokohan dalam partai politik yang merupakan representasi dari ideologi yang

masih berkembang di masyarakat. Dalam tataran yang paling dalam, hal tersebut masih sangat dijaga dan dipertahankan. Pemahaman tersebut dibentuk dan terkait dengan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga melahirkan cara pandang budaya tertentu yang terbentuk dalam waktu yang lama mulai dari keluarga dan lingkungan yang menjadikan tidak mudah tergerus oleh perubahan macam apapun. Lebih jauh Utomo (50) menjelaskan:

> "Contohnya ketika pasca reformasi PDIP menjadi partai yang sangat viral, sebenarnya kekuatannya bukan teretak pada PDIPnya karena waktu itu banyak partai-parta nasionalis juga bermunculan, seperti PNI Marhaenis, PDP. Tetapi mengapa mereka tidak menang. Karena mereka tidak cukup kuat menggandeng dengan yang disebut mitologi ketokohan. Nah ketokohan itu ada di dalam diri Megawati. karena dia merupakan representasi Soekarno baik secara biologis maupun ideologis. Karena istilah abang zaman dulu itu ya soekarno. Itu yang menurut saya tidak atau belum bergeser. Kemudaian kalau bicara agama, kalau yang menjadi mitologi jawa itu hanya NU dan Muhammdiyah, yang kemudian mereka membuat sekoci berupa partai politik PKB dan PAN. " (Wawancara, 21 September 2019)

Dengan model kultur Jawa yang cenderung seenaknya sendiri dalam arti positif, yakni nggak mau dikekang dan sebagainya, maka ikatan-ikatan tersebut yang sebenarnya masih terlihat kokoh hingga sekarang. Di kalangan abangan juga karena ada ketokohannya yang menyebabkan mereka menjadi kuat dan lestari hingga sekarang. Di PKB meski ada konflik internal di tengah perjalanan tapi para nahdiyin tetap menjadikan Gus Dur sebagai tokoh yang menjadi panutan sebagaian besar kaum nahdiyin.

Hubungan antara tim sukses dengan caleg sangatlah ditentukan oleh proses selama menjalin hubungan tersebut. Jika caleg dapat memperhatikan kebutuhan dan kehendak timses maka hubungan tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari penguatan posisi caleg, mereka secara suka rela mendukung dan mempengaruhi orang lain untuk tetap mendukung caleg tersebut. Berikut wawancara dengan salah seorang timses celeg Slamet (50):

> "Sebenarnya kalau caleg bicara baik-baik, diajak ngopi, saya akan pikir-pikir lagi untuk meninggalkan dia. Tetapi jika dia sudah main opini katanya saya menjual suara, tidak komitmen dan lain-lain, maka saya akan cari caleg lain untuk saya dukung" (Wawancara, 22 Desember 2019).

Biasanya seorang caleg juga memanfaatkan kedekatan dengan seorang tokoh agama dalam mendapatkan legitimasi atau simpati. Dengan mendekati seorang tokoh agama harapannya, jamaah atau orang –orang terdekat tersebut bisa dengan mudah ia arahkan untuk mendukung pencalonannya. Hal tersebut berlaku terutama bagi komunitas atau kelompok masyarakat nahdliyin yang memang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki hubungan dngan tokoh panutannya baik itu gus ataupun seorang kyai tertentu.

Seringkali yang terjadi adalah kepentingan partai atau golongan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Baginya yang penting adalah menang dulu perkara bagaimana mengurusi kemenangan itu soal lain, begitulah seringkali para politisi ketika memasuki masa masa pemilihan umum dalam pragmatisme politik yang menjadi yang menjadi penting adalah kekuasaan partisipasi politik yang semestinya merupakan roh dari demokrasi

hanya merupakan persyaratan untuk menuju sebuah kekuasaan karena dorongan berkuasa yang begitu kuat kekuasaan menjadi tujuan akhir dari berpolitik mereka yang masih belum memenangkan pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih kekuasaan tersebut dengan berbagai cara sebaliknya mereka yang sedang berpuasa akan mati-matian pertahankan dunia politik memang sarat dengan diskursus tentang bagaimana berpuasa sekaligus mengabaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang menjadi masalah dari situasi seringkali dihasilkan pemecahan masalah kemasyarakatan yang tidak populis demi tujuan berkuasa mengabaikan kepentingan yang lebih umum dan kekhawatiran bahwa suatu solusi akan dipolitisasi akhirnya membuat banyak aktor politik enggan berbuat sesuatu padahal politik yang sesungguhnya adalah berarti mengambil keputusan.

Guna menjawab pertanyaan penelitian diatas maka perlu terlebih dahulu memahami dan mengetahui kondisi sosial ekonomi bahasa biasaan keyakinan daya serta perilaku keberagaman hidup seseorang kelompok atau warga Kediri. Dengan memahami kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat, maka akan sangat berguna untuk memahami pandangan dan sikap objektif tentang pemilu, walaupun orang yang bersangkutan tidak menyatakannya secara langsung.

Masyarakat dalam berpolitik sudah cerdas, terutama dalam menentukan kepala daerah, maka kultur tidak menjadi pertimbangan, tetapi lebih mempertimbangkan program atau *track record* seseorang calon. Karena bicara kultur keagamaan di kediri utamanya di Kota ini, mayoritas adalah nahdliyin. Tapi mengapa kok yang dipilih justru kader dan calon yang

diusung oleh partai bentukan muhammadiyah. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa masyarakat tidak lagi berfikir tentang kelompok aliran atau kultur tadi, tetapi mana yang lebih memilki program yang mampu diyakini masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Meskipun money politik juga tetap memiliki andil dalam menstimulasi pilihan utamanya tadi. Jadi kefanatikan NU dan Muhammadiyah dalam pilkada masyarakat sudah tidak ada lagi. Karena masyarakat juga tidak merasa terbelenggu oleh sekat-sekat keormasan tertentu pada saat harus memilih calon pemimpinnya dalam pilkada. (Tamam Mustofa)

Dalam waktu dekade belakang ini, penulis mengamati bahwa khususnya di Kediri telah terjadi pergeseran pola dan sikap dalam kalangan santri dan abangan. Identitas mereka kadang tampak kabur dan mencair antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pengaruh perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka sehari-hari. Beberapa posisi dalam ranah publik penulis amati mencerminkan saling menerima dan mempengaruhi antara kelompok abangan dan kelompok santri. Dari kelompok abangan dapat menerima identitas keagamaan kelompok santri sesuai dengan kebiasan hidupnya, demikian sebaliknya kelompok santri juga mau menerima kelompok abangan dalam kehidupan mereka. Keduanya bertemu dalam ritus dan pola keberagamaan yang cukup harmonis dan saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagai indikator dari kecenderungan tersebut adalah munculnya kebiasaan kelompok abangan dalam setiap pillkada baik di kota maupun kabupaten Kediri menggandeng

kelompok santri dari kalangan Nahdlatul Ulama. Terlepas bahwa bahwa kadang secara personalitas dari santri tersebut belum tentu merupakan representasi dari NU secara kelembagaan.

Namun perubahan yang terjadi dalam tingkat identitas tersebut tidak serta merta diikuti dalam sikap dan perilaku elektoralnya. Artinya kelompok abangan masih dominan memilih partai-partai nasionalis yang sekuler. Mereka masih menjadi basis utama dalam pemenangan partai nasionalis baik saat pilkada maupun dalam pemilu legislatif. Kefanatikan terhadap sosok Soekarno dan Megawati yang dianggap sebagai penerus ideologi membela wong cilik menjadi faktor penyebabnya.

Namun ada yang sisi yang menarik dalam kaitannya dengan kelompok abangan ini, yaitu pada golongan priyayinya. Secara kultur keagamaan para pejabat dan priyayi ini banyak yang mengadopsi budaya kegamaan santri. Beberapa tempat di Kota banyak menyelenggarakan acara-acara pengajian secara rutin, yang pelaksananya melalui organisasi RT dan RW. Secara personal banyak dijumpai pula perilaku kelompok priyayi atau pejabat yang lebih menonjolkan simbol-simbol keagamaan yang kuat, misalnya dalam hal berpakaian sering menggunakan baju koko, dan lewat penampilan diri dengan cara memlihara jenggot. Dalam waktu-waktu tertentu mereka melakukan pertemuan keagaman dalam bentuk majelis taklim. Tidak sedikit pula kelompok tersebut dalam ketika memasuki momentum pilkada atau pemilu lebih condong ke PAN, PKS dan PPP.

Kecenderungan perubahan identitas keagamaan dari kelompok abangan dan priyayi tersebut tidak serta merta

mempengaruhi sikap mereka dalam politik kepartaian. Kaum abangan masih setia pada partai nasionalis seperti PDIP, Gerindra dan Golkar. Sedangkan kelompok priyayi lebih memilih ke partai Islam seprti PAN, PKS dan PPP, meskipun hal tersebut tidak terjadi secara linier. Hal tersebut dipekuat oleh hasil pemilu tahun 2014 perolehan suara dan kursi dari ketiga partai tersebut mengalami peningkatan

Hal yang berbeda justru terjadi pada pemilih santri tradisional yang sebelumnya lebih memilih partai yang direstui dan diinisiasi kelahirannya oleh PBNU yaitu PKB. Namun dalam perkembangan dalam setiap pemilu di Kota Kediri, partai ini justru mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada pemilu 2004 PKB memperoleh 9 kursi dan menempatkan sebagai pemenan pemilu. Namun dalam rentang waktu lima tahun berikutnya, tahun 2009 PKB hanya mampu mendapatkan 4 kursi. Faktor yang paling mempengaruhi penurunan suara tersebut karena adanya konflik kepengusan pusat yang berimbas ke daerah-daerah. Para kiai dan politisi yang merasa tidak terakomodasi dalam PKB membentuk partai sendiri yang diberi nama PKNU. Akibatnya masa pendukung yang semula solid menjadi terbelah, satu di PKB dan satunya lagi mendukung PKNU.

Ada yang sama2 ngasih uang, yang satu kenal yang satu tidak, maka akan dipilih yang kenal. Mereka akan memberi pada akhir –akhir waktu. Modusnya pada saat mau berangkat ke TPS, orang jalan diparani. Politik anut grubyuk hanya kecil, dan itu hanya sebatas kelompok orang-orang tua. Tingkat partisipasi di kota sangat tinggi. Penguasa saat pilkada 2018, semua stag holder diinstruksinya untuk memerangi politik uang. Karena kalau pakai uang diasumsikan inkumben akan

kalah. Masyarakat itu hanya dua program atau uang. Dan prodamas sebagai alat kampanye yang efektif. Kompensasinya dana prodamas ditambahi menjadi 100 juta per RT. Honor RT juga ditambahi. Dan itu nggak bisa dikatakan sebagai politik uang. Di pileg itu mereka nggak pegang anggaran, jika sudah selesai ya sudah, berbeda dengan pilkada pemenang bisa langsung dapat dirasakan.

Hasil studiWawanSobari (2016) terhadap pelaksanaan pilkada 2010 di dua kabupaten di Jawa Timur menemukan fakta bahwa demokrasi bekerja karena kuatnya dorongan praktik patronase (politik imbal balik). Sementara studi Edward Aspinall (2014) terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 menjumpai praktik patronase terang-terangan di sejumlah provinsi. Selain itu,, Burhanuddin Muhtadi (2013) menemukan korelasi antara lemahnya identifikasi partai (party ID) dan toleransi terhadap praktik politik uang. Data longitudinal (2003-2013) terkait penurunan tingkat loyalitas terhadap parpol berkontribusi atas kerentanan pemilih terhadap politik uang. Dengan kata lain, politik imbal balik merupakan salah satu faktor penting bekerjanya demokrasi, khususnya pemilu. Situasi dan praktik politik elektoral tersebut telah mendorong kondisi paradoksal konsolidasi demokrasi.

Praktik-praktik patronase menyebabkan rendahnya kinerja lembaga legislatif dan partai politik di mata publik. Pasalnya, kedua institusi demokrasi tersebut lebih mengedepankan akuntabilitas personal terhadap pemilih yang mereka "beli" saat pemilu, bukan akuntabilitas publik atas kinerja legislasi, kontrol, penganggaran, dan agregasi kepentingan dan agenda kebijakan. Lebih jelasnya, politik imbal balik telah memutus

hubungan akuntabilitas kedua institusi demokrasi kepada publik. Dengan kata lain, pertanggungjawaban kolektif DPR seolah terputus karena para legislator lebih fokus "melayani" konstituen secara personal, padahal kinerja institusi legislatif dinilai publik secara kelembagaan. Setali tiga uang, parpol yang dituntut akuntabel sebagai agregator kepentingan dan pengusung konsisten agenda kebijakan, justru lebih sibuk memobilisasi suara, perekrutan politik, dan meraih jabatan publik.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri, Jaka Siswa Lelana (45 tahun) dalam wawancara dengan tim peneliti, mengatakan bahwa uang menjadi pertimbangan utama warga dalam menentukan pilihan politiknya. Lelaki yang juga menjadi caleg pada pemilu 2009 dari Dapil 3 Mojoroto ini, telah menata organ partai mulai cabang hingga ranting untuk digerakkan dalam berbagi kegiatan social ekomnomi, tetapi pada hari menjelang pemungutan suara, mereka meminta uang transport untuk ke TPS. Para pengurus partai pun juga enggan untuk bekerja jika tidak ada dana.

Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Orientasi Politik Harmoni Sosial

Harmoni sosial bagi orang Jawa adalah suatu tugas yang dipahami oleh setiap orang Jawa agar selalu menjaga kehidupan sosial selalu dalam keselarasan dan keseimbangan. Dalam menjaga kehidupan sosial dapat dilakukan dengan melakukan interaksi sosial berjalan dengan wajar tanpa ada tekanan-tekanan dan pemaksaan yang dapat menghambat kebebasan seseorang.(Moh.Roqib, 2007, hal. 3) (Moh.Roqib, 2007, hal. 3)

Harmoni sosial juga merupakan keadaan yang menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan. Keharmonisan dalam masyarakat dapat terwujud jika di dalamnya masing-masing orang saling menghargai, saling menyayangi diantara anggota keluarga dan masyarakat. Misalnya dalam keberagaman agama, status sosial, ataupun perbedaan etnis. Singkatnya , dalam budaya Jawa harmoni sosial adalah cita-cita tertinggi dalam menata kehidupannya baik di keluarga maupun di masyarakat. Suatu harmoni tidak akan tercapai jika rasa cinta dan kedamaian serta rasa saling menghargai tidak tertanam dalam diri manusia.

Karakter orang Jawa yang suka terhadap harmoni sosial tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan mereka yang hidup sebagai petani. Kultur agraris tersebut lahir sebagai akibat dari kebiasaan mereka mengolah tanah dan menanaminya hingga suatu saat akan memanennya. Tidak jarang selama mereka melakukan hal tersebut terjadi komunikasi batin antara petani dengan tanaman dan tanah yang diolahnya. Salah satu cara melakukan komunikasi dengan tanah dan tanaman tersebut diwujudkan dalam bentuk ritual upacara tradisional, saat ingin memulai cocok tanam dan saat panen tiba. Dalam skala yang lebih luas lagi masyarakat Jawa secara kolektif juga melakukan ritual yang dilakukan secara rutin setahun sekali terhadap bumi, tanah air kelahirannya yang benama upacara bersih desa. (Mulder, 1985)

Kediri yang secara kultural banyak penduduknya dari suku Jawa. Data terakhirmenunjukkan populasi orang Jawa di Kediri mencapai lebih dari 90%. Dominasi terhadap orang Jawa ini terasa sekali dalam kehidupan sehar-harinya. Salah satu ukuran dari dominannya budaya dan tradisi Jawa

tersebut adalah digunakannya bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, kadang pula peneliti temukan dalam interaksi mereka dalam bidang pemerintahan dan layanan publik di Kediri. Selain itu, mereka meskipun mayoritas beragama Islam, namn praktik-praktik ritual keselamatan masih rutin dilakukan, sepert dalam kelahiran,pernikahan dan kematian.

Bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Kediri hampir sama dengan yang digunakan oleh masyarakat di Jawa tengah, atau di pusat kerajaan Mataraman dahulu yakni Jogja dan Solo. Struktur bahasa yang digunakan bertingkat, mana yang digunakan untuk berinteraksi dengan sesama tingkatan sosialnya dan ada pula yang menggunakan *kromo inggil* bagi seseorang yang secara kedudukan sosialnya lebih atas, baik secara usia lebih tua maupun dalam jabatan sosial lebih tinggi. Makanya bagi orang Kediri *unggah-ungguh* atau tata cara dalam pemakaian bahasa sangat diperhatikan. Penggunaan bahasa Jawa oleh seseorang, selain sebagai simbol untuk mengetahui maksud dalam penyampaian pesan, yang lebih penting pula adalah apakah pengguna bahasa mengerti atau tidak tentang etika Jawa. Oleh karenanya untuk dapat melakukan itu semua, para orang tua di Kediri mengajarkannya kepada anak sejak kecil di lingkungan keluarganya.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menemukan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kota Kediri yang merupakan cerminan dari masyarakat yang menekankan adanya harmoni sosial. Peristiwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Harmoni sosial tersebut tercermin dalam tiga peristiwa yaitu; harmoni sosial dalam slametan besih dusun/ desa, harmoni sosial dalam pelestarian kesenian tradisional

dan harmoni sosial dalam kehidupan antar umat beragama dan kepercayaan.

Harmoni dalam Tradisi Slametan

Harmoni atau keselarasan dalam kehidupan masyarakat Jawa sebenarnya tidak selalu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi orang Jawa konsep Harmoni itu lebih merupakan hal-hal peta pikiran yang mampu menjiwai seluruh aspek kehidupan. Saya bahwa keharmonisan merupakan inti dari budaya Jawa sebagian yang lain mengatakan bahwa keselarasan atau harmoni sosial merupakan cikal bakal untuk mencapai tujuan hidup yaitu hidup yang aman tentram dan sejahtera. Sedangkan kesejahteraan sendiri bisa dicapai apabila seseorang bisa melakukan keselarasan dengan lingkungan sosialnya, hubungan antara manusia dan Tuhan alam dan hubungan antar sesama manusia itu sendiri.

Selain menjunjung tinggi konsep Harmoni orang Jawa juga meyakini rukun dan rasa hormat. Dua hal tersebut masih Junjung tinggi dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, meskipun ada beberapa pihak yang memang sudah meninggalkannya. Bahwa prinsip rukun dan hormat dalam masyarakat Jawa merupakan kaidah dasar yang paling menentukan dalam pola hidup masyarakat bagi upaya untuk mencapai keselarasan dan pemeliharaan ketertiban. Untuk mewujudkannya masyarakat Jawa cenderung untuk melakukan pengorbanan terhadap kepentingan dan ambisi pribadinya.

Selanjutnya dimaksud nilai rukun adalah memberi bantuan timbal balik dan berbagi beban (gotong royong film) sedangkan dalam proses pengambilan keputusan

dilakukan terlebih dahulu dengan konsultasi atau yang sering dinamakan musyawarah. Dalam pengertian lain, yang dimaksud rukun adalah ketika seseorang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan ketika melakukan suatu keputusan dilakukan melalui proses interaksi dan musyawarah dengan orang lain. (Mulder, 1985)

Masyarakat Jawa sangat memegang teguh kerukunan, karena bagi mereka kondisi itu harus terus dipertahankan sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, tentram, aman dan tanpa menimbulkan perselisihan. Setiap orang selalu di ajarkan untuk tidak menghancurkan keseimbangan sosial demi mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menekankan sikap nrimo atau mempunyai sikap pasrah terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Hal tersebut selalu disadarinya karena merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan hormat adalah nilai yang sangat berhubungan dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan sebuah etika pergaulan dengan orang lain.

Masyarakat Kediri utamanya di wilayah perkotaan mayoritas penduduknya adalah suku Jawa.Dalam kehidupan keagamaannyapunmemang tidak lepas dari pengaruh nilai, norma dan pandangan budaya Jawa, baik dari golongan masyarakat santri maupun yang abangan. Islam Abangan dalam memaknai agama Islam hanya pada aspek ritual tertentu, selebihnya mereka lebih banyak menggunakan pandangan-pandangannya yang bersumber dari kebiasaan dan adat budaya nenek moyang. Kelompok ini memilki pandangan bahwa untuk urusan dunia sosial, cukup diselesaikan berdarkan kebiasaan budaya tanpa melibatkan

agama, sehingga agama hanya mengurusi hal-hal yang bersifat khusus pribadi. Kelompok Islam Abangan sangat percaya pada adat istiadat Jawa. Hingga ada julukan dari pihak lain, mereka merupakan kelompok kejawen.

Dari pengamatan penulis kelompok abangan atau kejawen ini masih cukup banyak di Kediri. Meskipun secara ritual mereka tidak lagi melaksanakan tata cara ritual paling tidak secara terang-terangan sebagaimana yang digambarkan Clifford Geertz.(1960). Tetapi mereka masih mempercayai upacara-upacara dalam siklus kehidupan seperti kelahiran; mitoni, selapanan,perkawinan, kematian; mendak 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari meninggalnya seseorang, Begitupun juga dalam hal perkawinan masih banyak ditemukan keluarga-keluarga yang menggunakan upacara tradisi temanten yang menggunakan tata cara orang Jawa. Misalnya tradisi lamaran, sisetan, temu manten, pitonan dan lain sebagainya. Meski begitu dalam perkembangannya praktek-praktek ritual tersebut sudah bersifat kolaboratif yaitu bersama-sama dengan kelompok Islam santri.

Kolaborasi antara Islam abangan dan Islam santri dapat berupa do'a bersama atau acara ngirim do'a kepada arwah. Dalam hal acara pengiriman doa arwah tersebut banyak ditemukan dalam keluarga Islam abangan dengan mengundang kelompok yasinan dan tahlil ke rumahnya, minta dido'akan agar hajatnya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pihak tuan rumah menyediakan hidangan untuk dimakan besama dan nasi berkat untuk dibawa pulang kelompok Islam santri dengan maksud diberikan kepada keluarganya di rumah.

Disamping itu, ada tradisi kelompok abangan yang sebagian kecil masih dilakukan secara turun temurun yakni memberikan sesaji di pertigaan dan perempatan jalan. Tradisi ini mereka lakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, bahkan terkesan dilakukan secara diam-diam. Artinya tradisi ini dilakukan oleh masing-masing individu dan tidak secara kolektif sebagaimana upacarayang terkait dengan siklus kehidupan tadi.

Dari gambaran di atas, apabila dikaitkan dengan temuan Clifford Geertz dalam bukunya *Agama Orang Jawa*, maka karakter kelompok abangan maupun santri, atau lebih tepatnya antara orang Islam abangan dan Islam santri sudah jauh berbeda kondisinya dibandingkan dengan saat penelitian tersebut dilakukan yakni tahun 1960-an. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek ritual dan perilaku keagamaanya saja, tetapi juga terjadi pada wilayah relasi antar keduanya yang tidak lagi bersifat antagonis, tetapi sudah berubah menjadi sinergis bahkan terkesan integral antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu contoh untuk menjelaskan kondisi tersebut antara lain banyak kelompok abangan karena dirasa mampu secara finansial telah melakukan haji. Bahkan mereka yang sudah berhaji tersebut dengan tidak malu-malu menyebutkan titel hajinya di depan namanya. Atau secara lisan mereka bangga jika dipanggil dengan sebutan pak haji. Sebaliknya bagi kelompok santri hubungannya dengan kelompok abangan semakin dekat dan akrab . Hal ini disebabkan kaum abangan lebih dekat dengan tata cara keagamaan yang dimilki kelompok santri dibandingkan model keagamaan kelompok Islam perkotaan.

Dalam kenyataannya, memang orang-orang Islam abangan ini dalam hal beribadah akhirnya secara alamiah menjadi bagian dari jamaah orang Islam santri. Dimana dalam setiap kegiatan ritual seperti sholat jamaah, pengajian, yasinan dan tahlilan, santrilah yang menjadi pemimpinnya. Apalagi dalam banyak tempat ditemukan orang santri tersebut juga sekaligus merupakan pemimpin ormas keagamaan, atau memilki masjid atau madrasah.

Selanjutnya, masih terkait dengan siklus kehidupan, yang menyangkut tempat tinggal dan mata pencaharian, masyarakat Islam abangan di Kota Kediri setiap tahunnya masih mengadakan ritual bersih desa atau *nyadran.* Ritual ni bertujuan sebagai bentuk syukur terhadap bumi dan alam semesta yang telah memberikan rejeki dan penghidupan pada penduduk di suatu desa. Biasanya kegiatan yang banyak diikui oleh seluruh lapisan masyarakat ini dipusatkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti makam, pohon besar, dan sumber mata air atau sendang. Mereka mempercayai bahwa ketika ritual ini dilaksanakan,akan menjadi sarana tolak balak, namun sebaliknya jika tidak dilakukan akan mendatangkan bencana dalam kehidupannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga Balbak, Sukijo (49)sebagai berikut:

> "*Nyadran* ini dilakukan secara rutin dan turun-temurun, masyarakat mempercayai bahwa dengan kegiatan ini sebagai cara berterima kasih kepada yang babat alas desa dan kepada Gusti Allah.. *Nyadran* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil panen seperti polo gumantung, polo kependem. Setelah semua itu dido'akan nantinya juga dibagikan kepada mesyarakat juga". Kata Sholikin warga Kaliombo.(Wawancara, 12 Desember 2020)

Dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan nyadran atau sedekah bumi, atau secara umum disebut juga bersih desa, dilakukan oleh seluruh warga dusun tanpa pandang bulu. Dalam acara bersih desa yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap orang wajib mengagendakan agar pada hari H dapat ikut serta, hadir dan berkumpul dengan warga yang lainnya. Setiap keluarga menyediakan nasi berkat yang akan dibawa saat acara tersebut digelar. Pada hari itu semua warga menyiapkan makanan khas tersebut untuk dibawa dan diberikan kepada warga lain sebagai sedekah setelah sebelumnya dibacakan do'a–do'a oleh tokoh adat dan tokoh agama.

Dalam melakukan ritual bersih desa tersebut, tokoh dusun yang biasanya dituakan dan dihormati, akan memimpin jalannya upacara hingga selesai. Semua warga berkumpul dan secara seksama mendengarkan ijab, atau ikrar yang diucapkan pemimpin desa. Ikrar diucapkan dengan menggunakan bahasa Jawa, tepatnya bahasa Jawa inggil, yang bagi generasi muda belum tentu tahu artinya tersebut, tetapi secara hikmat diikuti oleh semua warga yang hadir. Di akhir acara selanjutnya dilakukan do'a yang dipimpin oleh salah seorang tokoh agama Islam. Sudah pasti kalau doa tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa arab sebagaimana tuntunan syariat Islam. Setelah do'a dipanjatkan giliran ada sambutan dari pejabat RT atau RW yang menegaskan pentingnya tradisi dan kegiatan tersebut dipertahankan. Bukan hanya karena acara tersebut dilakukan karena setahun sekali, tetapi memilki pesan khusus bahwa tradisi dan ritual itu sendiri menyangkut keberlangsungan dan keselamatan seluruh warga desa.

Rangkaian paling akhir dari kegatan ritual bersih desa adalah pembagian berkat dan makan bersama. Dalam acara makan bersama ini sebagian warga ada yang langsung pulang dengan membawa bagian berkatnya, dan sebagian yang lain makan bersama dengan cara muluk, yaitu makanan diletakkan di nampan lalui dimakan bersama oleh sejumlah orang. Puncak dari acara bersih desa adalah panggung hiburan rakyat yang dilaksanakan soe hingga malam hari. Biasanya mereka menampilkan kesenian rakyat atau kesenian tradisional yang berupa jaranan atau wayangan. Baiaya penyelenggaraan dari rangkaian acara tradisi tersebut dihimpun dari warga masyarakat sendiri dengan cara iuran.

Jika dilihat dari gambaran fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa perasaan senasib dan sepenanggungan antar warga Kota Kediri masih kuat. Ikatan solidaritas sebagai bagian dari keluarga besar masih sangat terasa. Kondisi tersebut hampir sebagaian besar dilakukan oleh warga Kota Kediri. Utamanya bagi warga kelurahan yang di dalamnya masih terdapat punden atau tempat yang disakralkan, maka kegiatan nyadran atau bersih desa ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Dengan demikian, kemampuan masyarakat dalam membangun solidaritas sosial yang masih tinggi tersebut yang oleh Emil Durkheim disebut solidaritas mekanik, hal tersebut disebabkan masyarakat masih memiliki rasa kebersamaan yang lebih besar dibandingkan kepentingan masing-masing warganya. Rasa kebersamaan yang tinggi tersebut biasanya ditandai dengan keharusan untuk hadir dalam setiap acara bersama, termasuk kegiatan bersih desa yang momentumnya dilaksanakan setahun sekali ini - menjadi ukuran tersendiri bagi setiap orang sebagai warga desa bahwa ia masih guyub

dan memiliki empati dengan yang lain. Artinya komitmen kebersamaan setiap orang dapat dilihat dari keaktifan yang bersangkutan untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan desa.

Dengan gambaran pelaksanaan ritual bersih desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata bukan hanya didominasi oleh kalangan masyarakat abangan saja. Tetapi dalam penyelenggaraannya telah melibatkan kelompok masyarakat santri untuk ambil bagian di dalamnya. Bahkan dalam perkembangan lima tahun terakhir yang peneliti amati sendiri, ritual *slametan* ini justru banyak dilakukan oleh kelompok santri yang ternyata frekuensinya jauh melampaui apa yang dilakukan oleh kelompok abangan sendiri. Bedanya, kalau kegiatan *slametan* ini dilakukan dengan mengundang kelompok santri sendiri namanya diganti menjadi acara syukuran atau tasyakuran. Bedanya kalau ritual yang dilakukan oleh kelompok abangan saja biasanya menggunakan mantra-mantra dengan bahasa Jawa dan dilengkapi dengan sesajen, sedangkan jika acara tersebut dilakukan oleh kelompok santri maka dinamakan dengan acara tahlilan, yasinan atau manaqiban. Sedangkan makanan yang disuguhkan pun juga bebas dan tidak ada syarat syarat khusus. Acara ini biasanya diadakan bersamaan dengan momentum kematian atau kelahiran bayi. Bahkan tidak jarang pula dilakukan menjelang acara akad nikah atau perkawinan. Yaitu dengan cara mengundang tetangga sekitar untuk membaca tahlil dan doa bersama di kediaman tuan rumah.

Konsep harmoni sosial yang terkandung dalam tradisi bersih desa dapat dilihat dari makna-makna yang terkandung dalam tradisi bersih desa. Dalam tradisi bersih desa sebagaimana yang telah dijelaskan, selain terdapat

unsur harmoni sosial yang dapat dilihat dari prosesi atau pelaksanaan tradisi bersih desa adalah sebagai acara yang menggambarkan falsafah kehidupan orang Jawa yang gotong royong dan kehidupan yang penuh kerukunan dan ketentraman, serta mampu hidup damai ditengah-tengah masyarakat yang pluralis.

Harmoni sosial dalam pelaksanaan slametan bersih desa selain disimbolkan dalam beragam tata upacara dan sarana ritual juga diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial antar berbagai elemen masyarakat yang berbeda keyakinan, agama, kelas sosial dan kelompok sosial di masyarakat Kota Kediri. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya harmonisasi tersebut adalah masih kentalnya nilai-nilai dan tradisi Jawa dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, meskipun pola kehidupan mayarakat Kota Kediri yang telah mengalami perubahan ke arah masyarakat urban dan mulai berlangsung proses industrialisasi, namun dalam kehidupan ritual dan tradisi Jawa masih dipertahankan dan menjadi cara pandang yang cukup dominan hingga penelitian ini dilakukan.

Harmoni dalam Seni Tradisi

Salah satu seni tradisi masyarakat Jawa abangan di Kota Kediri adalah jaranan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari kesenian yang menggunakan property jaran kepang ini adalah adanya ritual sebelum kesenian ini pentas. Ritual yang dimaksud adalah dengan menggunakan mediasi roh-roh atau makhluk halus dengan membakar dupa. Jaranan pada zaman dahulu adalah selalu bersifat sakral. Maksudnya selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Selain untuk tontonan,pada zamandahulu jaranan juga digunakan

untuk upacara-upacara resmi yang berhubungan dengan roh-roh leluhur keraton. Pada zaman kerajaan dahulu jaranan seringkali ditampilkan di keraton.

Dalam kehidupan sehari-harinya para seniman jaranan adalah orang-orang abangan yang masih taat kepada leluhur. Mereka masih menggunakan *danyang* atau *punden* sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Artinya mereka masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap roh-roh nenek moyangnya. Sehingga mereka juga masih melaksanakan praktik-praktik slametan seperti halnya dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Sedangkan jika dilihat dari segi starta sosial, seniman jaranan pada umumnya adalah para pekerja kasar. Mereka sebagian besar bermata pencaharian di sektor informal misalnya satpam, pedagang pasar, sopir, tukang becak, buruh bangunan, buruh pabrik, dan tukang kayu dan lain sebagainya. Sebagian yang lain bekerja sebagai penjual makanan ringan di pinggir -pinggir jalan di perkotaan, di pasar, terminal dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dalam perkembangan zaman yang terus berubah, keberadaan kesenian jaranan juga terus mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan kondisi social masyarakat yang sudah berubah dalam memaknai dan mengembangkan jaranan. Dari tahun-ke tahun jaranan mulai berubah dari yang sifatnya tuntunan menjadi tontonan dan yang paling menarik adalah jaranan sebagai alat untuk menarik simpatisan dan untuk pengembangan pariwisata.

Clifford Gertz mengidentifikasi mereka dengan sebutan abangan. Gertz memberikan penjelasan tentang praktik abangan. Masyarakat abangan adalah suatu sekte politio-religius dimana keppercayaan jawa asli melebur

dengan Marxisme yang Nasionalistis ynag memungkinkan pemeluknya sekaligus mendukung kebijakan komunisdi Indonesia. Sambil memurnikan upacara-upacara abangan dari sisa-sisa Islam (Geertz :1983).

Pada masa Orde Baru hubungan kelompok jaranan dengan santri sempat terjadi ketegangan. Namun seiring dengan perkembangan waktu, apalagi setelah masa reformasi, akhirnya kedua kelompok ini saling memahami satu dengan yang lainnya. Memang keberadaan seni tradional di Indonesia pada umumnya selama Orde Baru selau distigma sebagai kesenian rakyat yang pro komunis dan berafiliasi dengan PKI. Di Kediri yang seni tradisinya adalah jaranan juga menghadapi situasi yang sama, selalu diawasi dan distigma sebagai bekas binaan partai terlarang. Kalaupun diperbolehkan hidup, gerak dan manajemennya selalu dikontrol oleh pemerintah bahkan oleh aparat militer. Saat itu jaranan Kediri diperbolehkan pentas namun harus dipimpin oleh pejabat milier saat itu, yang secara kebetulan orang tersebut juga sedang bertugas di Kediri, namanya Pak Samboyo. Setelah itu nama kelompok jaranan juga diganti sesuai dengan nama pemimpinannya, yakni kelompok jaranan Samboyo Putro.

Bukti dari adanya saling pengertian antara kelompok abangan dan santri ini antara lain, saat datangnya bulan ramadhan, semua kelompok kesenian jaranan di Kota Kediri yang berjumlah tidak kurang dari 70 kelompok ini berhenti pentas. Artinya selama sebulan mereka tidak ada pementasan di kediri maupun di kota lain. Hal ini dilakukan sebagai wujud menghormati kaum muslim yang sedang berpuasa di bulan ramadhan. Sedangkan dari sisi pesantren memberkan keleluasaan bagi kelompok jaranan untuk pentas

asalkan tidak terlalu dekat dengan lokasi pondok pesantren. Dengan kondisi tersebut akhirnya hubungan kelompok santri dangan kelompok abangan di Kota Kediri dapat berjalan dengan damai dan kondusif. Kalaupun ada masalah dalam pementasan jaranan, biasanya berupa perkelahian atau keributan yang terjadi antar penonton jaranan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat dalam setiap pertunjukkan jaranan senantiasa dikerumuni massa. Itupun sekarang sudah jarang terjadi, karena adanya tingkat kesadaran masyarakat dan antisipasi yang dibuat oleh pihak keamanan.

Menurut Clifford Geerts, masyarakat Jawa dalam kehidupan keagamaan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Islam Abangan dan kelompok Islam Santri. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang kelompok Islam Abangan. Berdasarkan analisis Geertz tersebut, peneliti mencoba mengkomparsikan dengan perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat penelitian ini dilakukan. Jaranan yang asal-usulnya sebagai tradisi masyarakat abangan memang benar adanya. Sebab dalam kesenian jaranan ada syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh para pemainnya jika ingin menjadi seorang seniman jaranan sejati. Salah satu syarat ketika akan pentas di suatu tempat, terlebih dahulu harus melakukan ritual sesaji di tempat punden baik itu makam, sendang, atau petilasan di wilayah sekitar tempat pentas. Dalam bahasa jawanya mereka harus *kulo nuwun* terlebih dahulu kepada *danyang* desa. Tujuannya agar dalam pementasan diberikan kelancaran dan keselamatan.

Selain itu,, dalam pementasanpun ada adegan yang disebut *ndadi* yaitu kondisi yang sengaja diciptakan agar bisa

trance. Lewat kondisi trance inilah para pemain jaranan memanggil makhluk halus untuk bisa membantu dalam pertunjukkan. Bentuknya bisa diberi kekuatan untuk menari hingga durasi yang sangat lama, atau para pemain bisa memeragakan kekuatan diluar kemampuan manusia biasa, misalnya bisa kebal dari senjata tajam, memakan kaca, hingga ada juga yang membunuh ayam dan meminum darahnya. Hal tersebut dilakukan pemain tanpa kesadaran, atau sejenis kesurupan tetapi dikontrol pergerakkanya melaui tabuhan gamelan yang menjadi iringannya.

Jika dikaitkan dengan temuan Geertz tersebut memang benar bahwa salah satu karakter kelompok abangan adalah kebiasaannya dalam melakukan ritual sesajen dengan memanggil roh-roh halus nenek moyang. Jika dilihat dari latar belakang sosial budaya dan kebiasaan hidup sehari-hari, memang semua pemain adalah abangan. Dan secara formal agama mereka adalah Islam. Dan sebagaimana kata Geertz, mereka adalah Islam minimalis atau Islam KTP. Yaitu model keberagamaan yang tidak menjalankan tuntunan agama secara menyeluruh sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Tetapi mereka manaka ditanya tentang agamanya, mereka akan menjawab dengan jelas dan tegas bahwa ia adalah orang Islam atau muslim.

Gambaran di atas berbeda dengan kondisi yang terjadi di kalangan penonton jaranan. Jika dilihat dari latar belakang keagamaan - yang ditunjukkan melalui perilaku dan busana yang mereka pakai, bahwa sebagian penonton jaranan hingga penelitian ini dilakukan adalah berasal dari 2 kelompok. Yang pertama adalah berasal dari kalangan muslim abangan,

sama dengan kondisi para pemainnya, sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Sedangkan kelompok kedua adalah penonton yang berasal dari kalangan muslim santri. Memang jika diteliti lebih mendalam hanya satu dua orang yang benar-benar berasal dari kaum santri atau pondok pesantren. Tetapi mayoritas dari mereka adalah orang-orang abangan baik secara ideologis maupun sosiologis, meskipun mereka juga menjalankan syariat agama Islam seperti sholat dan puasa. Singkatnya, mereka adalah orang muslim abangan. Bahwa mereka juga sangat senang terhadap kesenian jaranan dan aktif menonton di manapun jaranan dipentaskan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menjalankan rukun Isam dalam kehidupannya seperti sholat, puasa, dan membayar zakat pada bulan ramadhan.

Meskipun demikian, hubungan antara komunitas jaranan dan pesantren seringkali pada masa lalu terjadi ketegangan. Kondisi tersebut berjalan fluktuatif. Dalam beberapa hal mereka bersitegang karena perbedaan prinsip. Maka dalam kondisi demikian, antara jaranan dengan pesantren nampak tidak seiring dan bergerak saling menjauhi. Karena pada umumnya baik santri dan kyai tidak sepakat dengan adanya jaranan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena penggunaan makhluk halus dalam setiap pementasannya. Mensikapi hal demikian dari para pelaku jaranan juga melakukan pembelaan, sebagai mana pandang Suratin salah seorang pemimpin kelompok jaranan mengatakan demikian:

> "Dari kalangan santri kurang sepakat dengan tradisi jaranan. Maka untuk menjaga keselamatan, saya dalam setiap pertunjukan saya harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak keamanan setempat. Hal ini kami lakukan agar kami selaku seniman bisa terlindung dari oknum-oknum

> yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kesenian ini untuk kesenangan dan tidak ada hubunganya dengan agama. Jadi jangan dicampuradukan dengan agama. Saya berharap harus ada keseimbangan antara seniman dengan pihak pesantren. Dan tidak harus berdebat tentang keberadaan masing-masing." (Wawancara, 3 September 2019)

Dalam kesempatan yang lain peneliti juga mewancarai salah seorang pemimpin kelompok jaranan yang berdomisili di Kelurahan Bandarlor. Ia menceritakan bahwa para seniman jaranan jika dimata pengasuh pondok pesantren Wahidiyah cenderung diberi ruang dan tidak memberikan larangan atau mengharamkan. Bahkan dalam banyak kesempatan para seniman jaranan yang bertempat tinggal disekitar pondok bisa berinteraksi dengan baik dengan kiainya.Tidak jarang pertemuan tersebut dilakukan di warung kopi di gang kampung dekat pondok. Dari pertemuan informal tersebut akhirnya terjalin pengertian antara kelompok jaranan dengan pondok pesantren. Ia juga menyadari bahwa hubungan baik tersebut belum tentu berlaku untuk pesantren lain. Pada umumnya hubungan pesantren dengan kesenian jaranan di Kota Kediri tidak ada masalah. Artinya kondusif dan saling menjaga. Meskipun jika dilihat dari luar, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tetapi tidak sampai menimbulkan konflik yang serius dan menimbulkan permusuhan.

Dalam pandangan teori struktural fungsional, konflik dan ketegangan harus semaksimal mungkin dihindari. Sebab konflik selain akan merusak tatanan sosial bersama, ia juga akan menimbulkan disharmoni dalam masyarakat. Akibatnya peran dan fungsi dari elemen sosial yang lain tidak dapat terintegrasi menjadi kekuatan yang menyatukan. Sedangkan

dalam pandangan struktural fungsional masyarakat adalah kumpulan dari berbagai elemen atau unsur yang ada di dalamnya dan mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dengan yang lain.(Ritzer, 2007) (Ritzer, 2007)

Dengan demikian keberadaan kesenian tradisional jaranan di Kediri merupakan bagian dari sistem pelembagaan sosial. Sehingga secara struktural ia berfungsi dan saling berhungan dengan sub-sub sistem yang lain. Secara fungsional kesenian tradisional ini berfungsi sebagai simbol untuk membentengi masyarakat desa agar tidak terjerumus pada tindakan yang merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini dirasakan masyarakat. Dalam konsep harmoni sosial sebagaimana yang disampaikan Talcot Parson, selalu berupaya mempertahankan unsur-unsur dalam sistem masyarakat tetap berfungsi. Dengan berfungsinya sistem-sistem tersebut termasuk sistem kesenian dan keyakinan, eksistensi komunitas dalam masyarakat tersebut dapat dipertahankan.

Harmoni Antar Umat Beragama dan Peghayat Kepercayaam

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara memiliki keterkaitan erat dengan krisis politik yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu situasi dan kondisi yang tidak menentu, akibat krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tahun 1997. Akibatnya banyak pengusaha melarikan modalnya ke luar negeri. Perusahaan melakukan pemutusan kerja kepada para karyawannya sehingga mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat merebak di hampir semua kota di Indonesia. Di kota-kota besar aksi unjuk rasa bahkan

berkembang menjadi kerusuhan dan pembakaran terhadap fasilitas umum, pertokoan, gedung-gedung pemerintahan, rumah, dan kendaraan dinas maupun pribadi. Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut hingga jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya.

Di Kediri situasi dan kondisi saat itu juga ikut terdampak, meski tidak sampai menimbulkan kerusuhan dan memakan korban jiwa dan harta benda, namun demonstrasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kediri hampir dilakukan setiap hari. juga seringkali dilakukan.

Dalam kondisi yang demikian kerusuhan atau konflik yang terjadi di suatu tempat dibagian wilayah anapun akan dengan mudah sampai ke Kediri. Padahal hal tersebut banyak disebabkan oleh kurang matangnya sebagian masyarakat dalam menyerap informasi yang belum tentu kebenarannya. Seringkali penggalan informasi yangbbelum dikonfrmasi terlebih dahulu sudah menyebar dan masyarakat akhirnya menjadi reaktif dan kadangkala brutal.

Secara teritorial wilayah Kota Kediri memang tidak dapat dikatakan luas, bila dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. Tetapi kondisi riil masyarakat Kota Kediri menunjukkan bahwa keberagaman latar belakang masyarakatnya sangat mencolok. Ada beberapa etnis di kota tahu ini antara lain Jawa, Cina, Madura, Batak, Ambon, Arab, bugis dan lain sebagainya. Keberadaan etnis-etnis tersebut tidak semuanya mengelompok di suatu tempat, tetapi juga banyak yang menyebar dan membaur dengan etnis yang lain. Selain etnisitas, di Kota Kediri juga banyak berkembang faham keagamaan dan kepercayaan. Dalam rumpun Islam saja ada Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad dan

Ahmadiyah. Satu hal lagi yang membedakan Kota Kediri dengan daerah lain yaitu tempat berdirinya organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan organisasi pengamal sholawat Wahidiyah. Kedua organisasi tersebut berpusat di Kediiri. Dalam setiap bulan tertentu selalu dibanjiri ribuan angotanya yang datang kota-kota lain di Indonesia. Selain kedua organisasi sosial keagaaman tersebut di Kediri juga merupakan tempat lahir dan berkembanganya aliran kebatinan atau pengahayat kepercayaan. Beberapa kelompok kebatinan yangdapat disebutkan di sini antara lain Saptadarma, Ngesti Tunggal, Sumarah, dan Budhi Luhur.

Selain Islam yang merupakan agama mayoritas bagi masyarakat di Kota Kediri, terdapat agama lain yang keberadaanya sejak zaman kolonial bahkan pada masa kerajaan Daha Kediri zaman dulu, yaitu Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen dan Katholik. Wujud keberadaan umat beragama yang sangat plural ini diperkuat dengan banyaknya tempat peribadatan dan lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, mushola, gereja, pura, wihara dan klenteng.

Menyadari semakin besarnya kekuatiran masyarakat terjadinya konflik sosial ditambah lagi semakin sulitnya mengendalikan rasa keputusasaan masyarakat yang semakin meluas karena himpitan problem sosial dan ekonomi akibat krisis moneter, maka timbulah kesadaran dalam benak para tokoh agama dan pengusaha yang ada di Kota Kediri untuk melakukan komunikasi sebagai langkah antsipasi agar terhidar dari konflik dan kerusuhan sosial yang menakutkan tersebut.

Dalam kondisi yang penuh dengan kegaduhan tersebut, KH Anwar Iskandar salah seorang tokoh ulama Kediri

memannggil beberapa tokoh masyarakat dan pemuda untuk melakukan sharing dan diskusi mensikapi situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Acara pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu awal untuk memahami suasana kebatinan para tokoh agama dan umatnya serta menyusun langkah-langkah ke depannya secara bersama-sama.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 10 Mei 1998 bertempat di kediaman KH Anwar Iskandar pondok pesantren Ngasinan, Ngronggo Kota Kediri. Adapun yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain KH Imam Yahya Malik, Amin Djunaidi (pengusaha/Kristen), Budhi Dharma (pengusaha/GKI), Sholahuddin (PMII), Abdul Halim Moestafa dan Ahmad Subakir, keduanya dari NU. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengadakan kegiatan dalam bentuk pawai keliling kota yang diikuti oleh semua tokoh dan pemeluk agama. Dalam pertemua tersebut juga diharapkan masing-masing tokoh dan umat agama memakai atribut dan pakaian keagamaan. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui bahwa antar tokoh agama di Kediri dapat berdampingan hidup rukun dan damai tanpa menimbulkan konflik serta kekerasan.(Subakir, 2003, hal. 86) (Subakir, 2003, hal. 86)

Waktu terus berjalan seiring dengan situasi pergolakan di Jakarta semain hari semakin memanas. Aksi kerusuhan, penjarahan, pembakaran toko-toko dan fasilitas umum, bahkan pemerkosaan terhadap etnis Cina terjadi kian marak di ibu kota. Tanggal 19 Mei telah terjadi pembakaran Yoga Plasa di kawasan Jatinegara Jakarta hingga merenggut korban jiwa sebanyak 126 orang. Situasi semakin tidak menentu, sementara demonstrasi mahasiswa diseluruh kota di Indonesia

sudah sulit untuk dikendalikan. Di Jakarta, demonstrasi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa tetapi sudah melibatkan masyarakat. Demonstrasi tersebut dilakukan setiap hari tanpa berhenti. Akhirnya tanggal 21 Mei 1998, masyarakat dikejutkan dengan pengunduran Soeharto sebagai presiden RI dan jabatan tersebut diserahkan kepada BJ. Habibie sebagai penggantinya.

Meskipun stuasi tampak sedikit menurun, meskipun beragam opini dan suasana masih mencekam. Hal tersebut karena diberbagai kota di Indonesia aparat keamanan dan polisi tampak hilir mudik di jalan berusaha untuk mengendalikan situasi. Demonstrasi tetap berjalan, meski salah satu tuntutan mahasiswa agar Soeharto turun sudah dilakukan.Peristiwa serah terima jabatan presiden tersebut langsung disiarkan oleh semua stasiun televisi nasional, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui peristiwa penting sekaligus mengejutkan tersebut. Ahmad Subakir yang merupakan saksi sejarah saat peristiwa tersebut, mengatakan:

> "Meski di Kediri situasinya tidak sepanas Jakarta, tapi melihat dari raut muka sebagian besar para tokoh agama banyak merasakan ketegangan, dan seakan menunjukkan kekuatiran yang mendalam antara satu dengan yang lainnya, namun hal tersebut sulit untuk diutarakan. Maka akhirnya setelah dilakukan pembicaraan singkat, rencana untuk melakukan pawai bersama keliling kota yang sudah disosialisasikan mendadak dibatalkan. Kuatir jika dilakukan akan menimbulkan penyusupan. Bila ini dilakukan justru akan memicu konflik yang semakin luas." (Wawancara, 6 Desember 2019)

Untuk menggantikan acara pawai bersama yang telah direncakan sebelumnya, maka dalam pertemuan kedua yang bertempat di kampus Uniska ini, KH. Anwar Iskandar

kembali mengusulkan acara tersebut diganti dengan ritual , yaitu acara do'a bersama yang dibei nama acar Do'a Bersama Komponen Umat Beragama. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan kekuatan moril bangsa Indonesia pada umumnya dalam menghadapi cobaan berat sebagai bangsa yang beragama. Acara tersebut juga sebagai pelipur lara dan dorongan spiritual bagi keluarga korban kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

Kegiatan do'a bersama akhirnya dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1998 yang bertempat di kampus Universitas Islam Kadiri. Do'a bersama tersebut dihadiri dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Kediri. Baik pemuka agama maupun umat berdatangan untuk melakukan kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya. Jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 2000 orang yang berasal dari umat Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan penghayat kepercayaan.

Setelah acara selesai masing-masing tokoh agama melakukan pembicaraan terkait dengan perkembangan situasi terakhir. Mereka juga sepakat untuk melestarikan dan melanjutkan acara-acara serupa di masa-masa mendatang. Untuk memermudah koordinasi dan komunikasi, maka disepaki untuk mendirikan wadah kerukunan tersebut dengan nama Paguyuban Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan. Bentuk dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk piagam kerukunan antar umat beragama yang ditanda tangani oleh tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan di Kediri.

Setelah disepakati berdirinya wadah paguyuban, maka segera disusun kepengurusan paguyuban. Sebagai dewan

penasehat diketuai oleh KH. Anwar Iskandar, KH.Imam Yahya Malik, Yudiono Mukti Widjoyo, Amin Djunaedy, Romo Antonius Yani Wimarta,Timotius Kabul, Sugeng Daminto, Suhandoko dan Suparno . Sedangkan pegurus harian untuk ketuanya adalah Ma'ruf Anas, sekretaris Kristaianto Gunadi dan bendahara dipegang oleh Paulus Bingadiputra.(Subakir, 2003, hal. 94) (Subakir, 2003, hal. 94)

Menurut KH.Anwar Iskandar, misi dibentuknya wadah paguyuban kerukunan antarumat beragama ini dimaksudan sebagai bagian dari keikutsertaan tokoh umat beragama secara aktif dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kehidupan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian fungsi paguyuban antar umat adalah sebagai wadah yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan nailai-nilai yang substatif dan membantu penanaman nilai etik dan berakibat pada pendidikan masyarakat. Adapun kriteria dari sebuah tata nilai yang dimaksud dapat mewujudkan harapan paguyuban sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan advokasi antar pimpinan dan umat beragama dan penghayat kepercayaan, menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bergerak di bidang sosial dan tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dalam berbagai bentuk.(Subakir, 2003, hal. 92) (Subakir, 2003, hal. 92)

Dalam perkembangannya paguyuban tersebut dapat diterima dan mendaptkan simpati dari masyarakat luas. Pada tahun 2000 Muhammadiyah dan LDII yang semula tidak

terlibat dalam pendirian paguyuban, menyatakan diri masuk sebagai anggota paguyuban. Selanjutnya pada tahun 2001 bertempat di kantor pabrik farmasi Afi Farma pada tanggal 3 September 2001, atas saran dan usulan banyak pihak, struktur kepengurusan paguyuban yang lama direvisi karena masuknya dua ormas tersebut beserta elemen yang lain dalam lembaga tersebut. Maka sejak itu paguyuban kerukunan umat beragama dan kepercayaan Kota Kediri menjadi semakin lengkap kebinnekaan dan keberagamanya.

Selain paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, di Kota Kediri juga didirikan Foum Komunikasi Umat Beraga (FKUB) yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang berdiri pada bulan April tahun 2006. Lembaga tersebut didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006.

Para pemuka agama yang tergabung dalam PAUB-PK maupun FKUB telah memiliki media pertemuan yang namanya pertemuan Jum'at Kliwon. Pertemuan rutin ini dilaksanakan sebulan sekali yang dimanfaatkan untuk saling berinteraksi antar umat beragama, masing-masing tokoh agama mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Budha ,Hindu, dan Penghayat Kepercayaan. Kegiatan tersebut selalu dilakukan secara rutin dan tidak hanya di satu tempat saja, akan tetapi tempatnya berpindah-pindah sesuai dengan keputusan bersama. Ketua FKUB Ma'ruf Anas mengatakan:

> "FKUB Kota Kediri mengoptimalkan komunikasi lewat media Jum'at Kliwon yang diperuntukkan memang untuk semua umat beragama.Disamping itu, FKUB mempunyai tindak pertemuan pengurus FKUB tiap hari Senin,Minggu pertama awal bulan. Pengurus FKUB mempunyai grup

> WhatsApp untuk berkomunikasi tentang kegiatan Internal atau Eksternal yang disampaikan melalui grup WhatsApp sehingga komunikasi berjalan dengan efektif. Interaksi yang saat ini dilakukan di FKUB Kota Kediri merupakan interaksi langsung. Maka dari itu upaya yang dilakukan dalam membangun toleransi perbedaan agama dimuat dalam program FKUB yang telah disetujui oleh kementerian, yaitu ada 3 : pemberdayaan, pemeliharaan, dan perizinan." (Wawancara, 17 Januari 2020)

Kegiatan rutin pertemuan Jum'at Kliwon dirasakan hampir semua pengurus dan tokoh agama sangat signifikan karena mengajak umatnya untuk saling bertemu demi terciptanya Kota Kediri yang harmonis. Dengan adanya paguyuban sangat memberi dampak terhadap kerukunan umat beragama, karena berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Kota Kediri karena terciptanya satu kedamaian dan stabilitas kondisi Kota Kediri sehingga tidak ada gejolak atau konflik.

Dalam pandangan Talcot Parsons, semua tindakan sosial manusia mempunyai variabel pola dan semua tindakan berpola itu berfungsi untuk menunjang sistem sosial. Variabel pola juga menyediakan sarana untuk menggambarkan dan megklasifikasikan lembaga, hubungan sosial, dan masyarakat yang berbeda. Dalam konteks lain Parson juga mengemukakan semacam hipotesis, jika para aktor dapat menjalankan variabel pola tindakan secara stabil misalnya terlembaga, maka setiap individu dan kelompok cenderung mengkoordinasikan tindakan mereka secara kolektif pula. Sehingga hasil dari kesamaan simbolis dapat disebut sebagai pola budaya atau budaya umum. Pola atau budaya tersebut dianggap sebagai tindakan yang syah jika diungkapkan berdasarkan "pola konsistensi" dan "simetri" atau "mempunyai kesesuaian

yang berarti" dan "konsistensi logis".(Liliweri, 2016, hal. 321) (Liliweri, 2016, hal. 321)

Salah satu bentuk atau pola komunikasi yang dilakukan PAUB dan FKUB Kota Kediri pernah peneliti ikuti pada saat kegiatan sosialisasi tersebut diadakan di Kantor Kemenag Kota Kediri yang dihadiri oleh perwakilan tokoh agama di setiap kelurahan dan para pegawai bidang keagamaan. Di dalam kegiatan tersebut terlihat bahwa interaksi yang dilakukan umat beragama sangat baik dan terlihat akrab. Tamu undangan dalam sosialisasi tersebut saling berkomunikasi satu sama lain, termasuk dengan orang yang beda agama. Peneliti menemukan bahwa percakapan antar umat beragama tersebut tidak ada kecanggungan, maka dari itu hubungan pengurus dan tokoh masyarakat Kota Kediri terbilang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di masyarakat Kota Kediri terdapat bentuk komunikasi antar umat yang harmonis dan dinamis.

Terkait hal ini peneliti mewawancarai Surono selaku kepala Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren, tentang pola hubungan antar umat beragama serta kegiatan yang dilakukan. Saat peneliti mewancarainya, kebetulan bersamaan dengan pertemuan para tokoh lintas agama yang rutin dilakukan setiap awal bulan. Berikut pernyataan Surono :

> "Seperti pada bulan muharam atau sasi suro warga Kelurahan Betet berbondong bondong melaksanakan kegiatan bersih desa, ada berbagai kegiatan yang diadakan dan masing-masing keyakinan memiliki cara tersendiri, namun baiknya di Kelurahan Betet warganya itu guyup jadi saling menghormati satu sama lain. Kegiatannya bervariatif ada yang melaksanakan arak-arakan berkeliling desa, kemudian berhenti di titik kumpul di sebuah sumber yang ada di Kelurahan Betet, disitu nanti ada kegiatan

> semacam tayubpan semua tokoh masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas lainnya berkumpul menjadi satu di Sumber teresebut, ada juga kirim doa kepada leluhur. Jadi ya begitulah cara kita sebagai pemerintah desa untuk melestarikan sekaligus menjadikan faktor pendukung untuk berbaur dengan warga yang notabennya memiliki perbedaan keyakinan". (Wawancara, 23 Desember 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai peneliti amati yaitu pemerintah Kelurahan Betet khususnya Surono selaku kepala Kelurahan Betet memberikan kebiasaan terhadap warga Kelurahan Betet pada saat bulan Muharram atau sasi suro, beliau mengadakan arak-arakan keliling desa yang tujuannya adalah menyatukan dan memberikan dampak positif bagi wargannya, tidak hanya di arak saja melainkan juga berkumpul di titik kumpul yaitu di Sumber Kembangan yang merupakan punden di Kelurahan Betet. Di tempat itulah warga bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda berkumpul menjadi satu tanpa membedakan keyakinan mereka. Bagi warga yang beragama Islam mereka juga mengadakan doa bersama kepada leluhur.

Dari salah satu tokoh pemuda juga memberikan penjelasan sebelum kegiatan tersebut dimulai, berikut penjelasan dari Hartono salah satu tokoh pemuda, menjelaskan :

> "Kegiatan seperti ini selalu dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Betet, ya tujuannya agar masyarakat tetap guyup dan saling menghormati antar umat beragama, sekaligus bersih desa.Kegiatnnya sangat beragam dimulai dari arak-arakan, ke sumber dulu lalu doa bersama, kurang lebih seperti itu kegiatannya. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang ada di Kelurahan Betet, jadi kegiatannya intinya adalah mendoakan arwah leluhur dan kita pasti punya cara sendiri untuk mendoakan. Yang terpenting adalah

> niat dan guyup rukun kita sebagai warga Kelurahan Betet tanpa membedakan keyakinan masing-masing individu". (Wawancara, 23 September 2019)

Pernyataan ini juga senada dengan salah satu ketua RT yang ada di Kelurahan Betet, Markhaban, bahwa kegiatan bersih desa seperti ini merupakan kegaiatn turun temurun yang diselenggarakan oleh masyarakat Kelurahan Betet tanpa memandang keyakinan masing-masing individu, kegaiatannya berajalan dengan lancar sesuai yang kami angan-angankan. Dari kegiatan ini dapat dilihat kerukunan warga. Yang ikut acara itu tidak hanya umat muslim saja, ada yang Hindu, Kristen semua bekumpul untuk berpartisipasi. Berikut penjelasan dari Markhaban:

> Jadi seperti ini mas, kami disini selaku perangkat Kelurahan Betet sangat mengapresiasi kegiatan bersih desa ini. Karena apa, pada bersih desa ini "sealin kita semua berdoa untuk leluhur kami, pada acara ini juga titik berkumpulnya masyarakat dari berbagai keyakinan, jujur saya senang melihat masyarakat Kelurahan Betet guyup, rukun, dan saling menghormati satu sama lain seperti ini. Meskipun mereka berbeda keyakinan namun tujuannya sama yaitu mendoakan. Hanya saja cara mereka yang berbeda. Mungkin kalau melaksanakan doa bersama itu tetap menyesuaikan jadwal ibadah mereka".(Wawancara, 9 Nopember 2019)

Kegiatan seperti itu dilakukan rutin setiap tahun oleh pemerintah Kelurahan Betet untuk mendorong komunikasi yang baik antar umat beragama. Hal kecil itu dapat berdampak besar bagi warga masyarakat. Jika sudah menjadi kebiasaan warga makan dalam penerapan kehidupan sehari-hari mereka dapat berjalan dengan baik tanpa ada batasan untuk saling berbaur dengan satu sama lain.

Perangkat desa itu selain menjadi figur yang diutamakan oleh warga. Perangkat Desa juga sebagai penasehat, sebagi sesuatu yang perlu di contoh oleh wargannya.Degan harapan, warga masyarakat mampu terbentuk menjadi masyarakat yang berkualitas dalam hal bersikap dengan warga masyarakat yang lain. Kelurahan Betet merupakan desa yang kental dengan bermacam-macam budaya, dan agama. Masyarakatnya pun tidak sedikit. Namun Desa yang plural tersebut mampuh menjadi tauladan bagi masyarakat lainnya. Toleransi, kerukunan, solidaritas dijaga dengan baik dengan bentuk-bentuk kerukunan yang bermacam-macam.

> "Bentuk kerukunan masyarakat Betet itu dapat dilihat dari kebersamaan antara masyarakat baik itu islam, hindu, Kristen, dan di Betet tidak pernah ada konflik mengenai perbedaan agama, karena ketika kita jagongan (kumpul-kumpul) tidak pernah menyinggung masalah agama mas, paling ditanyakan tentang Sawahe piye? Kalau mas lewat di Kelurahan Betet dan banyak orang jagongan di warung, pasti mas tidak bisa membedakan mana itu yang orang Islam, hindu atau kristen, karena semua berkumpul jadi satu." (Wawancara, 23 September 2019)

Menurut masyarakat Betet, dengan adanya perbedaan maka akan semakin lengkap, seperti halnya menghadiri undangan tahlilan dari orang Islam, maka orang yang agamanya lain juga ikut menghadiri undangan tersebut Hanya saja masyarakat agama lain tidak ikut tahlilan karena ada orang Islam yang bagian baca tahlilan. Hal itu dipenuhi karena sudah tertanam rasa menghargai sesama manusia walaupun plural agama. Bagi yang bukan agama Islam juga ikut mengadakan slametan, hal ini lebih dimaksudkan atau dimaknai sebagai tindakan sosial dari pada tindakan religious

sebab mereka bukan umat Islam. Mereka memaknai untuk merekatkan antar tetangga dan mengenai waktu, mereka selaraskan dengan pilihan untuk Islam. Dalam acara tahlilan, anak yang beragama Kristen ikut membantu orang tuanya dalam acara tahlilan tersebut. Bahkan dalam satu atap terdiri dari tiga agamapun sudah tidak heran lagi.

Selain itu,, ada selamatan menyambut bulan Ramadhon dan selamatan sebelum hari raya umat Islam. Bagi yang bukan agama Islam juga ikut mengadakan selamatan. Mereka memaknai untuk merekatkan antar tetangga dan mengenai waktu mereka selaraskan dengan pilihan umat Islam. Selamatan untuk orang meninggal juga masih dilakukansebagian besar masyarakat Betet, dan mengundang para tetangga dan kerabat termasukmereka yang beragama Hindu dan Kristen. Bagi mereka memenuhi undangan adalah sesuatu yang penting karena disitu terdapat kontrol sosial yang ketat. Bagi mereka yang tidak dating harus pamitan sebelum atau sesudahnya.

Sehingga ketika ada undangan dari orang Islam, orang-orang beragama Hindu dan Kristen menghadirinya. Karena, bagi mereka memenuhi undangan adalah sesuatu yang penting karena disitu terdapat kontrol sosial yang kuat. Bagi mereka yang tidak datang pun mereka berpamitan sebelum dan sesudahnya.

> "Kalau orang Kristen ada natalan, orang Islam dan Hindu juga akan di kasih jajanan perayaan natal mas, begitu juga sebaliknya kalau orang islam mulutan, idul fitri, tahlilan dan orang Hindu merayakan nyepi, maka saling memberi berkat, jajan mas, pokoke yo wes biasa mas (pokoknya sudah biasa mas) terus kalau waktu puasa juga orang-orang saya ingetkan mas! Biar makan atau minum didalam rumah, ia

> paling tidak dijalan atau didepan rumah pokoknya tidak ngawur." (Wawancara, 23 September 2019)

Interaksi sosial itu melahirkan budaya-budaya yang khas, budaya asli yang dapat mempengaruhi interaksi multi agama yang terjadi. Interaksi sosial yang demikian itu melahirkan interpretasi pada simbol-simbol budaya berbeda dengan daerah lain. Suatu misal pada saat datang kehajatan untuk menyumbang atau membantu para perempuan banyak yang memakai kerudung (bukan jilbab) dan bapak-bapak banyak yang memakai songkok atau kopyah, padahal agama mereka belum tentu Islam sebagaimana pada masyarakat yang lain. Hal ini berarti kerudung dan kopyah lebih berarti sebagai symbol budaya yang diinterpretasikan menghormati pesta hajatan atau acara ngaturi,

Rasa saling menghormati juga diwujudkan selama bulan suci ramadhan oleh penganut agama yang lain. Umat Hindu yang biasa beribadah pukul 19.00 WIB misalnya, terpaksa merubah jadwalnya sebelum Maghrib. Karena pada pukul 19.00 WIB umat Islam sedang menjalankan shalat tarawih Dengan saling memberikan kesempatan pada umat beragama lain untuk melakukan ibadah yang sesuai dengan aturan-aturan dengan agama tersebut maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam lingkungan sosial yang sama. Satu sama lain tidak pernah melarang dan membatasi orang dalam hal ibadah. Menghargai agama lain itu yang tetap akan selalu dipupuk oleh masyarakat Betet. Selagi tidak mengganggu ketenangan masyarakat lain.

> "Wujud toleransi juga dilihatkan seperti halnya tidak mengeraskan suara ketika adzan dan khutbah jum'at dan juga memadamkan lampu masjid atau gereja setiap

sesudah beribadah. Ketika bulan puasa tiba, maka orang-orang Hindu saya wanti-wanti jangan makan di depan orang yang sedang puasa"

Kebiasaan lain dari masyarakat Betet adalah penyambutan bulan Agustus yang dimeriahkan dengan banyak acara yang biasanya atas inisiatif atau arahan pihak desa seperti pentas seni dan donor darah masal yang dipelopori oleh kalangan muda atau karang taruna. Sebagai ciri khas masyarakat yang plural agama maka seni yang dimainkan dalam pentas senipun dimeriahkan masyarakat semua melalui kolaborasi dari tri-agama, baik dari islam (bermain terbang/hadrah), Kristen bermain band dan Hindu bermain gamelan yang dikolaborasikan dengan baik. Untuk mewujudkan persatuan, masyarakat tidak pernah memandang dari segi agama, tidak pernah membandingkan agama apa dan agama siapa yang paling baik.

Dalam pesta hajatan terdiri dari dua hari, hari yang pertama adalah acara,ngaturi' dimana dalam acara ini didatangi oleh seluruh warga RT yang bersangkutan dan seluruh keluarga yang ada. Dalam acara ini juga dihadiri oleh perangkat desa sebagai wakil dari pihak desa dan oleh tokoh agama yang sesuai dengan agama yang punya sebagai pembaca doa. Untuk hari kedua adalah maksud dari hajatan itu sendiri, bisa acara nikahan, sunatan atau yang lainnya. Masyarakat yang datangpun dari ketiga agama tersebut. Perbedaan agama terjadi bukan hanya pada antar keluarga tetapi terjadi pula dalam kelurga itu sendiri, sehingga dalam setiap acara salah satu agama pasti melibatkan aggota keluarga yang berbeda agama. Baik bantuan berupa tenaga maupun biaya upacara keagamaan yang akan berlangsung.

Meskipun di desa tersebut cukup beragam agamanya, ternyata masyarakatnya cukup menyadari akan adanya keberagaman tersebut. Masyarakat Betet sangat menjaga betul gaya komunikasi sesama warga, saling menghargai, saling menghormati demi mewujudkan suasana keakraban dan kerukunan ditengah-tengah komunitas yang beragam tersebut. Karena menurut mereka bahwa memeluk agama merupakan hak asasi dari masing-masing individu. Seperti yang di tegaskan oleh Ibu Sumiati:

> "Nganut agama kuwi yo wes dadi urusane dewe-dewe, ojo dipeksone agamo nang wong liyo' (memeluk agama itu ya sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri,jangan memaksakan agama kepada orang lain). Terus lek enek kumpulan kuwi yo podo gelem kumpul masio seng ngundang bedo agomo' (terus kalau ada kumpulan juga pada mau ngumpul meskipun yang mengundang itu beda agama)." (Wawancara, 23 September 2019)

Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut warga Betet tidak bisa seandainya di desa tersebut harus disamakan pada satu agama saja dalam menganut agama. Bahkan kelompok Islam, mereka tidak bertindak semena-mena terhadap kelompok yang lebih minoritas (pemeluk Agama Kristen dan pemeluk Agama Hindu), dan juga tidak membatasi keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan desa, meski mereka merupakan kelompok yang paling dominan.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa agama dapat menjadi kekuatan integratif yang mampu melahirkan soliditas sosial masyarakat menjadi kuat. Dalam konteks struktural fungsional, agama dapat menjadi pemersatu atau integrasi sosial. Dalam kehidupan sosial,

pandangan ini meyakini bahwa setiap pemeluk agama apapun memiliki keinginan untuk menciptakan keserasian dengan yang lain. Dengan semangat solidaritas sosial, setiap unsur dalam masyarakat senantiasa berupaya agar tercipta kondisi kehidupan yang harmonis, bekerjasama dengan menyebunyikan setiap perbedaan dari masing-masing agama.

Sejalan dengan pemikiran Parson, bahwa sistem kultur yang ada dalam masyarakat , yang dalam konteks penelitian ini meliputi kultur harmoni dalam kehidupan ritual atau slametan, kesenian tradisional dan hubungan antar agama, yang dimilki masyarakat Kota Kediri ternyata mampu mengikat sistem sosial lainnya, bahkan menjembatani interaksi antar aktor dan menyatukannya dalam sistem sosial bersama. Dengan demikian kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain serta kemampuan untuk mengendalikan sistem tindakan yang lain.

Kondisi masyarakat yang harmonis tersebut, telah dirintis di Kota Kediri sejak gerakan reformasi digaungkan tahun 1998. Dengan adanya perubahan sistem politik yang sebelumnya bersifat otoriter ke sistem politik yang demokratis, telah memberikan kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat dan elite di Kediri membangun kembali kehidupan sosial yang lebih mengedepankan sikap toleran dan persaudaraan antar elemen masyarakat yang plural baik dari segi agama, budaya, dan ekonomi ekonomi .

Hubungan Segitiga Kekuasaan

Selepas rezim Orde Baru jatuh, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia hadir dalam format yang berbeda. Perbedaan ini terkait dengan perubahan peran dan fungsi beberapa

kekuatan politik utama dalam menentukan proses pembuatan kebijakan negara. Adapun kekuatan-kekuatan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partai politik, birokrasi pemerintahan, milier dan masyarakat itu sendiri yakni individu atau kelompok individu yang melembagakan hak sipil dan hak politik mereka ke dalam institusi kekuatan politik. Fenomena seperti ini direpresentasikan oleh munculnya berbagai kelompok kepentingan dalam aneka bentuk dan sifatnya, baik organisasi profesi, keagamaan, dan komunitas-komunitas hobi yang lain. Kelompo-kelompok kepentingan tersebut secara sadar ingin terlibat dalam proses politik serta berupaya memengaruhi kebijakan publik.(Asrinaldi, 2014, hal. 7) (Asrinaldi, 2014, hal. 7)

Lahirnya hubungan segitiga kekuasaan di Kota Kediri terjadi secara bertahap. Era reformasi yang disusul dengan diterapkannya otonomi daerah dalam mengelola pemerintahan daerah tidak dapat dipungkiri sebagai faktor utama yang mendorong para elite politik dan pemerintahan berani melakukan langkah-langkah partisipatif dengan melibatkan para tokoh agama dan masyarakat, elite parpol serta berbagai elemen sosial yang lain. Sementara di kalangan masyarakat muncul sebuah keinginan kuat agar pola kepemimpinan yang ada sebelumnya yang bersifat top down diganti dengan pola kepemimpinan yang lebih komunikatif sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan mudah dan leluasa. Munculnya sebuah kesadaran baru tersebut dimulai saat terpilihnya Walikota Kediri, Ahmad Maschut pada tahun 1998 dalam sidang paripurna DPRD Kota Kediri.

Pada tanggal 5 maret 1998, Ahmad Maschut dipilih anggota DPRD menjadi walikota Kediri menggantikan walikota lama

Wiyoto. Maschut didapingi Bambang Edianto sebagai wakil walikotanya, yang sebelumnya sebagai sekretaris daerah. Pasangan walikota dan wakil walikota ini segera dihadapkan pada situasi yang cukup berat akibat krisis moneter dan krisis politik saat itu.

Pada tahun pertama pemerintahan Maschut lebih banyak melakukan pemetaan potensi dan bersosialisasi dengan mayarakat dan tokoh-tokoh agama, tokoh politisi dan kalangan pengusaha di Kota Kediri. Pertemuan demi pertemuan dengan kelompok masyarakat dilakukan demi mendengarkan aspirasi dan keluhan, mulai urusan ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan, pendidikan, kesehatan hingga kesenian dan olah raga.

Dalam menjalankan pemerintahan, Walikota Ahmad Maschut menetapkan rencana program kerja selama lima tahun di Kota Kediri yang diberi nama Tri Bina Kota. Dengan program Tri Bina Kota tersebut, Maschut ingin menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan industri dan pusat pariwisata.

Gambar 4 Hubungan Segitiga Kekuasaan

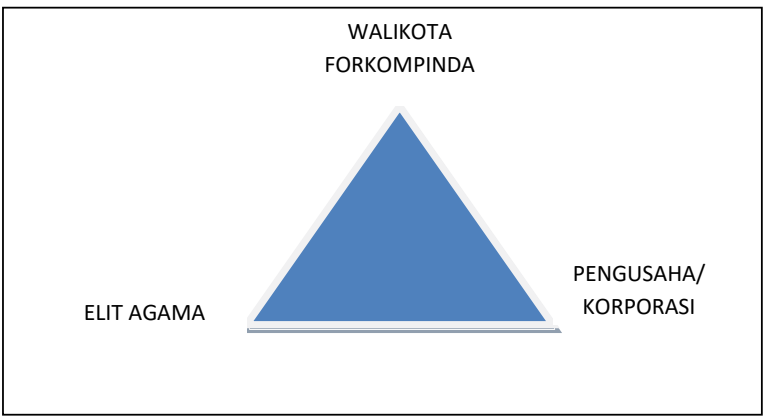

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu ciri khas Kota Kediri adalah keberadaan dan peran para pemuka agama; kiai, pastur, dan pendeta dalam percaturan dan dinamika lokal, sehingga atas peran tersebut sangat berpengaruh terhadap pola dan hasil yang hendak dicapainya.

Realitas di tengah masyarakat menunjukkan bahwa setiap masyarakat diperinta oleh sekelompok orang yang memilki kualitas tertentu. Dalam prespektif sosiologis mereka ini sering disebut elite. Konsepsi tentang elite ini pada dasarnya melahirkan situasi sosial bau yang mencerminkan adanya dinamika masyarakat, karena dalam struktur masyarakat ada yang memerinta dan yang diperintah.

Di sisi lain, hubungan antar kiai dan masyarakat telah lama terlembagakan dalam bentuk norma patron-klien. Suatu pola hubungan yang memilki relasi dan peran khusu antar keduanya. Sementara itu masyarakat Kota Kediri menurut pandangan penulis memilki kharakteristik hubungan sebagaimana yang kami jelaskan tersebut. Kiai sebagai patron, sedangkan masyarakat sebagai klien. Patron akan memperoleh posisi khusus di tengah masyarakat. Bahkan pola patronase antara kiai dan masyarakat ini tidak dibatasi oleh teritoril tertentu, tetapi bisa lintas teritorial yakni wilayah antar kabupaten atau bahkan provinsi.

Pengaruh kepemimpinan dan jaringan kiai yang semakin luas memudahkan mereka utuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar baik pemerintah maupun partikelir. Keberadaan dan posisi kiai yang demikian ini memudahkannya untuk berperan sebagai agen penyampai pesan-pesan pemerintah tentang pembangunan. Apalagi secara kultural

kiai dalam pandangan masyarakat Jawa memilki posisi yang cukup istimewa, yakni disegani dan ditaati perintahnya.

Pemerintah kota Kediri menyadari bahwa posisi kiai yang begitumenentukan dalam memengaruhi tindakan masyarakat serta dalam membimbing mereka untuk menerima langkah-langkah tertentu, atau kebijakan tertentu dari pemerintah. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya interelasi kiai dengan pejabat pemerintah Kota Kediri.

Hubungan kiai dan pejabat Pemerintah Kota Kediri telah terjalin sedemikian rupa, meski mempunyai peran, fungsi dan kapasitas yang bereda antar keduanya, namun memilki tujan yang sama yaitu untuk mengabdi pada masyarakat luas. Awalnya proses relasi biasanya diawali dengan membangun kunjungan silaturahmi kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan mengembangkan program yang diperuntukkan pada masyarakat umum. Program-program tersebut tentu saja terkait dengan memberikan kesempatan bagi para kiai atau tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan yang menjadi rencana kegiatan pemerintah. Biasanya pesan-pesan tersebut dibuat dalam suatu acara pengajian yang difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu,, ada waktu khusus yaitu saat perayaan hari-hari besar keagamaan juga telah dijadwalkan sebelumnya dalam perencanaan kegiatan pemerintah dalam bentuk ceramah keagamaan

Sebenarnya jika dilihat secara mendalam prose hubungan antara kiai dan pemerintah kota memiliki manfaat dari kedua belah pihak. Satu sisi kiai sebagai bagian dari elite masyarakat dapat mengakses beberapa program pemerintah, yang biasanya dalam bidang sosial keagamaan. Demikian pula dengan pemerintah juga mendapatkan manfaat karena

pemerintah dapat menjadikan kiai sebagai bagian dari proses sosialisasi program pembangunan yang sedang dicanangkan. Hal ini sangat dirasa membantu karena, keberadaan kiai sebagai panutan masyarakat dapat dengan mudah menerima arahan-arahan dari kiai yang terkait dengan peran dan manfaat yang diterima masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan oleh kiai tentu akan lebih dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat, karena yang menuyampaikannya adalah tokoh panutannya sendiri.

Dengan demikian hubungan antara kiai dan pejabat pemerintah kota bersifat saling menguntungan, atau simbiosis mutualisme. Hubungan tersebut tentu dirasakan sebagai hal yang sangat strategis dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan di Kota Kediri. Kondusifitas ini memang penulis rasakan sendiri yang selama 20 tahun lebih tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hampir dalam semua bidang urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak atau protes dari masyarakat. Bahkan kondisi tersebut banyak dinilai dan diapresiasi dari daerah lain, hingga seringkali Kota Kediri mendapatkan penghargaan sebagai daerah teraman dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Selain itu, pemerintah Kota Kediri juga banyak menerima kunjungan atau studi banding dari pemerintah daerah lain, untuk belajar tentang kondisi yang stabil tersebut dapat diterapkan di daerahnya masing-masing.

Jika diamati lebih mendalam, hubungan antara kiai dengan pejabat pemerintah kota Kediri telah lama terbangun sejak awal reformasi. Hubungan tersebut apabila disimpulkan memilki nilai saling menguntungkan diatara keduanya.

Sekalipun demikian, bukan berarti relasi tersebut berjalan secara linier. Ada saatnya relasi tersebut bersifat fluktuatif karena ada persoalan-persoalan yang kadang membutuhkan penyelesaian cukup lama, bahkan kadangkala menimbulkan konflik, tetapi juga ada kalanya hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Kondisi fluktuatif tersebut pada umumnya apat diatasi oleh kedua belah pihak, sehingga relasi yang terbangun sesungguhnya besifat aktif dan dinamis.

Dinamika hubungan antar pejabat pemerintah kota kediri dengan kiai ini dapat diamati dengan menggunakan prespektif interaksi simbolik. Bahwa interaksi antar keduanya dilakukan secara sadar dari kedua belah pihak, bahkan dalam beberapa wawancara ditemukan masing-masing mempunyai motif tertentu, tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan-tidakan tersebut dalam teori interaksi simbolik disebut tindakan bermakna. Yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, terarah menuju suatu penyelesaian suatu aktivitas yang dirancang, dan tindakan tersebut diproyeksikan oleh pelaku dalam pikirannya sendiri. Dalam arti kata, interaksi antar kedua belah pihak dilakukan berdasarkan motif tertentu. Motif merupakan faktor yang penting dalam memahami sebuah fenomena tindakan. Motif-motif ini merupakan usaha-usaha seseorang dalam meringkas dan membuat makna baru dari tindakan yang kompleks. Motif juga merupakan label pernyataan ringkas dari alasan tindakan yang telah terjadi.

Dalam kehidupan sehari-hari secara umum masyarakat di Kota Kediri masih memegang teguh keyakinan agama. Salah satu ukuran keteguhan tersebut dimanifestasikan lewat simbol sosial yang dibungkus dalam prosesi berbagai kebiasaan dan

adat istiadat yang telah lama dijalani. Sebagi contohnya antara lain momen seperti kelahiran bayi, khitanan, pernikahan, dan peringatan hari besar nasional maupun keagamaan selalu disimbolkan dengan urusan praktek yang bermakna religi. Dalam ranah pejabat pemerintahan ekspresi tersebut diwujudkan dalam bentuk dan momentum yang berbeda dan disesuaikan dengan karakter jabatannya, misalnya peresmian pembangunan gedung, upacara ulangtahun, rapat kerja dan kegaiatan lainnya selalu dibungkus dengan simbol agama dengan mengundang seorang kiai. Dalam kesempatan seperti itu, kiai tidak hanya diminta untuk memimpin do'a, tetapi tidak jarang juga dimintai untuk memberikan ceramaah keagamaan (mauidhah hasanah) terkait dengan peristiwa tersebut. Hal tersebut dilakukan karena dengan doa dan acara keagamaan, diayakini dapat memberikan berkah dan kesuksesan terhadap hajat yang sedang dilaksanakan.

Pelibatan seorang kiai pada acara-acara resmi pemerintahan ternyata dianggap memberikan legimasi, karena dihadiri oleh kiai yang merupakan panutan masyarakat. Selain itu, acara tersebut juga secara spiritual diyakini mampu mendatangkan berkah.

Kiai dalam peta politik di Indonesia tetap dapat memainkan peran penting walaupun menurut beberapa pakar atau teori-teori modernisasi klasik, bahwa proses pembangunan tersebut telah menunjukkan adanya gejala sekularisasi di masyarakat. Sehingga peran agama tidak dianggap penting. Akibatnya peran kiaipun mengalami penurunan, sehingga sedikit-demi sedikit kiai kehilangan pengaruh dan peranannya dalam masyarakat dan pemerintahan.

Proses modernisasi atau pembangunan tidak selalu identik dengan sekularisasi yang berakibat tersingkirnya ulama dalam percaturan sosial dan politik. Untuk kasus di Kediri yang terjadi malah sebaliknya, proses modernisasi dan pembangunan yang berlangsung telah menimbulkan antusiasme keberagaman atau yang sering disebut kebangkitan agama Islam. Akibatnya, kiai menemukan momentumnya untuk berperan serta, bahkan lebih penting dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Oleh karena itu, kiai yang semula hanya berperan di pondok pesantren, membina santri dan masyarakat sekitarnya, berubah dengan dilibatkannya dalam proses sosial politik baik di organisasi politik maupun di ranah lembaga pemerintahan. Dalam banyak kasus ditemukan kiai dilibatkan dalam posisi tertentu di kepengurusan partai politik, dengan harapan mampu memberikan pengaruh dan dukungan secara politik terhadap partai yang bersangkutan. Dalam banyak kasus pula ditemukan bahwa dukugan kiai tersebut dimanipulasi untuk mendapatkan dukungan elektoral saat pemilu atau pilkada digelar.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pada umumnya kiai cenderung kurang memahami sofitikasi dan proses-proses politik utamanya dalam lembaga formal. Merka juga tidak memahami proses-proses dan mekanisme formal dari kelembagaan politik tersebut baik di lembaga politik maupun di lembaga pemerintahan. Sebenarnya ini sangat bisa dipahami, karena concern kiai bukan pada politik formal. Bahkan dalam beberapa kasus proses politik tertentu, yang peneliti temukan mereka sangat lugu dan naif, sehingga mudah dimanfaatkan dalam proses yang kadangkala bersifat

seremonial belaka. Dengan kondisi seperti itu, mengakibatkan keberadaan kiai mudah dibenturkan antara kelembagaan politik yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya fragmentasi antar kiai tidak bisa dihindarkan.

Peran kiai di Kota Kediri terutama kiai yang berada di dalam struktur kepengurusan NU lebih banyak berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah. Peran tersebut diwujudkan sebagai agen sosialisasi dan penyampaian program kepada masyarakat di akar rumput. Dukungan tersebut tidak hanya masalah agama, tetapi juga dalam bidang kesehatan, menjaga persatuan dan kerukunan serta sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.

Selain sebagai agen sosialisasi program pemerintah, peran kiai yang lain adalah sebagai mediator konflik. Hal ini tunjukkan saat ada gejolak para buruh pabrik Gudang Garam yang menuntut kenaikan upah dengan cara demostrasi kepada pihak manajemen. Atas permintaan pihak manajemen Gudang Garam kepada kiai agar bisa menjadi mediator, maka gejolak demonstrasi tersebut dapat diredam dan pihak manajemen juga sanggup memenuhi tuntutan pihak karyawannya. Dari keberhasilan memediatori konflik tersebut, menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu kiai masih memiliki pengaruh yang cukup signifikan di tengah masyarakat. Contoh yang lainnya saat warga Desa Pesantren melakukan demonstrasi menolak perubahan status dari desa ke kelurahan. Karena sudah ada hubungan yang baik antara pejabat dengan kiai, maka kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik, dan masyarakatpun bisa menerima perubahan tersebut. Dengan demikian, peran kiai selain sebagai mediaator konflik juga merupakan alat stabilisator keamanan di dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal ini, banyak para pejabat militer saat menjabat di wilayah Kediri pada awal massa jabatannya selalu yang dilakukan terlebih dahulu adalah membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, utamanya para kiai. Sehingga iklim kondusif tersebut terus bisa diciptakan karena adanya hubungan baik antara pejabat dengan tokoh agama yaitu kiai.

Secara umum, kedudukan kiai di Kota Kediri masih dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai orang yang mumpuni atau kelebihan dalam pengetahuan agama dan kemasyarakatan. Terkait dengan momentum pemilu dan pilkada, kiai dan tokoh agama merupakan figur panutan yang dianggap mampu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terjebak kepada kepentingan sesaat, apalagi saling bermusuhan hingga menjadikan masyarakat terbelah. Kyai dan tokoh agama lain juga selalu menyerukan kepada jamaahnya agar selalu menjaga kerukunan dan persatuan, dengan tetap mensukseskan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada sesuai dengan tujuan awalnya.

Peran agamawan utamanya kiai sebagaimana penulis jelaskan di atas adalah para kiai yang tersebar di setiap kelurahan di Kota Kediri, yang populer dengan sebutan kiai kampung. Mereka adalah kia-kiai yang dalam kesehariannya melaksanakan pendidikan agama di lingkungan sekitarnya. Biasanya mereka memilki pesantren atau ada juga yang hanya sebatas memilki masjid tetapi tiap harinya mereka menyelengarakan pengajian, tahlilan, diba'an dan kajian kitab kuning. Menurutnya politik itu kotor dan penuh dengan permainan yang menghalalkan segala cara. Mereka hidup

ditengah masyarakat dan berbaur dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Tidak ada jarak secara psikologis antara kiai dengan masyarakat. Hubungan yang bersifat intensif inilah menjadikan kiai kampung menjadi panutan bagi warga sekitar, utamanya terkait kehidupan sehari-hari dan urusan agama. Berbeda dengan kiai yang memilki pesantren besar, mereka kebanyakan hanya terkonsentrasi pengaruhnya di dalam pondok pesantren, dan ikatan dengan masyarakat sekitar sangat longgar.

Selanjutnya dalam setap momentum pemilu dan pilkada kiai atau ulama seringkali dijadikan target silaturrahmi politik. Hal ini dilakukan karena kiai dianggap memilki pengaruh dan kharisma yang cukup kuat di masyarakat.Fenomena tersebut menjadi menarik perhatian para politisi, terutama saat mendekati momentum pilkada atau pemilu. Alasannya, dengan mendekat ke para kiai, berarti mereka sedang mendekat ke penarik suara masyarakat. Para politisi beramai-ramai mendekat untuk minta restu dan doa dari sang kiai agar kelak bisa dipilih oleh masyarakat. Restu yang diberikan kiai terhadap seorang calon tidak langsung membawa kiai terlibat dalam ranah politik. Namun restu yang diberikan tidak akan berdampak banyak ketika kiai tidak merubah pemikirannya mengenai posisi pada romantisme masa lalu.

Dorongan kiai yang terlibat dalam proses pemilu maupun pilkada memang beragam. Mayoritas kalangan kiai atau tokoh agama lain tidak memilki kepentingan khusus untuk melakukan dukungan kepada calon tertentu. Dengan demikian mereka lebih banyak menjauhkan dirinya dari percaturan politik di lingkup Kota Kediri. Hal tersebut dilakukan menurut penulis karena keterbatasan kemampuan

yang dimiliki oleh diri kiai sendiri dalam dunia politik praktis. Cara penolakkannya pun juga bermacam-macam. Ada yang sengaja menghindar bila didatangi oleh tim sukse atau calon. Tetapi juga ada yang secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak akan ikut dalam dukung mendukung karena mengaku tidak paham dalam politik dengan mengatakan bahwa dia kan fokus saja mengaji.

Begitu juga dari kalangan pengurus ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Kediri, mereka menyatakan netral dan tidak terlibat dalam dukung mendukung calon tertentu. Kalau sifatnya hanya menerima silaturrahmi dari calon atau tim sukses maka sifatnya selayaknya sebagai tuan rumah yang berusaha untuk menghormati tamunya dengan cara mendokan calon agar mendapatkan yang terbaik.

Di sisi lain, banyak pihak dalam masyarakat menaruh kekhawatiran dengan keterlibatan kiai dalam politik. Karena dalam pandangan masyarakat, politik identik dengan dunia yang kotor dan penuh dengan tipu muslihat demi memenangkan kepentingannya. Maka dengan keterlibatan kiai atau tokoh agama dalam politik praktis justru akan menciderai tugas utama sebagai panutan yang lebih dibutuhkan oleh umat. Dan dalam kenyataannya hampir semua tokoh agama di Kota Kediri bersikap netral dan lebih memberikan kebebasan kepada setiap orang atau jamaah untuk memilih calon yang menjadi pilihannya.

Meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi seorang kiai untuk terlibat dalam politik atau ikut dalam perebutan kekuasaan, keterlibatan politik kiai senantiasa diletakkan dalam posisinya sebagai penjaga moralitas di dalam

masyarakat. Salah satu dasar yang sering diungkapkan adalah pertama, bahwa antara ulama dan umara harus sejajar dan bertanggung jawab terhadap tegaknya sebuah tatanan dan sistem di dalam masyarakat. Posisi yang demikian memang dalam dunia Islam sudah menjadi doktrin bahwa antara ulama dan umaro dalam sejarahnya harus senantiasa saling bersinergi tanpa mengitervensi antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Alasan yang kedua, bahwa ketika seorang kiai terjun di dalam dunia politik, artinya memberikan dukungan kepada salah satu calon dalam pemilu maupun pilkada, dimaknai sebagai cara berjuang kiai untuk kemslahatan umat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar.Baginya keterlibatannya dalam dunia politik adalah bagian dari cara mempertahankan moralitas yang selama ini dia ajarkan, karena Islam tidak itu tidak alergi dengan politik. Sebagai seorang kiai yang ssering berhubungan dengan masyarakat dinilai mengetahui lebih banyak tentang persolan-persoalan yang dialami masyarakat.

Dari sejumlah kiai yang melakukan dukungan terhadap calon, yang penulis ketahui, mereka juga dapat menjelaskan kepada santri dan masyarakat, bahwa apa yang menjadi pilihannya bisa salah dan bisa benar, dengan begitu masyarakat dipersilahkan untuk memilih yang sesuai dengan hati nuraninya. Sehinga pernyataan dan sikap kiai tersebut, bagi masyarakat menjadi pembelajaran yang berharga bahwa ketika urusan politik masyarakat diberi kebebasan untuk memilih, sedangkan untuk urusan agama umat harus ngikut kiai.

Hal tersebut ikut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat di Kota Kediri ketika ada seorang kiai menyatakan

dan mendukung kepada salah satu calon. Bagi masyarakat, tindakan seorang kiai tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sesaat dan bukan merupakan representasi dari kemauan umat. Akibatnya kharisma seorang kiai di mata masyarakat menjadi menurun. Sehingga dalam banyak hal masyarakat tidak lagi melihat kiai tersebut sebagai panutan dalam urusan agama.

Sementara di sisi lain dunia politik bersifat profan (keduniawian yang didalamnya meniscayakan kepamrihan dan ada tendensi-tendensi tertentu di dalamnya. Akibatnya hal tersebut justru akan mempersempit misi dakwah itu sendiri, dan bukan untuk memperjuangkan kepentingan umat. Ada kekuatiran dari banyak pihak, dengan kiai terlibat dalam politik maka pesantren, santri dan masyarakat akan cenderung dinomorduakan. Karena yang lebih diutamakan adalah kehendak dan keinginan para politisi yang didukungnya. Padahal otoritas seorang kiai diperoleh bukan dari kiprahnya di jalur kekuasaan, tetapi legitimasi seorang kiai diperoleh karena sikap dan tindakannya yang masih dalam bingkai moral tetapi juga melalui otoritas keagamaan yang dimilkinya.

Selanjutnya terkait dengan dengan kekuatan politik yang ketiga yaitu korporasi yang dalam hal ini adalah tentang keberadaan dan peran PT Gudang Garam. Dalam konsep dunia industri hubungan antara pemerintah, pihak managemen korporasi dengan karyawan dinamakan hubungan industrial. Dalam hubungan industrial tersebut, antara pemerintah kota Kediri dengan PT Gudang Garam dan karyawan disebut sebagai pola hubungan tripartitri. PT Gudang Garam merupakan salah satu pabrikan industri

rokok terbesar merupakan industri penghasil rokok Kretek terbaik di Indonesia yang didirikan pada tahun 1958. Usaha rokok ini awalnya hanya berasal dari industri rumahan oleh seorang keturunan Cina yang bernama Suryo Wijoyo. Kini Gudang Garam telah menjelma sebagai perusahaan raksasa multinasional. Kontribusinya terhadap pemasukan pajak Bea Cukai di Kota Kediri maupun bagi negara membuat Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan swasta yang paling terpandang. Jika dilihat secara politik memang hubungan Pemerintah Kota Kediri dengan PT Gudang Garam merupakan hubungan yang saling timbal balik atau memiliki hubungan simbiosis mutualisme.

Salah satu indikator dari hubungan simbiosis mutualisme tersebut adalah saat terjadi konflik atau tuntutan para karyawan yang menuntut kenaikan upah kepada pihak managemen perusahaan selalu berakhir damai. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya mediasi yang dilakukan pihak pemerintah kota Kediri dengan pihak manajemen PT Gudang Garam Kota Kediri. Di satu sisi pemerintah kota merasa terbantu karena dengan keberadaan Gudang Garam secara faktual sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Kediri. Sedikitnya 30.000 karyawan yang sebagian berasal dari masyarakat Kediri tersebut menggantungkan pendapatannya dengan bekerja di perusahaan rokok terbesar di Indonesia tersebut. Berdasarkan fakta tersebut yang menjadikan Pemerintah Kota Kediri selalu bersikap hati-hati agar ketika ada persoalan yang menyangkut tuntutan karyawan jangan sampai merusak hubungan baik yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya. Bambang (47) mengatakan:

> "Tahun 2001 yang lalu pernah terjadi aksi mogok massal yang dilakukan oleh para karyawan Gudang Garam. Aksi karyawan tersebut dilakukan akibat dari kebijakan perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Namun setelah diadakan mediasi oleh pihak Pemkot Kediri maka PT Gudang Garam mengatakan bahwa yang terjadi atas pemutusan hubungan kerja tersebut adalah bagi karyawan yang sudah berusia 48 tahun ke atas sedangkan bagi mereka yang berada di bawah itu masih dipertahankan itu pun sebenarnya masih diberikan pesangon sebagai Tali Asih untuk bisa mereka gunakan setelah mereka tidak bekerja di perusahaan tersebut." (Wawancara, 2 Pebruari 2010)

Selain membantu dalam merekrut tenaga kerja yang jumlahnya puluhan ribu, peran PT. Gudang Garam yang lain adalah pemberian bantuan untuk perbaikan fasilitas umum seperti pos kamling, tempat sampah, alat-alat pertanian, pembangunan gorong-gorong, jalan dan pembagian pemberian santunan atau sumbangan kepada panti asuhan, tempat ibadah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kediri. Dana tersebut diambilkan dari program CSR *(Corporate Social Responsibility)* maupun dari alokasi dana perusahaan yang lain. Huda salah satu pengurus Gerakan Pemuda Ansor mengatakan:

> "Kami dari Ansor yang memilki kepengurusan hingga di tingkat desa, sering mengadakan kegiatan bhakti sosial berupa penghijauan, bedah rumah, dan pemberian santunan yang biasanya dirangkai dengan kegiatan kaderisasi. Karena hubungan kami bagus dengan pihak pimpinan Gudang Garam, maka kami dalam setiap kegatan sering bekerja sama dan dibantu. Pihak Gudang Garam sangat antusias membantu jika kegiatannya langsung menyentuh masyarakat." (Wawancara, 5 Pebruari 2020)

Hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan PT Gudang Garam juga dilakukan dalam rangka mendukung program-program pemerintah baik kota maupun kabupaten Kediri. Kerja sama seperti ini rutin dilakukan setiap tahunnya yaitu melalui program CSR. Dalam praktiknya pemkot melalui dinas-dinas terkait mengajukan proposal kegiatan, selanjutnya Gudang Garam akan memberikan bantuan dana atau barang sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dimaksud. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai rencana kegiatan pembuatan taman kota, maka Gudang Garam memberikan bantuan berupa tempat duduk, tempat sampah dan gerobak sampah. Pada tahun 2016 Gudang Garam pernah menjadi sponsor utama Persik, sepak bola andalan masyarakat Kediri. Langkah tersebut dilakukan saat ada larangan bagi pemerintah daerah untuk membiayai sepk bola yang berasal dari dana APBD maupun APBD. Sehingga nasip persik saat itu sempat fakum kaena tidak ada yang mendanai.

Selain itu,, Gudang Garam dalam setiap tahunnya menyumbang tidak kurang 1,5 triliun kepada provinsi Jawa Timur dalam juga setiap tahunnya lewat dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana tersebut selanjutnya kepada tiga pihak, yaitu pertama adalah provinsi penghasil tembakau sebanyak 30%, yang kedua kepada kota dan kabupaten penghasil tembakau sebanyak 40%, dan yang ketiga adalah kota dan kabupaten lain sebanyak 30%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 75 tahun 2015 pada tahun 2016 Kota Kediri menerima dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 38 milyard. Dana tersebut oleh Walikota Kediri Samsul Ashar digunakan untuk membangun rumah sakit Gambiran 2 di wilayah Pakunden Kecamatan Pesantren.

Dari penjelasan di atas, peran serta PT Gudang Garam bukan dalam ranah menjadikan orang-orangnya berhasil duduk dalam kursi kekuasaan, akan tetapi posisinya sebagai perusahaan yang beskala nasional telah berhasil menjadikan warga Kediri yang berjumlah 30.000 menjadi karyawan di perusahaan rokok terbesar di Indonesia tersebut. Posisi seperti ini menjadikan pemerintah kota dan kabupaten Kediri mau tidak mau sangat tergantung dari korporasi ini, karena menyangkut nasib kehidupan ekonomi ribuan warganya yang ada di dalamnya.

Selain itu, sebagai korporasi yang berskala nasional bahkan internasional, maka relasi yang dibangun tidak hanya hingga tingkat lokal dan provinsi tetapi justru lebih kuat di level nasional. Oleh karena posisinya tersebut yang sudah bertaraf nasional, perusahaan ini tidak sejak pendiriannya selalu menjaga jarak dengan dinamika politik lokal aik di kota maupun kabupaten Kediri. Baginya peran-peran yang diambil selama ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sudah cukup memberikan posisi tawar yang sangat kuat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada tokoh-tokoh agama/masyarakat di Kediri dan sekitarnya. Namun demikian meskipun tidak melakukan langkah-langkah politik praktis, segala kebijakan menegemen Gudang Garam justru memiliki dampak yang signifikan bagi dinamika dan arah pengembangan kota maupun kabupaten Kediri.

Tabel 11 Peran dan Fungsi Segitiga Kekuasaan

NO	UNSUR	PERAN DAN FUNGSI
(1)	(2)	(3)
1	Pemerintah Kota dan FORKOM-PINDA	1. Walikota dan Wakil Walikota sebagai pelaksana dan pengendali kebijakan dalam bidang pemerintahan bersama lembaga-lembaga lain diantaranya : DPRD, Kejaksaan Negeri, Kodim 0809. Polres Kediri Kota, Pengadilan Negeri . Mereka bergabung dalam suatu wadah yang bernama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) 2. Memanfaatkan kegiatan PAUB-PK yaitu pertemuan rutin antar tokoh agama setiap malam jum'at kliwon sebagai ajang kegiatan bersama dengan pengusaha dan FORKOMPINDA
2	Kiai dan tokoh agama	1. Sebagai sosok panutan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka juga merupakan sosok yang sangat berkompeten dalam bidang keagamaan .Selain itu, mereka juga membentuk wadah bersama yang dibernama Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK) 2. Sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah kota ketika timbul persoalan-persoalan dalam masyarakat. Begitu pula sebagai mediator dalam hubungan idustrial antara pihak karyawan dengan pimpinan perusahaan. 3. Penyampai pesan-pesan dan program pembangunan dari pemerintah ke masyarakat/umat. 4. Penyampai aspirasi dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah kota.

3	Pengusaha atau Korporasi	1. Berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat dan patner bagi pemerintah kota dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan terutama di sektor perekonomian daerah. 2. Sering berperan dalam membantu kegiatan-kegiatan keagamaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan partikelir yang dikelola oleh tokoh agama.

Faktor SosialBudaya, Identitas Partai dan Lingkungan

Masuknya konsep persaingan dalam dunia politik telah mengubah petapolitik dewasa ini. Mau tidak mau semua pihak yang terlibat dalam dunia politik menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan dapat dengan seenaknya sendiri mendapatkan suara dari pemilih. Di luar mereka masih terdapat sejumlah pihak yang juga sama-sama berusaha dalam persaingan untuk memperebutkan perhatian , dukungan dan suara dari rakyat. Dampak dari hal tersebut adalah munculnya tuntutan untuk melakukan perubahan paradigma dalam memandang dan memposisikan rakyat sehubungan dengan adanya dinamika berpolitik. Asumsi dasar dalam hal ini adalah bahwa rakyatlah yang menentukan apakah suatu partai atau kandidat akan mendapatkan dukungan suara dan menjadi pemenang atau sebaliknya.

Perubahan tersebut tentu sangat berarti bagi partai politik maupun kandidat dalam pemilu dan pilkada. Selama ini para elite partai mendudukkan masyarakat sebagai objek yang harus mengikuti kemauannya. Padahal dalam kenyataan sekarang, rakyat adalah subjek politik. Untuk itu perubahan

orientasi politik masyarakat terhadap partai politik dan kandidat perlu dilihat sebagai bagian dari perubahan secara mendasar tentang tatanan politik yang ada di dalam dunia politik itu sendiri. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan orientasi politik di masyarakat dalam berbagai sisi, yaitu faktor demografis, faktor identitas partai dan faktor lingkungan.

a. Faktor Sosial Budaya

Dalam konteks pemilu legislatif pasca reformasi mayoritas partai politik dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat atau pemilih dengan cara-cara yang lebih rasional dan pragmatis dibandingkan dengan menggunakan menggunakan pendekatan ideologis. Penggunaan simbol-simbol ideologis tetap ada, namun sudah semakin minim dilakukan.

Selanjutnya terkait dengan terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat mataram di Kota Kediri, dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor dan peristiwa penting yang menyebabkan terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat tersebut yang berasal dari kondisi sosial budaya masyarakat. Tentu saja faktor-faktor yang akan dijelaskan nanti bukan merupakan faktor utama atau yang dominan, tetapi hal tersebut setidaknya memiliki andil dalam membentuk orientasi dan sikap politik masyarakat. Adapun faktor lainnya dapat berupa proses-proses hubungan antara partai politik, tim sukses dan masyarakat saat menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pasca reformasi hubungan sosial antarkelompok

dan elite di Kota Kediri semakin terjalin secara intensif . Hal tersebut salah satunya ditandai dengan banyaknya berdiri paguyuban dalam bidang sosial, budaya, profesi hingga antar umat beragama dan kepercayaan. Dengan banyaknya berdirinya paguyuban merupakan indikator bahwa mayoritas masyarakat Kota Kediri masih berpegang teguh pada nilai-nilai kebudayaan Jawa. Nilai-nilai budaya Jawa yang menjadi pegangan tersebut adalah guyub dan rukun. Atas dasar nilai guyub dan rukun tersebut dapat dibangun kehidupan yang harmoni di dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Sementara itu, konsep harmoni sosial bagi orang Jawa adalah suatu tugas yang dipahami oleh setiap orang Jawa agar selalu menjaga kehidupan sosial selalu dalam keselarasan dan keseimbangan. Dalam menjaga kehidupan sosial dapat dilakukan dengan melakukan interaksi sosial berjalan dengan wajar tanpa ada tekanan-tekanan dan pemaksaan yang dapat menghambat kebebasan seseorang.(Moh.Roqib, 2007, hal. 3) (Moh.Roqib, 2007, hal. 3)

Masyarakat Jawa sangat memegang teguh kerukunan, karena bagi mereka kondisi itu harus terus dipertahankan sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, tentram, aman dan tanpa menimbulkan perselisihan. Setiap orang selalu di ajarkan untuk tidak menghancurkan keseimbangan sosial demi mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menekankan sikap nrimo atau mempunyai sikap pasrah terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Hal tersebut selalu disadarinya karena merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan hormat adalah nilai yang sangat berhubungan dengan orang

lain. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan sebuah etika pergaulan dengan orang lain.

Selain didasari oleh nilai-nilai Jawa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kehidupan keagamaanpun juga mengalami perubahan pola hubungan yang signifikan. Saat awal reformasi banyak terjadi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kekuatiran bagi kalangan tokoh agama dan pengusaha di Kota Kediri agar kejadian tersebut tidak menjalar ke Kota Kediri.

Kekuatiran tersebut sangat beralasan mengingat kondisi riil masyarakat Kota Kediri sangat beragam baik dari latar belakang etnis, agama dan keperayaan. Di daerah yang mendapatkan julukan di "kota tahu" ini terdapat banyak etnis antara lain Jawa, Cina, Madura, Batak, Ambon, Arab, bugis dan lain sebagainya. Keberadaan etnis-etnis tersebut tidak semuanya mengelompok di suatu tempat, tetapi banyak yang menyebar dan membaur dengan etnis yang lain.

Selain etnisitas, di Kota Kediri juga hidup dan berkembang faham keagamaan dan aliran kepercayaan. Dalam rumpun Islam saja ada Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Ahmadiyah. Satu hal lagi yang membedakan Kota Kediri dengan daerah lain yaitu tempat berdirinya organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan organisasi pengamal sholawat Wahidiyah. Kedua organisasi tersebut berpusat di Kediiri. Dalam setiap bulan tertentu selalu dibanjiri ribuan angotanya yang datang kota-kota lain di Indonesia. Selain kedua organisasi sosial keagaaman tersebut di Kediri juga merupakan tempat lahir dan berkembanganya aliran kebatinan atau pengahayat kepercayaan. Beberapa

kelompok kebatinan yangdapat disebutkan di sini antara lain Saptadarma, Ngesti Tunggal, Sumarah, dan Budhi Luhur.

Dalam hal keagamaan, selain Islam yang merupakan agama mayoritas bagi masyarakat di Kota Kediri, terdapat agama lain yang keberadaanya sejak zaman kolonial bahkan pada masa kerajaan Daha Kediri zaman dulu, yaitu Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen dan Katholik. Wujud keberadaan umat beragama yang sangat plural ini diperkuat dengan banyaknya tempat peribadatan dan lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, mushola, gereja, pura, wihara dan klenteng.

Hingga akhirnya dalam rangka untuk mengadakan pertemuan antar tokoh dan masyarakat lintas etnis dan agama diadakan pertemuan awal pada tanggal 10 Mei 1998 yang bertempat di kediaman KH Anwar Iskandar pondok pesantren Ngasinan, Ngronggo Kota Kediri. Dari pertemuan awal tersebut akhirnya melahirkan suatu gagasan untuk medirikan paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. Acara tersebut dideklarasikan pada tanggal 28 Juli 1998 di aula Universitas Islam Kadiri (UNISKA).

Menurut KH.Anwar Iskandar, misi dibentuknya wadah paguyuban kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan tersebut dimaksudan sebagai bagian dari keikutsertaan tokoh umat beragama secara aktif dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian fungsi paguyuban antar umat adalah sebagai wadah yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan

nilai-nilai yang substatif dan membantu penanaman nilai etik dan berakibat pada pendidikan masyarakat. Adapun kriteria dari sebuah tata nilai yang dimaksud dapat mewujudkan harapan paguyuban sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan advokasi antar pimpinan dan umat beragama dan penghayat kepercayaan, menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bergerak di bidang sosial dan tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dalam berbagai bentuk.(Subakir, 2003, hal. 92) (Subakir, 2003, hal. 92)

Dalam perkembangannya, wadah paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan tersebut telah mampu melaksanakan agenda rutin yaitu berupa pertemuan setiap malam jum'at kliwon. Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh para pemuka agama dan aliran kepercayaan, namun dihadiri pula para pengusaha, pemimpin pemerintahan yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) seperi Kodim 0809, Polres Kediri Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Demikian pula para tokoh pemuda dan anggota dari organisasi sosial kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah, LDII, BAMAG, KNPI, WALUBI juga selalu hadir dalam pertemuan tersebut. Sejak berdirinya hingga sekarang, agenda pertemuan PAUB-PK telah menjadi wadah interaksi sosial bagi semua komponen masyarakat yang ada di Kota Kediri, dan telah mampu menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar unsur masyarakat di Kota Kediri.

Di tingkat elite pemerintahan dan tokoh masyarakat, semenjak Kota Kediri dipimpin walikota Ahmad Maschut, hubungan dengan para tokoh masyarakat, pengusaha dan

pemuka agama, dan pengasuh pesantren mulai dibangun. Salah satu bentuk dilibatkannya tokoh-tokoh masyarakat dalam pemerintahan adalah pada waktu sidang paripurna pemilihan walikota Kediri oleh anggota DPRD Kota Kediri. Adalah suatu yang tidak lazim saat itu, sidang paripurna yang biasanya hanya melibatkan para anggota DPRD, namun saat itu justru mengundang para tokoh masyarakat dan pemuka agama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Halim Moestofa mantan anggota DPRD Kota Kediri sebagai berikut:

> "Sejak periode lima tahun pertama, walikota pak Maschut memang berhasil melakukan pendekatan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Banyak pendekatan yang beliau lakukan terbukti berhasil dan diakui sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat. Untuk pemuda dan olah raga beliau berhasil memajukan Persik. Karena melihat pola kepemimpinan pak maschut bisa diterima oleh banyak kalangan, maka untuk periode lima tahun berikutnya para tokoh dan elite agama sepakat mendukung beliaunya maju lagi sebagi walikota untuk kedua kalinya. Dan sebagai apresiasi terhadap dukungan tersebut para tokoh tersebut dundang dalam sidang paripurna pemilihan walikota Kediri. Kami saat itu sebagai anggota dewan menyetujuinya. Meskipun keberadaannya saat itu hanya sebatas menyaksikan."

Gambaran sebagaimana yang telah disampaikan Halim Moestofa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa interaksi dan hubungan sosial antar tokoh dan pemimpin di Kota Kediri sudah berjalan dengan baik. Pola hubungan tersebut senantiasa terus dijaga dan dilakukan secara terus menerus. Pola interaksi tersebut berlanjut hingga pemerintahan walikota berganti ke Samsul Ashar selama lima tahun, dan terus dilanjutkan ke walikota Abdullah Abu Bakar hingga sekarang.

Dengan demikian hubungan segi tiga antara pemerintah/elite politik, pengusaha dan para tokoh agama dan masyarakat telah memberi dampak pada terciptanya situasi dan kondisi sosial dan politik di Kota Kediri dapat berjalan dengan stabil dan kondusif.

Wadah interaksi sosial yang lain di tingkat masyarakat bawah sejak pasca reformsi juga berjalan semakin intensif. Hal tersebut dapat dilihat melalui aktivitas keagamaan masyarakat dan pelestarian kesenian tradisional. Dengan demikian keberadaan kesenian tradisional jaranan di Kediri merupakan bagian dari sistem pelembagaan sosial. Sehingga secara struktural ia berfungsi dan saling berhubungan dengan sub-sub sistem yang lain. Secara fungsional kesenian tradisional ini salah satunya berfungsi sebagai simbol untuk membentengi masyarakat desa agar tidak terjerumus pada tindakan yang merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini dirasakan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat dapat ditinjau dari apek demografis. Untuk mengetahui aspek demografis tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Artinya dalam mengetahui orientasi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Latar belakang demografi dan sosial ekonomi yang dimaksud adalah seperti agama, usia dan jenis kelamin. (Surbakti, 1992, hal. 145) (Surbakti, 1992, hal. 145)

b. Faktor Identitas Partai

Partai Faktor identitas partai merupakan faktor yang berkaitan dengan sikap dan pola tingkah laku individu.

Faktor identitas partai ini dapat mempengaruhi pola pikir santri sebagai pemilih pemula terhadap proses politik. Faktor psikologis ini sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam pemilihan walikota Kediri tahun 2013. Dalam pendekatan psikologis, memandang seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pikada bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan. Yang termasuk klasifikasi pemilih yang seperti ini ada di kelompok terpelajar dan secara ekonomi termasuk golongan menengah ke atas. Biasanya kelompok masyarakat seperti ini tinggal di kompleks perumahan di Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor identitas partai dapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dalam pemilu maupun pilkada di Kota Kediri terutama orientasi afektif. Identitas partai adalah komponen dari *political engagement* yang dipercaya punya pengaruh positif terhadap partisipasi seseorang. Identitas kepartaian merupakan suatu keadaan psikologis yaitu perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia pada atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. Identitas partai membentuk sebuah identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikkan dirinya dengan sebuah partai politik (Mujani, 2012: 25).

Dalam faktor identitas partai ini terbangun sebuah persepsi dan sikap partisan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal, membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah-masalah publik dalam keluarga, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik. Kategori dari pemilih tipe seperti ini biasanya adalah keluarga dari para pengurus organisasi kemasyarakatan dan pemuda, seperti pengurus RT/RW, KNPI, Karangtaruna, dan Pemuda Ansor. Demikian pula untuk pengurus ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan LDII serta organisasi profesi seperti PGRI dan Saburmusi.

Banyak hal yang bisa ditangkap dari hasil penelitian yang penulis temukan yang menyangkut pemahaman pemilih terkait dengan partai politik. Namun secara garis besar ada beberapa fenomena yang ada dan dapat diambil sebagai benang merah terkait dengan pemahaman dan sikap politik disebut. Fenomena yang muncul di lapangan peneliti mengelompokkannya ke dalam tiga bagian yaitu pemahaman ideologis, pemahaman sosial kemasyarakatan, dan pemahaman ekonomi. Ideologi partai adalah pemahaman yang muncul dari sebuah keyakinan seseorang mengenai partai yang berbasis perilaku keberagamaan seperti yang dikemukakan Clifford Geertz yaitu Santri yang modernis, santri tradisional dan abangan.

Adapun varian pemahaman ideologi yang ada di masyarakat terbagi dalam empat klasifikasi. Pemahaman

yang pertama adalah tentang perjuangan Islam, kedua pengejawantahan keislaman, ketiga pembelaan kepada wong cilik dan yang keempat adalah perlawanan pada ideologi penguasa.

Pemahaman sosial kemasyarakatan partai adalah pemahaman partai yang tumbuh dari hasil interaksi sehari-hari anggota masyarakat yang dilandasi oleh norma adat dan kebiasaan. Bagian dari pemahaman sosial kemasyarakatan terdiri dari solidaritas sosial, kepatuhan kepada pemimpin dan budaya. Sementara varian pemahaman ekonomi partai adalah pemahaman yang berkembang akibat kondisi sosial, ekonomi, geografi, dan demografi yang tidak mendukung. Sedangkan varian dari pemahaman ekonomi partai ini terdiri dari bantuan pembangunan dan pemberian uang.

Politik merupakan sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ketertiban terhadap masyarakat tertentu, termasuk menawarkan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Kalau dikaitkan dengan pemahaman seseorang terhadap partai politik, pemahaman ideologi dari partai bisa berarti bahwa partai politik tersebut harus punya gagasan yang dituangkan dalam visi, misi dan platform serta ditunjukkan dari perilaku elitenya dalam memperjuangkan dan merealisasikan gagasan tersebut dalam kenyataan sehari-hari.

Dalam khasanah perpolitikan di Indonesia, ideologi politik yang bersumber dari politik aliran sudah cukup lama mempengaruhi kehidupan politik kepartaian, dan hal tersebut sudah peneliti bahas dalam bagian sebelumnya. Memang politik aliran itu telah melahirkan dua kutub

ideologi yaitu kutub Islam dan kutub nasionalis. Kedua kutub ideologi tersebut mempunyai pendukung sangat luas dalam masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Dalam kaitannya dengan pemahaman ideologis partai di Indonesia maka partai politik harus punya gagasan yang dituangkan dalam visi, misi, dan platform serta ditunjukkan dari perilaku elitenya dalam memperjuangkan dan merealisasikan "Islam", maupun "nasionalis," dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Di kalangan Islam modernis mempunyai pemahaman bahwa partai politik sangat diperlukan sebagai bagian dari cara memperjuangkan Islam. Dalam sejarah Islam, menurut mereka sangat ditentukan oleh orang-orang yang mampu merebut dan berposisi sebagai penguasa. Dengan kekuasaan tersebut, maka nilai-nailai dan ajaran Islam dapat diperjuangkan dan diterapkan dengan baik. Hal tersebut, menurut mereka tiak hanya berlaku sekarang tetapi sejak zaman Nabi Muhammad mensyiarkan agama selalu menggunakan kekuasaan sebagai kekuatan uatamanya.

Menurut Azis, salah seorang aktivis Muhammadiyah Kediri mengatakan bahwa sebenarnya kekuasaan itu dibutuhkan dalam agama tidak hanya di Islam, tetapi juga di agama Kristen. Karena hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah, bahwa agama Kristen dapat tersebar ke seluruh dunia, karena bangsa Romawi saat itu dapat menguasai kerajaan-kerajaan lain di dunia dengan kekuasaan yang mereka miliki. Begitu pula di Indonesia, bagi santri modernis penting untuk mendidtribusikan kader dan sumberdaya yang ada untuk terjun dan masuk adalam politik kekuasaan. Dengan harapan nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan

kenegaraan di Indonesia. Jangan sampai menurut mereka, negara yang memilki dasar Pancasila ini yang di dalamnya ada sila ketuhanan yang maha esa tidak mewarnai dalam kehidupan nyata di dalam politik kenegaraan maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.

Menurut aktivis Muhammadiyah Kota Kediri ini, aspirasi dan tuntutan adanya keinginan untuk berperan serta dalam politik tersebut harus disalurkan melalui partai-partai Islam yang ada di Indonesia. Karena dengan memilih wakil dari partai Islam diyakini memiliki pemahaman yang lebih komprehensip tentang nilai dan ajaran Islam dibandingkan partai-partai nasionalis. Karena pemahaman politiknya tersebut, pada umumnya kelompok Islam modernis tingkat partisipasinya lebih tinggi. Demikian juga dengan tingkat melek politiknya juga rata-rata tinggi, hal tersebut disebabkan tingkat pendidikan mereka punyai kebanyakan menengah ke atas. Oleh karena itu mayoritas kelompok santri modernis dalam menyalurkan aspirasi politiknya ke PAN dan PKS.

Meskipun sebenarnya diantara santri modernis sendiri terjadi perbedaan cara pandang dalam melihat partai Islam antara PAN dan PKS. Menurut simpatisan PKS di Kota Kediri mengatakan bahwa PKS lebih jelas vis dan misinya untuk kemajuan Islam dibandingkan dengan PAN. Ia menjelaskan bahwa PKS awalnya didirikan sebagai bagian dari misi dakwah, oleh karena itu dalam setiap usahanya kader-kader PKS akan selalu menekankan pentingnya amat ma'ruf nahi munkar sebagaimana perintah Islam itu sendiri. Sedangkan PAN sebagaimana yang selalu dikatakan oleh ketua umumnya Amien Rais dalam setiap pidatonya, ingin membawa PAN sebagai gerbong reformasi untuk memperbaiki kehidupan

bangsa dan negara. Dengan demikian PAN dimata kader PKS, adalah partai politik yang plural dan siapa saja dapat masuk di dalamnya.

Lain lagi argumentasi dari simpatisan PAN, baginya untuk memperjuangkan Islam tidak harus selalu mengusung isu tentang negara Islam. Baginya Islam di Indonesia berbeda dengan di Timur Tengah, maka nilai-nilai Islamlah yang paling penting diperjuangkan dalam ranah kebangsaan yang plural seperti Indonesia ini. Oleh karena itu Muhammadiyah sangat mendukung penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta saat itu. Karena menurut keyakinan Muhammadiyah, syariat Islam dapat diberlakukan di tengah kehidupan masyarkat tanpa harus mengubah bentuk negara menjadi negara Islam.

Dengan demikian dari paparan di atas dapat diketahui bahwa kalangan santri modernis sangat mendukung adanya partai Islam. Dengan dukungan tersebut diharapkan para pengurus partai Islam juga mampu mewujudkan cita-cita Islam tersebut dengan konsisten. Menurut Aktiis Muhammadiyah ini, banyaknya partai Islam di Indonesia mulai sejak dulu hingga sekarang terbukti belum mampu menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan Islam. Kebanyakan dari mereka hanya sekadar mengejar kekuasaan, dibandingkan memperjuangkan cita-cita Islam. Oleh karenanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai Islam dan partai non Islam, karena sama-sama sibuk mengejar kekuasaan. Bahkan dirinya menaruh simpati dengan PDIP sebagai partai nasionalis yang memilki Baitul Muslimin Indonesia. Dengan demikian perjuangan mendirikan negara Islam hanya akan sia-sia saja, berbeda hal jika kita ingin mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai Islam, karena

tentu akan kita sesuaikan dengan keragaman yang ada di bangsa Indonesia.

Sementara itu, kehidupan santri tradisional di Kota Kediri cukup semarak dan intensif dalam menjalankan ritual keagamaan. Selain diakukan di pondok-pondok pesantren ritual keagamaan juga semarak pula dilakukan di tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa model keberagaman santri tradisional sangat terkait dengan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, utamanya masyarakat Jawa. Bagi kelompok santri tradisional, ritual kegamaan adalah bagian dari proses menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akherat.

Demikian pula terkait dengan orientasi politiknya, kelompok santri tradisional sangat simpel dan sederhana. Mereka sangat tertarik dengan simbol dan beragam tata cara yang sudah berjalan lama di masyarakat. Dari segi penampilannya, kelompok santri tardisional juga sangat berbeda dengan kelompok Islam lainnya. Mereka selalu pakai sarung, baju koko dan berpeci hitam. Dalam ritual dan ibadah sehari-hari hal tersebut mereka gunakan sebagai pakaian utamanya. Pada era Orde Baru, santri tradisonal mengarahkan pilihanya ke partai Islam yang bergambar Ka'bah yaitu PPP. Selain karena tekanan rezim otoriter saat itu juga karena mengikuti perintah para kiainya. Dan saat itu memang tidak ada pilihan lain kecuali memilih PPP.

Namun sejak pemilu di era reformasi, kelompok tradisonal ini berganti pilihan dengan mendukung PKB, partai yang didirikan oleh kiai-kiai NU. Menurut mereka memilih PKB adalah bagian dari cara memperjuangkan nilai-nilai Islam sekaligus sebagai cara mereka takdzim pada guru atau

kiai. Baginya, takdzim pada kiai adalah bagian dari tradisi di kalangan NU yang menjadikan kiai sebagai pemimpin sekaligus panutan. Selain sebagai pemimpin dan panutan dalam kehidupan agama, kiai juga panutan dalam kehidupan sosial. Bahkan kedudukan kiai juga sebagai referensi dalam menentukan pilihan politik mereka. Hal tersebut sebagaimana yang dituturkan Umam (53) salah seorang simpatisan PKB dan aktivis NU sebagai berikut:

> " Saya dulu zaman Orde Baru memilih PPP. Namun setelah reformasi karena NU punya PKB maka saya ganti pilih PKB. Apa yang diperintahkan para kiai menurut saya harus dipatuhi apapun resikonya. Meskipun saat milih PKB saya nggak lihat calonnya, yang penting nyoblos gambar partainya. Saya kan NU jadi harus taat pada Gus Dur sebagai kiai dan pemimpin NU. Bahkan untuk membesarkan PKB saat itu, kami harus sama-sama urunan (berkorban). Saya rela karena semua itu kita niatkan untuk NU."(Wawancara, 19 Januari 2020)

Kelompok santri tradisonalis memandang dalam memilih partai politik adalah sebagai bentuk perwujudan dari keislaman mereka. Cara pandang tersebut muncul karena adanya pengaruh dari kelompoknya. Secara psikologis mereka merasa nyaman karena pilihan tersebut merupakan bagian dari pilihan kelompok dan ormas kebanggan mereka. Hal tersebut dilakukan selain karena mengikuti perintah kiai, juga merasa simbol organisasi sama dengan yang tercantum dalam gambar partai pilihannya. Karena didominasi oleh motivasi kelompok, maka yang nampak dalam setiap kampanye mereka selalu tampil dengan heroik. Fenomena tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Mojoroto yang merupakan lumbung suara kelompok santri tradisional.

Karena di kecamatan tersebut selain banyak jamaah pengajian juga banyak berdiri pondok pesantren besar seperti pondok pesantren Lirboyo, dan beberapa pondok pesantren lainnya di wilayah Bandarkidul.

Pemahaman masyarakat yang berdasarkan identitas partai juga ditemukan pada komunitas kelompok abangan di Kota kediri. Pemilih abangan menganggab bahwa partai politik yang cocok dengan aspirasi mereka adalah PDIP. Alasan mereka memilih PDIP adalah karena partai politik tersebut merupakan representasi dari simbol masyarakat bawah. Dengan memilih PDIP berarti sama dengan memperjuangkan nasibnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat kecil yang dimarginalkan.

Bagi kalangan simpatisan partai berlambang kepala banteng ini, PDIP dianggap sebagai simbol partainya wong cilik karena simbol Bung Karno yang terkenal dengan ajaran marhaenismenya. Dan orang yang mewarisi kharisma Bung Karno tersebut adalah Megawati yang juga sudah lama berjuang bagi kebesaran PDIP. Bung Karno dan Megawati menurutnya adalah simbol perjuangan yang menjadikan para simpatisan dari kelompok abangan ini mencoblos PDIP. Agus Beton (51) salah seorang pengurus organisasi Kawulo Alit Kota Kediri mengatakan:

> "Para pemilih abangan memilih karena ada simbol Bung Karno, kalaupun karena megawati karena dia sudah lama berjuang di PDIP yang saat Orde Baru juga disia-siakan. Selain itu, simbol banteng juga selain menjadi simbol perjuangan juga menjadi simbol kalangan wong cilik. Sebagai simbol identitas kaum marginal. PDIP mampu menggerakkan simpatisannya masih tetap loyal hingga sekarang meskipun banyak partai politik baru lahir." (Wawancara, 25 September 2019)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kelompok abangan memahami partai sebagai bagian dari cara merepresentasikan dirinya sebagai masyarakat marginal atau wong cilik sehingga hanya PDIP sebagai representasi partainya wong cilik atau orang kecil . Adapun yang termasuk orang kecil adalah mereka yang identik dengan petani, buruh kasar, pedagang pasar, pedagang kaki lima, karyawan toko, dan yang lainnya. Mereka adalah para pekerja yang sebagian besar mengandalkan kekuatan tenaga fisik. Maka dalam setiap mereka berkampanye dan berkonvoi keliling kota, seringali menunjukkan perilaku brutal dan menakutkan. Hal tersebut seakan menunjukkan bahwa saat itu mereka sedang melampiaskan ekspresinya dari segala tekanan yang mereka rasakan akibat berbagai persoalan hidup.

Dalam setiap kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh PDIP, yang diminati bukan pidato-pidato yang panjang. Mereka tidak merasa penting untuk mengetahui visi dan misi partainya. Baginya lebih senang kepada tindakan riil dan hal-hal yang bersifat pragmatis. Sehingga orasi-orasi politik yang bersemangat disertai propaganda lebih mengena dan disenangi. Selanjutnya setelahnya orasi selesai biasanya dilanjutkan dengan acara bernyanyi dan atau berjoget dengan hiburan yang telah disiapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian terdahulu, identifikasi kelompok wong cilik selain dari koteks pekerjaan dan keadaan sosial ekonomi juga dapat dilihat dari model keberagamaan mereka. Kelompok abangan yang dinamakan wong cilik ini secara keagamaan adalah termasuk Islam minimalis. Mereka dalam keseharian cenderung jauh dari langgar dan masjid atau tidak taat dalam menjalankan syariat

Islam. Menurutnya akibat ketidakberdayaan mereka dalam pekerjaan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan agama dengan sempurna. Akhirnya mereka juga menjadi ketidak berdaya dalam kehidupan keagamaan. Kondisi tersebut lama-lama akhirnya tidak hanya menjadi perilku yang sudah terbiasa, bahkan telah menjadi karakter dan identitas dari masyarakat tersebut.

Jika dilihat dari perkembangan hingga era sekarang politik aliran yang sebagaimana telah dijelaskan di muka, tetap masih berlaku untuk mesyarakat tertentu. Perbedaannya, politik aliran yang biasanya dilatarbelakangi adanya persamaan latar belakang sosial budaya dan keagamaan tidak lagi bersifat dominan. Dalam penelitian ini, ditemukan data bahwa kelompok masyarakat kecil atau wong cilik motif utama dalam memilih calon atau partai politik lebh di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pragmatisdan jangka pendek.

Nampaknya fenomena tersebut juga didukung adanya desakan terhadap kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga mengharuskan bagi kelompok masyarakat kecil ini bersikap realistis dan jauh dari sikap-sikap fanatis. Baginya masyarakat miskin seperti ini politik hanya sebatas urusan memilih dari sekian pilihan parpol dan calon itu saja. Dan hampir dapat dipastikan mereka tidak mempertimbangkan visi dan misi calon atau partai politik. Yang mereka tahu dia harus berangkat ke TPS dengan nama calon yang sudah diperkenalkan terlebih dahulu melalui teman atau pimpinan komunitas mereka, dengan sejumlah kompensasi tertentu dalam bentuk finansial.

c. Faktor Lingkungan

Terkait dengan faktor lingkungan, penelitian ini menemukan data bahwa keberadaan masyarakat miskin yang ada di Kota Kediri dalam hal merespons adanya kegiatan politik lima tahunan tersebut sangat bergantung kepada berbagai dimensi yang berada di sekililingnya. Demikian pula, karakteristik latar belakang sosial ekonomi seseorang juga mempengaruhi proses pembentukan nilai politiknya. Adanya keterbatasan nilai politik masyarakat miskin yang ada di Kota Kediri berdampak kepada tinggi atau rendahnya partisipasi yang mereka berikan kepada para calon atau kandidat yaitu terkait dengan kompensasi yang akan diterimanya. Partisipasi politik untuk kategori masyarakat miskin ini memang tergolong rendah. Ini dapat dilihat dari keterlibatan mereka yang hanya sebatas partisipasi dalam pemberian suara di hari pemilihan. Jarang sekali terlihat ada aktivitas politik lain yang diikuti masyarakat miskin ini terkait dengan aktualisasi diri mereka dalam dinamika politik.

Selanjutnya, partisipasi politik untuk masyarakat miskin ini juga cenderung tidak otonom, dan lebih bersifat mobilisasi. Artinya, keterlibatan mereka dalam proses politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka seperti faktor lingkungan sosial dibandingkan dengan berasal dari kesadaran politik mereka sendiri. Malah dalam banyak kasus, penulis mengamati langsung, bahwa dalam hal keikutsertaan mereka dalam politik ini umumnya dipengaruhi oleh anggota keluarga terdekat seperti anak, saudara, istri, suami dan orang tua. Interaksi yang terjadi di antara mereka dalam keluarga memperluas hubungan saling mempengaruhi dalam konteks

politik, sehingga berdampak pada pembentukan dukungan politik kepada calon atau parpol tertentu.

Sebagai ilustrasi bagaimana sikap politik masyarakat miskin kota yang sering menjadi sasaran bagi para politisi dalam mendapatkan dukungan, berikut pernyataan salah seorang pedagang kaki lima di Kota Kediri ketika menghadapi momentum politik lima tahunan tersebut. Namanya Slamet (50) pedagang asongan, berjualan makanan ringan yang biasa mangkal di depan sekolah-sekolah. Dia juga merupakan ketua paguyuban pedagang asongan yang bernama diberi nama Bina Mandiri. Berikut pernyataanya;

> "Sejak paguyuban pedagang ini dibentuk, yang banyak memberikan dorongan adalah pak Ayub, maka karena seringnya interaksi tersebut, teman-teman PKL memilih dia, karena sudah ada ikatan. Dialah yang sering memberikan saran-saran untuk paguyuban ini. Dan saat pemilu, kami memang diarahkan untuk mendukung dan meilih dia." (Wawancara, 22 Desember 2019)

Sedangkan keterlibatan masyarakat miskin dalam politik di luar agenda pemilu dan pilkada sangat minim. Kalau toh suatu saat mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah daerah, biasanya bukanlah sesuatu yang berasal dari kesadaran diri mereka. Keterlibatan mereka dalam aktivitas ini cenderung dimobilisasi oleh kelompok tertentu. Artinya, keikutsertaan ini tidak lebih sebatas bentuk solidaritas sosial mereka sebagai bagian dari kelompok yang sama-sama berada dalam kondisi miskin.

Jika dilihat dalam realitas kehidupan sehar-hari masyarakat miskin yang ada di Kota Kediri tidak jauh berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Kehidupan mereka yang membaur dengan kelompok masyarakat lain yang cenderung

terbuka. Sikap terbuka ini berdampak pada pola hubungan kekuasaan dalam konteks kehidupan masyarakat yang lebih luas. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat miskin tidaklah serumit seperti yang ada dalam kelompok masyarakat kelas menengah dan atas. Kecenderungan ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek.

Pertama, kekuasaan yang ada dalam masyarakat miskin ini penggunaannya jauh lebih sederhana dan bersifat netral dibandingkan kekuasaan kekuasaan yang dimilki oleh kelompok lain di luar kehidupan mereka. Penggunaan kekuasaan bagi kelompok masyarakat ini bertujuan untuk kepentingan harmonisasi bersama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Fenomena ini sebenarnya dapat dilihat dari kecenderungan mereka mengakui eksistensi pemimpin mereka baik yang dipilih bersama seperti pengurus RT/ RW maupun yang diangkat oleh pemerintah ditingkat terendah seperti lurah. Selain itu,, pemimpin dalam kelompok masyarakat ini, juga tidak memilki tendensi untuk mempengaruhi kelompoknya, terutama untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan posisi tersebut.

Dari fenomena ini dapat dipahami bahwa masyarakat miskin di Kota Kediri, justru mengakui eksistensi dan wewenang pemimpinnya, khususnya yang terkait dengan kepentingan mereka dalam upaya memperbaiki ekonomi keluarga. Pemimpin bagi kelompok masyarakat ini, adalah dari kalangan mereka dan sosok orang yang yang membawa manfaat, terutama secara sosioekonomi bagi kehidupan mereka. Bagi kelompok masyarakat seperti ini, kekuasaan dalam cakupan yang sederhana dan memiliki implikasi kemanusiaan, terutama untuk mendukung kepentingan

anggota kelompok mereka. Aspek ini dapat dipahami, bahwa pemimpin dalam kelompok masyarakat miskin dipandang, tidak saja sebagai seseorang yang memperjuangkan nasib kelompok mereka ketika berjadapan dengan kepentingan ekonomi atau materi, tetapi juga seseorang yang dapat memfasilitasi kebutuhan seperti psikologis, emosional dan politik.

Kedua, gejala kekuasaan dalam masyarakat miskin kota merupakan fenomena yang normal. Adanya kekuasaan dalam kehidupan masyarakat miskin adalah bagian dari realitas sosial bahwa mereka terikat satu dengan yang lain. Ikatan yang terbentuk ini justru semakin memperkuat ikatan emosional yang ada di antara mereka. Elemen positif dari kecenderungan ini adalah menguatnya rasa senasib dan sepenanggungan dalam kelompok ini.

Namun, secara politik realitas ini dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk mendaptkan dukungan mereka, terutama dalam pencapaian tujuan kelompok tersebut. Tumbuhnya rasa percaya yang tinggi pada pemimpin memeudahkan kelompok politik tertentu memobilisasi dukungan dari kelompok pekerja sektor informal ini melalui pemimpin tersebut. Sebagaimana dalam kasus yang penulis temukan calon legislatif yang bernama Yudi Ayubkhan, membina hubungan baik dengan paguyuban pedagang kecil dengan membentuk kepengurusan paguyuban yang diberi nama Bina Mandiri Putra. Setelah dibentuk paguyuban tersebut, Yudi Ayubchan berposisi sebagai pembina paguyuban. Selanjutnya dalam pemilu tahun 2014, paguyuban pedagang ini menjadi komunitas utamanya dalam

menggalang suara, dan berhasil sebagai anggota DPRD Kota Kediri.

Dalam banyak kasus, pola hubungan yang terbentuk antara kelompok masyarakat miskin dengan dengan pemimpinnya memudahkan individu atau kelompok politik meminta dukungan kepada pemimpin tersebut. Hal ini terkait dengan kempuan pemimpin tersebut dalam mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan kelompok masyarakat miskin tersebut. Karenanya dapat dikatakan pemimpin dalam kehidupan kelompok masyarakat miskin adalah orang yang mampu mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku mereka.

Ketiga, implementasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat miskin di Kota Kediri lebih banyak berbentuk persuasif (lunak) dibandingkan kekuasaan yang bersifat koersif. Jarang sekali penggunaan kekuasaan di antara individu dengan individu lainnya atau pemimpin dengan anggota kelompoknya menggunakan kekerasan atau paksaan. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai harmoni dalam komunitas ini sangat kelihatan dan dijunjung tinggi. Salah satu nilai harmoni ini adalah di antara mereka tidak jarang saling membantu dalam menyelesaikan urusan ekonomi. Dengan adanya harmonisasi melalui relasi patron-klien ini secara tidak langsung membentuk jaring-jaring kekuasaan dalam kehidupan keseharian mereka di sekitar tempat tinggal mereka turut membentuk perilaku mereka yang bertahan dalam himpitan ekonomi, sehingga mereka harus memilih ikut berdemonstrasi, misalnya menuntut kenaikan upah kerja mereka di pabrik, karena dimobilisasi oleh anggota kelompok yang lain.

Masyarakat nampak sudah pandai dalam memilih dan memilah siapa yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya, terlepas dari latar belakang partainya. Sayangnya, harus diakui pula tak jarang, makna memberikan manfaat itu bagi sebagian masyarakat bersifat jangka pendek saja. Dalam kondisi ketika sebagian besar masyarakat semakin pandai berhitung, adalah wajar jika pendekatan yang bersifat personal, yang mampu menumbuhkan keyakinan dan hasil konkret semakin dibutuhkan. Di sini figur-figur atau caleg dengan mobilitas individual yang dimilikinya jelas lebih berpotensi untuk mengisi kebutuhan itu. Tidak mengherankan pula jika figur pada akhirnya lebih diperhitungkan oleh masyarakat ketimbang partai, saat hari H pemilihan. Kecenderungan masyarakat yang lebih mementingkan hal-hal yang baru dan lebih pragmatis dibandingkan hal-hal yang bersifat ideologis dibenarkan oleh informan berikut ini:

> "Secara serampangan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan baru yang berkembang saat ini, bahwa masyarakat saat ini dalam membangun varian-varian yang cenderung non ideologis. Lebih bersifat komunal, ada beberpa partai baru yang didirikan lebih mengedepankan semangat komunal dan tidak ada kaitannya dengan masa lalu, yaitu ideologi."

Terkait dengan fenomena pemilih yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial disekitarnya, juga dibenarkan dalam penelitian Wawan Sobari dkk yang hasilnya menemukan bahwa perilaku politik masyarakat di wilayah Mataraman masih didominasi oleh nilai-nilai Jawa yang hirarkis. Nilai-nilai yang dimaksud adalah *ewuh pekewuh* dan *tepo sliro*.(Arga Sevtyan, 2018) (Arga Sevtyan, 2018) Artinya dalam penelitian tersebut preferensi pemilih masih didasarkan pada faktor

lingkungan sekitar masyarakt untuk dapat hidup rukun dan menghindari konflik dengan orang lain. Istilahnya adalah *anut grubyuk*. Hal tersebut sangat rentan dengan manipulasi karena kepentingan tersebut dapat dituar dengan hal-hal yang bersifat pragmatis dan jangka pendek. (Sobari, 2016).

Ada satu filosofi budaya Jawa yang terkait dengan konsep partisipasi, yang mungkin cocok untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang politik, yaitu :TRI DHARMA, yang dirumuskan oleh Sri Mangkunegoro I yang dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo. Bunyinya sbb : Dharma 1. Rumongso melu handarbeni :masyarakat perlu menyadari dan merasa ikut memiliki program-program pembangunan, sehingga lebih berperan (langsung maupun tidak langsung) dalam mengembangkan dan mengsukseskan program-2 pembangunan. Dharma 2. Wajib melu angrungkebi : masyarakat wajib ikut bertanggung jawab atas kegagalan maupun keberhasilan program-2 pembangunan. Dharma 3. Mulat sariro hangrosowani : Masyarakat perlu instropeksi (mawasdiri) dan punya empati (teposliro) serta keberanian melakukan sesuatu demi keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi Strukturasi dalam Perubahan Orientasi Politik Masyarakat

Dalam pembahasan ini, jika dikaitkan dengan teori strukturasi Gidden, peneliti melihat adanya struktur yang bermain dalam proses perubahan orientasi politik masyarakat yang dilakukan oleh agen dalam hal ini adalah para calon dan partai politik dalam meyikapi aturan-aturan di dalam lembaga

pemerintahan (pilkada) maupun lembaga perwakilan, DPR dan DPRD lewat pemilu. Permain struktur yang dimaksud peneliti amati telah berlangsung jauh sebelum hari pemilihan. Dalam penelitian ini retang perubahan orientasi politik tersebut dimulai saat pemilu sebelum reformasi hingga pasca reformasi.

Setelah rezim Orde Baru tumbang digantikan oleh Orde Reformasi, sistem politik berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Partisipasi masyarakat tumbuh dan pergantian sistem ketatanegaraan berubah menjadi lebih demokratis. Salah satu perubahan yang tampak setelah orde reformasi adalah sistem politik dan sistem pemilihan umum. Partai politik banyak berdiri menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Hingga penelitian ini dilaksanakan sudah empat kali diselenggarakan pemilu. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1999, kemudian pemilu tahun 2004, pemilu ketiga dilaksanakan tahun 2009 dan pemilu keempat pada tahun 2014. Demikian pula untuk pengisian jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak lagi dilakukan melalui pemilihan anggota DPRD melainkan melalui pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat. Pilkada (pilihan kepala daerah) pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2005.

Dalam pandangan teori strukturasi, dalam rentang sepuluh tahun terakhir, agen dengan aktif melakukan paraktik-praktik sosial berupa sikap dan perilaku yang ditujukan kepada partai politik dan kandidat dalam merespons ajakan untuk memilihnya dalam ajang pemilihan umum maupun piikada. Praktik-praktik tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menghasilkan struktur baik yang membatasi

maupun yang membebaskan atas sikap dan tindakan mereka. Demikian pula ada diantara mereka yang semula mengalami pemberdayaan berubah menjadi mengalami pembatasan dari struktur. Hal ini membenarkan sebagaimana yang dikatakan Giddens bahwa struktur dapat membatasi atau mengekang (Constraining), namun dapat pula berarti memberdayakan (enabling) pelaku atau agen. Pembatasan atau pemberdayaan struktur tersebut dapat dilakukan oleh negara karena kewenangan yang melekat pada dirinya.

Dengan demikian, struktur dalam konteks pemilu Orde Baru lebih ditentukan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengontrol partai politik dan masyarakat. Sementara dalam konteks strukturasi pelaku atau agen bukanlah sebagai sosok yang pasif. Pelaku dalam hal ini masyarakat atau pemilih dengan kreativitas yang dimilki mampu melakukan tindakan untuk melepaskan diri dari jeratan struktur yang melingkupinya. Pelaku bahkan mempunyai peluang untuk menyiasati untuk membuat struktur baru dengan melakukan derutinisasi tindakan guna memberi keuntungan baginya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menarik untuk mencermati keberadaan dan peran elite lokal baik dilevel pemerintahan, lembaga politik, maupun tokoh agama dan masyarakat. Tumbangnya rezim Orde Baru menghadirkan ruang bagi elite lokal dan masyarakat untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung oleh dominasi pemerintah. Struktur yang dimaknai sebagai aturan dan sumber daya akhirnya dapat mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat sebagai aktor dalam bentuk pembatasan ataupun pemberdayaan, namun di sisi lain, kelompok-kelompok

masyarakat di Kediri dengan kreativitas yang dimilikinya dapat menyiasati sebagai upaya mempengaruhi struktur yang ada. Selanjutnya para elite dan masyarakat sendiri dengan kemampuannya akan berupaya agar posisinya tetap seperti semula dalam arti tidak dirugikan oleh perubahan struktur yang sebelumnya menjadi pengekang baginya.

Menurut Giddens praktik-praktik sosial terbentuk karena adanya prinsip-prinsip yang terdapat dalam struktur. Prinsip-prinsip struktural tersebut terdiri dari signifikansi, dominasi dan legitimasi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang memilki suatu arti yang berbeda-beda namun terkait satu dengan yang lainnya. Penguatan dimensi stuktural tersebut menimbulkan suatu bentuk perubahan orientasi politik masyarakat dalam bentuk sikap dan tindakan politik dalam setiap pemilu dan pilkada dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu praktik sosial.

Berdasarkan temuan data di lapangan, dapat diidentifikasi tiga dimensi strukturasi dalam proses terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri dalam pemilihan umum sebelum reformasi higga setelah reformasi. Pertama dimensi Legitimasi. Yakni suatu legalitas atau peraturan yang digunakan sebagai dasar terbentuknya orientasi politik masyarakat. Dalam penelitian ini terungkap bahwa setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu berpedoman pada sistem dan mekanisme yang telah diatur secara detail melalui undang-undang. Bahkan dalam setiap pelaksanaan pemilu di era reformasi khususnya sejak pemilu 2004, lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan regulasi atau aturan tentang tahapan pemilu dan pilkada.

Meskipun aturan-aturan tersebut bersifat teknis, namun mengikat secara hukum.

Sebelum KPU menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, minimal setahun sebelumnya DPR telah mengesahkan paket undang-undang politik yang di dalamnya mengatur tentang partai politik, pemilu dan penyelenggara pemilu. Dari paket undang-undang politik tersebut akan diketahui bagaimana sistem dan mekanisme pemilu dilakukan. Dari pelaksanaan undang-undang pemilu ini pula yang nantinya akan menentukan bagaimana preverensi dan perilaku pemilih.

Pelaksanaan pemilu 1999 penyelenggara pemilu menggunakan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 sebagai acuan utamanya. Keanggotaan KPU pada masa ini, diambil dari seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu dan empat orang wakil dari pemerintah. Dalam pemilu pertama di era reformasi ini masyarakat akan memilih tanda gambar partai politik. Sedangkan nama-nama calon hanya tertulis di tempat pemunggutan suara. Bedanya dengan pemilu 2004, surat suara berisi tanda gambar partai politik dan nama-nama calon, meskipun keduanya tidak diwajibkan untuk mencoblos nama calon. Karena dalam pemilu 1999 dan 2004 calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut yang sebelumnya telah ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan.

Akibat dari sistem pemilu yang demikian, masyarakat atau pemilih tidak berhak menentukan calon mana yang akan terpilih tetapi partailah yang memilki kewenangan dalam menentukan nomor urut berapa seorang calon diletakkan. Selanjutnya dalam sistem pemilu seperti ini, posisi seseorang calon yang akan masuk dalam daftar calon dan surat suara pemilu ditentukan oleh pola hubungan dan loyalitas seorang

calon kepada partai politik. Pola hubungan yang dimaksud tentu pola hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Seorang calon yang memiliki hubungan baik dan ditunjang dengan loyalitas tinggi pada partai akan dengan mudah menempati nomor urut atas. Sebaliknya jika hubungan calon hanya biasa-biasa saja, maka calon tersebut hanya layak ditempatkan pada nomor sepatu, atau nomor bawah. Singkatnya kewenangan pengurus partai politik di era awal reformasi ini sangat besar.

Kondisi sebagaimana telah digambarkan di atas, berbeda dengan yang terjadi di level pemilih atau masyarakat. Pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 keberadaan mereka tidak lebih sebagai objek politik partai politik dalam setiap lima tahun sekali menjelang pemilu. Pemilu tahun 1999 yang merupakan penyelenggaraan pemilu pertama kali di era reformasi ini menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Saat itu penentuan calon terpilih di dasarkan pada nomor urut yang telah ditentukan oleh partai politik sebagaiman yang telah tercantum dalam surat suara. Sedangkan pada pemilu 2004 yang menggunakan dasar Undang-Undang nomor 12 tahun 2003, sistem pemilu yang digunakan sama dengan sebelumnya, hanya saja daftar calon legislatif dicantumkan dalam surat suara sehigga memungkinkan pemilih dapat mecoblos nama calon maupun gambar partai. Dengan sistem yang ada saat itu, dapat diketahui besaran perolehan suara yang memilih nama calon dibandingkan perolehan suara yang hanya memilih tanda gambar partai politik saja.

Berdasarkan legitimasi yang bersumber dari undang-undang pemilu, pemerintah saat itu ingin menunjukkan bahwa pemilu yang dilaksanakan sejak reformasi 1998 berbeda

dengan pemilu era Orde Baru. Yaitu pemilu yang dilakukan secara demokratis, jujur dan adil. Secara mandiri, masyarakat juga diberikan kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya sesuai dengan kehendak masing-masing pemilih. Namun demikian kehendak pemilih sebagai aktor dalam menyampaikan pilihan politiknya menghasilkan struktur baru yang berupa penciptaan persamaan identitas dan ideologi partai politik dengan identitas dan kelompok sosial masyarakat sendiri. Dengan kewenangan yang dimilki oleh aktor, maka terbentuklah sebuah kesadaran bahwa hanya partai yang cocok dengan identifikasi sosial dirinya yang akan didukung. Sedangkan partai politik yang tidak sesuai identitas sosial pemilih tidak akan dipilih. Sehingga dalam kajian sosiologi politik melahirkan politik aliran sebagaimana pada pelaksanaan pemilu 1955. Sesungguhnya sikap dan tindakan masyarakat yang terjadi pada pemilu 1999 dan 2004 tidak sama persis dengan saat pemilu 1955.

Menurut data penelitian meskipun pemilu di era reformasi ini lebih demokratis, namun bahwa orientasi politik aktor-aktor dalam pemilu 1999 dan 2004 masih berada dalam bayang-bayang politik aliran. Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang terlalu lama dikekang keberadaan dan perannya selama Orde Baru berkuasa. Sehingga saat kebebasan dibuka, maka kerinduan masyarakat terhadap identitas dan ideologi politik tertentu bertemu dengan kepentingan partai politik yang saat itu sangat getol mereproduksi simbol-simbol identas sosial untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.

Lima tahun berikutnya, saat pemilu 2009, sitem pemilu mengalami perubahan yang cukup fundamental. Jika

pada pemilu sebelumnya yang menentukan calon terpilih di lembaga DPR dan DPRD adalah partai politik dengan menggunakan mekanisme nomor urut. Namun dalam pemilu 2009 ini, penetapan calon terpilih tidak berdasarkan nomor urut tetapi didasarkan pada perolehan suara caleg terbanyak. Legitimasi ini didasarkan pada permohonan pengujian terhadap undang-undang pemilu legislatif yang oleh caleg PDIP dan Partai Demokrat. Dasar dari pengujian ini didasari oleh adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pengurus partai politik dalam penentuan nomor urut . Menurutnya penentuan nomor urut terkesan politis dan hanya berdasarkan subjektivitas pengurus partai.

Selain disebabkan adanya perubahan sistem pemilu dalam penentuan calon terpilih. Perubahan orientasi politik masyarakat di Kota Kediri juga dipengaruhi adanya konflik kepengurusan di internal partai politik. Melihat kondisi seperti ini masyarakat sebagai aktor mampu menentukan sikap politiknya sebagai praktik sosial yang diperoleh secara berulang-ulang.

Dilihat dari sisi hubungan yang berlangsung antara struktur yang ada dalam era pemilu pasca Orde Baru masyarakat sebagai aktor menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi . Hubungan dualitas sebagaimana diungkap Giddens ditunjukkan tak terpisahkannya antara pemilih sebagai pelaku atau aktor dengan struktur yang ada. Struktur yang ada mempengaruhi sikap dan tindakan politik masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Demikian pula pemilih atau masyarakat, sebagai aktor berupaya menunjukkan kreatifitasnya untuk mempengaruhi struktur melalui upaya pensiasatan agar

memperoleh kemenangan dalam kompetisi perebutan kekuasaan melalui pemilu dan pilkada.

Struktur yang ada tidak tertutup kemungkinan dimaknai oleh aktor sebagai upaya pemberdayaan tergantung pada kreatifitas yang berasal dari proses interaksi secara intensif dengan beragam kepentingan yang ditawrkan oleh para calon dan partai politik. Dengan perubahan sistem pemilu yang dilegitmasi melalui perangkat peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya kreatifitas bagi pemilih sehingga struktur tersebut tidak menjadikan terkekang. Tetapi justru memberdayakan atau memberi peluang untuk mendapatkan kompensasi disaat struktur yang seringkali menjadikan mereka lupa dan melupakan kepentingan masyarakat sebagai tugas pengabdiannya.

Kedua adalah dimensi dominasi. Struktur dominasi identik dengan penguasaan atas orang (politik) dan penguasaan atas barang (ekonomi) Adapun struktur yang terjadi pada perubahan orientasi politik masyarakat adalah adanya dominasi dari elite politik dalam melakukan langkah-langkah yang ofensif dalam rangka mendapatkan dukungan politik masyarakat dengan beragam cara dan pendekatan. Dominasi yang dilakukan partai politik melalui para calon dan tim sukses menjadikan aktor yaitu kelompok masyarakat melakukan beragam praktik sosial yang salah satunya adalah memandang mereka tidak lagi sebagai calon pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya sebatas memburu jabatan atau kekuasaan. Oleh karena itu bagi masyarkat dalam melakukan perubahan orientasi dari yang bersifat idealis kepada sesuatu yang lebih pragmatis

adalah salah satu cara mereka untuk keluar dan menghindar dari dominasi struktur yang mengekang dan merugikan.

Begitu pula pada era Orde Baru, dominasi yang ditunjukkan pemerintah adalah selalu menekankan pentingnya menjaga semangat ideologi Pancasila kepada semua lapisan masyarakat dengan cara harus saling membantu satu dengan yang lain atas nama menjaga konsesensus nasional yaitu Pancasila. Untuk menjaga persatuan diantara warga masyarakat, penguasa Orde Baru juga menciptakan politik massa mengambang. Langkah dominasi yang dilakukan selanjutnya adalah melahirkan kebijakan penghapusan seluruh kegiatan partai politik kecuali untuk kampanye pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Dengan dasar untuk meminimalisir konflik yang berkepanjangan akibat perbedaan ideologi antar paratai politik maka pemerintah Orde Baru membuat kekuatan politik tengah yaitu Golkar. Cara tersebut ternyata cukup efektif untuk menekan konflik antarpartai politik, disamping sikap politik pemerintah sendiri saat itu sangat besar dalam membesarkan Golkar. Dengan dasar untuk meminimalisir konflik yang berkepanjangan akibat perbedaan ideologi antar paratai politik maka pemerintah Orde Baru membuat kekuatan politik tengah yaitu Golkar. Cara tersebut ternyata cukup efektif untuk menekan konflik antarpartai politik, disamping sikap politik pemerintah sendiri saat itu sangat besar dalam membesarkan Golkar.

Ketiga struktur signifikasi. Struktur signifikansi atau penandaan adalah struktur yang menyangkut simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Adapun signifikansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa pemilu

atau pilkada merupakan pesta demokrasi. Pemilu dan pilkada yang merupakan perwujudan dari demokrasi dicitrakan sebagai pesta demokrasi yang memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih calon dan tanda gambar partai politik lewat pelksanaan pemilu dan pilkada.

Dalam konteks pemilu dan pilkada, keberadaan dan peran rakyat atau pemilih ditempatkan begitu sentral dalam menentukan nasib dan masa depan daerah untuk masa lima tahun ke depan. Citra tersebut dibangun oleh partai politik dan para calon melalui berbagai media baik lewat pertemuan langsung maupun menggunakan media massa. Proses signifikansi tentang simbol pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebaga ajang pesta demokrasi juga dilakukan saat tahapan kampanye berlangsung.

Dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada dilaksanakan, setiap calon atau kandidat ingin selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertemu dengan pemilih. Kesempatan tersebut biasanya digunakan oleh para kandidat untuk memperkenakan diri kepada masyarakat tentang identitas, motivasi dan tujuan mengapa mereka maju menjadi kandidat. Selanjutnya mereka menyampaikan rencana program kerja dan keinginan ketika menjadi wakil rakyat.

Dalam beberapa kesempatan ketika peneliti mengikuti pertemuan calon dengan masyarakat, hampir sebagian besar tidak menyiapkan suatu rencana kerja yang tersetruktur dan terukur. Kalupun disampaikan rencana yang akan dilakukan hanya sekilas dan tampak tidak terkonsep dengan baik. Dari gambaran tersebut yang terkesan di mata publik justru sebaliknya, seringkali yang terjadi saat melakukan pertemuan dengan calon adalah terkesan sedang berusaha meminta

dukungan dan restu, dengan harapan apa yang menjadi tujuan, yaitu menjadi wakil rakyat dapat tercapai sesuai rencana.

Dengan melihat fenomena sebagaimana digambarkan di atas, publik atau pemilih justru memilki pandangan yang berbeda dengan calon atau kandidat. Bahwa seorang calon ketika berhadapan dengan masyarakat tujuan utamanya hanya sekadar meminta restu dan dukungan agar hajat menjadi pejabat dapat tercapai dengan mudah. Di sinilah kemudian timbulnya kesan negatif di mata masyarakat, bahwa seorang kandidat maju sebagai anggota parleman bukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi dalam rangka mencari jabatan atau pekerjaan.

Adapun orientasi dan sikap politik oleh masyarakat dalam menanggapi tindakan aktor seperti itu sangat terkait dengan rasionalitas tindakan para aktor yang ada di dalamnya. Rasionalisasi tindakan tersebut merujuk pada kesengajaan *(intentionlity)* sebagai suatu karakteristik rutin perilaku manusia yang dilakukan dalam cara-cara yang biasa.(Giddens, 2010) (Giddens, 2010). Timbulnya perubahan orientasi di kalangan masyarakat terhadap para kandidat dan partai politik tersebut adalah sesuatu yang dianggap wajar dan sesuai dengan tujuan yang dimilikinya. Fenomena semacam ini terjadi hampir disemua tingkatan masyarakat, dan dilakukannya setiap menjelang dan saat pemilu dan pilkada dilaksanakan. Hal tersebut yang dimaksudkan Giddens sebagai rasionalisasi tindakan.

Dalam teori strukturasi, individu bukanlah ditempatkan pada posisi titik pusat (tetapi juga bukan subyek).Dalam kaitan ini Giddens melihat adanya titik temu antara kegiatan

sosial mengikat ruang dan waktu dengan akar pembentukan dari subyek maupun objek.Seluruh kehidupan sosial terjadi dalam dan dibentuk oleh persimpangan kehadiran dan ketidakhadiran dalam waktu dan ruang Karenanya kehidupan sosial dikontekstualitaskan dengan ruang dan waktu. Dalam kontekstualitas ruang dan waktu manusia dipandang sebagai suatu proses yang terus menerus bukan sebagai kumpulan tindakan atau tindakan yang terpisahpisah. Konsep-konsep seperti maksud, alasan, sebab dan rasionalisasi dalam pandangan Giddens dilihat sebagai suatu proses bukan keadaan.Tindakan manusia tidak dapat dipisahkan dari tubuh dengan penempatannya dalam dimensi waktu dan uang. Dengan kata lain interaksi sosial atau kehidupan sosial harus dipelajari dalam kehadiran bersama.

Suatu praktik sosial pasti berada dalam waktu dan ruang apabila tidak terjadi tidak pada ruang atau belum datangnya waktu maka belum bisa dikatakan adanya praktik sosial. Oleh karena itu keterkaitan antara agen dan struktur menjadi penting dalam terjadinya praktik sosial tersebut.

Prinsip dalam struktural terdapat dalam tiga gugus besar struktur yakni signifikasi (*signification*), dominasi (*domination)* dan legitimasi (*legitimation*). Struktur signifikasi atau penandaan adalah struktur yang menyangkut simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Sedangkan yang kedua adalah struktur dominasi struktur dominasi atau penguasaan mencakup penguasaan atau orang (politik) dan barang (ekonomi).Penguasaan atas orang berkaitan dengan politik. Sementara penguasaan terhadap barang berkaitan dengan bidang ekonomi. Selain skemata dominasi dan signifikasi terdapat skemata legitimasi.Skemata legitimasi adalah

menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum.

Kota kediri meskipun secara administrasi pemerintahan masuk wilayah perkotaan, masyarakatnya yang berciri urban, namu dalam kehidupan sosial masih bersifat paternalistik. Keragaman tersebut tersebut telah ada sejak Kediri sebagai kerajaan hingga zaman kolonial dan berlanjut sampai sekarang. Namun begitu meski keragaman tersebut dikatakan besar, masing-masing kelompok masih mengikuti anjuran dan perintah dari orang-orang yang ditokohkan. (Irawan Hadi Wiranata, 2017)(Irawan Hadi Wiranata, 2017)

Rasionalitas Pilihan Politik MasyarakatMataraman dalam Pemilu dan Pilkada

Hubungan antara tim sukses dengan caleg sangatlah ditentukan oleh proses selama menjalin hubungan tersebut. Jika caleg dapat memperhatikan kebutuhan dan kehendak timses maka hubungan tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari penguatan posisi caleg, mereka secara suka rela mendukung dan mempengaruhi orang lain untuk tetap mendukung caleg tersebut. Berikut wawancara dengan salah seorang timses celeg:

> "Sebenarnya kalau caleg bicara baik-baik, diajak ngopi, saya akan pikir-pikir lagi untuk meninggalkan dia. Tetapi jika dia sudah main opini katanya saya menjual suara, tidak komitmen dan lain-lain, maka saya akan cari caleg lain untuk saya dukung"

Biasanya seorang caleg juga memanfaatkan kedekatan dengan seorang tokoh agama dalam mendapatkan legitimasi atau simpati. Dengan mendekati seorang tokoh agama

harapannya, jamaah atau orang –orang terdekat tersebut bisa dengan mudah ia arahkan untuk mendukung pencalonannya. Hal tersebut berlaku terutama bagi komunitas atau kelompok masyarakat nahdliyin yang memang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki hubungan dngan tokoh panutannya baik itu gus ataupun seorang kyai tertentu.

Tentang sesorang timses yang memilih caleg tertentu juga ditentukan oleh faktor hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Artinya para timses merasa kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh caleg dengan cara memberi sarana atau pekerjaan sesuai dengan keahlian atau pekerjaan timses sehari-hari. Slamet salah seorang timses di kecmatan Pesantren mengatakan bahwa ukuran dia mendukung seorang caleg ada dua yaitu petama, kenal dengan caleg tersebut. Biasanya untuk dapat kenal baik dengan calon, caleg tersebut tempat tinggalnya juga masih dalam lingkup wilayah yang sama dengan timses, misalnya dalam satu wilayah kelurahan yang sama.

> "Ashari dan Mustofa adalah sama-sama caleg baru dan keduanya juga tinggal dalam wilayah kelurahan saya. Namun jika disuruh memilih, saya lebih memilih Mustofa, karena sebelum coblosan berlangsung, ketua partainya Mustofa telah memberi job pada saya untuk mencetak atribut kampanye. Ya, akhirnya saya lebih memilih dia. Dan saya yakin jika kaitannya dengan pemberian jasmas saya lebih bisa berharap ke dia "

Dan yang kedua adalah memiliki rekam jejak yang baik serta hubungan dan komunikasi yang mudah, sehingga jika caleg tersebut terpilih maka akan dengan mudah meminta bantuan atau dukungan jika warga membutuhkan.

> "Saya realistis saja, caleg yang saya dukung adalah orangnya baik, serta dikenal baik pula oleh warga. Sehingga sewaktu-waktu kami butuh bantuan, misalnya pengajuan proposal maka dengan mudah dikomunikasika. Nah sebaliknya kalau kenal saja tidak, gemana bisa untuk keperluan tersebut tentu sangat sulit diharapkan."

Dalam meraih simpati dan dukungan warga seorang caleg petahana juga memanfaatkan program-program bansos ke masyarakat. Dalam melihat peluang seperti itu dia dengan mudah mengumpulkan masyarakat sekaligus membagi-bagikan bantuan sembako. Dengan pembagian sembako itu diharapkan merupakan "senjata sakti" bagi caleg petaha untuk mendapatkan dukungan suara. Dana dalam kenyataannya, memang banyak masyarakat bawah jika ada kegiatan pembagian sembako sangat antusias untuk datang. Bahkan tidak jarang antar warga terjadi silang pendapat, karena tidak seluruh warga mendaptkannya. Tentang adanya kekuatiran dari para caleg baru terkait pembelian suara oleh caleg petahana disampaikan Hadi salah seorang caleg dari partai Demokrat sebagai berikut:

> "Kampanye dengan cara pembagian sembako dan uang oleh caleg petahana sangat dikuatirkan oleh caleg lain, apalagi caleg-caleg baru seperti saya. Karena pada kenyataannya, masyarakat masih mudah dimobilisasi dengan cara-cara tersebut. Caleg petahana dalam melakukan pembelian suara dilakukan pada akhir menjelang hari pencoblosan. Selain itu, caleg petahana sudah menghimpun dana yang luar biasa banyaknya. Karena mereka mendapatkannya lewat jalur program jaring aspirasi. Inilah yang sangat dikuatirkan oleh caleg-caleg baru."

Perubahan parpol penguasa yang lama dipegang partai nasionalis berubah menjadi PAN. Pendudkung partai tidak

lagi ideologis. Kekuatan aliran yang dulu masih terkotak merah kuning hijau, sekarang telah menyebar ke berbagai partai. Termasuk PAN sebgai partai pemerintah hari ini. Ternyata kalau dikumpulkan mereka yang jadi itu sebagai warga NU. PDIP itu ideologis, sehingga siapapun calegnya akan dicoblos partai. Belum ada ceritanya orang caleg nasionalis membantu kelompok pengajian atau tempat ibadah. Regina yang orang cina saja karena masuk PDIP jadi calon jadi. Masyarakat itu memilki pandangan pada hari H harus dapat uang, karena kalau dia jadi nggak bakalan diperhatikan, maka dia harus data sesuatu jika diminta mencoblos

Rasionalitas Sosial Budaya

Kehidupan sosial di Kediri pada umumnya masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang cukup menonjol. Kekerabatan yang dimaksud di sini selain berdasarkan jalur keturunan juga melalui jalur perkawinan. Bahkan jalur kekerabatan tersebut dapat diperluas hingga tetangga dalam satu wilayah dusun ataupun desa/kelurahan. Sikap guyub rukun sebagaimana yang peneliti jelaskan sebelumnya nampaknya masih sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, utamanya di wilayah pedesaan. Perilaku tersebut senantiasa dipertahankan secara turun-temurun dan diwujudkan dalam beragam aktivitas, baik yang menyangkut hajat hidup keluarga maupun menyangkut kepentingan kolektif warga dusun atau kelurahan. Hal tersebut dapat peneliti amati misalnya dalam kegiatan bersih desa atau peringatan hari besar keagamaan ataupun hari besar nasional. Mereka secara suka rela berkumpul dan menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi dengan pembagian peran yang sudah

permanen berdasarkan tingkatan atau stratifikasi sosial yang sudah terlembagakan sebelumnya.

Praktik penggunaan jalur kekerabatan tersebut sebenarnya telah lama digunakan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya diajang pemilihan kepala desa. Tidak terkecuali saat momentum lima tahunan datang, baik pemilu dan pilkada. Cara tersebut masih tetap digunakan lagi, namun dengan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang ada agar hal tersebut dapat berjalandengan kondusif, dan tidak menimbulkan gejolak atau konflik yang terbuka. Kondisi tersebut harus benar-benar bisa diciptakan secara bersama-sama mengingat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, seorang kandidat siapapun ia dan dari manapun asalnya, masyarakat tetap akan memperlakukan kepadanya secara berhati-hati, dan santun, agar tidak menyinggung perasaan kandidat yang dimaksud.

Dalam banyak kasus ditemukan, hampir semua anggota masyarakat bersifat terbuka dan mau menerima kehadiran tim sukses bersama kandidat untuk melakukan pertemuan. Sikap tersebut sengaja dipertahankan masyarakat dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif atau guyub rukun. Kedua, masih terkait dengan budaya guyub rukun dan tidak mau menyinggung perasaan kandidat atau tim sukses yang biasanya lebih dari satu orang, sehingga setiap keluarga akan melakukan musyawarah antaranggota keluarga bagaimana keputusan akhirnya diambil.Biasanya antarmereka akan berbagi berdasarkan jumlah kandidat yang telah mengajaknya untuk memilih dirinya. Misalnya satu keluarga memiliki hak suara empat orang, sementara keluarga tersebut telah diajak oleh tiga orang kandidat, maka dari empat suara tersebut akan

mereka bagi ke tiga kandidat, dengan cara satu sura ke kandidat A, satu suara ke kandidat B, dan dua suara ke kandidat C. Khusus untuk dua suara yang diberikan ke kandidat C, tentu dengan pertimbangan yang paling berat bobot penilaiannya. Bisanya penilainnya berdasarkan hubungan yang sudah cukup lama dan terjalin baik, atau sudah mengetahui karakter kandidat. Selain pola hubungan antara pemilih dan kandidat atau tim sukses, penilain masyarakat juga didasarkan pada jumlah pemberian dari kandidat atau tim sukses baik berupa uang ataupun barang.

Dengan uraian di atas, dapat peneliti sampaikan bahwa sesungguhnya sebelum waktunya pemilu datang, masyarakat telah memiliki patokan dalam menentukan pilihan ke partai atau kandidat yang akan mereka pilih. Adapun yang menjadi patokan dalam memilih antara lain ikatan keluarga, pertemanan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan yang biasanya akan menjadi penentu bagi pilihan politik masyarakat. Adapun dasar pertimbangan masyarakat dalam memilih yaitu adanya ikatan pertemanan, saudara maupun teman dalam lingkungan tertentu, maka terkesan masyarakat bersikap opo jare, atau terserah teman, saudara atau teman dalam lingkungan tertentu. Akibatnya sikap tersebut lebih didasari karena adanya pertimbangan supaya tidak disisihkan dari ikatan-ikatan sosial tersebut.

Tentang seseorang tim sukses yang memilih caleg tertentu dalam pencalonan kandidat , juga ditentukan oleh faktor hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Artinya para simpatisan tersebut akan berupaya memenangkan calon yang dimaksud, apabila kebutuhan poko hidupnya dipenuhi oleh caleg. Biasanya dengan cara memberi sarana atau pekerjaan

sesuai dengan keahlian atau pekerjaan tim sukses sehari-hari. Slamet (50)) salah seorang timses di kecmatan Pesantren mengatakan bahwa ukuran dia mendukung seorang caleg ada dua. Yang pertama, dia sudah kenal dengan caleg tersebut. Biasanya dapat kenal baik dengan calon, apabila caleg tersebut tempat tinggalnya masih dalam lingkup wilayah yang sama dengan tim sukses. Sebagaimana yang di sampaikan Slamet sebagai berikut:

> "Ashari dan Mustofa adalah sama-sama caleg baru dan keduanya juga tinggal dalam wilayah kelurahan saya. Namun jika disuruh memilih, saya lebih memilih Mustofa, karena sebelum coblosan berlangsung, ketua partainya Mustofa telah memberi job pada saya untuk mencetak atribut kampanye. Ya, akhirnya saya lebih memilih dia. Dan saya yakin jika kaitannya dengan pemberian jasmas, saya lebih bisa berharap ke dia " (Wawancara, 22 Desember 2019)

Selanjutnya syarat yang kedua, calon memiliki rekam jejak yang baik serta hubungan dan komunikasi yang mudah. Sehingga apabila caleg tersebut terpilih menjadi anggota dewan, maka dirinya akan dengan mudah meminta bantuan atau dukungan jika warga membutuhkan. Lebih lanjut, Slamet mengatakan:

> "Saya realistis saja, caleg yang saya dukung adalah orangnya baik, serta dikenal baik pula oleh warga. Sehingga sewaktu-waktu kami butuh bantuan, misalnya pengajuan proposal maka dengan mudah dikomunikasika. Nah sebaliknya kalau kenal saja tidak, gemana bisa untuk keperluan tersebut tentu sangat sulit diharapkan." (Wawancara, 22 Desember 2019).

Dalam meraih simpati dan dukungan warga seorang caleg petahana juga memanfaatkan program-program

bansos ke masyarakat. Dalam melihat peluang seperti itu dia dengan mudah mengumpulkan masyarakat sekaligus membagi-bagikan bantuan sembako. Dengan pembagian sembako itu diharapkan merupakan "senjata sakti" bagi caleg petaha untuk mendapatkan dukungan suara. Dana dalam kenyataannya, memang banyak masyarakat bawah jika ada kegiatan pembagian sembako sangat antusias untuk datang. Bahkan tidak jarang antar warga terjadi silang pendapat, karena tidak seluruh warga mendapatkannya. Sebaliknya, kampanye dengan cara pembagian sembako dan uang oleh caleg petaha sangat dikuatirkan oleh caleg lain, apalagi caleg-caleg baru. Karena pada kenyataannya, masyarakat masih mudah dimobilisasi dengan cara-cara tersebut.

Menurut Wawan Sobari, faktor Jawa menjadi pertimbangan strategis dalam politik elektoral Indonesia, karena orang Jawa adalah penduduk Indonesia yang paling banyak. Namun, karya-karya besar seperti yang ditulis oleh Geertz (1960) dan Gaffar (1992) hanya menerapkan pendekatan pemungutan suara yang terbatas dan berbasis individu dalam upaya mereka menjelaskan perilaku memilih di Jawa. Studi kasus kualitatif baru-baru ini mengeksplorasi anut grubyuk (menyesuaikan diri) sebagai bentuk unik dari perilaku memilih orang Jawa pedesaan yang berkelompok, yang berakar pada filosofi kehidupan komunal dan nilai-nilai hierarkis Jawa. Sebuah studi di empat desa terpilih di Kabupaten Blitar dan Trenggalek di Jawa Timur menunjukkan bahwa pemilih perorangan di Jawa menyesuaikan keputusan memilih berdasarkan preferensi utama di lingkungannya, sesuai dengan semangat kebersamaan untuk hidup rukun serta menghindari konflik dan rasa hormat. hubungan bertetangga.

Artikel ini menyajikan penilaian awal tentang anut grubyuk sebagai pemungutan suara berorientasi kelompok di kalangan masyarakat Jawa, topik yang relatif tidak ada dalam diskusi akademis. Di luar penjelasan budaya, praktik demokrasi tidak liberal baru-baru ini telah membuat anut grubyuk rentan terhadap manipulasi, karena pemimpin atau perantara komunitas tertentu mengeksploitasi komunalitas Jawa dengan imbalan keuntungan individu dan komunal jangka pendek dari para kandidat. Alih-alih membantu pertumbuhan demokrasi liberal, anut grubyuk berpotensi mendukung demokrasi berbasis patronase, di mana sejumlah kecil elite menggunakan patronase untuk mengontrol proses pemilu yang berpengaruh.

Rasionalitas Ekonomi

Pada budaya pragmatis, pemilih terlibat dalam aktivitas pemilu dengan cara harus diberi kompensasi tertentu, misalnya imbalan materi yang berupa barang atau uang. Apabila tidak ada kompensasi, pemilih enggan untuk terlibat dalam aktivitas kampanye, menggunakan hak pilihnya, atau setidaknya tidak akan memilih partai atau calon yang tidak memberi kompensasi, bahkan sampai pada tindakan golput.

Budaya pemilih pragmatis seperti itu menjadikan ongkos pemilu menjadi mahal bagi setiap calon. Pemilih yang ingin dilibatkan dalam aktivitas menjadi tim sukses, ikut dalam kampanye, sampai pada hari pemilihan harus diberi kompensasi. Tanpa kompensasi yang jelas, parpol dan calon tidak dapat berharap terlalu banyak untuk mendapatkan dukungan suara masyarakat. Artinya, kesukarelaan dalam pemilu sudah tidak ada lagi.

Setelah terjadinya perubahan sistem politik yang berimplikasi kepada perubahan sistem pemilu di Indonesia maka yang peneliti lihat adalah para aktor politik dalam hal ini adalah caleg dan Pasangan calon mudah sekali terjebak dalam pragmatisme politik. Dalam bukunya Firmansyah mendefinisikan pragmatisme politik adalah sebagai orientasi jangka pendek dari para aktor politik dalam memenangkan persaingan politik. (Firmanzah, 2010)(Firmanzah, 2010)

Dari pernyataan tersebut berarti bahwa seseorang yang maju dalam ajang Pemilu dan Pilkada lebih dominan mementingkan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dari pada apa yang harus dilakukan setelah mereka berkuasa. Kekuasaan adalah tujuan akhir dan bukan sebagai cara untuk melakukan pembaruan dan kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Hal tersebut berakibat pada ditabraknya etika moralitas aturan main, janji politik serta ideologi partainya yang sebenarnya hanya sekadar mengatasnamakan posisi politik mereka saja. Tentu saja sikap pragmatisme politik seperti ini yang bertujuan jangka pendek ini sudah saatnya ditinggalkan oleh partai politik maupun para calegnya.

Salah satu gambaran adanya sikap politik pragmatis tersebut disampaikan oleh salah seorang informan, bahwa baik saat pilkada maupun pemilu, masyarakat di Kota Kediri menyatakan menerima uangnya tetapi belum tentu memilih orangnya. Jika dicermati lebih jauh terhadap fenomena tersebut, memiliki dua makna. Pertama, masyarakat sebenarnya telah memiliki pilihan terhadap calon tertentu, namun karena proses pemberian uang itu dilakukan oleh calon atau tim sukses yang merupakan orang-orang yang mereka kenal, maka besar kemungkinan ada perasaan enak

dan tidak enak jika menolaknya. Sehingga uangpun diterima meskipun pilihannya sudah ke calon lain. Kedua, masyarakat menganggap politik uang sebagai sesuatu yang biasa, sehingga tidak perlu untuk ditutup-tutupi. Dengan memberikan uang, hubungan antara calon dengan pemilih bersifat transaksional. Karena uang yang telah dikeluarkan oleh calon dianggap sebagai ongkos atau biaya politik. Dengan demikian ada semacam ikatan atau penanda bahwa antara keduanya telah terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Calon akan mendapatkan suara atau dukungan politik, sedangkan bagi pemilih mendapatkan imbalan untuk pengganti biaya transport atau upah kerja sehari. Begitulah gambaran rasionalitas masyarakat secara ekonomis dalam menyikapi adanya politik pemilihan. Yaitu dengan menggunakan materi baik berupa uang dan ataupun barang.

Analisis Teori Pilihan Rasional James S Coleman

Sebelum membahas tentang rasionalisasi pilihan masyarakat Mataraman di Kota Kediri dalam berpolitik, terlebih dahulu penulis akan membahas terlebih dahulu tentang teori yang digunakan dalam membahas persoalan ini, yaitu teori pilihan rasional. Teori ini dikemukakan oleh James E.Coleman.

Teori pilihan rasional mendasarkan diri pada asumsi dasar bahwa sebuah kebijakan publik tidak selalu dilihat dari kaca mata sistem, tetapi justru harus memperhatikan individu dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tindakan perseorangan atau indvidu mengarah pada suatu tujuan. Dan tujuan itu sendiri ditentukan oleh nilai atau preferensi/pilihan. Karena aktor diangap sebagai indiidu yang memiliki tujuan.

Sedangkan aktor sendiri dalam mencapai tujuan memilki pilihan-pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan dilakukan secara sadar.

Sebagaimana dalam hasil penelitian ini bahwa sikap dan perilaku masyarakat dalam menilai seorang calon atau kandidat didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. Dikatakan berdasarkan pengetahuan masyarakat, bahwa masyarakat kecil yang berpendidikan rendah memahami pemilu atau pilkada adalah sebatas mencoblos nama dan tanda gambar partai. Ketika pengetahuannya demikian maka melakukan tindakan memilih dengan datang ke tempat pemungutan suara dan nyoblosnya dengan benar sesuai aturan ditambah dengan pengetahuannya terhadap calon adalah suatu aktivitas dianggap sudah cukup dan selesai. Baginya memilih adalah konsekuensi dari proses interaksinya dengan calon yang didasari pertimbangan dan manfaat tertentu. Dengan mendasarkan diri pada manfat yang akan diterimanya pemilih akan melakukan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan calon atau tim sukses. Kompensasi tersebut bisa berupa uang ataupun barang sesuai dengan tujuan dari pemilih tersebut.

Sedangkan petimbangan mengenai untung ruginya dalam memilih suatu kandidat selalu terkait dengan kondisi sosial di mana individu tersebut tinggal. Dalam masyarakat kecil dasar perimbangan yang paling dominan dalam menyampaikan hak politiknya adalah interaksi dengan sesama teman atau saudara yang tidak jauh berbeda dengan kehidupannya. Misalnya jika yang bersangkutan adalah pedagang kaki lima, maka aspirasi dan sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan pedagang yang lain, yang dalam

kesehariannya mereka melakukan aktivitas bersama dalam pekerjaannya.

Tipe masyakat kecil sebagaimana yang peneliti jelaskan ini, menjadi bagian yang cukup banyak di wilayah kota Kediri. Kelompok masyarakat seperti ini dalam menggantungkan kehidupannya adalah dengan berjaualan di pinggir jalan, dekat sekolah dan pusat-pusat keramaian, seperti taman kota, dekat terminal, stasiun, pasar dan dipertigaan dan perempatan jalan utama.

Lebih lanjut kelompok masyarakat kecil tersebut dalam mewujudkan tujuannya menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional. Sehingga dengan rasionalitas yang dimilkinya semaksimal mungkin dipayakan utilitas dan keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa didapatkan. Seorang pemilih dalam menjatuhkan pilihannya di dasarkan pada pertimbangan yang menurut mereka rasional dan dapat ukur tingkat kemanfaatannya. Baginya berkenalan dengan calon atau kandidat dalam pemilu dan pilkada adalah momentum atau waktu yang tepat untuk memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai. Masyarakat tipe seperti ini sangat realistis berpikirnya, di mana ajang pemilihan hanya berlangsung sekali dalam lima tahun. Kesempatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan "kehadiran" kandidat baik secara langsung ataupun melalui perantara tim sukses adalah dalam rangka memakaksimalkan kegunaan hak suara yang dimilkinya untuk digantikan sesuatu yang bermanfaat baginya, baik berupa uang maupun barang.

Adapun yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan tersebut adalah bahwa seorang calon atau kandidat hanya akan ditemuinya saat menjelang pemilihan. Masyarakat

sudah terbiasa melihat para politisi yang sudah terpilih menjadi anggota dewan ataupun pejabat pemerintahan tentu tidak akan ingat lagi dengan dirinya bahkan janji-janjinya sekalipun. Sebagai konsekuensinya adalah mereka menuntut dipenuhinya permintaannya kepada kandidat jika yang bersangkutan menginginkan untuk dipilih. Dengan dasar petimbangan tersebut masyarakat memiliki argumentasi dalam menjelaskan sikap dan tindakannya tersebut kepada tim sukses ataupun langsung kepada kandidat.

Di sisi lain, terdapat faktor citra kandidat yang merupakan faktor rasional yang menyebabkan pemilih menilai dan menjatuhkan pilihannya ke calon tertentu.Mereka menilai kandidat secara personal, terlepas dari mana partai politiknya. Adapun yang merupakan bagian dari pemilih ini adalah mereka yang tingkat pendidikannya menengah ke atas.Fenomena tersebut muncul terutama saat pelaksanaan pilkada.

Menurut perspektif pilihan rasional, setiap orang dalam bertindak selalu rasional. Yakni, mempertimbangkan baik atau buruk pilihan politik dalam pemilihan umum. Model ini bertumpu pada asumsi bahwa pilihan politik banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonomi, personal maupun kolektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor rasional seperti citra kandidat dapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat terutama orientasi evaluatif. Citra kandidat merupakan faktor rasional yang juga mempengaruhi orientasi politik kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan menengah ke atas. Citra calon ini juga berkaitan dengan karakteristik atau kepribadian kandidat atau partai politik di mata masyarakat pemilih (konstituen).

Untuk menjelaskan fenomena sosial sebagaimana digambarkan di atas, jika peneliti menggunakan teori pilihan rasional, maka setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur dan posisi sosial di lingkungannya. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas dan tingkat ekonominya mapan lebih cenderung berpikir dan bertindak menurut ukuran-ukuran yang rasional, ideal bahkan berdasarkan norma-norma tertentu.

Begitu pula dengan masyarakat bawah yang tingkat pendidikannya rendah ditambah tingkat ekonominya lemah maka akan cenderung berpikir dan bersikap pragmatis, jangka pendek dan mudah kompromi dengan keadaan.

Rekonstruksi Teori dan Proposisi

Dalam bab ini selanjutnya akan dipaparkan uraian-uraian yang berkaitan dengan implikasi teoritik dari beberapa temuan penelitian dan proposisi-proposisi berdasarkan fokus penelitian ini yaitu, (1) proses perubahan orientasi politik masyarakat, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat, (3) Rasionalitas pilihan masyarakat dalam politik. Temuan dan pembahasan data yang telah dilakukan, diharapkan mempunyai implikasi teoritik terhadap teori-teori sosiologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori budaya Clifford Geertz, teori struktrasi Anthony Giddens dan teori pilihan rasional James Coleman. Selanjutnya pembahasan terhadap temuan data dalam penelitian ini yang

menggunkan teori-teori tersebut diharapkan mempunyai implikasi teoritik dalam bentuk dua hal, pertama, mendukung teori yang sudah ada dan yang kedua mengkritisi atau merevisi teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Data-data yang telah ditemukan dianalisis dan dikolaborasikan sehingga membentuk suatu rekonstruksi teori serta akan memunculkan adanya proposisi-proposisi.

Rekonstruksi Teori

Dalam pembahasanpenelitian ini terdapat teori-teori yang digunakan. Teori utama yang digunakan adalah teori strukturasi Anthony Giddens, kemudian teori budaya politik menggunakan Clifford Geertz, Selanjutnya teori pilihan rasional James Coleman.

Sejak pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan yakni tahun 1955, para ilmuan menganggap bahwa politik aliran tetap menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi sikap an perilaku masyarakat, dan hal tersebut hingga pelaksanaan pemilu berikutnya, 1971, 1977,1982, 1987, 1992, 1997 di bawah rezim Orde Baru yang represif. Tidak hanya itu, pelaksanaan pemilu 1999 dan 2004 di era reformasipun masyarakat dalam memilih partai masih didominasi karena latar belakang ideologi atau aliran. Meskipun dalam konteks dua pemilu ini tidak sedikit pula pakar ilmu politik yang membantah.

Dwight King(King, 2003) (King, 2003), dalam bukunya yang berjudul "*Half-Hearted Reform, Elekctoral Institutions and Struggle for Democracy in Indonesia"* yang juga didukung dalam tulisan Anis Baswedan (2004), *Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004*. Yang menarik dari paparan King adalah bahwa ada keberlanjutan politik aliran yang terjadi pada pemilu

1955 di bawah Odre Lama ke pemilu 1999 di era Reformasi. Begitu pula dengan Bawesdan, ia menemukan fakta bahwa telah terjadi korelasi yang signifikan di kota dan kabupaten di Indonesia bahwa partai-partai Islam mendapatkan dukungan yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Begitu pula dengan dukungan partai nasionalis dalam hal ini PDIP mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat yang mayoritas non muslim.

Sementara pihak yang tidak setuju dengan temuan King dan Bawesdan adalah William Liddle dan Saiful Mujani dalam karyanya yang berjudul, *"Leadership, Party and Religion:Explaining Voting Behavior in Indonesia"*. Liddle dan Mujani menilai pengaruh orientasi keagamaan dan politik aliran pada hasil perolehan suara di pemilu 1999 dan 2004 sangat terbatas. Adapun pengaruh dominan dalam mempengaruhi perilaku pemilih adalah leadership atau kepemimpinan yang didukung oleh perkembangan media massa utamanya televisi yang pengaruhnya hingga ke pelosok tanah air. Terlepas mana yang benar dan menjadi pegangan akademis, apakah pendapat Clifford Geertz yang dteruskan King dan Bawesdan atau sebagimana pendapat Wiliam Liddle dan Saiful Mujani bahwa telah terjadi perubahan, maka akan ditentukan oleh seberapa besar dukungan masyarakat, utamanya masyarakat akademis sebagaimana yang dikemukakan Khun.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tindakan individu dan masyarakat dalam menyikapi sistem politik yang berlangsung, maka penting untuk mengetahui lebih jauh tentang rasionalisasi tindakan mereka tersebut dalam bentuk pilihan-pilihan politiknya. Dalam melakukan tindakan sosial tersebut tentu ada rasionalisasi yang bisa dijelaskan

di balik tindakan tersebut. Dalam hal ini pilihan-pilihan politik masyarakat Mataraman terhadap sistem politik yang berlangsung akan didapatkan argumentasi yang mampu menjelaskan secara komprehensip mengapa hal tersebut dilakukan.

Pandangan, sikap dan tindakan individu atau kelompok terhadap kehidupan politik tersebut akan berimplikasi pada pilihan-pilihan yang dianggaprasional dalam menghadapi mementum pemilu maupun pilkada. Pada momentum politik lima tahunan itulah masyarakat memberikan evaluasi dan penilaian, atau sebaliknya memiliki alasan tersendiri dalam menentukan pilihan politiknya.

Untuk menganalisis tentang orientasi dan sikap politik masyarakat Kediri dalam pemilu dan pilkada, peneliti menggunakan teori budaya politik yang dikemukakan oleh Gibral Almond dan Verba. Dalam penelitian ini ditemukan data bahwa masyarakat Kediri dalam mensikapi fenomena politik termasuk dalam momentum pemilu dan pilkada didasarkan pada nilai-nilai budaya Jawa beserta faktor lain yang bersifat eksternal yaitu identitas partai dan faktor lingkungan sosial.

Bagi kelompok terpelajar dan yang sudah "melek" politik politik, pemilu dan pilkada adalah merupakan ajang untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya untuk diwujudkan sebagai kebijakan yang harus ditetapkan oleh siapapun yang menjadi wakil rakyat baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Adapun kelompok masyarakat yang masuk kategori ini antara lain, pengurus organisasi kemasyarakatan, LSM, kelompok profesional, tokoh agama dan masyarakat serta civitas akademika di perguruan tinggi.

Sedangkan sebagian yang lain seperti jamaah pengajian yang tergabung dalam organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, LDII serta beberapa kelompok majelis taklim orientasi dan sikap politiknya masih cenderung memilih calon dan partai yang berbasis agama. Begitu pula dengan kelompok nasionalis, mereka yang tergabung dalam paguyuban penghayat kepercayaan, kelompok kesenian tradisional jaranan, aktivis sosial dan perkumpulan budaya masyarakat cara pandang dan sikap politiknya lebih bersifat ideologis atau menyamakan antara indentitas kelompok sosial mereka dengan parpol yang mensimbolkan ideologi nasionalis.

Sementara itu yang menarik dari temuan penelitian ini, untuk kelompok masyarakat miskin di perkotaan dalam mensikapi pilihan-pilihan politiknya tidak lagi berdasarkan identitas kelompok sehingga berusaha mencari persamaan dengan simbol-simbol partai potik tertentu. Pandangan dan sikap politik kaum miskin kota tersebut tampak lebih cair dan tidak terikat pada sebuah ideologi partai tertentu. Artinya, keterlibatan mereka dalam proses politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka seperti faktor lingkungan sosial dan budaya dibandingkan dengan berasal dari kesadaran politik mereka sendiri. Dalam hal keikutsertaan mereka dalam politik ini umumnya dipengaruhi oleh anggota keluarga terdekat seperti anak, saudara, istri, suami dan orang tua. Interaksi yang terjadi di antara mereka dalam keluarga memperluas hubungan saling mempengaruhi dalam konteks politik, sehingga berdampak pada pembentukan dukungan politik kepada calon atau parpol tertentu.

Jika dilihat dari temuan penelitian di atas, ternyata fenomena tersebut juga pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat perdesaan di wilayah Mataraman. Hal ini berarti bahwa temuan penelitian ini lebih memperkuat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wawan Sobari pada tahun 2016, tentang *Politik Anut Grubyuk,* sebuah studi yang pernah dilakukan pada kelompok masyarakat di wilayah pedesaan dalam menyalurkan pilihan politiknya. Bahwa orientasi dan sikap politik sesorang kepada calon dan partai politik didasarkan pada preferensi yang berkembang di sekitarnya. Hal tersebut dilakukan demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik dengan tetangga sekitar.

Jika dihubungkan dengan temuan data dari dua penelitian ini, bahwa antara masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin di perkotaan hampir seluruhnya adalah memiliki kultur Jawa. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Jawa sangat memegang teguh kerukunan, karena bagi mereka kondisi itu harus terus dipertahankan sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, tentram, aman dan tanpa menimbulkan perselisihan.

Dalam pandangan orang Jawa, setiap orang selalu di ajarkan untuk tidak menghancurkan keseimbangan sosial demi mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menekankan sikap nrimo atau mempunyai sikap pasrah terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Hal tersebut selalu disadarinya karena merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan hormat adalah nilai yang sangat berhubungan dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan sebuah etika pergaulan dengan orang lain.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori budaya politik Clifford Geertz yang mengklasifikasi budaya politik masyarakat Jawa berdasarkan tiga kategori yaitu abangan, santri dan priyayi, tidak lagi relevan. Mestinya jika menggunakan teori tersebut, para pedagang kaki lima, pedagang pasar, buruh kasar, dan pedagang asongan, yang merupakan kaum miskin perkotaan menjatuhkan pilihannya ke partai politik abangan yang pro wong cilik. Tetapi dalam peneitian ini ditemukan data, bahwa orientasi dan sikap komunitas tersebut terhadap bidang politik dan pemilu tidak lagi bersifat ideologis. Tetapi justru sebaliknya, mereka sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi ikatan kelompok atau komunitasnya. Artinya pilihan terhadap calon atau parpol dalam pemilu maupun pilkada akan sangat bergantung dari kesepakatan internal mereka dengan siapa pilihan tersebut akan diberikan.

Berdasarkan paparan di atas, maka trikotomi yang dirumuskan Clifford Geertz yang membagi orientasi politik masyarakat Jawa menjadi tiga yaitu santri, abangan dan priyayi, tidak lagi bersifat linier. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masyarakat abangan yang ditunjukkan oleh masyarakat miskin perkotaan, tidak lagi ada keharusan untuk memilih dan memenangkan calon atau partai politik nasionalis.

Demikian pula bagi kelompok priyayi, seperti pegawai negeri, para pejabat pemerintahan dan para pedagang menengah ke atas, tidak lagi secara terang-terangan memenangkan Partai Golkar sebagai representasi bagi kelompok profesional dan kelas priyayi sebagaimana pada zaman Orde Baru. Tetapi mereka cenderung realistis dan rasional dalam memilih

seorang calon dan partai politik. Bahkan sebagian besar dari mereka memilih calon tidak didasarkan pada latar belakang kepartaiannya. Tetapi mereka melihat calon sebagai sosok personal, sehingga kriteria penilaiannya berkisar pada karakter pribadi calon, tingkat perkenalannya dengan publik, dan kriteria selanjutnya adalah seberapa besar para calon tersebut mau memahami kebutuhan dan kepentingan yang dirasakan pemilih. Maka yang terjadi kemudian, pola hubungan yang tercipta antara calon dengan pemilih lebih bersifat transaksional dan negosiatif, meskipun resikonya para pemilih ini akan dengan mudah ditinggalkan setelah calon tersebut menjadi pejabat sebagai wakil rakyat.

Selanjutnya untuk mengetahui perubahan orientasi politik masyarakat Mataram di Kota Kediri, penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens sebagai pisau analisisnya. Dalam teori strukturasi Giddens mengartikan bahwa struktur berbeda dengan pandangan strukturalisme atau pos-strukturalisme. Dalam pandangan Giddens struktur itu sebagai *"rules and resources"* yakni tata aturan dan sumber daya, yang selalu diproduksi dan direproduksi, serta memiliki hubungan dualitas dengan agensi, serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial. Jika dalam teoristrukturalisme, struktur dipandang sebagai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial serupa, sebagai kerangka atau morfologi sebuah organisme atau tiang penyangga sebuah bangunan, yang berada di luar tindakan manusia. Maka Kritik Giddens kepada strukturalisme ialah, bahwa memandang struktur cenderung lebih tertuju pada "fungsi" daripada "struktur" dan meletakkan struktur sebagai sesuatu

yang berada di luar. (Giddens, 2010, hal. 25-26)(Giddens, 2010, hal. 25-26)

Adapun yang dimaksud struktur dalam penelitian ini adalah produk hukum dan aturan pemilu,yang tidak tertutup kemungkinan dimaknai oleh aktor dalam hal ini adalah calon dan partai politik dengan melakukan upaya-upayatertentu secara terus-menerus yang berasal dari proses interaksi secara intensif dengan menawarkan beragam janji dan harapan kepada pemilih atau masyarakat.

Selanjutnya struktur dominasi yang mengakibatkan adanya perubahan orientasi politik masyarakat adalah adanya tindakan dominasi dari elite politik dan calon dalam melakukan langkah-langkah yang ofensif dengan harapan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.Demikian pula, dominasi yang dilakukan calon dan partai politik melalui berbagai cara untuk mendapatkan dukungan politik. Dalam pandangan pemilih atau masyarakat, seorang calon atau partai politik tidak lagi bersifat kelembagaan yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi hanya sebatas memburu jabatan dan kekuasaan semata. Oleh karena itu bagi masyarakat, cara terbaiknya adalah melakukan hubungan transaksional kepada calon dan partai politik. Dengan situasi seperti itu, maka orientasi dan sikap politik masyarakat, tidak lagi bersifat ideologis dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama, tetapi telah berubah menjadi orientasi dan sikap politik yang bersifat pragmatis. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara masyarakat atau pemilih keluar dan menghindar dari dominasi aktor yaitu calon dan partai politik yang bersifat mengekang dan merugikan.

Adapun yang menjadi faktor-faktor terjadinya perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat dalam penelitian ini ada tiga yaitu faktor sosial budaya, faktor identitas partai dan faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang bersifat dinamis dan saling terkait antara faktor yang satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pasca reformasi hubungan sosial antarkelompok dan elite di Kota Kediri semakin terjalin secara intensif . Hal tersebut salah satunya ditandai dengan banyaknya berdiri paguyuban dalam bidang sosial, budaya, profesi hingga antar umat beragama dan kepercayaan. Dengan banyak berdirinya paguyuban tersebut merupakan indikator bahwa mayoritas masyarakat Kota Kediri masih berpegang teguh pada nilai-nilai kebudayaan Jawa. Nilai-nilai budaya Jawa yang menjadi pegangan tersebut adalah guyub dan rukun. Atas dasar nilai guyub dan rukun tersebut dapat dibangun kehidupan yang harmoni di dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Selain faktor sosial budaya, faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat adalah identitas partai. Adapun yang dimaksud identitas partai adalah komponen dari *political engagement* yang dipercaya punya pengaruh positif terhadap partisipasi seseorang. Identitas kepartaian merupakan suatu keadaan psikologis yaitu perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia pada atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. Identitas partai membentuk sebuah identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikkan dirinya dengan sebuah partai politik.

Faktor identitas partai ini terbangun sebuah persepsi dan sikap partisan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal, membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah-masalah publik dalam keluarga, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa meskipun faktor identitas partai masih dimiliki oleh sebagian masyarakat pemilih di wilayah Mataraman, namun rasa fanatisme terhadap partai politik tidak lagi menjadi penentu utama dalam meraih kemenangan elektoral. Justru sebaliknya, fanatisme terhadap identitas dan ideologi tertentu di kalangan masyarakat Mataraman terhadap partai politik telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya temuan bahwa basis elektoral dalam mengelola kemenangan tidak ditentukan oleh patform politik, tetapi lebih dipengaruhi oleh hubungan intensif antara calon dan pemilih yang bersifat personal dan transaksional.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat adalah faktor lingkungan. Dalam penelitian ini menemukan data bahwa sebagian masyarakat, utamanya masyarakat bawah dalam menyalurkan aspirasi politiknya sangat tergantung kepada berbagai dimensi sosial dan budaya yang dialaminya sehingga mempengaruhi pembentukan nilai politiknya. .

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang rasionalitas dari tindakan para aktor politik dalam pemilu maupun pilkada serta alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan politik tertentu dalam rangka memengaruhi pemilih agar memilih calon atau partai politiknya sebagai kontestan dalam pemilu dan pilkada. Alasan-alasan tersebut dapat ditemukan penjelasanya dalam penelitian ini, dengan menggunakan perspektif teori pilihan rasional.

Dalam prespektif teori pilihan rasional, manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional. Artinya segala yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam kontek tindakan sosial merupakan konsekuensi bahwa mereka sadar dan paham atas pilihan tersebut. Sedangkan alasan-alasan mengapa tindakan tersebut dipilih karena terdapat alasan-alasan pembenar yang telah ditetapkan bahwa hal tersebut memiliki kegunaan atau manfaat yang lebih besar baik oleh calon maupun pemilih atau masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan temuan data dalam penlitian ini, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, sejak pemilu 2009 di wilayah Mataraman pada umumnya dan di Kota Kediri pada khususnya adalah gejalan tentang memudarnya politik aliran. Kondisi tersebut secara sosiologis disebabkan adanya penembahan jumlah penduduk yang memilki tingkat pendidikan menengah ke atas semakin bertambah. Hal tersebut berakibat kepada perubahan cara berpikir dan bersikap masyarakat terhadap persoalan bersama termasuk bidang politik juga semakin rasional dan terbuka.

Kedua, Menurut temuan data di lapangan bahwa sejak pasca reformasi kondisi masyarakat di Kota Kediri

telah mengalami perubahan orientasi. Perubahan orientasi politik masyarakat tersebut karena disebabkan kondisi masyarakat semakin rasional. Meskipun ada faktor politik uang dalam pemilu maupun pilkada, namun program masih menjadi sandaran dan dasar dalam menentukan pilihan politiknya. Artinya partai politik yang menawarkan program kesejahteraan akan semakin diminati rakyat.

Fenomena tersebut terjadi sejak pemilu 2009, bahwa partai politik yang menang pada pemilu 2004 karena dirasa tidak memperjuangkan kepentingan rakyat akhirnya pindah ke partai politik lain. Di sisi lain sejak pelaksanaan pemilu 2009 masyarakat telah mengenal politik uang. Hal tersebut disebabkan pengaruh pelaksanaan pilkada sebelumnya yang menjadikan uang sebagai bagian dari transasksi politik.

Fakta lain yang memperkuat argumen tersebut, bahwa sejak pilkada pertama tahun 2008 hingga pilkada 2013 PAN tetap menjadi pemenangnya. Hal tersebut disebabkan masyarakat tidak lagi melihat partai pengusung sebagai pertimbangan utama, tetapi lebih memetingkan faktor figur kandidat yang pertimbangan utamanya. Artinya masyarakat lebih mempertimbangkan program yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat dibandingkan dengan sentiment ideologis seperti nasionalis atau agama.

Pada pemilu 2014, PAN berhasil menjadi pemenang pemilu sehingga sehingga berhak atas kursi Ketua DPRD. Sehingga secara total PAN dapat menguasai kursi legislatif dan eksektutif. Jika diamati dari kaca mata ideologis maupun politik aliran, maka kemenangan PAN bukan merupakan simbol kemenangan kelompok Islam modernis. Hal tersebut disebabkan orientasi politik masyarakat yang telah berubah.

Mereka memilih partai politik tidak lagi didasarkan pada ideologi atau sentimen keagamaan, namun karena dilatarbelakangi oleh pandangan yang lebih kekinian dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara praktis.

Dari temuan data tersebut dapat diketahui bahwa orientasi politik masyarakat Mataraman di Kota Kediri telah mengalami perubahan ke arah yang lebih realistis dan terbuka. Mereka lebih memilih partai politik atau calon yang dapat memenuhi harapan dan juga soal kepemimpinan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan ideologis.

Adapun mengenai tipologi keberagamaan sebagaimana digambarkan Clifford Geertz tetap disimpan dalam ruang kebatinan masyarakat. Bedanya jika pada masa lalu ideologi tersebut sekaligus dapat mengarahkan pada orientasi politik kepada partai politik tertentu untuk dipilih, namun yang terjadi sekarang orientasi politik tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan elektoral saja dan tidak ada perubahan dalam pola keberagamaan mereka.

Selain itu,, jika dihubungkan dengan temuan Clifford Geertz, maka karakter kelompok abangan maupun santri, atau lebih tepatnya hubungan antara orang Islam abangan dan Islam santri sudah jauh berbeda (lebih cair) kondisinya dibandingkan dengan saat penelitian tersebut dilakukan yakni tahun 1960-an.

Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek ritual dan perilaku keagamaanya saja, tetapi juga terjadi pada wilayah relasi antar keduanya yang tidak lagi bersifat antagonis, tetapi sudah berubah menjadi sinergis bahkan terkesan integral antara satu dengan yang lainnya.

Proposisi

Proposisi adalah hubungan yang logis antara nilai atau sifat dalam sebuah kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh, yaitu suatu kalimat bisa dipercaya, disangsikan, disangkal dan atau dibuktikan benar tidaknya (pernyataan mengenai hal-hal yang dinilai benar atau salah). Proposisi adalah kalimat pernyataan yang terdiri dari dua variasi atau lebih yang menyatakan hubungan sebab akibat. Dari pembahasan tersebut terdapat kata hubung sebab akibat (kausalitas). Dari batasan tersebut terdapat kata hubungan sebab akibat yang mempunyai makna bagi proposisi tersebut. Proposisi dalam pembahasan ini berkaitan dengan pernyataan tentang perubahan orientasi politik masyarakat, faktor-faktor pendukung perubahan orientasi dan rasionalitas pilihan politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada.

Sejak pemilu tahun 2009 penetapan calon terpilih tidak lagi didasarkan pada nomor urut, sebagaimana dalam pemilu-pemilu sebelumnya, namun perolehan kursi partai akan diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak. Perubahan tersebut disebabkan karena terbitnya amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir sistem pemilu sebelumnya dan menggantinya dengan sistem proporsional daftar terbuka penuh. Dengan perubahan sistem pemilu ini, menyebabkan para calon mengubah arah dan strategi kampanye mareka, dan harus bertarung dengan rekan mereka sendiri sesama calon di partai yang sama.

Hal yang sama sistem proporsional daftar terbuka tersebut juga berlaku hingga pelaksanaan pemilu tahun 2014. Bedanya untuk pemilu 2014 para calon sudah sejak awal memilki waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan

model dan strategi kampanyenya. Pada prakteknya, banyak calon yang mampu memperkirakan tentang berapa kursi yang dapat dimenangkan oleh partainya di daerah pemilihan mereka. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa kompetisi yang sesugguhnya adalah memenangkan suara per individu untuk mengalahkan lawan politik dari partai mereka sendiri dapat memperoleh kursi. Sebagian besar informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa kompetitor mereka yang sesungguhnya adalah para calon atau kandidat lain dari partai yang sama. Dari gambaran dan dinamika tersebut sesungguhnya adalah sebagai akibat dari adanya perubahan sistem pemilu itu sendiri. Sehigga dengan adanya perubahan-perubahan sistem pemilu tersebut, secara eksternal ikut mempengaruhi pula perubahan orientasi politik masyarakat atau pemilih sendiri dalam setiap menghadapi pemilihan umum.

Ketika seorang calon menghadapi kandidat lain dari partai yang sama, serta memiliki kesamaan wilayah pemilihan dan ideologi, mereka akhirnya akan membuat pembedaan. Salah satunya adalah dengan cara menawarkan "sesuatu yang konkrit " kepada para pemilih. Cara lain yang juga dapat dilakukan yaitu dengan membuat tim sukses personal. Upaya lain yang biasanya juga dipilih oleh para calon adalah dengan memperkenalkan nama mereka dan membangun relasi personal dengan sebanyak-banyaknya pemilih. Di sisi lain para calon juga biasanya mengandalkan pada nama dan ketenaran mereka dalam melakukan mobilisasi dukungan suara.

Selain faktor personal calon, kegagalan partai politik sebagai media kaderisasi calon pemimpin telah terjadi begitu

lama. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika Mahkamah Konstitusi pada Pemilu tahun 2009 mengeluarkan putusan bahwa penetapan calon terpilih dalam Pemilu Legislatif bukan lagi berdasarkan daftar nomor urut calon yang disusun pengurus partai, tetapi berdasarkan perolehan calon yang mendapat suara terbanyak.

Perubahan cara pengitungan calon terpilih tersebut, berakibat pada banyaknya caleg-caleg jadi yang tidak berdasarkan proses kaderisasi internal partai tetapi lebih mengandalkan popularitas dan modal financial. Popularitas dapat *ditreatment* sedemikian rupa asalkan memiliki biaya. Dengan modal popularitas yang telah dibangun, suarapun dapat dikondisikan dan dibeli. Akhirnya lahirlah politik uang yang dalam klasifikasi ini disebut *buying voters* yaitu membeli suara ke pemilih.

Mengamati perilaku pemilih saat pemilu dan pilkada di gelar, masyarakat Mataramantidak lagi didominasi cara pandang yang absolut. Artinya bahwa pilihan politik masyarakat pemilih baik kepada partai politik maupun calon legislatif dan eksekutif tidak didasarkan semata-mata kepada jenis ideologi yang dianut. Demikian pula tentang identitas pemilih, tidak lagi menjadi pengekang atau hambatan dalam menjatuhkan pilihan kepada partai politik dan kandidat yang berada di luar garis identitas ideologi atau kelas sosial yang dimilkinya. Dengan demikian, politik identitas atau aliran bagi masyarakat Mataraman tidak lagi menjadi penggerak utama bagi suatu dukungan politik sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada era pemilu 1955 hingga awal reformasi tahun 1999.

Selain hal di atas, perubahan orientasi politik masyarakat Mataramanjuga salah satunya dipengaruhi oleh metode kampanye yang digunakan oleh elitepartai politik terhadap konstituen atau pemilih. Jika sebelumnya partai politik lebih banyak mengangkat isu-isu yang bersifat kebijakan publik dan menyangkut hajat hidup bersama sebagai warga bangsa atau negara. Maka sejak pemilu tahun 2009, model kampanye yang dilakukan oleh kandidat dan partai politik lebih bersifat personal sehingga tidak terintegrasi secara kelembagaan dengan visi dan misi partai politik yang menjadi pengusungnya.

Kondisi tersebut seolah semakin mendapatkan dukungan kuat setelah pemerintah dan parlemen pusat memberlakukan penyelenggaraan pilkada secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Partai politik dan perorangan ditetapkan dalam undang-undang sebagai kendaraan untuk maju dalam kontestasi untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun sejak pelaksaaan pilkada tahun 2005, partai politik lebih banyak menonjolkan ketokohan kandidat dibandingkan platform dan visi misi politik lembaganya. Dengan demikian dapat dilihat dari hasil pilkada selanjutnya, bahwa masyarakat lebih banyak melihat faktor figur calon dibandingkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ideologis terhadap partai politik.

Dominasi yang dilakukan partai politik melalui para calon dan tim sukses menjadikan kelompok masyarakat melakukan beragam praktik sosial yang salah satunya adalah memandang mereka tidak lagi sebagai calon pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya sebatas memburu jabatan atau kekuasaan. Oleh

karena itu bagi masyarkat dalam melakukan perubahan orientasi dari yang bersifat idealis kepada sesuatu yang lebih pragmatis adalah salah satu cara mereka untuk keluar dan menghindar dari dominasi struktur yang mengekang dan merugikan. Berdasarkan temuan data di lapangan maka dapat dikembangkan proposisi sebagai berikut:

> Proposisi 1 : Jika hubungan kandidat/calon dengan masyarakat bersifat personal, maka akan melahirkan orientasi dan sikap politik masyarakat yang transaksional dan pragmatis.

Perubahan orientasi politik masyarakat mataram di Kediri berjalan secara bertahap dari setiap periode pemilu ke pemilu berikutnya. Secara gradual perubahan tersebut bersumber dari faktor sosial budaya masyarakat , identitas partai politik dan faktor lingkungan. Beragamnya faktor pendukung tersebut menandakan bahwa datangnya perubahan tidak hanya berasal dari satu arah saja melainkan berasal dari internal dan eksternal pemilih sendiri. Begitu pula terkait dengan yang terjadi dalam masyarakat mataram sendiri, tentu bukan merupakan entitas yang tunggal dan homogen. Tetapi sebaliknya, di dalamnya tersusun dari banyak lapisan, kelompok dan struktur sosial yang membentuknya.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan pemilih dalam menghadapi momentum politik lima tahunan baik pemilu maupun pilkada, selalu terkait dengan konteks sosial dan kebiasaan yang berlangsung di dalamnya. Artinya latar belakang pemilih dari sisi geografis, pendidikan, agama, jenis kelamin, dan mata pencaharian sangat berpengaruh terhadap preferensi politik mereka terhadap calon dan partai politik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor identitas partai dapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dalam pemilu maupun pilkada di Kota Kediri terutama orientasi afektif. Adapun yang dimaksud identitas partai adalah komponen dari *political engagement* yang dipercaya punya pengaruh positif terhadap partisipasi seseorang.

Faktor identitas partai ini terbangun sebuah persepsi dan sikap partisan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Artinya sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal, membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah-masalah publik dalam keluarga, dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik. Kategori dari pemilih tipe seperti ini biasanya adalah keluarga dari para pengurus organisasi kemasyarakatan dan pemuda, seperti pengurus RT/RW, KNPI, Karangtaruna, dan Pemuda Ansor. Demikian pula untuk pengurus ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan LDII serta organisasi profesi seperti PGRI dan Saburmusi.

Selain identitas partai, partisipasi politik khususnya bagi masyarakat bawah juga cenderung tidak otonom, dan lebih bersifat mobilisasi. Artinya, keterlibatan mereka dalam proses politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka seperti faktor lingkungan sosial dibandingkan dengan berasal dari kesadaran politik mereka sendiri. Bahkan dalam banyak kasus, penulis mengamati langsung, bahwa dalam hal keikutsertaan mereka dalam politik ini umumnya

dipengaruhi oleh anggota keluarga terdekat seperti anak, suadara, istri, suami dan orang tua. Interaksi yang terjadi di antara mereka dalam keluarga memperluas hubungan saling mempengaruhi dalam konteks politik, sehingga berdampak pada pembentukan dukungan politik kepada calon atau partai politik tertentu.

Terkait dengan fenomena pemilih yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial disekitarnya, penelitimenemukan bahwa perilaku politik masyarakat di wilayah Mataraman masih didominasi oleh nilai-nilai Jawa yang hirarkis. Tipe pemilih seperti ini jarang menampakkan sikap konfrontatif dengan yang lain, tapi sebaliknya mencoba membangun sikap yang akomodatif. Siapa yang dirasa paling dominan dalam lingkungannya, maka kelompok masyarakat seperti ini akan cenderung memberikan dukungan pula, tanpa harus tahu secara mendalam apa yang didukung dan dipilihnya tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikembangkan proposisi sebagai berikut:

> Proposisi 2 : *Jika faktor sosial budaya, identitas partai dan lingkungan lebih dominan di masyarakat maka akan memperlemah sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat.*

Teori pilihan rasional mendasarkan diri pada asumsi dasar bahwa sebuah kebijakan publik tidak selalu dilihat dari kaca mata sistem, tetapi justru harus memperhatikan individu dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tindakan perseorangan atau indvidu mengarah pada suatu tujuan. Dan tujuan itu sendiri ditentukan oleh nilai atau preferensi/pilihan. Karena aktor diangap sebagai indiidu yang memiliki tujuan. Sedangkan aktor sendiri dalam mencapai tujuan memilki

pilihan-pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan dilakukan secara sadar.

Dalam banyak kasus ditemukan, hampir semua anggota masyarakat bersifat terbuka dan mau menerima kehadiran tim sukses bersama kandidat untuk melakukan pertemuan. Sikap tersebut sengaja dipertahankan masyarakat dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan rasa guyub rukun. Kedua, masih terkait dengan budaya guyub rukun dan tidak mau menyinggung perasaan kandidat atau tim sukses yang biasanya lebih dari satu orang, maka setiap keluarga akan melakukan musyawarah antaranggota keluarga bagaimana keputusan akhirnya diambil.Biasanya antarmereka akan berbagi berdasarkan jumlah kandidat yang telah mengajaknya untuk memilih dirinya. Misalnya satu keluarga memiliki hak suara empat orang, sementara keluarga tersebut telah diajak oleh tiga orang kandidat, maka dari empat suara tersebut akan mereka bagi ke tiga kandidat, dengan cara satu sura ke kandidat A, satu suara ke kandidat B, dan dua suara ke kandidat C. Khusus untuk dua suara yang diberikan ke kandidat C, tentu dengan pertimbangan yang paling berat bobot penilaiannya. Bisanya penilainnya berdasarkan hubungan yang sudah cukup lama dan terjalin baik, atau sudah mengetahui karakter kandidat. Selain pola hubungan antara pemilih dan kandidat atau tim sukses, penilain masyarakat juga didasarkan pada jumlah pemberian dari kandidat atau tim sukses baik berupa uang ataupun barang.

Sedangkan petimbangan mengenai untung ruginya dalam memilih suatu kandidat selalu terkait dengan kondisi sosial di mana individu tersebut tinggal. Dalam masyarakat kecil dasar perimbangan yang paling dominan dalam menyampaikan

hak politiknya adalah interaksi dengan sesama teman atau saudara yang tidak jauh berbeda dengan kehidupannya. Misalnya jika yang bersangkutan adalah pedagang kaki lima, maka aspirasi dan sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan pedagang yang lain, yang dalam kesehariannya mereka melakukan aktivitas bersama dalam pekerjaannya.

Tipe masyakat kecil sebagaimana yang peneliti jelaskan ini, menjadi bagian yang cukup banyak di wilayah kota Kediri. Kelompok masyarakat seperti ini dalam kehidupan ekonomi sehar-harinya menggantungkan kehidupannya dengan berjualan di pinggir jalan, dekat sekolah dan pusat-pusat keramaian, seperti taman kota, dekat terminal, stasiun, pasar dan dipertigaan dan perempatan jalan utama.

Selanjutnya dengan pendekatan pilihan rasional melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Yang pada akhirnya pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian terdahulu dalam penelitian ini, bahwa sikap dan perilaku masyarakat dalam menilai seorang calon atau kandidat didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. Dikatakan, berdasarkan pengetahuan masyarakat, bahwa masyarakat kecil yang berpendidikan rendah memahami pemilu atau pilkada adalah sebatas mencoblos nama dan tanda gambar partai. Ketika pengetahuannya demikian, melakukan tindakan

memilih dengan datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblosnya dengan benar sesuai aturan ditambah dengan pengetahuannya terhadap calon adalah suatu aktivitas dianggap sudah cukup dan selesai. Baginya, memilih adalah konsekuensi dari proses interaksinya dengan calon yang didasari pertimbangan dan manfaat tertentu. Dengan mendasarkan diri pada manfaat yang akan diterimanya pemilih akan melakukan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan calon atau tim sukses. Kompensasi tersebut bisa berupa uang ataupun barang sesuai dengan tujuan dari pemilih tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat dikembangkan menjadi proposisi sebagai berikut:

> **Proposisi 3** : *Jika seorang calon lebih mengedepankan cara-cara pragmatis dalam meraih tujuan politiknya, maka sikap masyarakat lebih realistis dalam merasionalisasikan pilihan-pilihan politiknya.*

Selanjutnya, berdasarkan temuan data dan analisis yang dilakukan serta proposisi yang dihasilkan dari fokus penelitian ini, dapat dijelaskan proposisi kolaborasi sebagai berikut:

> **Proposisi Mayor** : *Semakin tinggi hubungan transaksional antara calon dengan pemilih maka orientasi dan sikap politik masyarakat semakin pragmatis.*

Bab V Perubahan Oreintasi Politik Ideologis ke Politik Rasional-Pragmatis

Pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 orientasi politik masyarakat Kediri masih didominasi oleh cara pandang kelompok keagamaan. Artinya, orientasi masyakat dalam memilih partai politik dalam pemilu disesuaikan dengan identias kelompok (religio-politik) dengan identitas kepartaian yang berlaku saat itu. Terdapat empat partai politik besar yang ada saat itu mewakili unsur nasional dan unsur Islam atau agama. Dari kelompok nasionalis terdapat PDIP dan Partai Golkar, sedangkan dari kelompok agama muncul PKB dan PAN.

Namun, dalam pemilu 2004 tersebut yang menjadi partai pemenang di Kota Kediri ini adalah PKB dengan memperoleh 9 kursi di DPRD. Dengan demikian, dalam pemilu tersebut, perolehan suara partai agama lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perolehan suara partai nasionalis. Fakta ini berarti mematahkan hipotesis yang selama ini berkembang bahwa wilayah Mataraman selalu didominasi partai nasionalis perlu direvisi, setidaknya-tidaknya hal tersebut tidak terjadi di Kota Kediri.

Selanjutnya, sejak pelaksanaan pilkada 2008 dan pemilu 2009 di Kota Kediri mengalami perubahan.Sejak pemilu ketiga di era reformasi ini ditemukan tren atau kecenderungan bahwa pemilu mengalami penurunan ideologi dan digantikan

dengan hal-hal yang bersifat pragmatis. Akan tetapi, tidak berarti peran ideolog dalam partai politik tidak ada sama sekali.

Di sisi lain, orientasi dan sikap masyarakat dalam berpolitik juga semakin rasional. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap mereka dalam pemilu dan pilkada tidak lagi tergantung pada tokoh anutan yang mereka miliki. Dalam wilayah politik masyarakat ternyata dapat lepas dari bayang-bayang pengaruh para tokoh anutannya. Artinya, masyarakat dapat memisahkan mana urusan agama dan mana yang merupakan urusan politik.

Faktor Sosial Budaya, Identitas Partai dan Lingkungkan Sebagai Sebab Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Mataram

Faktor sosial budaya meliputi nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Adapun warga Kota Kediri mayoritas adalah masyarakat Jawa yang masih memegang teguh etika dan tradisi Jawa seperti sikap guyub rukun dan cenderung menghindari konflik secara terbuka. Faktor selanjutnya adalah identitas kepartaian. Yaitu, suatu keadaan psikologis atau perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia pada atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. Identitas partai membentuk sebuah identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikkan dirinya dengan sebuah partai politik Sedangkan, faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat adalah faktor lingkungan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan data bahwa keberadaan masyarakat miskin yang ada di Kota Kediri dalam hal merespons adanya kegiatan politik lima tahunan tersebut sangat bergantung kepada berbagai dimensi yang berada di sekililingnya.

Nilai dan Norma Budaya Jawa Sebagai Dasar Rasionalitas Masyarakat Mataraman dalam Kontestasi Politik

Kehidupan masyarakat Kota Kediri pada umumnya masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang cukup menonjol. Kekerabatan yang dimaksud di sini adalah selain berdasarkan jalur keturunan juga melalui jalur perkawinan. Bahkan, jalur kekerabatan tersebut dapat diperluas hingga tetangga dalam satu wilayah dusun ataupun desa/kelurahan. Sikap guyub rukun tampaknya masih sangat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Perilaku tersebut senantiasa dipertahankan secara turun-temurun dan diwujudkan dalam beragam aktivitas. Demikian juga, yang berlaku dalam menyikapi persoalan politik.

Kondisi tersebut harus benar-benar bisa diciptakan secara bersama-sama mengingat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, seorang kandidat siapapun ia dan dari manapun asalnya, masyarakat tetap akan memperlakukan kepadanya secara berhati-hati dan santun agar tidak menyinggung perasaan kandidat yang dimaksud.

Bagi sebagian besar masyarakat di Kediri, dalam menentukan sikap politiknya digunakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional. Dengan demikian, dengan rasionalitas yang dimilkinya semaksimal mungkin dipayakan utilitas dan keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa

didapatkan. Seorang pemilih dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada pertimbangan yang menurut mereka rasional dan dapat ukur tingkat kemanfaatannya. Baginya, berkenalan dengan calon atau kandidat dalam pemilu dan pilkada adalah momentum atau waktu yang tepat untuk memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai.

Masyarakat tipe seperti ini sangat realistis berpikirnya, di mana ajang pemilihan hanya berlangsung sekali dalam lima tahun. Kesempatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan "kehadiran" kandidat baik secara langsung ataupun melalui perantara tim sukses adalah dalam rangka memaksimalkan kegunaan hak suara yang dimilkinya untuk digantikan sesuatu yang bermanfaat baginya, baik berupa uang maupun barang.

Adapun yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan tersebut adalah bahwa seorang calon atau kandidat hanya akan ditemuinya saat menjelang pemilihan. Masyarakat sudah terbiasa melihat para politisi yang sudah terpilih menjadi anggota dewan ataupun pejabat pemerintahan tentu tidak akan ingat lagi dengan dirinya bahkan janji-janjinya sekalipun. Sebagai konsekuensinya, mereka menuntut dipenuhinya permintaan kepada kandidat jika yang bersangkutan menginginkan untuk dipilih. Dengan dasar petimbangan tersebut, masyarakat memiliki argumentasi dalam menjelaskan sikap dan tindakannya ini kepada tim sukses ataupun langsung kepada kandidat.

Di sisi lain, dalam banyak kasus ditemukan, hampir semua anggota masyarakat bersifat terbuka dan mau menerima kehadiran tim sukses bersama kandidat untuk melakukan pertemuan. Sikap tersebut sengaja dipertahankan masyarakat

dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan rasa guyub rukun. Kedua, masih terkait dengan budaya guyub rukun dan tidak mau menyinggung perasaan kandidat atau tim sukses yang biasanya lebih dari satu orang, maka setiap keluarga akan melakukan musyawarah antaranggota keluarga bagaimana keputusan akhirnya diambil.

Daftar Pustaka

A.Almond, G.& Verba, S. (1990). *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokasi di Lima Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Alfian, N. S. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Althoff, M. R. (2011). *Pegantar Sosiologi Politik.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Arga Sevtyan, W. S. (2018). Perilaku Gumunan, Memperluas Kajian Perilaku Pemilih Jawa, Temuan Awal. *Jurnal Politicio* , 193-205.

Asrinaldi. (2014). *Kekuatan_Kekuatan Politik di Indonesia.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakti, A. F. (2012). *Literasi Politik da Konsolidasi Demokrasi.* Jakarta: Churia Press.

Berezin, M. S. (2020). *Cultural in Politics and Politics in Culture: Institutions, Practices, and Boundaries.* Cambridge: Cambridge University.

Castles, L. (2004). *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chilcote, R. (2010). *Teori Perbandingan Politik.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

David Kaplan, R. A. (2000). *The Theory Of Culture.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Erdward Aspinal, W. B. (2019). *Democracy For Sale Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Feith, H. (1963). *The Dicline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Itaca.

Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009.* Jakarta: Yayaysan Pustaka Obor Indonesia.

Gabriel A.Almond, S. V. (1990). *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokasi di Lima Negara* . Jakarta: Bumi Aksara.

Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geertz, C. (2013). *Agama Jawa Abanganalam Kebudayaan Jawa.* Depok: Komunitas Bambu.

Geertz, H. (1983). *Keluarga Jawa.* Jakarta: Graffiti Pers.

Giddens, A. (2010). *Teori Strkturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia.* (M. &. Daryanto, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H Antlöv, S. C. (2001). *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Halim, A. (2014). *Politik Lokal, Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya.* Yogyakarta: Lembaga Pengkajain Pembangunan Bangsa.

Hardjowirogo, M. (1983). *Manusia Jawa.* Jakarta: Yayasan Idayu.

Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Herry-Priyono, B. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar.* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Huberman, M. a. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Huntington, S., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.* Jakarta: Rineka Cipta.

Irawan Hadi Wiranata, M. (2017). KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA SEBAGAI DASAR CITY. hal. 64-73.

Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar.* Bandung: Sinar Baru.

Kanto, S. (2011). *Perspektif Modernisasi dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritik dan Empirik.* Malang: UB Press.

Kartodirdjo, S. (1987). *Perkembanagan Peradaban Priyayi.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

King, D. (2003). *Half-Hearted Reform, Elekctoral Institutions and Struggle for Democracy in Indonesia.*

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kominfo, J. (2014). *REKAP FINAL, BERIKUT PEMENANG PILEG 2014 DI PROVINSI JATIM.*

Liliweri, A. (2016). *Konfigurasi Dasar Teori-Teori Komunikasi Antar Budaya.* Bandung: Nusa Media.

M. Arief Wicaksono, A. F. (2018). Reflecting Clifford Geertz: Conflict-Integration in East Java Local Politics Nowadays. *Conference: International Undergraduate Symposium on Social and Political Issues 2017* (hal. 1-19). Depok: Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia.

Maleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marijan, K. (2015). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru.* Jakarta: Prenada Media Group.

Mas'oed, M., & Andrews, C. M. (2000). *Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mochtar, H. (2011). *Demokrasi dan Politik Lokal.* Malang: UB Press.

Moh.Roqib. (2007). *Harmoni dalam kebudayaan Jawa: dimensi edukasi dan keadilan gender.* Purwokerto: Purwokerto STAIN Purwokerto Press .

Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa.* Yogyakata: LKiS Printing Cemerlang.

Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa, Ideologi di Indonesia.* (N. Cholis, Penerj.) Yogyakarta: LKiS.

Mulder, N. (1985). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa.* Jakarta: Sinar Harapan.

Nashir, H. (2012). *MEMAHAMI STRUKTURASI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI GIDDENS* (Vol. 7). Yogyakarta: Jurnal Sosiologi Reflektif.

P.A.Sitepu. (2012). *Studi Ilmu Politik.* Jakarta: Graha Ilmu.

Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.

Pratiwi, D. A. (2018). Sitem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia; Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika* , 13-18.

Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work : Civic Tradition in Modern Italy.* Princeton: Princeton University Press.

R.Anderson, B. (2000). *Kuasa Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia.* Yogyakarta: Mata Bangsa.

R.Anderson, B. (2000). *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa.* Yogyakarta: Qalam.

Ritzer, G. (2007). *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Kencana.

Romly, L. (2006). *Islam Yes, Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Pelajar.

Setiadi, M. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sobari, W. (2016). Anut Grubyuk in the Voting Process: The Neglected Explanation of Javanese Voters Preliminary finding. *Southeast Asian Studies* , 239-268.

Sobari, W. (2013). Elektabilitas dan Mitos Pemilih Rasional: Debat Hasil-Hasil Opini Menjelang Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik* , 59-84.

Subair. (2015). Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa. *Dialektika* , 35-39.

Subakir, A. (2003). *Merajut Persaudaraan Sejati Antar Umat Beragam, 5 Tahun PKUB Kota Kediri.* Kediri: Sosekumdik dan Litbang PKUB Kota Kediri.

Sudarsono. (1985). *Pendidikan, Moral, dan Ilmu Jiwa Jawa.* Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Sukristyanto, A. (2018). Governor Election and Political Participation in East Java . *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 191* , 552-559.

Sulistyo, H. (2002). Electoral Politics in Indonesia, A Hard A Way to Democracy. *Electoral Politics in Southeast Asia and East Asia* , 75-99.

Sulistyo, H. (2001). *Palu Arit di Ladang Tebu.* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Kompas Gramedia.

Suseno, F. M. (2001). *Etika Jawa Sebuah Analisis tentang Kebijakan Hidup Jawa.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, M. (1985). *Etika Jawa.* Jakarta: Gramedia.

Sutarto, A. (2004). *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Jawa Timur.* Surabaya: Pemkot Surabaya.

Syam, N. (2010). *Islam Pesisisran dan Islam Pedalaman.*

Tribunnews.com. (2014). *Enam Ketua Partai di Kediri Gagal Menjadi Anggota dewan.* Jakarta: Tribunnews.com.

Wirawan, I. (2013). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Woodward, M. R. *Islam Jawa Kesalehan Normatif.*

Yesmil Anwar, A. (2013). *Sosiologi untuk Universitas.* Bandung: Refika Aditama.

Yunas, N. S. (2018). Perbandaingan Loyalitas Abangan dan Santri terhadap Khofifah dan Safullah Yusuf dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Jurnal Sosiologi Agama* , 155-172.

Zahro, S. (2007). The Impact of A Neutrality Bureaucracy in the 1999 Elections: Case Studiesin East Java and South Sulawesi" dalam Local Democracy and Bureaucratic Reform: Selected Articles.

Profil Singkat Penulis

Taufik Alamin, lahir di Gunungkidul, Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 1972. Anak dari pasangan Bapak Sumadi Salim dan Ibu Djuminah ini, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jember jurusan Ilmu Sejarah. Dilanjutkan Pada tahun 2008, menyelesaikan program magister Ilmu Komunikasi di Universitas Dr.Soetomo Surabaya. Sedangkan gelar doktornya diperoleh dari Pasca Sarjana FISIP Universitas Brawijaya Malang tahun 2020.

Penulis merupakan dosen aktif di IAIN Kediri sejak tahun 2006 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri mulai tahun 2003-2009. Sampai saat ini penulis aktif dalam berbagai forum ilmiah dan kegiatan sosial keagamaan di Kediri dan sekitarnya. Pada tahun 2019-2022 penulis menjadi Ketua Program Studi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Selanjutnya pada tahun 2022-2026 penulis diamanahi sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Kediri.

IAIN
KEDIRI

IAIN
KEDIRI
FESTIVAL BUDAYA
kediri
KUNO-KINI